



# SUNGAI sebagai pusat PERADABAN

Prosiding Seminar  
Perubahan DAS Brantas  
Dalam Perspektif Sejarah



DIREKTORAT GEOGRAFI SEJARAH  
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
2008

**SUNGAI** sebagai  
pusat **PERADABAN**

Prosiding Seminar  
Perubahan DAS Brantas Dalam Perspektif Sejarah



# **SUNGAI** sebagai pusat **PERADABAN**

Prosiding Seminar  
Perubahan DAS Brantas Dalam Perspektif Sejarah

Editor :  
**Restu Gunawan**

DIREKTORAT GEOGRAFI SEJARAH  
DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
2008

©2008 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata  
Direktorat Geografi Sejarah-Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala\*

Katalog dalam Terbitan

Sungai sebagai pusat peradaban: prosiding seminar perubahan DAS  
Brantas dalam perspektif sejarah/Restu Gunawan (ed.)  
- Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2008  
vii + 215 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-18033-0-4

1. DAS - Brantas
2. Sejarah Peradaban

333.91

Diterbitkan oleh:

Direktorat Geografi Sejarah  
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala  
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata



\*Direktorat Geografi Sejarah  
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala  
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata  
Jakarta.

# KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga buku ini dapat terwujud.

Dalam pertemuan perubahan iklim yang berlangsung di Bali beberapa waktu yang lalu, masalah perubahan iklim menjadi perhatian bangsa-bangsa di seluruh dunia. Perubahan iklim ini salah satu dampaknya adalah pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global yang terjadi di muka bumi sebagian besar karena ulah manusia. Akibatnya pemanasan global ini pada titik tertentu akan mengancam peradaban manusia. Contoh yang paling nyata dari efek pemanasan global adalah perubahan iklim yang ekstrim, gelombang tinggi, banjir dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan pemikiran tersebut, maka Direktorat Geografi Sejarah mencoba menyoroti aktifitas pengelolaan sungai yaitu Sungai Brantas dalam bentuk Seminar Perubahan DAS Brantas Dalam Perspektif Sejarah, dengan tema: "Sungai Sebagai Pusat Peradaban" yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk buku ini.

Sungai Brantas adalah sungai terbesar di Pulau Jawa yang telah menjadi pusat peradaban manusia sejak dahulu kala. Dinamika yang terjadi di sungai Brantas telah menjadi pelajaran yang baik bagi umat manusia dalam mengelola sungai. Karena jika sungai dikelola dengan baik maka keberadaan sungai akan menjadi pusat kehidupan manusia, tetapi jika sungai tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber bencana bagi manusia.

Buku ini tidak akan terwujud tanpa kesediaan para pemakalah dalam menyumbangkan tulisannya, untuk itu kami menyampaikan

ucapan terima kasih, dan berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini.

Wassalamu 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Jakarta, Mei 2008

Direktur Geografi Sejarah



**Endjat Djaenuderadjat**

## **SAMBUTAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga buku dengan judul: “*Sungai Sebagai Pusat Peradaban: Perubahan DAS Brantas Dalam Perspektif Sejarah*” dapat terwujud. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata bagi kehidupan manusia. Dalam beberapa tahun belakangan ini masalah kerusakan lingkungan tidak hanya menjadi isu nasional tetapi juga internasional. Masalah banjir, tanah longsor dan lain sebagainya yang merupakan dampak pemanasan global, telah mengakibatkan hancurnya peradaban umat manusia.

Untuk itu konservasi sumber daya air merupakan masalah yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Dengan upaya konservasi diharapkan sungai dapat senantiasa menyediakan air dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup.

Jika dikaitkan dengan kesepakatan “*Millenium Development Goal*” yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia, yang isinya antara lain menjamin kelestarian lingkungan hidup dengan cara mengintegrasikan prinsip pembangunan berkesinambungan melalui penyusunan kebijakan dan program untuk mencegah kerusakan sumber daya alam, sehingga penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sekitar 100 juta penduduk dunia yang hidup di daerah-daerah kumuh dapat mencapai perbaikan hidup secara signifikan pada tahun 2020. Dengan demikian pengelolaan DAS Brantas dapat menjadi contoh sebuah upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Diharapkan pengalaman dalam pengelolaan DAS

Brantas bisa menjadi inspirasi bagi pengelolaan 89 DAS besar lainnya di Indonesia.

Melalui buku ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berharap dapat memberikan sumbangsih dalam upaya pengelolaan sungai yang lebih dikenal dengan *one river, one plan, one integrated management*. Untuk itu, kami mengajak segenap bangsa dapat mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan menjaga keseimbangan alam dengan melestarikan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk seluruh umat manusia pada masa kini dan masa akan datang.

Jakarta, Mei 2008

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata



**Ir. Jero Wacik, SE**

# **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya sehingga buku ini dapat terwujud sebagai hasil dari proceeding seminar Perubahan DAS Brantas Dalam Perspektif Sejarah dengan tema: "*Sungai Sebagai Pusat Peradaban*", yang dilaksanakan oleh Direktorat Geografi Sejarah.

Ini merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu sejarah dalam kaitannya dengan lingkungan alam, dengan mengadakan pembahasan dari suatu aspek yang lebih mikro dari sebuah tema sejarah yaitu aspek geografi dan lingkungan atau yang lebih dikenal sebagai *eco history*.

Sungai sudah digunakan sebagai aktifitas kehidupan manusia sejak dahulu kala. Di Mesir Kuno, Sungai Nil adalah pusat peradabannya, di Cina, Sungai Kuning mempunyai peranan besar dalam peradaban manusia di Cina, begitu juga Sungai Gangga di India.

Di Indonesia, sungai telah lama digunakan sebagai pusat peradaban, misalnya Sungai Progo, Sungai Ciliwung, Sungai Batanghari, Sungai Brantas, Bengawan Solo dan lain sebagainya telah digunakan sebagai pusat aktifitas manusia. Sungai telah menjadi poros dalam perkembangan peradaban manusia. Berdasarkan data-data arkeologis dan tradisi lokal, sungai sudah menjadi pusat peradaban sejak zaman dahulu. Hubungan antara manusia dan alam inilah yang kemudian menimbulkan berbagai tradisi penghormatan terhadap alam. Ketika tradisi penghormatan ini ditinggalkan maka ada ungkapan "alam akan marah". Ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dan alam sebenarnya dalam wilayah saling menjaga.

Buku Perubahan DAS Brantas ini menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan analisa para ahli hidrologi yang mengatakan bahwa pulau Jawa pada tahun 2015 akan mengalami defisit air, sekitar 134 juta meter kubik. Hal ini menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa pengelolaan air harus dimulai saat ini juga. Untuk itulah air sebagai kekayaan alam harus dikelola secara bijaksana melalui penetapan peruntukkan secara rasional dan digunakan secara efisien. Melalui pemahaman terhadap siklus hidrologi dapat diketahui bahwa dinamika air sebenarnya dikendalikan oleh gejala-gejala alam untuk kepentingan manusia. Perilaku manusia dalam memanfaatkan air cenderung menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan siklus air secara alamiah yang berdampak negatif terhadap kelestarian jumlah ketersediaan dan mutu air. Sehingga upaya pengelolaan air dan segenap permasalahannya tidak cukup hanya diserahkan kepada pemerintah. Anggapan bahwa air merupakan milik bersama (*common property*) harus diterjemahkan bahwa air beserta sumber-sumbernya harus dikelola bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi air dan sumber-sumbernya melalui pemulihan siklus hidrologi secara alamiah.

Berdasarkan pemikiran itu, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan sungai secara berkelanjutan.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Mei 2008

Direktur Jenderal Sejarah dan  
Purbakala



**Hari Untoro Dradjat**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>SAMBUTAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b> .....	iii
<b>SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
• <b>SUNGAI SEBAGAI PUSAT PERADABAN</b> .....	1
Oleh: <i>Prof. Dr. AB. Lopian</i>	
• <b>RONA-RONA SEJARAH DARI LEMBAH BRANTAS MASA KOLONIAL (ABAD XIX) DARI KEDIRI</b> .....	13
Oleh: <i>Prof. Dr. Aminuddin Kasdi</i>	
• <b>LORONG WAKTU DI ALIRAN SUNGAI</b> .....	51
Oleh: <i>Drs. Akhudiat</i>	
• <b>SUNGAI BRANTAS DALAM KONTEKS TRANSPORTASI ANTARA DAS BRANTAS DAN PELABUHAN SURABAYA KAJIAN HISTORIS</b> .....	73
Oleh: <i>Indriyanto, M.Hum</i>	
• <b>PROSPEK PENGEMBANGAN DAS BRANTAS DALAM BIDANG SOSIAL EKONOMI</b> .....	105
Oleh: <i>Ir. Djoko Pitono, M.T.</i>	
• <b>KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR</b> .....	163
Oleh: <i>Dr. Suparto Wijoyo, SH</i>	
• <b>KALI BRANTAS DAN BENCANA ALAM</b> .....	173
Oleh: <i>Ir. Widyo Parwanto, M.Tech</i>	
• <b>KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI DAS KALI BRANTAS</b> .....	191
Oleh: <i>Ir. Soekistijono, Dipl. HE</i>	

# SUNGAI SEBAGAI PUSAT PERADABAN

Oleh: Adrian B. Lopian

**B**uku sejarah mengajarkan di sekolah bahwa semua peradaban dunia tumbuh dan berkembang di tepian sungai. ‘Keberanian sejarah’ ini mulai dipertanyakan setelah ditemukan beberapa peninggalan arkeologi di luar daerah aliran sungai (DAS) yang usia kepurbakalaannya juga sangat tua – di gurun pasir, dataran tinggi (Peru), hutan tropikal (Asia Tenggara), pulau kecil (Malta), dan lain sebagainya. (Fernández-Armesto, 2001). Namun tidak dapat disangkal bahwa banyak peradaban dunia telah lahir dan berkembang di daerah pinggiran sungai, seperti sungai Nil, Furat (Efrat) dan Tigris, Huang He, Indus (Sindhu), Gangga, dan lain-lain.

Para pakar antropologi-budaya mengadakan perbedaan antara peradaban (*civilization*) dan kebudayaan (*culture*), akan tetapi dalam percakapan umum sehari-hari kedua istilah ini sering dianggap sebagai sinonim sebagaimana dijelaskan pula dalam Kamus Besar (Indonesia) dan Kamus Dewan (Malaysia). Seperti diketahui, definisi yang dirumuskan para pakar tentang kata *culture* dalam antropologi-budaya bermacam-macam, demikian pula halnya tentang *civilization*. Fernand Braudel pernah menulis:

“The vocabulary of the social sciences, unfortunately, scarcely permits decisive definitions. Not that everything is uncertain or in flux, but most expressions, far from being fixed for ever, vary from one author to another, and continually evolve before our eyes.”  
(Braudel, 1993: 3).

Memang bila kita mengikuti proses penggunaan kedua kata tersebut – *civilization* dan *culture* – dalam bahasa-bahasa Eropa Barat, kita bisa memahami perbedaan pemahaman di kalangan para penuturnya, termasuk para pakar. Kata *civilisation* muncul pertama kali dalam bahasa Prancis pada abad ke-18, suatu bentukan dari verba

yang sudah lama dikenal, yaitu *civiliser* yang mengandung suatu proses yang memperadabkan manusia agar menjadi *civilisé* (beradab). Di awal abad ke-19 kata *civilisation* yang dikenal dalam bentuk tunggal (singular) mulai dipakai dalam bentuk jamak (*civilisations*) dan sejak abad ke-20 bentuk terakhir ini lebih dominan. Ini berarti bahwa pada waktu itu sudah diakui berbagai macam peradaban, sedangkan sebelumnya hanya diterapkan pada peradaban Prancis yang mempengaruhi peradaban (Eropa) Barat.

Sementara itu pada abad ke-19 di Jerman istilah *die Kultur* mulai meluas. Kata ini sebenarnya sudah muncul lebih dulu akan tetapi lebih terkenal dan meluas setelah terbit buku Jacob Burckhardt tentang kultur Renaissance di Italia. Sejak itu kata kultur di Jerman mulai menggeser kata *Zivilisation* yang dirasakan sebagai suatu impor dari Prancis. Bahasa-bahasa lain di Eropa pun menggunakan kata ini dan memakainya sebagai sinonim kata *civilisation*. Demikian pula di Inggris muncul kata *culture* di samping: *civilization*. Manfaatnya, dari substantif ini bisa dibuat ajektif *cultural*. Buku Edward B. Tylor, *Primitive Culture* (1871) banyak mempengaruhi penyebaran kata baru tersebut.

Namun dalam perkembangannya terasa ada perbedaan nuansa antara dua istilah ini – *culture* dan *civilization*. Malahan Oswald Spengler (*Untergang des Abendlandes*, I) mengatakan adanya kontras antara *Kultur* dan *Zivilisation*, yakni antara yang internal dan eksternal, antara organisme dan mekanisme, bahkan antara tujuan dan cara untuk mencapainya (Huizinga: hlm. 487).

Peristilahan Indonesia mempunyai dua kata – kebudayaan dan peradaban – yang berasal dari dua bahasa, Sanskerta dan Arab. Walau pun dianggap sebagai sinonim, asal kata masing-masing sesungguhnya mengandung makna yang bernuansa lain. Seperti dijelaskan oleh Kamus Besar BI, *adab* adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak; dan *budaya* diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam antropologi budaya *kebudayaan* merupakan padanan dari *culture* (bhs Ingg) dan *peradaban* adalah terjemahan dari *civilization*. Dalam hal ini jelas bagi kita bahwa kontras yang dikemukakan Spengler tidak valid: apakah peradaban merupakan penghalusan eksternal dan kebudayaan penghalusan internal, atau sebaliknya? Oleh sebab itu masih perlu dipertanyakan apakah terjemahan (peradaban-civilization) dan (kebudayaan-culture) tepat?

Memasuki abad ke-21 Fernández-Armesto menampilkan karya dengan judul *Civilizations* yang orisinil dan menantang, dan yang memperlihatkan “*a long display of learning and passionate intelligence*”. Berbagai macam masyarakat yang dipelajari, dari masyarakat maritim Polynesia di Laut Pasifik sampai masyarakat Dewada di gurun pasir Sahara di samping masyarakat yang sudah dikenal secara luas, dan ia tiba pada kesimpulan bahwa setiap masyarakat dapat dinilai lewat penelitian mengenai interaksi mereka dengan lingkungan alam yang didiaminya. Pada setiap masyarakat ada “*the itch to civilize*”, hasrat untuk mengadabkan dirinya sendiri.

Fernand Braudel (hlm. 9-23) membuat empat kategorisasi tentang peradaban (*civilizations*): (1) peradaban sebagai unit geografis; (2) peradaban sebagai masyarakat (*civilizations as societies*); (3) peradaban sebagai sistem ekonomi; dan (4) peradaban sebagai cara berfikir (*civilizations as ways of thought*). Dengan demikian studi tentang peradaban perlu melibatkan semua bidang ilmu sosial dan kemanusiaan.

Membicarakan peradaban adalah membicarakan ruang, tanah dan ketinggianya dari permukaan laut, iklim, flora dan fauna sekitarnya, peluang alamiah dan kemudahan daripadanya, juga membicarakan tindakan manusia dalam menghadapi situasi dan kondisi dasar tersebut – pertanian, peternakan, makanan, tempat bernaung, komunikasi, kriya, dan lain sebagainya. Studi tentang peradaban sudah barang tentu merupakan studi tentang masyarakat, malahan dalam hal ini “peradaban” bisa dianggap sinonim dari

“masyarakat” – misalnya, studi tentang peradaban Eropa Timur adalah sama dengan studi tentang masyarakat Eropa Timur, pembahasan tentang peradaban sungai adalah sama dengan pembahasan tentang masyarakat daerah aliran sungai bersangkutan, dan sebagainya. Demikian juga keterkaitan peradaban dengan sistem ekonominya. Kemajuan atau kemunduran ekonomi menentukan kemajuan atau kemunduran peradabannya, kondisi kesehatan dan penyakit erat terkait dengan demografi. Di masa lampau peradaban sangat tergantung pada tenaga manusia sehingga jumlah penduduk menentukan pertumbuhan ekonomi setempat. Namun pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada tersedianya makanan telah menimbulkan kemiskinan dan kelaparan yang baru bisa diatasi setelah adanya industrialisasi. Braudel juga menyebut peradaban sebagai “*ways of thought*” yang sangat berhubungan dengan akhlak dan budi pekerti kolektif masyarakat. Mentalitas kolektif ini berabad-abad lamanya diturunkan dari generasi ke generasi dan menciptakan adat istiadat masyarakat bersangkutan. Dalam hal ini agama dan kepercayaan sangat berperan:

“Almost all civilizations are pervaded or submerged by religion, by the supernatural, and by magic: they have always been steeped in it, and they draw from it the most powerful motives in their particular psychology.”  
(Braudel: hlm. 23).

## Sungai dalam Tinjauan Sejarah dan Sastra

*...die Luft ist kühl und es dunkelt  
Und ruhig fließt der Rhein...*

Dua baris tersebut oleh Heine dari lagu Jerman terkenal yang mengisahkan tentang Loreley, sebuah bukit cadas di tepi sungai Rhine. Menurut dongeng, di atasnya ada puteri cantik yang duduk menyisir rambutnya yang pirang keemasan sambil menyanyi lagu yang merdu, memukau awak kapal yang lewat sehingga sering kali kapalnya kandas.

Dalam tradisi kita ada juga cerita tentang sungai yang dihuni puteri cantik, misalnya dalam *Hikayat Banjar*:

“Sudah itu maka timbul buih saparti pajung agung basarnya, rupanja saparti parimata ratna mutu manikam tjahajanja. Air pun tanang saparti air dalam dulang. Maka barbungji suara didalam buih itu, maha-mardu bunjinja saparti bangsikara, katanja: “Hai Lambu Mangkurat, apa kardja sida ini?” Maka sahut Lambu Mangkurat: “Hamba ini mantjari radja akan radja didalam nagri Nagara-Dipa ini.” Maka sahut suara itu: “Hai Lambu Mangkurat, ialah aku radja jang sida tjari tu. Namaku Putri Tundjung Buih.” (Ras: hlm. 272).

Cerita asal usul yang berdasarkan seorang puteri yang muncul dari sungai ditemukan pula dalam naskah-naskah Melayu lain. Dalam *Sejarah Melayu* puteri ini bernama Puteri Junjung Buih, nama yang juga ditemukan dalam versi lain dari *Hikayat Banjar*. Dalam *Salasilah Kutai* puteri yang muncul dari sungai adalah Puteri Junjung Buih pula. Di *Sukadana* namanya Puteri Lindung Buih yang keluar dari sebuah kembang air. Demikian pula *Hikayat Marong Mahawangsa* menceritakan perihal seorang putri yang muncul dari buih air sungai, dengan nama Puteri Seluang (Ras: hlm. 87-88). Perkawinan antara puteri sungai ini dengan putera darat mengingatkan kita kepada tradisi Jawa yang mengisahkan perkawinan Ratu Kidul dengan raja-raja Mataram – suatu simbolisasi tentang bersatunya Tanah dengan Air.

Ada kalanya sungai menjadi inspirasi komponis, seperti halnya Gesang dengan Bengawan Solo yang “sedari dulu [telah] menjadi perhatian insani” dan kini sudah terkenal sampai Jepang. Alunan air – yang dimusim kemarau “tak seberapa” sedangkan di musim hujan “meluap sampai jauh” – mengalir lamban dengan irama keroncong, yang merupakan kontras dengan arus gelombang sungai Donau yang bergerak cepat mengikuti irama wals ciptaan Johan Strauss (*die schöne blaue Donau*).

Sungai bisa juga berfungsi sebagai tapal batas, antara dua wilayah kampung, antara dua provinsi (ump. Ci Tanduy antara Jawa Barat dan Jawa Tengah), sebagai pemisah dua negara (Sungai Oder antara Jerman dan Polandia, Sungai Mekong antara Thailand dan Laos), dan antara dua peradaban (Rio Grande antara Amerika Utara dan Amerika Latin). Di Tiongkok Sungai Yangzi membagi negeri ini dalam dua ‘peradaban’ pula: di sebelah utara masyarakat Cina yang bertani dan makan gandum dan di sebelah selatan yang bercocok tanam padi dan makan nasi.

Dalam sejarah kuna Sungai Rubicon terkenal sebagai batas pemisah antara Gallia Cisalpina dan Italia. Nama Rubicon terkenal di dunia Barat karena peristiwa tahun 49 BCE ketika Julius Caesar bersama pasukannya melintasi sungai ini, menantang senat Roma dan kemudian menimbulkan perang saudara. Ungkapan *alea jacta est* (“dadu telah dijatuhkan”) yang konon – menurut Suetonius – diucapkan Caesar pada waktu itu sering dikutip jika mengambil tindakan yang tidak dapat dibatalkan lagi.

Ungkapan lain yang terkenal dan terkait dengan sungai, berasal dari sejarah Amerika Serikat. *All quiet along the Potomac*, “di sekitar sungai Potomac tenang-tenang saja”, mengacu kepada peristiwa tatkala dalam Perang Saudara A.S. pada tahun 1861 Jenderal McClellan tidak mengambil tindakan terhadap pasukan Selatan meski pun dia sebenarnya berada dalam posisi yang menguntungkan.

Sebagai pemisah wilayah, daerah sungai tentu juga sering kali merupakan arena perang. Banyak pertempuran terkenal terjadi di wilayah sungai, misalnya, pertempuran di sungai Marne pada masa Perang Dunia I. Dalam bulan September 1914 Joffre, jenderal Prancis berhasil menahan pasukan Jerman sehingga mengharuskan Moltke menarik tentaranya kembali. Pada tahun 1918 sungai Marne ini menjadi lagi tempat pertarungan seru yang berakhir dengan kemenangan Jenderal Foch (Prancis).

Kisah lain adalah nasib ribuan tawanan Perang Dunia II yang oleh tentara Jepang dipaksa membangun jalur kereta api (terkenal sebagai “Death Railway”) antara Siam dan Burma (Myanmar). Untuk melintas sungai Kwai (di Kanchanaburi, Thailand) diperlukan pembangunan jembatan yang sering kali dihancurkan pesawat pembom Sekutu. Film *Bridge over the River Kwai* telah banyak berperan menyebarkan kisah penderitaan para tahanan perang tersebut. Sekarang tempat ini menjadi tempat ziarah ke pemakaman Kanchanaburi War Cemetery dan Chongkai, dan tempat wisata ke Museum Kereta Api. Setiap tahun dalam bulan Desember selama satu pekan diselenggarakan *River Kwai Bridge Week* sebagai kenangan masa itu.

Ada pengunjung sungai untuk memenuhi persyaratan agamanya. Kota Allahabad dan Benares di India banyak didatangi pengunjung untuk mandi membersihkan jiwa raganya di Sungai Gangga. Sungai suci lainnya bagi orang Hindu adalah Brahmaputra yang bersumber di Tibet. Di Jepang bagi orang Kyoto Sungai Kamo, atau lebih tepat dewa-dewi Kamo, dianggap sebagai pelindung kota. Pada bulan ke-4 diadakan Kamo-no-Matsuri, Festival Sungai Kamo untuk menghormatinya.

Akhirnya perlu disebut cerita mengenai Nabi Musa yang semasa bayi ditemukan di Sungai Nil.

## **Dinamika Sosial Ekonomi DAS**

Kehidupan masyarakat sungai banyak ditentukan oleh karakter bengawan bersangkutan. Meluapnya air pada waktu tertentu mengharuskan masyarakat bekerjasama untuk menanggulangi ancaman banjir (misalnya dengan membuat tanggul). Kerjasama yang efisien memerlukan organisasi kemasyarakatan yang tangguh dengan tingkat kepedulian yang tinggi demi kepentingan umum. Maka diadakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kodifikasi perundang-undangan yang tertua berasal dari

peradaban Babylonia yang dikeluarkan semasa pemerintahan Hammurabi (abad ke-18 BCE).

Masyarakat sungai tidak selalu menganggap banjir sebagai suatu malapetaka. Masyarakat agraris melihatnya sebagai pembawa tanah subur dari daerah pegunungan. Wilayah aluvial mengendap di bagian hilir mengandung tanah yang baik untuk pertanian yang mampu menghasilkan makanan cukup bagi penduduk yang semakin bertambah jumlahnya. Surplus makanan yang dihasilkan tanah yang subur dan inovasi teknologi pertanian yang maju memungkinkan peradaban sungai mengeksportnya yang dipertukarkan dengan barang yang diperlukan dari daerah luar.

Jumlah penduduk yang besar dengan organisasi pemerintahan yang memadai telah menghasilkan bangunan monumental seperti zigurat di Mesopotamia, piramida di daerah aliran sungai Nil, dan Tembok Besar di Tiongkok – bangunan-bangunan yang walau pun sudah berusia ribuan tahun masih berdiri dengan megahnya sampai sekarang. Betapa banyak jumlah penduduknya pada waktu itu dapat dilihat pada luasnya reruntuhan kota Harappa dan Mohenjo Daro (peradaban sungai Indus/Sindhu).

Sungai berperan pula sebagai sarana komunikasi antara daerah hulu dengan daerah hilir. Sebelum ada jalan darat sungai merupakan tempat satu-satunya untuk kelancaran angkutan hasil bumi dari daerah pegunungan ke muara dan sebaliknya, membawa barang impor ke wilayah pedalaman. Perkembangan teknologi angkutan air telah berawal di sungai, mulai dengan pembuatan rakit dan sampan sederhana sehingga akhirnya peradaban sungai bisa membangun kapal yang cukup besar yang layak berlayar di laut. Dengan layanan komunikasi lewat sungai, perdagangan dapat ditingkatkan dan meluas.

Untuk kepentingan bersama sangat diperlukan hubungan yang baik antara daerah hulu dengan daerah hilir. Akan tetapi bisa juga persaingan antara hulu dan hilir pecah menjadi konflik bersenjata. Penguasa wilayah udik ingin mengembangkan

kekuasaannya ke bagian muara, sedangkan penguasa daerah hulu juga mau menguasai daerah pedalaman untuk menjamin arus produk dari pegunungan. Dalam sejarah interaksi dan persaingan demikian sudah dikenal sejak zaman purbakala, di Mesir antara Nil-Atas dan Nil-Bawah, di lembah Furat dan Tigris antara Assyria dan Babylonia, dan sebagainya. Di Indonesia pun gejala demikian ditemukan pada kerajaan-kerajaan sungai Nusantara, seperti dalam sejarah Jambi yang dimanfaatkan pemerintah kolonial (Locher-Scholten 1994).

Raja yang memerintah kawasan muara berada dalam posisi menguntungkan karena bisa menguasai impor ekspor dari dan ke luar daerah. Tetapi sering kali raja di pedalaman mempunyai alternatif, apabila daerahnya memiliki sungai lain yang bermuara di tempat berbeda. Demikianlah kongsi-kongsi Cina di Kalimantan Barat pada abad ke-18 memanfaatkan sungai-sungai lain – seperti Sungai Raya, Sungai Duri, dan Sungai Mampawah – ketika terjadi konflik dengan Sultan Sambas yang menguasai muara Sungai Sambas. Sungai penting lainnya adalah Sungai Landak yang bermuara di Sungai Kapuas bagian hilir di tempat bertumbuhnya Kota Pontianak.

## **Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sekitar DAS**

Peradaban sungai masa lalu telah meninggalkan situs-situs arkeologi berupa puing kota kuna dan sisa-sisa bangunan besar. Meski pun di sekitar lokasi tidak ada bebatuan yang memadai untuk membangun gedung, masyarakat setempat telah mengembangkan ketrampilan untuk membuat batu bata dari lumpur dan tanah liat yang dibawa sungai dari pedalaman. Di samping itu tanah liat tersebut dijadikan lempengan tempat coret-coretan yang berfungsi sebagai pembantu ingatan, yang kemudian menjadi aksara sehingga lahir budaya tulis-menulis.

Beberapa pemerintah kota mengelola air sungai sebagai sumber air minum yang memerlukan proses penyaringan, penjernihan, dan sebagainya. sehingga dapat dipakai tanpa mengganggu kesehatan pemakainya. Sedangkan masyarakat desa

memanfaatkannya untuk air sawah. Hal ini memerlukan organisasi pembagian air, agar supaya tidak menimbulkan konflik antara para petani. Sistem *subak* di Bali adalah contoh yang sudah sangat terkenal. Di Sumatera Barat tradisi masyarakat Minangkabau mengenal pranata *kapalo banda*, yakni induk pengairan yang dibuat dengan memahat batu alam agar air sungai dapat mengalir ke sawah. Pengaturan pembagian air dilakukan secara musyawarah di bawah pimpinan Tuo Banda. Secara gotong royong masyarakat setempat membersihkan dan memperbaiki bendungan bersama-sama, biasanya pada hari rakyat turun ke sawah yang telah ditentukan oleh Tuo Banda, diramaikan dengan berbagai macam kesenian rakyat.

Pesta air, misalnya di masa kerajaan Burma dan Siam, merupakan pesta rakyat yang biasanya disertai dengan lomba dayung. Sekarang festival air menjadi atraksi untuk pariwisata yang menarik banyak pengunjung dari mancanegara. Di antara olah raga sungai yang berkembang akhir-akhir ini adalah joga olah raga lintas jeram.

Keindahan alam di daerah aliran sungai juga merupakan obyek wisata. Air terjun Niagara di perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada selalu mendatangkan wisatawan untuk menyaksikan kedahsyatan volume air besar yang terjun setinggi 47 meter

## **Aspek-Aspek Teknis dalam Pengelolaan DAS**

Sejak dahulu kala masyarakat sungai berhasil mengembangkan ilmu hidraulika dalam rangka “*itch to civilize*”, mengadabkan kehidupannya sehari-hari. Peradaban Mesir membangun bendungan di Sungai Nil di dekat Memphis sekitar 2900 BCE, dan bendungan Arab yang tertua berasal dari abad ke-7 BCE, sedangkan bendungan Cina dari sekitar 200 BCE ditemukan di salah satu anak sungai Yangzi. Fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan air banjir dan sekaligus mengatur irigasi lahan pertanian setempat.

Air sungai dipakai bukan hanya untuk membasahi sawah, tetapi juga untuk memanfaatkan tenaga yang dibangkitkan jika terjun

puluhan meter ke bawah. Maka waduk dan bendungan dibangun dengan teknologi yang semakin canggih hingga bisa mengairi puluhan ribu hektar perkebunan dan menyediakan tenaga listrik yang melimpah kepada penduduk setempat. Hampir semua sungai besar di bumi kita telah dibendung untuk keperluan demikian.

Amerika Serikat membanggakan Hoover Dam (dikenal pula dengan nama Boulder Dam) yang membendung Sungai Colorado di perbatasan antara negara bagian Nevada dan Arizona. Bendungan ini dibangun antara 1931-1935 dan kawasan ini sejak 1985 diresmikan sebagai National Historic Landmark. Danau yang terjadi di balik bendungan diberi nama *Lake* (Danau) Mead untuk mengenang Elwood Mead, petugas yang dipercayakan mengawasi pembangunannya.

Waduk raksasa Cina di dekat Yichang di hulu Sungai Yangzi (dijuluki sebagai ‘Tembok Cina yang baru’) memerlukan persiapan beberapa dasawarsa. Sudah pada tahun 1919 Dr Sun Yat-sen memikirkan untuk membangun sebuah waduk disini untuk mencegah musibah banjir yang melanda setiap tahun di dataran Cina, namun baru 75 tahun kemudian dimulai tindakan yang kongkrit. Waduk Tiga Ngarai (Sanxia, yakni Wu Xia, Xiling Xia, dan Qutang Xia) ini yang mengharuskan satu juta lima ribu penduduk berpindah tempat tinggal, kini diharapkan bisa membangkitkan 16 buah pusat tenaga nuklir.

Bendungan Sanxia tersebut dikatakan sama panjang dengan jembatan Golden Gate di San Francisco yang juga merupakan sebuah konstruksi agung, hasil teknologi yang maju. Sejarah pertumbuhan teknologi jembatan tempat penyeberangan sungai sangat menarik untuk dipelajari. Berbagai peradaban sungai telah memikirkan dan menemukan cara penyeberangan yang baik sesuai dengan keadaan alam setempat, keberadaan bahan untuk membangunnya, dan menurut selera kebudayaan masing-masing.

Ada titian, eretan, ponton, sampai jembatan modern yang panjangnya lebih dari satu kilometer. Bersama tanggul, bendungan, waduk, kincir air, saluran dan terusan, sampan dan sebagainya,

jembatan merupakan salah satu bentuk teknologi penting yang dihasilkan peradaban sungai untuk menjawab tantangan alam yang dihadapinya.

Selama beberapa hari ini kita membicarakan secara khusus perihal DAS Brantas. Media massa akhir-akhir ini memberitakan perubahan di kawasan ini sebagai akibat dari luapan lumpur panas. Para pakar yang diundang akan mengetengahkan pelbagai peristiwa sejarah yang telah mengubah kawasan DAS ini. Candi dan peninggalan purbakala lainnya adalah bukti bahwa kawasan ini pun merupakan tempat hunian manusia berabad-abad lamanya, dengan suka-dukanya (“Nasib Tulungagung” dan “Jembatan Merah”). Semoga ekskursi ke peradaban sungai lain bisa menjadi bahan pertimbangan dan refleksi untuk memahami permasalahan kita.

## Referensi

- Braudel, Fernand, *A history of civilizations* (terjemahan Richard Mayne, *Grammaire des civilisations*). Penguin Books, 1993.
- Dick, Howard W., *Surabaya, city of work. A socioeconomis history, 1900-2000*. Singapore University Press, 2003.
- Fernández-Armesto, Felipe, *Civilizations*. London, Pan MacMillan, 2001.
- Huizinga, Johan, ‘Terminologie van het verschijnsel beschaving’, *Verzamelde Werken VII*, hlm. 481-491. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1950.
- Locher-Scholten, Elsbeth, *Sumatraans Sultanaat en Koloniale Staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme*. Leiden, KITLV, 1994.
- Ras, J.J., *Hikajat Bandjar. A Study in Malay Historiography*. Disertasi Universitas Leiden, 1968.
- Winchester, Simon, *The river at the centre of the world. A journey up the Yangtze and back in time*. Penguin Books, 1996.

Winstedt, R.O., 'The Malay Annals or Sejarah Melayu.' *Journal of the Malay Branch of the Royal Asiatic Society*, vol. XVI, Part III, 1938.

# **RONA-RONA SEJARAH DARI LEMBAH BRANTAS MASA KOLONIAL (ABAD XIX) DARI KEDIRI**

Oleh: Aminuddin Kasdi

## **1. Latar Belakang**

**W**ilayah yang sekarang menjadi Karesidenan Kediri, dalam Sejarah Indonesia klasik merupakan medan sejarah yang sangat penting. Bahkan jejak itu pada masa prasejarah telah menunjukkan keberadaannya di Wajak, suatu lembah di Brantas hulu yang sangat subur di dekat Tulungagung, yaitu ditemukannya adanya kehidupan *Homo Wajakensis*. Sejak periode sejarah Indonesia kuna sampai jatuhnya Kediri ke tangan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda pada abad XIX, berbagai peristiwa sejarah, baik sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan militer telah terjadi di daerah itu.

Apabila sejarah Kediri sampai kepada periode akhir Majapahit dapat dilacak pada berbagai sumber, khususnya sumber-sumber epigrafis dan filologis. Di lain pihak sejarah Kediri setelah pasca Islam – sampai periode kolonial (abad XIX), pada umumnya dianggap sebagai suatu periode yang gelap, karena sedikitnya serta simpang siurnya pemberitaan sumber-sumber sejarah yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Padahal selama periode tersebut telah terjadi berbagai peristiwa dan dinamika kesejarahan di Kediri. Dinamika itu selain diabadikan dalam bentuk warisan arkeologis, tradisi, juga terekam dalam sumber-sumber epigrafis.

## **2. Permasalahan**

Dari paparan yang dikemukakan timbullah permasalahan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana dinamika sejarah di Kediri pasca Majapahit sampai daerah itu dari kekuasaan Mataram (Surakarta-Jogjakarta) jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda pada abad XIX ?
- (2) Adakah sumber-sumber sejarah yang merekam perkembangan sejarah Kediri pasca Islam sampai periode Kolonial pada abad XIX ?
- (3) Bila ada sumber-sumber sejarah yang merekam perkembangan sejarah Kediri, selama periode kolonial, bagaimana isinya ?

### 3. Tujuan Penelitian

Kajian tentang sumber-sumber epigrafis Kediri dari periode kolonial ini bertujuan mengungkapkan aspek-aspek sejarah sebagai berikut.

- (1) Mengungkapkan perkembangan sejarah Kediri pasca islamisasi sampai abad XIX. Peungkapan ini dipandang perlu, guna mendapatkan gambaran kondisi sosial budaya sebagai *background* munculnya karya-karya epigrafis dari zaman itu.
- (2) Mengidentifikasi karya-karya yang dapat dikategorikan sebagai sumber-sumber epigrafis kolonial sampai abad XIX.
- (3) Mengungkapkan secara garis besar isi karya-karya epigrafis sebagai sumber sejarah yang berasal dari Kediri pada periode kolonial sampai abad XIX

### 4. Metode

Kajian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Adapun sumber-sumber yang digunakan antara lain; sumber primer berupa; prasasti (Harinjing I, II, dan III; prasasti Jiu 1486), arsip-arsip VOC (*De Opkomst van het Nederlandsch Gezag*) (J.K.J. de Jonge, 1877); *Corpus* (W. Stapel), dokumen perjanjian antara Mataram-VOC, laporan perjalanan (*Oud en Nieuw: Valentijn*), laporan ekspedisi militer (*De Expeditie van Anthonio Hurdt*) (H.J. de Graff, 1971). Kedua, sumber sekunder, misalnya *Babad Tanah Djawi*, *Babad*

*Trunajaya, Babad Doho, Geschiedenis van het Rijks van Kediri opgetekend in het Jaar 1873 door Mas Soema Sentika* (P.W. van den Broek, 1902), dan tradisi lisan. Ketiga, sumber tersier, dalam bentuk karya-karya ilmiah atau penelitian yang telah mendapat dalam pengetahuan sejarah. Misalnya: *The History of Java* (Th. S. Raffles, 1817); *The Policy and Administration of the Dutch in Java* (Clive Day, 1904); *Indonesian Sociological Studies* (Schrike, 1957); *Java in the 14<sup>th</sup>. Century; A Study in Cultural History IV* (Th. G. Th. Pigeaud, 1960); *Protest Movement in Rural of Java* (Sartono Kartodirjo, 1973); *War, Culture and Economy in Java 1677-1626* (M.C. Ricklefs, 1993), *Jawa Lintas Budaya* (Denys Lombard, 1996), dan lain-lain.

## 5. Pembahasan

### 5.1. Perkembangan Sejarah Kediri; Pasca Islamisasi-Abad XIX

Kediri ternyata memiliki pesona sejarah yang panjang. Meskipun sebagai pusat kekuasaan di Indonesia hanya berlangsung dari akhir abad XI (1080) sampai awal abad XIII (1222), akan tetapi sampai abad XIX, Kediri terus memainkan peran yang cukup penting (signifikan) bagi jalannya sejarah di Jawa. Selama kekuasaan berpusat di Kediri, telah ditandai masa keemasannya sastra Jawa kuna, sebagai simbol perkembangan intelektualitas periode klasik<sup>1</sup>.

Tatkala kerajaan itu di bawah Singasari berdasarkan pemberitaan prasasti Mulamalurung, betapa pentingnya posisi Kediri dalam struktur kerajaan itu (1222-1292) tidak diragukan lagi. Bahkan Kertanegara, mengambil menantu Ardharaja, putera penguasa Kediri: Jayakatwang sebagai menantunya<sup>2</sup>. Selama masa kejayaan Majapahit, Kediri dan kemudian juga Kahuripan, merupakan salah satu wilayah

---

<sup>1</sup>R.Ng. Poerbatjaraka, *Kapustakaan Djawi* (Djakarta: Djambatan, 1952).

<sup>2</sup>Slamet Mulyana, *Nagarakertagama dan Tafsir Sejarahnya* (Jakarta; Bhratara, 1979), halaman 64-96. Lihat J.L. A Brandes, *Pararaton (Ken Arok) Het Boek der koningen van Tumapel en Majapahit* ('s-Gravenhage: MartinusNijhoff/Batavia: Albrecht & Co., 1920).

inti kerajaan yang penting. Hal ini terbukti pemerintahan di kedua wilayah tersebut selalu di bawah keluarga raja terdekat, misalnya Gyatri dan Tribhuana, yang termasyhur dengan gelar Bre Daha dan Bre Kahuripan<sup>3</sup>.

Pada periode akhir Majapahit, tatkala kerajaan itu mengalami disintegrasi, rupanya Kediri bangkit kembali dan pada tahun 1474 berhasil menumbangkan hegemoni Majapahit<sup>4</sup>. Jawa dalam kondisi terpecah belah itu bandul kekuasaannya sampai tahun 1527 bergeser kembali ke Kediri (Daha-Dayu), dengan pusat kekuasaan di Kling di bawah Dinasti Girindrawardhana<sup>5</sup>. Dalam prasasti disebutkan bahwa pada tahun 1486 M nama kerajaannya: *Wilwatikta Daha Janggala Kadiri*. Daha=Kediri, adan *Wilwatikta*=*Majapahit*, yang posisi geografisnya berada di Jenggala. Krom mempertanyakan apa yang dimaksud dengan *Giri-inderawardhana* sama dengan Sunan Giri di Gersik. Krom menyangkal kemungkinan itu berdasarkan seperti arca Bharadwaja, Yama, Wisnu, upacara korban kematian, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup>Th. G. Th. Piegaud, *Java in the 14<sup>th</sup>. Century; A Study in Cultural History IV* ('s-Gravenhage: martinus Nijhoff, 1960), halaman 29-40.

<sup>4</sup>M. Yamin, *Tatanegara Majapahit: Sapta Parwa II* (Djakarta: Prapantja, 1960), halaman 331.

<sup>5</sup>Mengenai lokasi Kling sebagaimana ahli ada berpendapat di Kediri. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis dan epigrafis yang banyak ditemukan, boleh jadi di situ sekarang, menjadi Desa Keling, sebelah timur Pare. Akan tetapi ada juga yang menyatakan bahwa Kling terletak di dekat Caruban, Madiun. Boleh jadi berdasarkan bukti-bukti histories, pendapat bahwa Kling di Kediri lebih dapat diterima. Lihat: Hasan Djafar, *Girindrawardhana: Beberapa Masalah Majapahit Akhir* (Jakarta Yayasan Dana Pendidikan Budhis Nalanda, 1978), pada halaman I Peta Ikhtisar Jawa Tengah dan Jawa Timur, Madura, dan Bali Abad XIV-XV. Lihat: Tome Pires, *Suma Oriental* (London: Haluyt Society, 1944), halaman 264-289); Di Viaggio di Antonio Pigafetta, *L'Indonesia Nella Relazione di Viaggio di Antonio Pigafetta* (Roma: Istituto Italiano Per Il Medio ed Estremo Oriente Centro Italiano di Cultura, 1979), halaman 107-145. Lihat juga: Slametmulyana, *Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit* (Jakarta: Idayu Press, 1983), halaman 313-319.

yang bersifat Hinduistis pada prasasti Jiu<sup>6</sup>. Sebelumnya, Brandes juga menempatkan Giri sebagai suatu kerajaan selain *Wilwatikta* (Majapahit), *Daha*, *Janggala* dan *Kediri*. Brandes tampaknya tidak melihat dengan sebelah mata tentang keberadaan Giri yang pada tahun 1487 penguasanya, yaitu Sunan Giri memproklamkan dirinya sebagai *Prabu Satmata* atau *Sultan Ainulyakin*<sup>7</sup>. Tampaknya keturunan penguasa Kediri itulah yang nantinya benar-benar menghabisi keberadaan Kediri, karena Giri menganggap bahwa dinasti yang berkuasa itu bukanlah kelanjutan dinasti yang memerintah Majapahit terdahulu<sup>8</sup>. Di sekitar permulaan abad XVI, berdasarkan sumber tradisi lisan (*overlevering*) disebut-sebut adanya perkawinan Sunan Drajat (wafat 1520 M) dengan Raden Ayu Candrasekar, puteri Adipati Kediri. Adanya berita tradisi itu, memberikan petunjuk bahwa penetrasi Islam dari pesisir utara Jawa telah merembes ke Kediri<sup>9</sup>.

Kekuasaan Hindu di Kediri runtuh pada tahun 1527, akibat perluasan Islam. De Graaf memastikan peranan Giri terhadap

---

<sup>6</sup>N.J. Krom, *Zaman Hindu* (Djakarta: Pembangunan, 1954) halaman 255. Lihat M. Yamin, *Tatanegara Majapahit Sapta Parwa II*, (Djakarta: Prapantja, 1962), halaman 233-255.

<sup>7</sup>Aminuddin Kasdi, Babad Gresik; *Kajian Historiografis Dalam Studi Sejarah* (Surabaya: University Press IKIP Surabaya, 1997), halaman 38.

<sup>8</sup>Melihat kedatangan Syeh Wali Lanang ke Jawa yang bertepatan dengan dipenggalnya raden Gajah (1433). Oleh karena itu adanya dugaan bahwa ia termasuk keluarga Majapahit yang tersingkir akibat Perang Pa-reg-reg perlu dipertimbangkan. *Paramisora* (Parameswara) sendiri, pendiri Kerajaan Malaka (1405) jelas bangsawan dari Majapahit. Oleh karena itu tidak mustahil Dinasti Giri masih memiliki hubungan genealogis dengan Dinasti Majapahit.

<sup>9</sup>Tim Peneliti dan Penyusunan Sejarah Sunan Drajat, *Sejarah Sunan Drajat Dalam jaringan Masuknya Islam di Nusantara* (Surabaya: Tim Peneliti dan Penyusun Buku Sejarah Sunan Drajat, 1998), halaman 137-146.

keruntuhan Kediri<sup>10</sup>. Diduga intervensi Giri itu sebagai pembalasan terhadap *revance* dari pihak sisa-sisa kekuasaan Hindu di Sengguruh (Malang selatan) yang menyerang Giri pada masa Sunan Dalem (1506-1545)<sup>11</sup>. Perkembangan sejarah Kediri selanjutnya memang gelap.

Raffles, dalam *The History of Java* yang mengutip dari sumber-sumber local memberikan daftar sebagai berikut:

- 1448 (1525) Kediri ditaklukkan oleh Sunan Ngalaga.
- 1471 (1549) Pangeran Giri tiba di Kediri.
- 1473 (1551) Daha hancur akibat kebakaran, dan hilangnya Pangeran Prawata di tempat itu.
- 1499 (1577) Adipati Kediri dan putrinya lenyap setelah memeluk Islam.
- 1512 (1590) Kediri ditaklukkan oleh Panembahan Senapati<sup>12</sup>. Raffles tidak memberikan penjelasan lebih jauh terhadap kroniknya itu.

Bandingkan dengan pemberitaan *Babad Sangkala* sebagai berikut:

- 1527-1528 Kediri diduduki  
Perang Sengguruh
- 1545 Pamenang (ibu kota lama) ditundukkan
- 1552 Kediri terbakar
- 1549/1550 Raja Gunung (Sunan Giri) pergi ke Kediri
- 1578 Adipati Kediri hilang
- 1590 Kerajaan Kediri diduduki, Senapatinya menyerah
- 1610 Kediri ditaklukkan oleh Mataram

---

<sup>10</sup>H.J. de Graaf, *Awal Kebangkitan Mataram: Masa Pemerintahan Senapati* (Jakarta: Grafitipers, 1985)halaman 61-62.

<sup>11</sup>Aminuddin Kasdi, *op.cit.*, halaman 42-43.

<sup>12</sup>Th. S. Raffles, *The History of Java Volume II* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978), halaman 234-235.

Berdasarkan pemberitaan *Babad Sangkala* (diduga menjadi rujukan Raffles) dan *Babad Tanah Djawi*, tampaknya daya tahan dan *resistensi* Kediri terhadap ekspansi Islam sangat kuat. Pada tahun 1527 sehubungan dengan serangan sengguruh, oleh pihak Islam (Giri), Kediri diduduki. Pendudukan ini tidak berlangsung lama, karena Sengguruh melakukan konsolidasi dan melancarkan serangan balasan. Kali ini tidak tanggung-tanggung Sunan Giri (Sunan Dalem) turun gunung ke Kediri (1549/1550). Konflik itu uteras brkepanjangan, dan diberitakan pada 1578 Adipati Kediri bersama puterinya setelah masuk Islam hilang<sup>13</sup>. Hal itu memberikan petunjuk bahwa betapa lemahnya kontrol Pajang yang dianggap hegemoni Jawa. Selanjutnya di Jawa Tengah terjadi pergeseran kekuasaan dari Pajang ke Mataram (1586). Sementara di Jawa Tengah ricuh, di Jawa Timur Adipati Surabaya, Pangeran Pekik, yang menurut manuskrip *Sejarah Regent Surabaya* berasal keturunan Panembahan Kediri berusaha memperkuat pengaruhnya di Kediri<sup>14</sup>. Pekik menetapkan *Ratu Jalu* sebagai pengganti adipati yang lama: Pangeran Mas. Nama Adipati Jalu, mengingatkan *Panjalu*, sebagai sinonim *Daha* atau *Kediri* pada zaman kuna. Boleh jadi hal tersebut sebagai upaya Pekik, untuk mendapatkan legitimasi di Tengah-tengah situasi Jawa yang terpecah belah<sup>15</sup>. Tindakan penguasa Surabaya itu menyebabkan keempat saudara Pangeran Mas; Senapati Kediri, Saradipa, Kentol Jejanggu, dan Kartimasa kecewa, dan menggabungkan diri dengan pihak

---

<sup>13</sup>M.C. Ricklefs, *Modern Javanese Historical Tradition; A Study of an Original Kartasura Chronicle and Related Materials* (London: School of Oriental and Africans Studies, 1978), halaman 20-31.

<sup>14</sup>Winarsih P.Arifin, "Sejarah Regent Soerabaja (Br.474)", dalam *Babad Blambangan* (Yogyakarta: Ecole de Francaise d'Extreme-Orient bekerjasama dengan Yayasan Bentang Budaya, 1995), halaman 293-294.

<sup>15</sup>Tindakan serupa juga terjadi pada Dinasti mataram, yang menganggap sebagai keturunan bidadari *Nawangwulan*-Jaka tarub. Di Madura Dinasti yang berkuasa di pulau itu melakukan hal serupa yaitu menganggap sebagai keturunan bidadari *Tunjung Biru Bulan*-Aria Menak Sunaya.

Mataram<sup>16</sup>. Pada tahun 1610 Kediri oleh Mataram, berhasil ditundukkan sepenuhnya. Menurut *Babad Momana* (1638), Kediri merupakan salah satu daerah kabupaten di wilayah *mancanagara wetan*, dengan luas wilayah 4.000 *cacah* atau *karya*<sup>17</sup>, dipimpin oleh seorang berpangkat tumenggung/adipati<sup>18</sup>. Tetapi tidak disebutkan namanya.

Selanjutnya oleh pihak Mataram, Kediri bersama dengan daerah lain seperti: Madiun, Mataram, Bagelen, dan Banyumas, berturut-turut diperuntukkan sebagai *lungguh* atau *apanage* para Pangeran: Balitar, Purbaya, Aria Mataram, Pangeran Krapyak, dan Pangeran Silarong<sup>19</sup>. Posisi ini berlangsung sampai 1677.

Pada tahun 1677 pecah Perang Trunajaya, setelah Keraton Mataram (Plered) jatuh, Kediri di bawah kekuasaan dan menjadi pusat perlawanan Trunajaya. Selama berkuasa di Kediri, Trunajaya mendapat dukungan mertuanya: *Panembahan Rama* atau Raden Kajoran, ulama terkenal dari Jawa Tengah selatan. Untuk memberikan dukungan kepada Trunajaya, Panembahan Rama menetap di Kediri. Tokoh kharismatik ini berdiam di Nirmala, di pegunungan yang menurut laporan VOC bernama *Totombi*, sekitar setengah hari perjalanan dari Kediri. Atas usaha Kajoran di Kediri

---

<sup>16</sup>J.J. Ras, *Babad Tanah Djawi: de prozaversie van Ng. Kertapradja* (Dordrecht/Holland providence-USA: Foris Publications, 1987), halaman 107.

<sup>17</sup>*Babad Momana*, koleksi Perpustakaan Sanabudaya, Yogyakarta S.3 PBE 100.173.

<sup>18</sup>B.Schrike, *Indonesian Sociological Studies* (Bandung W van Hoeve Ltd, 1957), halaman 159.

<sup>19</sup>Rijklofs van Goens, *Javaense Reyse de bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram 1648-1654* (Amsterdam: terra Incognita, 1995), halaman 39-41. Lihat G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", dalam *Adatrechtbundels XXXIV: java en Madoera I* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931), halaman 280-281.

dengan semangat “*Pan Islamisme*” dilakukan penyebaran Islam secara intensif, meskipun dalam suasana perang<sup>20</sup>.

Atas permintaan Mataram, VOC untuk pertama kalinya merambah pedalaman Jawa yang masih asing baginya, dalam rangka melancarkan ekspedisi dan menindas perlawanan Trunajaya di Kediri. Guna mengetahui medan perang dan kekuatan yang loyal kepada Sunan, VOC melakukan registrasi wilayah Mataram. Dalam daftar tersebut daerah Kediri tidak tercantum, namun di sekeliling Kediri muncul Kabupaten baru: Pekuncen (di barat), Pace (di barat laut), Nganjuk (dekat Pace), dan Kertasana (utara)<sup>21</sup>. Dalam pengejarannya terhadap Trunajaya di Kediri, Amangkurat II yang berangkat dari Japara, kemudian membuat pesanggrahan sebagai kubu terdepan pasukan Mataram di medan perang, yaitu di desa Singkal, sebelah utara Kediri<sup>22</sup>.

Pada tahun 1678 Amangkurat II menyerahkan daftar daerah yang masih setia kepada Mataram kepada pihak VOC. Dari daftar daerah-daerah yang diwajibkan menyerahkan padi (*verplichte leveransier*) kepada VOC itu, sekaligus juga merupakan wilayah yang masih setia kepada Mataram meliputi: *Nagaragung* (Mataram, Pajang); *Pesisir Kulon* (Semarang, Tegal, Wiradesa, Kaliwungu, Lembahrawa, Brebes, Kendal, Terbaya, Pekalongan, Kaligawe, Pemalang, Losari, dan Dremayu); *Mancanagara Kulon* (Banyumas, Ayah, Kedu, Bocor, Salinga, Suran Tinga, Garuda); *Mancanegara Wetan* (Panaraga, Caruban, Wirasaba, Jagaraga, Madiun, Jipang,

---

<sup>20</sup>H.J. de Graaf, *Het Kadjoran Vraagstuk* (Masalah Kajoran), (Yogyakarta: Balai Kajian Sejarah & Nilai tradisional Depdikbud, Yogyakarta, 1987/1988), halaman 38-57. Kajoran kemudian kembali ke Jawa Tengah, karena berselisih pendapat dengan menantunya: Trunajaya.

<sup>21</sup>B.Schrieke, *op.cit.*, halaman 153-156.

<sup>22</sup>H.J. de Graaf, *De Expeditie vananthonio Hurdt Raad van bidie, als adimraal en Superintendent naar de binnenlanden van Java* (‘s-Gravenhage Martinus Nijhoff, 1971), bijlage Schetskaart der Expeditie van Anthonio Hurdt in Java’s Binnenland. Lihat J.J Ras, *Babad Tanah Djawi...*, *op.cit.*, halaman 190.

Japan, Pace, Berbek, Nganjuk, Kertasana, Pekuncen, Blitar, Kalangbret, Magetan, Kaduwang, Rawa, Grobogan, Sela, Warung). Daerah-daerah Kediri, Blora, Bagelen, Pasisir Wetan, Karena dikuasai oleh Trunajaya, tidak disebutkan<sup>23</sup>.

Menginjak abad XVIII posisi Kediri makin tidak menentu sebagai akibat terjadinya berbagai pergolakan setelah Perang Trunajaya. Misalnya, Perang Suksesi Jawa I (1703-1705), Perang Surabaya (1718-1722), dan Perang Suksesi Jawa II (1718-1723) juga menempatkan Kediri sebagai pusran perebutan kekuasaan, serta menjadikan daerah itu sering berganti tuan atau penguasa dari berbagai kelompok elite masa itu. Selama Perang Surapati (1687-1707), meskipun pusat perlawanannya di Pasuruan, tetapi Kediri merupakan terug val basis tatkala Surapati dan keturunannya terpukul oleh kekuatan VOC<sup>24</sup>.

Govert Cnoll, selaku Commandeur serdadu VOC pada 25 Juni 1706 melaporkan wilayah Mataram dan penduduknya yang masih setia pada Pakubuwana I (1703-1719); kuthagara dan sekitarnya (Kartasura, Mataram, Kedu, Bagelen, Banyumas): Pesisir Kulon (Demak, Kaliwungu, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes). Daerah-daerah seperti Kediri, Kaduwang, Magetan, Madiun, Caruban, Kertasana masih dikuasai oleh Sunan Mas. Daerah lainnya, seperti: Japan, Wirasaba, Surabaya, Tuban, Gresik, Lamongan tidak disebutkan. Daerah Pasuruan, MALang dan Kediri bagian selatan di bawah kekuasaan Surapati<sup>25</sup>.

Demikian pula, tatkala terjad perebutan tahta antara Puger dan Sunan Mas, Suana Mas sebelum menyerah kepada VOC (Perang suksesi Jawa I, 1803-1705), juga memusatkan perlawanannya di

---

<sup>23</sup>J.K.J. de Jonge, *Opkomst VII ...*, *op.cit.*, halaman 163-164.

<sup>24</sup>M.C Ricklefs, *War Culture, ...*, *op.cit.*, halaman 129-180.

<sup>25</sup>A.K.A. Gijssberti Hodenpijl, "De Onderwerping van Pangeran Adipati Anoen alias Soenan Mas aan de Hooge Regering te Batavia op de 6 September 1708", dalam *BKI, Volume 78* (1922) halaman 385-402. Lihat juga: M.C. Ricklefs, *Modern ...*, *op.cit.*, halaman 118119,193.

Kediri dengan bantuan penguasa setempat, adipati Katawengan. Pada tahun 1706 seorang pendeta Yezuit Francois Valentijn mengunjungi Kediri, kemudian menuliskan laporannya dalam *Oud en Nieuw in Oost-Indien* (diterbitkan 1862) menyatakan: “...Kediri, een van de grootste in 't rijk en de hoofplaats van dat landschap. Hier heeft een Ingabei Katawengan, die een nabestaande van Soerapati en met wiens dochter een van Soerapati zonen getrouwd is, het opperbewind. De stad is wel 2 mijlen in den omtrek wel 10.000 huisgezinnen sterk” (Kediri kota kerajaan terbesar, dan terletak istana dari negeri itu, memiliki kepala Ngabehi Katawengan, keluarga dekat Surapati, dan putrinya dikawin oleh salah seorang putera Surapati. Kota Kediri luasnya sekitar 2 mil dan berpenduduk 10.000 rumah tangga)<sup>26</sup>.

Pada tahun 1709, wilayah Kerajaan Mataram telah pulih kembali, kecuali daerah Pasuruan dan sekitarnya. Dalam masa yang relatif damai (1709-1719, sampai pecahnya Perang Surabaya (1718-1722), dan Perang Suksesi Jawa II (1719-1723), Mataram harus memenuhi kewajiban untuk menyerahkan sejumlah komoditi yang diperlukan VOC. Untuk itu Pakubuwana I menyerahkan daftar nama-nama daerah yang harus melakukan penyerahan wajib komoditi yang dimaksud. Dari daftar itu tergambar struktur wilayahnya; (1) Nagragung (Kartasura, Mataram); (2) Pesisir Kulon (Tegal, Wiradesa, Kaliwungu, Lembahrawa, Batang, Kendal, Pekalongan, Demak, Pematang, Brebes); (3) Pesisir Wetan (Japara, Kudus, Pati, Juwana, Lasem, Tuban, Sdayu, Gresik, Surabaya, Cengkalsewu, Madura); (4) Mancanagara Kulon (Banyumas, Kedu, Wates, Bagelen); (5) Mancanagara Wetan, dibagi menjadi dua kawedanan yaitu (A) di bawah kekuasaan Tumenggung Surawijaya dari Jipang, meliputi daerah Jipang, Madiun, Kalangbret, Jagaraga, Pacitan, Kaduwang, Japan, Selakaras, dan Warung-Kuwu. Wilayah (B) di bawah

---

<sup>26</sup>Francois Valentijn, *Oud en Nieuw Oost-Indien Uitgegeven door S. Keijzer Deerde Deel* (Amsterdam: Wed. J.C van Kesteren & Zoon, 1862), halaman 204.

kekuasaan Adipati Katawengan dari Kediri, meliputi Kediri, Srengat, Kertasana, Pace, Japan, Wirasaba, Panaraga dan Blora<sup>27</sup>.

Pada tahun 1719 pecah Perang Suksesi Jawa II antara Amangkurat IV dan saudara-saudara mudanya, daerah Kediri menjadi salah satu basis perlawanan. Saudara-saudara Sunan itu bersama-sama Adipati Jayapusita melancarkan perlawanan terhadap keraton. Saudara-saudara Sunan yang dimaksud yaitu: Pangeran Dipanegara/Panembahan Herucakra (senior), Pangeran Purbaya, dan Pangeran Adipati Aria Balitar. Gejolak yang juga telah membakar Kediri itu uterus berlangsung sampai tahun 1723<sup>28</sup>.

Pada masa Pakubuwana II (1726-1749), yang masa awalnya relatif tenang, pihak kerajaan melakukan penataan ulang wilayahnya dan sekaligus juga melakukan konsolidasi kekuasaan yang dipimpin oleh Patih Danureja (1719-1733). Dalam penataan tahun 1733 itu Kediri sebagai kadipaten, berturut-turut di bawah Demang Ranuhito, Ngabehi Singajuda, dan Ngabehi Katawengan<sup>29</sup>. Sumber-sumber arsip VOC dari tahun 1737 masih menempatkan Katawengan sebagai penguasa Kediri, tetapi pada arsip tahun 1743<sup>30</sup>, telah diganti oleh Tumenggung Suradaha. De Graaf berpendapat bahwa Katawengan merupakan dinasti lokal (*vorstenhuis*) yang berkuasa di Kediri dari sekitar abad XVI-XVIII. Menurut De Graaf paling tidak ada 4 penguasa Kediri yang menggunakan nama Katwengan<sup>31</sup>. Dari

---

<sup>27</sup>J.K.J. de Jonge, *Opkomst VII...*, *loc.cit.*

<sup>28</sup>J.J.Ras *Babad Tanah Djawi...*, *op.cit.* , halaman 329-360.

<sup>29</sup>ARNAS RI, No. 303 *Mataram: Register van de Families uit Soesoehoenangs Pacoeboeana opgegeven door den Keizerlijken Secretaris Soeriogoena tot Cartasoura den 20 October 1733*. Lihat: J. Brandes, "Serat Pustaka Raja Puwara", dalam *Register op De Proza-Omzetting van de Babad Tanah Djawi; Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (Batavia: Albrecht & Co., 's-Hage: Martinus Nijhoff, 1900), halaman 140-185.

<sup>30</sup>Arsip Nasional RI (ARNAS RI), MATaram No. 303 (1733)

<sup>31</sup>H.J. de Graaf, "Kediri en het geslacht KAtawengan van 1500-1700", BIKI No.133, halaman 420-437.

sumber-sumber Portugis, Babad Momana, Babad Tanah Djawi dan registernya yang disusun oleh Teeuw<sup>32</sup>, serta Serat Pustaka Rajapuwara dapat direkonstruksi nama penguasa Kediri sejak 1474 yaitu: Girindrawardana (1474-1519), Gusti Adipati (1519-1527), Adipati Kadiri, Pangeran Mas (...1575), Ratu Jalu (1575-1590), Pangeran Purbaya (sebagai patuh/pemilik lungguh), Trunajaya (1677-1679), Adipati Katawengan I (1706), Demang Ranuhita (1719), Adipati Katawengan III (1733), Ngabehi Singayuda (1733-1737), Ngabehi Katawengan IV (1737-1743) dan Tumenggung Surdadaha (1743).

Berdasarkan perjanjian Mataram-VOC 1743, Pakubuwana II (1726-1749) menyerahkan seluruh wilayah pantai utara Jawa, sebagai kompensasi biaya yang telah dikeluarkan oleh VOC untuk merebut keraton dan tahtanya baih dari kaum “perusuh” Cina, maupun dari cengkeraman Cakraningrat IV, penguasa Madura<sup>33</sup>. Dari wilayah yang diserahkan itu ternyata daerah yang kemudian menjadi Karesidenan Kediri masih utuh<sup>34</sup>. Pada tahun 1755 dengan terpecahnya wilayah Kerajaan Mataram menjadi Kasultanan Jogjakarta dan Kasultanan Surakarta, daerah Kediri sebagaimana masuk wilayah Surakarta (Kediri, Srengat/Blitar), sisanya yaitu, daerah Tulungagung (Kalangbret), Trenggalek (waktu belum ada), Nganjuk, dan Kertasana menjadi bagian Kasultanan Jogjakarta. Kondisi

---

<sup>32</sup>A. Teeuw, *Register op de tekst en vertaling van de Babad Tanah Djawi* (uitgave 1941).

<sup>33</sup>F.W. Stapel, *Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Verzameling van Poeltieke Contracten en verdere Vredagen dooe de Nederlanders in het oosten gesloten, van Privelegebrieven, aan hen verleend, enz. Vijfde Deel* (Printed in the Netherlands), halaman 359-381. Lihat: J.K.J. de Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indie Deel IX* (1877) (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1877), halaman 434-447.

<sup>34</sup>Peter Carey, “Waiting for the Just King: The Agrarian World of South-Central Java from Giyanti (1755) to the Java war (1825-1830)”, dalam *Modern Asian Studies Volume 20* (1986) (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), halaman 64.

territorial tersebut tidak banyak mengalami perubahan sampai pecahnya Perang Dipanagara (1825-1830). Akan tetapi untuk melacak nama pejabat atau bupati di wilayah Kediri, yang tentunya terdiri dari banyak bupati, perlu studi lebih intensif pada sumber-sumber yang berasal dari periode Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta.

Setelah Perang Diponegoro berakhir (1830), Kasultanan Jogjakarta dan Kasunanan Surakarta kehilangan berbagai wilayah mancanagara, khususnya yang berada di Jawa Timur (termasuk Kadiri), karena harus diserahkan kepada Belanda sebagai ganti rugi biaya perang, sebagai tindak lanjut penyerahan tersebut para penguasa local, terdiri 23 orang bupati Mancanagara Wetan, khususnya dari wilayah Kediri dan Madiun, dalam suatu upacara di Pendopo Sepreh, secara resmi beralih dari kekuasaan Kerajaan Mataram ke kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda<sup>35</sup>. Daerah Kediri yang semula terdiri dari daerah kabupaten-kabupaten: Kertasana, Nganjuk, Berbek, Ngarawa, dan Kalangbret dalam perkembangan selanjutnya disusutkan menjadi Kabupaten Kediri, Nganjuk, Berbek, dan Kertasana<sup>36</sup>. Kondisi geografi dan pemerintahan tersebut berlangsung sampai menjelang datangnya kekuasaan Jepang (1942).

---

<sup>35</sup>Harimintadji, *Menapak Sejarah Hari Jadi Kabupaten Nganjuk*, diajukan dalam Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk Yanggal 21 Agustus 1993. Menurut tradisi yang masih dapat dilacak di sekitar Nganjuk, *pendapa sepreh* terletak di sekitar desa Godean, Loceret Nganjuk. Karena waktu itu Godean juga berstatus kabupaten.

<sup>36</sup>Skep. YI. L.a A No.1 Semarang 31 Agustus 1830 dan Akte Komisaris Daerah-daerah Kraton yang telah diambil alih untuk Residentie Kediri, ditanda tangani di Semarang oleh van Lawick van Pabst. Dalam Akte itu ditetapkan juga pejabat-pejabat kabupaten lainnya, seperti patih, mantra, jaksa, mantra wadana/kepala distrik, mantra res dan penghulu. Lihat: *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk; Tweede Deel H-M* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff/Leiden: N.V. v/h. E.J. Brill, 1918), halaman 291-292.

## 5.2. Sumber-Sumber Epigrafis dari Kediri Masa Kolonial: *Babad Dhaha-Kediri (Geschied van Het Rijk Kediri).*

Dari paparan tersebut di atas ternyatalah bahwa sejarah Kediri pasca Islamisasi memiliki dinamika dan perkembangan yang berliku dan panjang. Penyebaran Islam sendiri tampaknya juga tidak sedemikian mulus seperti digambarkan oleh masyarakat pada umumnya. Apalagi mengingat dewasa ini di Kediri terdapat sejumlah pesantren terkenal. Dari perkembangan sejarah yang panjang serta penuh gejolak itu secara umum dapat diperoleh gambaran bahwa: (1) Kediri, Merupakan salah satu daerah Mataram yang terletak di pinggiran (*periphery*), (2) Kediri merupakan salah satu daerah yang penuh gejolak, khususnya pada periode Mataram Islam (1586-1755), dan (3) sebagai wilayah pinggiran yang termasuk alat proses islamisasinya, tidak mustahil pendukung tradisi pra Islam selain bertahan juga melakukan perlawanan.

Dari sentuhan-sentuhan budaya baru baik Islam, maupun Barat (baca: Belanda), setidaknya Kediri merekam dua peristiwa penting yaitu: (1) proses Islamisasi Kediri, dan (2) sentuhan budaya Barat lewat ekspedisi VOC terhadap Trunajaya di Kediri. Sentuhan kultural yang pertama melahirkan historiografi tradisional *Babad Dhaha-Kediri* atau *De Geschied van Het Rijk Kediri* (bahasa dan aksara Jawa). Sentuhan social, militer dan kebudayaan melahirkan Laporan Ekspedisi VOC berjudul *De Expeditie van Anthonio Hurdt Raad van Indie Als Admiraal en Superintendent naar de Binnenlanden van Java Sept- Dec. 1678 Vogene het Journal van Johan Jurgen Briel* (berbahasa Belanda, aksara Latin). Sehubungan dengan faktor waktu dalam kesempatan ini penulis membatasi kajian pada historiografi tradisional *Babad Dhaha* atau *Geschied van Het Rijk Kediri*.

Pertanyaan yang menghadang, dapatkah kajian terhadap karya-karya klasik itu dimasukkan dalam epigrafi? Memang menurut pengertiannya epigrafi adalah ilmu atau kajian tentang prasasti, khususnya penguraian kata-kata dan interpretasi dari prasasti (*the*

*study or science of inscriptions, especially the deciphering and interpretation of ancient inscriptions*). Akan tetapi dengan ditemukannya tulisan-tulisan *papyrus* di Mesir, juga temuan-temuan berbagai tulisan tentang kehidupan Bangsa Yunani, seperti perjanjian konstitusi di Athena oleh Aristoteles, karya Homerus, Demosthenes, fargamen *papyrus* dari Plato (abad III BC), pengertian *epigrafi* menjadi lebih luas yaitu bukan sekedar tulisan pada prasasti, melainkan ilmu tulisan kuna atau *written records*. Di dunia Barat, misalnya di Belanda, untuk membaca arsip-arsip dari abad XV-XVII diperlukan bantuan epigrafi. Dalam studi sejarah, epigrafi disebut pula sebagai *palaeografi* (tulisan kuna). Di Barat, juga di Negeri untuk membaca teks atau arsip abad XV-XVIII diperlukan bantuan epigrafi. Louis-Charles Damais dalam *Etudes d'Epigraphie Indonesienne*, dalam daftar kronologisnya juga mencakup karya-karya sampai tahun 1940<sup>37</sup>. Berdasarkan pengertian di atas penulis mengikuti pendirian bahwa cakupan *epigrafi* tidak hanya terbatas pada prasasti, melainkan juga pada berbagai naskah kuna.

Berita epigrafi sebagai *written records* sangat penting artinya guna merekonstruksi berbagai aspek kehidupan masa lampau, yaitu: (1) memberi penjelasan tentang penggunaan epigrafi untuk menjelaskan masalah administrasi, hukum, tradisi, sacral, hubungan-hubungan dalam masyarakat, dan berbagai keahlian khusus, untuk jangka waktu lama, (2) menjelaskan hal-hal yang sedang berlaku, seperti: surat-menyurat, keputusan-keputusan raja, pengumuman, dan lain-lain. Dan (3) menjelaskan tentang masalah keagamaan<sup>38</sup>, mendapatkan persamaan dan perbedaan teks, dan (2) mengusut

---

<sup>37</sup>L. Charles Damais, *Etudes d'Epigraphie Indonesienne* (Paris: Ecole Francaise d'Extreme Orient, 1990), halaman 682-693.

<sup>38</sup>R.P. Soejono, *Epigrafi dan Arkeologi di Indonesia; Makalah pada Seminar & Kongres AAEI di Malang, 28-30 Mei 2001* (Malang: Panitia Kongres & Seminar I AAEI, 2001).

hubungan antara fakta yang dikandung dalam teks dan fakta yang direkam oleh sumber-sumber lain<sup>39</sup>.

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas penulis melakukan langkah-langkah identifikasi naskah, membaca dan mengalihaksarakan, menerjemahkan, dan memberikan makna serta menafsirkannya.

### 5.2.1. Identifikasi Naskah

Ada dua naskah yang menjadi kajian. Pertama: *De Geschied van Het Rijk* Kediri yang mulai dikumpulkan pada tahun 1832 oleh Purbawijaya, saat permulaan pemerintahan Hindia Belanda membawahi Kediri. Naskah itu pada tahun 1873 dibukukan oleh Mas Soemasentika, selanjutnya diterjemahkan dengan berbagai catatan oleh P.W. Palmer van den Broek (Pejabat Kontrolir Urusan Dalam Negeri di Jawa-Madura). Buku ini diterbitkan E.J. Brill, Leiden (1902), menggunakan huruf dan bahasa Jawa baru. Baik Soemasentika maupun van den Broek, secara khusus tidak memberikan nama atau title lain, selain tertera pada judul di atas.

Naskah kedua, berjudul *Babad Daha-Kediri* aslinya ditulis dengan huruf dan berbahasa Jawa (baru). Naskah kedua dipublikasikan oleh penerbit Tan Koen Swie, Kediri (1953), telah dialih aksarakan ke dalam huruf Latin. Judul lengkapnya: *'Babad Daha-Kediri, Njariosaken Ki Butalotjaja retuning djim periparajangan. Babon kahunganipun swargi Kangdjeng Raden Harja Hadipati Danuredja ingkang kaping VI Papatih Dalem ing Karaton Ngajogjakarta Hadiningrat. Inggang akiripun Asma Kangdjeng Pangeran Harja Tjakraningrat.* Pada bagian bawah judul buku tertulis: *Kawedalaken dening warisipun Raden Soemadidjojo ing Pradja Dalem Ngajogjakarta Hadiningrat* (1953).

---

<sup>39</sup>Edi Sedyawati, Epigrafi: *Ajakan Untuk Tekun dan Cermat: Makalah pada Seminar & Kongres AA EI di Malang, 28-30 Mei 2001* (Malang: Panitia Kongres & Seminar I AA EI, 2001).

Kedua teks tersebut termasuk karya sastra sejarah atau penulisan sejarah tradisional (*historiografi* tradisional).

## V.2.2. Pembacaan, Alihaksara, dan Penerjemahannya

Dari pembacaan terhadap kedua teks, secara garis besar isinya sama. Perbedaannya, selain beraksara Jawadan Latin, isi bagian depan teks A, yaitu tentang inti ceritera Panji lebih ringkas, sedangkan ceritera penghujatan terhadap tokoh Sunan Bonang dan figur Raden Patah, sebagai reaksi terhadap islamisasi selain lebih keras juga lebih banyak memakan halaman buku. Sebaliknya pada teks B, uraian perihal kronologi kerajaan-kerajaan Jawa dan genealogi Raja-raja Kediri sangat panjang, sebaliknya penghujatan terhadap Raden Patah ditulis ringkas, sedangkan Sunan Bonang tidak disebut-sebut.

Perbedaan lain, pada teks A, pada bagian depannya disebutkan tahun penulisan pertama sebagai pengumpulan data, yaitu 1832 tatkala Kediri baru saja menjadi wilayah Gubernemen Hindia Belanda. Pekerjaan itu dilakukan oleh *beskal* (sebangsa jaksa) Purbawijaya, keturunan ke-4 Pangeran Katawengan (Adipati Kediri, 1737-1743).

Dalam pembacaan dan penerjemahannya tidak mengalami kesulitan, penulis mencatat hal-hal yang dianggap penting guna memberikan makna dan penafsiran. Adapun catatan-catatan yang dimaksud sebagai berikut.

- (1) Nama informan: Ki Purbawijaya, Dermokandha (*dalang wayang krucil*), Ki Sondong (penabuh gamelan sebagai tempat menyusupnya jin), Butalotjaja (raja jin yang bermukim di gua Selabali), Kiai Daha, Kiai Daka, Tunggulwulung, Kramatrana, dan lain-lain.
- (2) Nama-nama tempat: Kandhairan, Majarata, Mamenang, Nyaen, Kalasan, Jongbiru, Selamangleng, Gunungsari, Punjul (gn), Wilis (gn), Kloothok (gn), Klut (gn, Seman, Kediri, Kertasana.

- (3) Nama-nama Kerajaan: Daha, Janggala, Kediri, Urawan, Singasari, Majapahit, Medangkamulan, Prambanan, Baka, Demak, Bali.
- (4) Nama-nama raja & tokoh (baik histories maupun legendaris): Jayabhaya, Sindula, Dewacengkar, Ajisaka, Daneswara, Mundingwangi, Mundingsari, Prawatasari, Amongtani, Sandanggarba, Karungkala, Metungmalarang, Sri Gentayu (Erlangga), Dewi Kilisuci, Lembumiluhur, Lembuamerdadu, Lembupangarang, Lembuamijaya, Panji Kuwanisrengga, Raden Patah, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang.
- (5) Nama-nama tarian: bedaya-srimpi.

### Isi teks:

Sebagai karya *historiografi* tradisional, *De Geschied van Het uijk Kediri* isinya meliputi (1) unsur sastra dan (2) unsure sejarah<sup>40</sup>. Unsur sastranya antara lain;

- (a) Mitologi, yaitu menitisnya dewa Wisnu kepada Jayabhaya dan Kamiswara.
- (b) Legenda, yaitu kepercayaan terhadap makhluk halus yaitu Butalocaya dan tokoh Raden Panji, sebagai refleksi dari raja Kameswara di Kediri.
- (c) *Hagiografi*, yaitu ceritera tentang orang suci, seperti Dewi Kilisuci, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan khususnya Sunan Bonang.
- (d) Simbolisme, dalam bentuk tokoh Butalocaya, Kiai Tunggul Wulung, Sabdopalon, Sunan Bonang, Sendhang Kalasan, *reca Nyaen*, dan lain-lain.
- (e) Ramalan, dalam bentuk kutukan (Jawa: *sot*) . Misalnya beberapa desa di Kertasana yang mengalami kesukaran terhadap air, para remaja yang menjadi perjaka dan perawan tua, kondisi

---

<sup>40</sup>Daroesoeperto, *Penulisan Sastra Sejarah di Indonesia: Tinjauan Percobaan tentang Struktur, Tema, dan Fungsi* (Leiden,1975).

masyarakat sebelah timur sungai yang labil, dan keturunan Raden Patah yang dililit konflik dan pembunuhan.

- (f) Pemali, yaitu larangan menebang pohon-pohon besar di daerah sebelah timur Sungai Brantas.

Adapun unsur sejarahnya antara lain: Raja Jayabhaya, Kameswara, Raden Patah, Sri Genthayu, Kili Suci, dan lain-lain.

Secara garis besar isi teks dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- (1) Asal-usul nama Daha dan Kediri.
- (2) Sejarah Daha, yang diungkapkan berdasarkan tradisi lisan (*oral tradition*) lewat personifikasi tokoh *Ki Butalocaya*.
- (3) Ceritera tentang *menitis* dan moksanya dewa Wisnu kepada Raja Jayabaya dari Kediri.
- (4) Kronologi kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jawa sampai akhir Majapahit, yaitu: Kediri, Medangkamulan, Prambanan, Janggala, Panjalu, Urawan, Singasari, Majapahit, dan Demak.
- (5) Ceritera Panji, khususnya Panji Asmarabangun-Dewi Angraeni dan Dewi Sekartaji.
- (6) Genealogi raja-raja di Jawa, khususnya di Janggala-Kedhiri dalam hubungannya dengan ceritera Panji.
- (7) Perdebatan antara Butalocaya dan Sunan Bonang, mengenai laku utama sesuai dengan ajaran agama. Misalnya hujatan Butalocaya terhadap Sunan Bonang yang memindahkan aliran Sungai Brantas dari sebelah barat Kertasana ke sebelah timur kota itu, terjadinya sumur gumuling di dekat Pagu, dan lain-lain.
- (8) Runtuhnya Kerajaan Majapahit, karena perbuatan anak durhaka: Raden Patah, yang menyerbu Majapahit karena hasutan para wali.

Secara ideologis dan konseptual, isi *Babad Daha* dapat dikelompokkan dalam:

- (1) Pengungkapan sejarah Kediri berdasarkan sumber-sumber lokal, sebagai reaksi terhadap berbagai perubahan yang melanda Jawa

pada umumnya, dan daerah Kediri khususnya pada abad XIX, setelah daerah itu berada di bawah kekuasaan Hindia-Belanda.

- (2) *Resistensi* atau perlawanan terselubung terhadap perkembangan Islam (*islamisasi*), Yang makin mantap di Kediri, khususnya terhadap peranan kekuatan pesisir yang personifikasikan pada diri Sunan Bonang, Raden Patah dan Sunan Giri.

Pertanyaan yang patut diajukan terhadap kedua teks itu ialah;

- Pertama, mengapa juga muncul reaksi terhadap tokoh-tokoh Islam seperti Sunan Bonang, Raden Patah dan Sunan Bonang ?
- Kedua, mengapa pada akhir abad XIX muncul kembali pemitosan terhadap Raja-raja Kediri, khususnya Raja Jayabhaya dan Kameswara yang dianggap sebagai *titisan* dewa Wisnu dalam konteks ceritera Panji ?

### 5.2.3. Reaksi Terhadap Perkembangan Islam di Kediri

Untuk menjawab masalah reaksi terhadap islamisasi sebagai gerakan sosial dan intelektual, perlu dikaji posisi Kediri abad XVI (yang dianggap sebagai abad islamisasi), sampai abad XVII sebagai abad mulainya pengaruh dan kekuasaan colonial di Nusantara. Dalam *historiografi*, gerakan sosial biasanya dibedakan antara gerakan kolektif yang terorganisasi dalam lembaga-lembaga yang telah ada (poleksosbudmil), dan gerakan yang bersifat sporadic atau embrional yang memiliki bentuk dan struktur lentur.

Reaksi atau gerakan-gerakan itu terjadi, biasanya sebagai tanggapan kelompok sosial tertentu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya terhadap proses akulturasi, yaitu mencakup usaha masyarakat menanggapi pengaruh sosio-kultural dari luar. Dalam prosesnya terjadi proses seleksi, dengan diferensiasi berbagai golongan sosial. Spektrum itu meliputi golongan pendukung, penentang pembaharuan, dan mereka yang tidak tahu-menahu. Dampak dari situasi tersebut ialah terjadinya konflik sosial,

merupakan gejala yang mengiringi setiap perubahan atau pembaharuan sosial-budaya<sup>41</sup>.

Berdasarkan kerangka pemikiran (teoritik) di atas, dalam konteks kajian terhadap *De Geschied* yang dianggap sebagai kelompok penerima perubahan adalah kelompok Islam dan birokrasi colonial. Adapun kelompok penentang ialah sisa-sisa kelompok lama yang simbolkan dalam personifikasi Butalocaya dan jurubicaranya *Dermakandha*. Kelompok ini lewat tulisan dalam *De Geschied* melancarkan protes kepada pejabat kolonial: *Kiai Perbawidjaja*.

Dalam uraian yang dipaparkan jelaslah bahwa betapa posisi Kediri dalam perjalanan sejarah di Jawa, baik dalam interaksinya yang tidak harmonis selama intensifnya perkembangan Islam, khususnya di Jawa. Selanjutnya ternyata posisi wilayah Kediri selain secara kronologis, dari abad kea bad senantiasa bergolak, sebagai akibat kompetisi berbagai kelompok elite, hingga interaksi sosial budaya yang terjadi berjalan tersendat-sendat, tidak intensif, bahkan diliputi dengan berbagai kekerasan. Kondisi tersebut disebabkan jauhnya Kediri dari wilayah pusaran atau pusat-pusat kekuasaan atau perubahan di pesisir, dan kuatnya resistensi komunitas lokal terhadap perubahan.

Meskipun kedua penulis teks melancarkan kritik terhadap proses islamisasi yang dipersonifikasikan dengan tokoh Sunan Bonang, Raden Patah dan Sunan Giri, akan tetapi islamisasi Jawa berdasarkan bukti-bukti sejarah, sosial dan budaya berjalan secara damai. Kritik-kritik tersebut berdasarkan bukti-bukti arkeologis-epigrafis dapat dikatakan bertolak belakang. Secara arkeologis dan epigrafis dapat dikatakan bahwa hampir semua unsur budaya sebelum Islam baik Indonesia asli, Hindu, dan Budha diakomodasi oleh

---

<sup>41</sup>Aminuddin Kasdi, *Aspek-aspek Gerakan Sosial di Jawa Timur Dalam Perspektif Sejarah*, Makalah Seminar Kajian Sejarah Dalam Era Globalisasi. Seminar HMJ Pendidikan Sejarah FPIPS-IKIP Surabaya, 1993. Lihat: Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta. Gramedia, 1992), halaman 159-161.

komunitas Islam. Peninggalan arkeologis dalam bentuk situ-situs *Sendang Duwur*, *Sunan Drajat*, *Sunan Giri*, dll merupakan museum hidup yang membuktikan hal itu. Di berbagai situs tersebut terdapat bukti bahwa para wali sebagai pemimpin lokal melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: (1) Menjadi panutan, dan bahkan sasaran pemujaan masyarakat setempat. (2) Melakukan akulturasi dengan budaya yang telah ada (Indonesia asli, Hindu-Budha), serta melestarikannya. (3) Membangun pemukiman berciri *interpreneurship*. (4) Tidak mengusik kuatnya unsur-unsur leluhur. (5) Tidak ada petunjuk terjadinya *social* dan *cultural shocks* (gejolak sosial budaya), maupun *social* dan *cultural lag* (kemandekan sosial budaya) pada masing-masing situs. (6) Segenap warisan atau peninggalannya, baik berupa warisan intelektual (ajaran & tulisan), warisan visual sampai sekarang tetap dilestarikan dan dileluri<sup>42</sup>.

Di berbagai situs seperti *Sendang Duwur* dan *Drajat*, selain tetap memelihara tradisi sebelumnya dengan format Islam, penggunaan kalendrik, angka dan aksara juga masih tetap menggunakan unsure-unsur pra Islam yaitu: Bahasa dan aksara Jawa *madia*, kalender saka. Lebih dari itu apabila pembacaan Ch. Damais yang dikutip oleh Habib Mustopo terhadap kronogram 1407 S (1485 M) di situs *Sendang Duwur* benar, justru akulturasi secara penuh telah terjadi lebih awal<sup>43</sup>. Lebih dari itu berbagai relic seperti patung, relief, tradisi dari sebelum Islam masih terus diabadikan. Misalnya di masjid *Sendang Duwur* masih tersimpan patung Garuda yang terus difungsikan oleh komunitas setempat sampai tahun 1960-an, serta sisa-sisa patung Siwa dan paduraksa yang terpelihara dengan baik. Di *Giri* masih terdapat situs dari batu (boleh jadi patung), untuk melakukan meditasi bagi seseorang yang memiliki hajat khusus.

---

<sup>42</sup>Tim Peneliti dan Penulisan Sejarah Sunan Drajat, *Sejarah Sunan Drajat Dalam Jaringan Masuknya Islam di Nusantara* (Surabaya: Tim Peneliti dan Penulisan Sejarah Sunan Drajat, 1998), halaman 186.

<sup>43</sup>M. Habib Mustopo, *Kebudayaan Islam di Jawa Timur; Kajian Beberapa Unsur Budaya Masa Peralihan* (Jogjakarta: Jendela, 2001), halaman 69; 93.

Sementara itu dalam karya-karya filologi, yang bersifat sufistik, di dalamnya juga terkandung unsure-unsur mistik dari periode sebelum Islam yang diformat dalam ajaran sufi atau tasawuf. Misalnya *Dewa Ruci*<sup>44</sup>. Bahkan Sunan Giri yang oleh masyarakat awam dianggap puritan, dalam Serat Sithin menerjemahkan kata Allah dengan *Hyang Sukma*, *Hyang Widi*, *Hyang Manon* dan menerjemahkan ulama dengan kata *pandhita* (*pendeta*)<sup>45</sup>. Lebih dari itu Sunan Giri oleh masyarakat selain diberi julukan atau gelar Prabhu Sadmata yang arti sebenarnya adalah “*ana al-Haq*”<sup>46</sup>, suatu gelar yang sesungguhnya dituntut oleh tokoh *Seh Siti Jenar*.

Bukti-bukti sosiologis – epigrafis dalam bentuk inskripsi pada nisan bertarikh 1356-1398 M, memberikan petunjuk bahwa pada masa kejayaannya di ibu kota Majapahit telah terdapat kelompok masyarakat Islam<sup>47</sup>. Bahkan diduga mereka berasal dari kalangan

---

<sup>44</sup>Ajaran ini telah dikenal luas pada masa Majapahit. Kemudian menjadi bagian dari *Puspa Rinonce* yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai karya Sunan Drajat. Pada abad XVIII muncul pula dalam *Serat Cabolek*. Lihat: Prijohoetomo, *Nawaruci; Inleiding, Middeljawaansche Prozatekst, Vertaling, Vergeleken met de Bimasoetji in Oud-Javaansch Metrum, Academische Proefschrift aan de Rijksuniversiteit te Utrecht* (Groningen: J.B. Wolters Uitgegevers-Maatschappij, 1934). Lihat: Soebardi, *The Book of Cabolek, A Critical Edition with Introduction Translation and Notes: A Contribution to the study of Javanese Mystical Tradition* (The Hague: Martinus Nijhof, 1975).

<sup>45</sup>*Sithin*, MS koleksi Bibliotheek University of Leiden, Netherland, dengan kode OR. 3121. (7).

<sup>46</sup>P.J. Zoetmoelder, *Manunggaling Kawula-Gusti, Pantheisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa: Suatu Studi Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1990), halaman 358-359.

<sup>47</sup>Uka Tjandrasmita, “Majapahit dan Kedatangan Islam”, dalam “*700 Tahun Majapahit (1293-1993), Sutau Bunga Rampai* (Surabaya: Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Jawa Timur, 1993), halaman 277-289. Lihat juga L.Ch. Damais, “Etudes Javanaise L Les Tomes Musulammen Datees de Tralaya”, dalam BEFEO, Tome XLVII, fasc 353-415.

bangsawan tinggi<sup>48</sup>. Berita Cina dari *Ma-Huan* dari tahun 1416 yang menyatakan penduduk ibu kota Majapahit terdiri dari kelompok muslim, Cina yang kebanyakan juga muslim, dan Indonesia asli penyembah berhala, memperkuat hal itu<sup>49</sup>. Selanjutnya prasasti Jiu I-V, pemberitaan Tome Pires, dan Pigafetta jelas membantah tuduhan bahwa runtuhnya Majapahit karena serangan si anak durhaka Raden Patah dari Demak. Tuduhan terhadap Giri wajar, karena sebelum Giri membalas serangan Sengguruh terlebih dahulu meruntuhkan Kediri yang masih Hindu pada tahun 1527.

Adapun tuduhan terhadap Sunan Bonang, boleh jadi tokoh ini yang dianggap berperan mempercepat keruntuhan Kediri, dengan menutup Tuban sebagai pintu gerbang Kediri. Tuduhan itu juga memberikan petunjuk penetrasi Islam ke Kediri pada permulaan abad XVI dari daerah pesisir utara yaitu Tuban dan Drajat memiliki nilai historis<sup>50</sup>. Apabila bukti-bukti sejarah tidak menunjukkan adanya aksi kekerasan perihal hubungan Majapahit-Demak, mengapa tuduhan itu di kemudian hari muncul? Untuk memahami masalah itu dapat dijelaskan dengan pendekatan antropologi, khususnya yang berhubungan dengan masalah akulturasi budaya. Di muka telah dukemukakan bahwa dalam proses islamisasi juga terjadi akulturasi budaya. Dalam hal ini unsur budaya Islam sebagai budaya baru, mendatangi unsur budaya lama: Indonesia asli, Hindu dan Buda. Dalam proses tersebut, meskipun sebagian besar orang Jawa telah menerima Islam sebagai budayanya yang baru, namun minoritas intelektual pendukung budaya lama, yaitu kelompok elite dan berstatus mapan ada yang menolak. Perhatikan dialog sebagai berikut.

---

<sup>48</sup>M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gama Press, 1991), halaman 5-6.

<sup>49</sup>W.P. Groenveldt, *Historical Notes on Indonesia and Malaja compiled from Chinese Sources* (Djakarta: Bhratara, 1960), halaman 46-50.

<sup>50</sup>Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Kuntowijoyo (UGM), yang tatkala meneliti Sejarah Sunan Drajat (1998) telah memberikan sumbangan pemikiran dalam masalah ini.

Purbawijaya (beskal-sebangsa jaksa):

*“Kula punika tiyang asli Kedhiri, turun saking Pangeran Kutawengan. Kula pitaken-taken kawontenan Setanagedhong, Kediri, boten wonten ingkang waged mastan terang asalipun ing ngajeng. Sinten ingkang gadhahi jasa ? kang saweneh mestani jasanipun para wali. Terang kula Setanagedhong punika tilas dalemipun Raden Gunungsari, saweg sampeyan kandhani punika.*

Butalotjaja mangsuli:

*“...Para wali boten wonten ngantos wonten kang ngambah ing kitha Kediri ngriki, sabab kula tjegat wonten dhusun Singkal, kula wangsulaken. Sabab krijapan, djahil, sija. Sareng Sunan Benag badhe dhateng Kedhiri, dumugi tanah Kertasana kang iring kidul, salere Kedhiri dipun lih dhateng wetanipun Kertasana. Mawi ngesotaken tijang sarta namaning tanah sakidul Kertasana, salering Kedhiri dipun wastani Kitha Gedhah. Sarta tijang ngriku dipun sotaken ingkang medal djaler, sampun rabi-rabi jen dereng dados djaka sepuh. Inggang medal estri, sampun laki jen dereng dados prawan sepuh. Sarta dipun sotakening tanah Kitha Gedhah ngriku awis toja”.*

Mengenai pemindahan aliran sungai Brantas dari sebelah barat ke timur Kertasana, penulis masih dapat melacak sumber *overlevering* (ceritera dari mulut ke mulut). Ceritera itu menerangkan bahwa oleh masyarakat di sekitar Kediri-Warujayeng-Kertasana, sungai Brantas adalah bikinan Mpu Bharada untuk membagi Kerajaan Kahuripan menjadi Janggala dan Kediri. Berdasarkan palung-palung, rawa yang tersisa, bahwa sungai Brantas dahulunya alirannya berada di sebelah barat Kertasana, dari Singkal, Demangan, Ujung kemudian bersatu dengan kali Widas. Tatkala sunan Bonang mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari warga setempat, wali itu karena kemarahannya, memindahkan aliran Brantas ke sebelah timur Kertasana. Caranya Sunan Bonang menutup alirannya dengan *singkal* (kepala bajak), dan menggariskan *cis*-belian ke arah Kertasana hingga menjadi aliran sungai Brantas yang sekarang. Sesudah itu Sunan

Bonang juga mengutuk para remaja setempat menjadi perjaka dan perawan tua.

Boleh jadi bila melihat kondisi sekarang tidak mustahil, bahwa aliran Brantas dahulunya ada yang bercabang ke sebelah barat Kertasana. Karena dari Singkal-Warujayeng-Demangan-Ngujung-Lengkong secara geografis memberikan petunjuk itu.

Untuk mengecek kebenaran legenda Sunan Bonang memindah aliran Brantas dapat dilakukan *cross corroboration*, dan pendekatan ekologis.

Pertama *cross corroboration* (dicek) dengan sumber berupa laporan ekspedisi VOC ke Kediri tahun 1678. Dalam gambar yang tertera di sebelah barat Kertasana ada sebuah sungai, tetapi mata airnya berasal dari gunung Klotok dan Wilis. Sungai itu di daerah Kertasana dan sekitarnya disebut sebagai Kali Kedungsoka. Dalam peta itu desa Singkal memang ada. Desa itu selain digunakan sebagai tempat berkemah Amangkurat II juga sebagai salah satu *batterij* VOC<sup>51</sup>. Jadi pada tahun 1678 menurut pemetaan VOC, aliran di sebelah barat Kertasana itu bukan dari Brantas.

Kedua, Pendekatan ekologi. Boleh jadi aliran sungai itu memang ada. Mungkin pada saat serdadu VOC melakukan pemetaan (1678), mereka tidak melihatnya, hingga tidak tergambar. Pada tahun 1830 daerah Kediri (sebagai bagian *mancanagara wetan*) diserahkan kepada Hindia Belanda. Pada tahun 1832, saat akan dilaksanakan Tanam Paksa di Kediri para pejabat dikerahkan untuk mengumpulkan data ke wilayahan guna kepentingan itu. Salah seorang pejabat itu ialah Kiai Purbawijaya, berasal dari Kediri. Sebagaimana informasi diterima dari kelompok masyarakat yang dipersonifikasikan sebagai *Butalotjaja*. Untuk kepentingan pengembangan Tanam Paksa, Penjinakan Kali Brantas, dilakukan dengan mengelola alirannya, yaitu menutup anak-anak sungai dengan cara membuat tangkis untuk memperbaiki alirannya. Salah satu anak sungai yang mengalir ke

---

<sup>51</sup>J.K.J. de Jonge, *Opkomst ...*, op.cit., 254.

sebelah barat Kertasana tadi. Pemerintah selanjutnya menggantinya dengan sistem irigasi yang teratur. Waktu pembuatan tangkis tersebut memakan waktu bertahun-tahun bahkan beberapa generasi, hingga tatkala *De Geschied* dibukukan (1873) aliran sungai itu telah jadi, sisa-sisa palung dan *kedhungnya* masih dapat diamati. Akan tetapi generasinya telah berganti. Selanjutnya pemindahan itu kemudian melahirkan legenda dalam berbagai versi. Diantaranya adalah versi yang dikemukakan oleh kelompok yang dilambangkan sebagai *Butalotjaja*. Kelompok ini tampaknya tidak dapat menerima perubahan, akan tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan melakukan perlawanan secara fisik atau perlawanan terbuka. Oleh karenanya penolakan mereka lancarkan dalam bentuk perlawanan intelektual lewat tulisan yang bernada menyerang, menjelek-jelekan tokoh pambaharu sebagai personifikasi atau representasi kelompok pambaharu<sup>52</sup>. Dalam hal ini Sunan Bonang, Raden Patah, dan Sunan Giri. Selanjutnya sebagai kompensasi mereka mengagung-agungkan agama dan budaya lama yang nyaris tenggelam itu<sup>53</sup>. Symbolisme dalam bentuk personifikasi tokoh-tokoh juga terdapat dalam berbagai ceritera, seperti: *Sangkuriang*, *Watugunung-Dewi Shinta* (mengawini ibunya sendiri), Malinkundang (larangan durhaka kepada ibu), *Syeh Siti Jenar* (ajaran sesat), Sabdo Palon-Nayagenggong (sisa kekuatan Hindu Belanda), dan lain-lain. Contoh tulisan lain sebagai manifestasi dari perlawanan terhadap meluasnya Islam di Jawa tercermin dalam *Serat Darmagandhul dan Serat Gatholoco*<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup>Koentjaraningrat, *Tokoh-tokoh Antropologi* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1964), halaman 92-99.

<sup>53</sup>Ibid. Misalnya dalam *Babad Daha-Kediri* dalam bentuk pujaan terhadap Wisnu yang menitis kepada Jayabhaya.

<sup>54</sup>Ki Kalamwadi, *serat Darmogandhul* (Semarang: Effar & Dahara Prize, 1991). Lihat: Prawirataruna, *Falsafah Gatholoco* (Semarang: Dahara Prize, 1990).

## 5.2.2. Munculnya Kembali Pemitosan Jayabhaya dalam Konteks Ceritera Panji dan Sejarah Lokal

Munculnya mitos Jayabhaya, sesungguhnya secara embrional telah dimulai oleh Pangeran Diponegoro atau Panembahan Herucakra, putera tertua Pakubawana I dari selir, yang pada tahun 1718-1722 atas seizing ayahandanya melancarkan peperangan melawan VOC (juga Mataram) dengan basis di Jawa Timur<sup>55</sup>. Selanjutnya dalam hubungannya dengan ceritera Panji dan sejarah lokal, selain disebabkan oleh faktor-faktor proses islamisasi, seperti telah dipaparkan, juga terjadinya faksonialisasi kekuatan lokal di tengah-tengah makin kuatnya penetrasi kekuatan Belanda di Kediri. Pada abad XIV Ibn Khaldun telah mengingatkan bahwa wilayah pinggiran biasanya digunakan sebagai tempat pelarian dan pengungsian. Selanjutnya dari daerah itu para oposan melancarkan serangan ke pusat untuk merebut kekuasaan. Selama kekuasaan di pusat kokoh, wilayah pinggiran (*periphery*) terkontrol sepenuhnya. Sebaliknya tatkala kekuasaan lemah daerah pinggiran merupakan pangkalan para pelawan<sup>56</sup>. Berbagai peristiwa sejarah di Kediri, sepanjang 1500-an sampai 1700-an telah membuktikan hal itu. Ketiga fenomena itu berjalan beriringan dan juga saling memperkuat. Misalnya terjadinya krisis pada proses islamisasi, sebagai akibat gejala berkepanjangan baik di pusat kekuasaan maupun yang melanda Kediri, hingga di daerah itu tidak ada salah satu kekuatan mampu meraih legitimasi dan hegemoni. Sebaliknya setelah Kediri sepenuhnya berada di bawah Hindia Belanda, justru proses perubahan tersebut makin mantap dan penetrasi Belanda makin intensif.

Dalam konteks ini perlu diinjau bagaimana pihak luar, dalam hal ini Belanda melakukan interaksi dengan pihak Indonesia. Pada

---

<sup>55</sup>J. Brandes, *lets over een ouderen Dipanagara in verband met een prototype van de voorspellingen van Jayabaya*" (Weltevreden, 18880, halaman 369-390).

<sup>56</sup>Charles Issawi, *Filsafat Islam Tentang Sedjarah pilihan dari Krangan Ibn Khaldun dari Tunis (1332-1406)*, halaman 170-175.

tahap *pertama*, sejak abad XVII untuk melakukan perdagangan Belanda harus lewat perantaraan raja. Pada abad selanjutnya XVIII, kekuasaan raja-raja di Nusantara, khususnya di Jawa telah tumbang. Pada tahap *kedua*, periode ini Belanda memanfaatkan jasa bupati sebagai perantara. Pada abad XIX, yaitu tahap *ketiga*, karena makin intensifnya penetrasi Belanda dalam bidang ekonomi hubungan itu telah merambah ke tingkat desa dengan perantaraan Kepala Desa. Akhirnya pada peralihan abad XIX-XX, yaitu tahap *keempat*, pengaruh Barat itu telah sampai pada lapisan paling bawah, yaitu: rakyat atau masyarakat<sup>57</sup>. Burger secara eksplisit menerangkan bahwa penetrasi menjadi sangat intens dengan dilaksanakannya *Cultuur Stelsel* (Tanam Paksa)<sup>58</sup>.

Telah dipaparkan bahwa salah satu bagian dari *isi Geschied van Het Rijk Kediri* adalah hujatan Butalocaya terhadap Sunan Bonang dianggap bertingkah *kriyapan*, (baca kurang ajar) karena telah memindahkan aliran Brantas dari sebelah barat ke timur kota Kertasana. Dari waktu penulisannya jelas bahwa *Geschied* data-datanya mulai diambil tahun 1832 dan dibukukan pada 1873. Periode tersebut bertepatan dengan pelaksanaan *tanam paksa*. Jadi tidak sukar untuk menduga bahwa sebelum Sungai Brantas alirannya dimanfaatkan secara intensif untuk kepentingan pertanian, khususnya tanam paksa dan kemudian juga perkebunan gula yang tersebar luas di sepanjang alirannya, betapa luasnya sungai itu. Intensifikasi aliran sungai Brantas dengan membuat tangkis jelas sangat membatasi alirannya. Boleh jadi anak sungai yang mengelilingi kota Kertasana kemudian mati atau kering, hingga merugikan penduduk setempat. Proses pembuatan tangkis yang mampu mengendalikan aliran Brantas tersebut berlangsung puluhan tahun, dan tidak mustahil meliputi beberapa generasi. Bagi orang awam yang tidak menyaksikan secara

---

<sup>57</sup>D.H. Burger, "Structuurveranderingen in de Javanese samenleving" dalam *Indonesia* 2-3 ('s-Gravenhage: W.van Hoeve, 1948). Telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia "*Perubahan-perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*" (Jakarta: Bhrtara, 1983), halaman 11.

<sup>58</sup>*Ibid.*

kronologis “pengalihan aliran Brantas” itu merupakan perbuatan besar, yang hanya bisa dilakukan dengan kekuatan gaib dan dianggap merugikan masyarakat setempat yang tidak suka kepada Islam. Di lain pihak masyarakat setempat yang diwakili atau disimbolkan sebagai *jim Butalotjaja* secara kultural juga belum siap terhadap perubahan ekologi yang telah terjadi. Wajar bila hujatan itu kemudian dicarikan kambing hitam orang yang tidak disukai sebagai lambang makin mantapnya Islam di wilayah Kediri.

Mengapa Sunan Bonang menjadi kambing hitam? Tudingan terhadap Sunan Bonang sebagai kambing hitam bukan tanpa dasar, dan penudingnya juga bukan sembarang orang yang tidak mengenal sastra Jawa. Sebaliknya figur *Butalotjaja* memiliki intelektualitas tinggi serta mengikuti karya-karya tulis, khususnya karya sufi termasuk diantaranya dari Sunan Bonang yang cukup banyak. Katakanlah bahwa Sunan Bonanglah sebenarnya dianggap sebagai aktor intelektual proses islamisasi Jawa. Anggapan itu berdasarkan kenyataan bahwa karya-karya Sunan Bonang yang sangat dikenal dalam kesusasteraan seperti *Suluk Wujil*, *Suluk Sukarsa*, dan *het Boek van Bonang* merupakan karya yang mampu mengintegrasikan antara sufi Islam dan faham mistik dari zaman Hindu-Budha<sup>59</sup>. Apalagi Sunan Bonang sebagai guru Sunan Kalijaga juga sebagai *patron* dua tokoh yang dikenal luas di kalangan Kejawan, khususnya dalam hal pusaka: *Mpu Supa dan Mpu Sura*<sup>60</sup>. Boleh jadi *Bulotjaja* adalah symbol figure yang mewakili kelompok yang belum dapat menerima atau bahkan sebagai status quo yang bersikap anti perubahan, baik karena proses islamisasi maupun karena pengaruh budaya barat, khususnya di bidang sosial ekonomi. Protes senada, tetapi dalam ekspresi berbeda juga tercermin pada ceritera rakyat *Pak Sakerah*,

---

<sup>59</sup>Prof. Dr. R.M. Ng. Poerbatjaraka, *Kapustakan Djawi* (Djakarta: Djambatan, 1952), halaman 91-100. Lihat: G.W.J. Drewes, *The Admonition of Sheh Barri* (The Hague: Martinus Nijhoff, 19690).

<sup>60</sup>Karya-karyanya antara lain yang termasyur adalah pusaka (keris) *Nagasasra*, *Sabuk Inten dan Sangkelat*. Ketiganya sangat terkenal dalam mistily: Jawa.

*Syarif Tambak Oso, dan Pendekar Gunung Gangsir*. Ketiga peristiwa itu juga terjadi pada waktu yang tidak jauh berbeda<sup>61</sup>. Di Jawa Timur perlawanan lainnya yang lebih keras ditunjukkan oleh H. Kasan Mukmin dari Gedangan dan Kiai Dermajaya di Bendungan, Nganjuk. Perbedaannya bila perlawanan Butalocaya bersifat anti Islam, sebaliknya perlawanan Kasan Mukmin dan Dermajaya didasari inspirasi ajaran Islam<sup>62</sup>. Di atas telah dikemukakan bahwa dalam perubahan yang terjadi pada abad XIX ada sekelompok masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan atau pembaharuan dan mereka tidak mampu membendung atau menghentikannya. Kondisi pancaroba itu disebutnya sebagai zaman kekacauan atau zaman krisis. Mereka hanya dapat menghadapi perubahan itu dengan hati tidak puas dan mendongkol. Dalam keadaan semacam itu tidak sedikit diantara mereka yang kemudian mencari kepuasan, dengan cara menarik diri dari kehidupan masyarakat untuk hidup dalam dunia mereka sendiri. Dalam dunia yang terasing itu mereka mengenang (baca: mengkhayal) kembali zaman bahagia yang lampau. Itulah embrio (benih) bagi suatu gejala masyarakat yang timbul dalam zaman kekacauan sebagai akibat proses akulturasi. Proses tersebut selain melahirkan kelompok-kelompok yang tidak puas atau bahkan menentang perubahan, juga tidak jarang melahirkan gerakan kebatinan dan gerakan *messianistic*: Ratu Adil.

Gerakan Ratu Adil memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- (a) Keagamaan, karena penyebarannya menganggap dirinya sebagai utusan dewa/Tuhan, dan berpusat dalam upacara keagamaan.
- (b) Psikologis, karena penyelenggaraan upacaranya ditujukan untuk mengatasi zaman kacau, dengan cara memusatkan kekuasaan fantasi (batin).

---

<sup>61</sup>Peristiwa itu ditandai dengan dimulainya perusahaan gula secara luas, terutama di delta Brantas (*Afdeling* Pasuruan), pembuatan jalan raya dan jalan kereta api Surabaya-Malang (1870-an), dan makin intensifnya pengawasan pantai oleh pihak Belanda.

<sup>62</sup>Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rural Java* (London: Oxford university Press/PT Indira, 1973).

- (c) Ratu Adil, yaitu tokoh yang ditunggu-tunggu untuk membereskan kondisi pada zaman kacau, kemudian membawa masyarakat ke zaman bahagia.
- (d) Keaslian budaya. Tokoh Ratu Adil yang diimpikan selain membawa kebahagiaan, dikacaukan oleh proses pembaharuan sebagai akibat adanya akulturasi budaya<sup>63</sup>.

Sebagai penutup patut dikemukakan bahwa Ratu Adil, ialah tokoh dalam fantasi yang dianggap sebagai penyelamat tatkala masyarakat mengalami kekacauan. Misalnya di Jawa Pangeran Dipanagara (Pr. Jawa: 1825-1830), Cokroaminoto (SI; 1912-1934), dan juga Bung Karno (1960-1965) oleh para pengikutnya dianggap sebagai Ratu Adil yang didambakan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa gerakan ini memiliki pola tidak jauh berbeda dengan mitos *avatara Wisnu*. Dalam konteks ini wajar bila kemudian Jayabaya yang dipercaya sebagai *titisan Wisnu* diusung oleh tokoh Butalotjaja.

### Daftar Pustaka

Aminuddin Kasdi, *Aspek-aspek Gerakan Sosial di Jawa Timur Dalam Perspektif Sejarah*, Surabaya Panitia Seminar HMJ Sejarah FPIPS-IKIP Surabaya, 1993.

\_\_\_\_\_, "Sunan Giri", dalam *Jejak Kanjeng Sunan*, Surabaya, Yayasan Festival Walisongo, 1999.

\_\_\_\_\_, *Babad Gresik: Tinjauan Historiografis Dalam Studi Sejarah*, Surabaya, University Press IKIP Surabaya, 1997.

Arsip Nasional RI (Surakarta) No.303, *Register van de Soesoehoenangs Pacoeboeana opgegeven door den keizerlijkn Secretaris Soeriogoena tot Cartasoura den 20 October 1733*.

---

<sup>63</sup>Koentjaraningrat, op.cit. halaman 97-98.

- \_\_\_\_\_, No. 87 *Lijst der tans en wesen zijnden kinderen, broeders en zuster, mitsgaders d'Afkomst vvan den Soesoehoenang Pakoeboewana de Hoofd regenten en mindere Bediense, dewelke haar aan & Hoff en aan de Straden, bevinden zoo mede aan de Binnenlanden als (1737,1744)*
- Bausani, A., *L. Indonesia Nella Relazione di Viaggio di Antonio Pigafetta*, Roma, Istituto Italiano per il Sud-Est Asiatico, 1963. "Register op de Proza-Omzetting van de Babad Tanah Djawi", dalam *Verhandelingen van het Bataviaasch genotschap van Kunsten en Wetenschappen*, Batavia –Albrecht & Co, /The Hague-M Nijhoff.
- \_\_\_\_\_, *Iets Over een ouderen Dipanagara in verband met een prototype van de voorspelingen van Jayabaya*, Weltevreden, 1888.
- \_\_\_\_\_, *Oud-Javaansche Oorkonden Nagelaten Transcripties*, Batavia-Albrecht & Co., / 's-Hague-M. Nijhoff, 1913.
- \_\_\_\_\_, *Pararaton (ken Arok) het Boek der Koningen van Tumapel en van Majapahit*, 's-Gravenhage-Martinus Nijhoff/Batavia-Albrecht & Co., 1920.
- Broek, P.W. Palmer van, *De Geschied van het Rijk Kediri*, Leiden, E.J. De Brill, 1902.
- Burger, D.H., *Perubahan-perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa Jakarta*, Bhratara, 1983.
- Carey, Peter, "Waiting for the Just King: The Agrarian World of South-Central Java from Giyandi (1755) to the Java War (1825-1830)", *Modern Asian Studies* Vol.20 (1986), Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
- Cortessau, Armando, *The Suma Oriental an Accaunt of The East From The Red Sea to Japan Written in Malacca and India in 1514-1515* (Reproduced by Pemiission of the Hakluyt

Society, from the edition originally published by the Society in 1944 Karus Reprint Limited, Nedrland/Lechstentein, 1967.

Damais, Louis-Charles, *Etudes d'Epigraphie Indonesienne*, Paris, Ecole Frencaise d'Extreme Orient, 1990.

Edi Sedyawati, *Epigrafi Ajakan untuk Tekun dan Cermat*, Makalah Seminar Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia di Malang, 2001.

Goens,Rijklofs van, *Javaense Reyse, De bezoeken van een VOC gezant aan het hof van Mataram 1684-1654*, Amsterdam, Terra Incognita, 1995.

Graff,H.J. de, *De Expeditie van Anthonio Hurdt Raad van Indie als Admiraal en Superintendent naar de Binnenlanden van Java Sept-Dec. 1678*, 's-Gravenhage, Martinus, Nijhoff, 1971.

\_\_\_\_\_, "Kediri en het geslacht Katawengan van 1500 tot 1700", BKI No.133,1977

\_\_\_\_\_, *Awal Kebangkitan Mataram,: Masa Pemerintahan Senapati*, Grafiiti Press, Jakarta, 1985.

\_\_\_\_\_, *Het Kadjoran vraagstuk (Masalah Kadjoran)*, Yogyakarta, balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional, 1987/1988.

\_\_\_\_\_, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa;Tinjauan Sejarah politik Abad XV-XVI* Jakarta, Grafiti Press, -KITLV,2001

Issawi, Charles, *Filsafat Islam tentang Sejarah; Pilihan dari Karangan Ibn Khaldun dari Tunis (1332-1406)*, Jakarta, Tinta Mas, 1962.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Anthropologi Dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*. Djakarta, Penerbitan Universitas, 1958.

\_\_\_\_\_, *Tokoh-tokoh Antropologi*, Djakarta, PT Pembangunan, 1964.

- Krom, N.J., *Zaman Hindu*, Djakarta, Pembangunan, 1954.
- Muhammad Yamin, *Tatanegara Majapahit Paarwa H*, Djakarta, Jajasan Prapaantja, 1962.
- Pigeaud, Th. G. Th., *Java in The 14<sup>th</sup>. Century, A study in Cultural History*, The Hague, Martinus-Nijhoff, 1960
- Pitono, R., *Sedjarah Indonesia Lama*, Malang, Lebbit IKIP Malang, 1961.
- Prijoetomo, *Nawaruci, Inleiding, Middel-Javaansch metrum. Acadeish Proefschrift aan de Rijks-Universiteit te Utrecht*, 1934, Groningen, J.B. Wolters, 1934.
- Raffles, Th. S., *The History of Java*. Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1978.
- Ras, J.J., *Babad Tanah Djawi; de prozaversie van Ng. Kertapradja*, Dordrecht- Holland/Providence-USA, 1978.
- Rommelink, W.G.J., *Emperor Pakubuwana II, Priyayi & Company and The Chinese War*, Proofshrift aan de Rijkuniversiteit te Leiden, 1990.
- Ricklefs, M.C., *Modern Javanese Historical Tradititon, A Study of an Ooriginal Kartasura Chronics and Related Materials*, London, School of Oriental and African Studies University of London, 1978.
- Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural of Java*, London, Oxford University Press, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Masyarakat Kuno & Kelompok-kelompok Sosial*, Jakarta, Bhartara Karya Akasara, 1977.
- Sithin, MS koleksi Rijksuniversiteit-Leiden, No. OR. 3121 (7)
- Slametmulyana, *Nagarakrtagama dan Tafsir Sejarahnya*, Jakarta, Bhartara, 1974.

- 
- \_\_\_\_\_, *Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit*, Jakarta, Idayu Press, 1983.
- Soejono, R.P., *Epigrafi dan Arkeologi di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia di Malang, 2001.
- Stapel, F.W., *Corpus Diplomaticum Neerlandico Indicum Vijfde Deel 1726-1752*.
- Teeuw, A., *Register op de tekst en vertaling van Babad Tanah Djawi*, (tanpa nama penerbit, tanpa tahun).
- Tim Peneliti Sejarah Sunan Drajat, *Sejarah Sunan Drajat Dalam Jaringan Masuknya Islam di Nusantara*, Surabaya, Tim Peneliti Sejarah Sunan Drajat.
- Tim Peneliti Sejarah Sunan Drajat, *Sejarah Sunan Drajat Dalam Jaringan Masuknya Islam di Nusantara*, Surabaya, Tim Peneliti Sejarah Sunan Drajat.
- Valentijn, Francois, *Oud en Nieuw Oost-Indien*, Amsterdam, wed J.C. van Kesteren & Zoon, 1862.
- Veth, P.J., *Java, Geografische, Ethnologische, Historisch I-II*, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1912.
- Winarsih Partaningrat Arifin, *Babad Blambangan*, Yogyakarta, Ecole Francaise d'Extreme-Orient, 1995.

# LORONG WAKTU DI ALIRAN SUNGAI

Oleh: Akhudiat

## 1. Lokasi: Kali Surabaya dan Kalimas

Situs-situs dan toponim-toponim sepanjang satu sungai dengan dua nama itu berurutan letaknya, dari hulu ke hilir, dari Cangki/Canggu (Kabupaten Mojokerto), Klagen (Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo), Wonokromo sampai Ujung, Tanjung Perak, di Surabaya. Tetapi tahun-tahun penanda situs/toponim itu tidak berurutan secara kronologis, maka “wisata air” atau *ngintir* (menghilir) di aliran sungai ini mirip keluar-masuk tabel waktu sejarah atau maju-mundur bagai kisah anakronistik, yang barangkali menyarankan suatu cara pandang impresionis. Ini yang menarik, sebab itu disebut “Lorong Waktu di Aliran Sungai”—menyeberang Brantas, dan sepanjang Kali Surabaya serta Kalimas (satu a) atau *Kali Maas* (dua a).

“Kali Mas” berasosiasi dengan “Tanjung Perak”. Tetapi “*Kali Maas*” mirip nama pabrik gula di Besuki (Kabupaten Situbondo), “*de Maas*” (Belanda) = Sungai Maas, dibawa oleh Belanda dari toponim di Nederland. Seperti halnya perkebunan Inggris dan setasiun kereta api, antara Kalibaru-Banyuwangi, bernama Glenmore, ternyata *Glenmore* dari toponim di Skotlandia, Inggris Raya. (Inggris): *Glen* = lembah sempit di antara pegunungan atau perbukitan; *more* = luas, lebar, atau lebih.

## 2. Toponim Tepian Kanan Sungai

Bandar di Sepanjang.

Jambangan: bandar (*Ferry Charter*, 1358) = (Jawa) *jembangan*, *pengaron* besar, pot besar.

Dadungan: desa di Wonokromo (peta Surabaya, 1879), *dadung* = (J) tali besar untuk mengikat sapi.

Karang Puh (Kepuh): desa di Wonokromo (p.1879). *Kepuh* = (J) nama pohon dan buahnya, untuk obat mimisan, bijinya untuk obat batuk (*Sterculia foetida*).

Wonokromo: bandar (FC, 1358) = pantai Surabaya (?). Pada abad ke-16/17 tempat kedudukan Adipati Surabaya, keturunan Sunan Ampel ke-5. (Sunnyoto 2004:137).

*Pangeran Wanakrama, dalem ing dhusun Wanakrama ugi* (Arifin 1995:293. “Sejarah Regent Soerabaia”, Br474).

*Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), perusahaan minyak letaknya di tepi Kanal Wonokromo, Jagir, menghasilkan minyak, paraffin, aspal, dan lain-lain produk (p.1900; Vries 1929). Kini kantor pemasaran Pertamina.

Bersamaan masanya di Wonocolo, di selatan Wonokromo, berdiri pabrik kulit *NV Exploitatie Maatschappij & Lederfabriek “Wonotjolo”*, pengelolanya *NV Maintz Productenhandel* (Vries 1929:264), air untuk penyamakan kulit dialirkan dari Kali Surabaya lewat pintu air Gunungsari. Kini lahan parkir gedung Expo Jawa Timur, Jalan Jendral A. Yani, Surabaya.

“Surabaya”: baru muncul tahun 1358 (prasasti Trowulan oleh Hayam Wuruk dan Kitab Negarakertagama-Prapanca, 1365), sejajar dengan Tuban, Gresik, dan Majapahit.

“...ring jangala sabha narpati ring surabhaya mamulus mare buwun” (dari Jenggala ke laut raja singgah di Surabaya terus ke Buwun). (Pupuh 17, bait 5, larik 4)

Pacekan atau *Pa-tsieh-kan* dalam kronik Cina dinasti Yuan, 1293. Letaknya persis di antara percabangan Kalimas dan Kanal Wonokromo, kira-kira sekarang di tempat pengolahan air minum PDAM Surabaya. Di Pacekan inilah pasukan Raden Wijaya berhasil mengusir pasukan Tartar, pada Ahad, 31 Mei 1293: dipilih menjadi “hari kelahiran” kota Surabaya (p.1879). Bukan tanggal 11 September 1294, saat penganugerahan tanda jasa kepada kepala desa

dan rakyat Desa Kudadu atas jasa mereka menyelamatkan Raden Wijaya. Atau tanggal 7 Juli 1358, tanggal pada prasasti Trowulan (lihat “Surabaya” di atas), yang pertama kalinya muncul nama Surabaya selaku *naditira pradega* atau pelabuhan pelayanan ke pulau-pulau Nusantara (Suparto Brata, 2006).

Pintu air Jagir dibangun pada 1916. Memasuki 1932, pintu air ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai fungsi kontrol bajir di wilayah selatan kota juga sebagai perbaikan akses di wilayah Darmo dan kawasan industri di Ngagel. Instalasi air minum dibangun pada 1919

Mranggen; *mranggi* = (J) *wrongko* = sarung keris, tombak, dan lain sebagainya. Desa tukang/perajin *wrongko* (p.1900).

Kenayang = (J) wayang, layangan, gambar. Tempat pertunjukan atau pembuatan “kenayang” (p.1900).

Bagong Sabrangan (p.1900). *Bagong*=(J) aksesoris untuk gelang atau jam. Kawasan perajin “bagong” dan tempat penyeberangan perahu tambang.

Keradenan: domisili para raden, bangsawan kraton, di seberang baratnya adalah Keputran=domisili para putra kraton (p.1900).

Demangan. Situs makam Ki Demang, di Gubeng Jepit, dianggap sebagai cikal-bakal/pembabat alas hunian Gubeng (p.1900). *Gubeng* dari *gobang* = (J) 2,5 sen, harga setoran padi (wawancara dengan novelis Suparta Brata, 2000). *Gubeng* dari *gubengan* = (J) kain kepala atau tempat membuat *udheng* (Purwono, 2006:19).

Gubeng Pojok: di pojokan timur laut Kalimas (p.1825).

Taroan = (J) pepohonan; desa utara Gubeng Pojok (p.1825).

Gomoin = Gomohen = Ondomohen; dari *gemoh* = (J) tempat pekerja kerajinan tangan (p.1825). Kini Jalan Walikota Mustajab.

Bendungan (selatan): terletak antara Gomoin dan Gemplag = Ngemplak (p.1825).

Hotel Ngemplak: didirikan pada 1923 (Vries, 1929:273), pernah dipakai untuk pengurusan STNK/pajak kendaraan pada 1980-an; kini kosong tak terpakai, rencananya untuk hotel.

Mulai dari Wonokromo sampai Gembong, sepanjang pinggiran timur Kalimas dan Kali Gembong/Pegirikan, banyak terdapat pabrik gula dan arak: Dadungan, Ngagel, Bagong, Gubeng, Ketapang/Ketabang, Pecindilan, dan satu pabrik gas di Gembong (p.1879): *Nederland Indische Gas Maatschappij* (Vries, 1929:224), kini jadi ITC-Megagrosir-Carrefour.

Bendungan (utara): antara Undaan dan Pengopohan.

Pengopohan, *opoh* = (J) *opok* = basah, kawasan basah, tanah lempung untuk bahan pembuatan tembikar, bata, genteng, *ampo* (lempung tipis dikeringkan untuk dimakan sebagai jamu terutama bagi wanita hamil), dan lain sebagainya.

Titisan: (J) = keturunan; mungkin ada hubungannya dengan keluarga kraton di seberang baratnya. Titisan terletak antara Lawang Seketeng (gerbang kraton) dan Pejagalan (p.1825).

“Pulau”. Bendungan (utara), Undaan, Klimbangan, Kalianyar, Pengampon, Kebon Urang, Pejagalan, Titisan, Lawang Seketeng, Pandean, Peneleh, Plampitam, Pengopohan: dikelilingi Kalimas, Kali Pegirikan, dan kali/kanal/terusan dari Sulung ke Gembong yang memisahkan Kebon Urang dengan Wonokusumo (p.1825); kanal itu jadi rel kereta api (p.1900).

Makam Peneleh adalah *Europeesch Kerkhof* = makam Eropa (sebelum Kembang Kuning), telah dipakai sebagai kuburan sejak kira-kira 1680-an (wawancara dengan Dhukut, penulis, 2006).

Kwijilan: terletak antara Wonokusumo dan Bibis (p.1825). Merujuk kisah von Faber tentang Surabaya, terbit pada 1953: ...Antara tempat pemukiman kasta terendah dan para punggawa telah

dibuat bandar kecil yang berada di dalam kota yakni Semut (sebenarnya *Simut* = perahu barang), yang bisa berhubungan dengan Butulan (terusan sempit) lewat Kalimas. Kemudian seputar inti ini terdapat sepuluh desa yang mulai dari bartat daya adalah Tambak Bayan, Butulan, Sulung, Kawijilan, Wonokusumo, Gembong, Pacendolan (kini: Pecindilan), Kalisari, Palimbungan (kini: Klimbangan), dan Pejagalan. Desa-desa ini dihuni para narapidana dan dalam keadaan siap siaga serta bertanggung jawab atas keamanan di situ, "seolah-olah sebagai kulit buah keras yang melindungi isi buah yang lunak." (Purnomo, 1984:21). *Wijil* = (J) biji, keturunan, pintu, gerbang, keluar.

Bibis (utara, p.1825): antara Kwijilan dan Pecinan (*Chinesche kamp*). *Bibis* = (J) sejenis serangga atau lipas air mirip kecoak, *Dendrocyna javanica*.

*Chinesche kamp* (p.1866): dari *Handel straat* (Jalan Kembang Jepun) sampai *Chinesche buiten weg* (Jalan Sambongan) dan pasarnya disebut Pasar Bong. Sambongan dari *San-Bong-an* (kampung kediaman tiga marga Bong). Menurut kronik Cina, Masjid Ampel Denta didirikan oleh seorang asal Shi Fun An (Pnom-penh) bernama Bong Swi Hoo, cucu Bong Tak Keng. Bong Swi Hoo bukanlah Sunan Ampel meski asalnya dari Campa (Sunnyoto, 2004:68). Makam keluarga besar Sambongan di Jalan Arjuna.

*Roodebrug* (Jembatan Merah, atau Buk Abang); *brug* (B) = *buk* (J): merujuk legenda Suro lawan Boyo, jembatan itu sebagai peringatan atas perang dahsyat berdarah-darah sampai Kalimas berwarna merah.

*Maleische kamp* (Kampung Melayu atau pribumi) dan *Arab kamp* (Kampung Arab): dari Jalan Kembang Jepun sampai Kampung Sukodono (p.1866) bahkan mungkin sampai pantai.

"Kota Bawah" (*benedenstad*) atau "Surabaya Lama," menjadi kawasan barat dan timur dibelah oleh Kalimas, dan kawasan utara dan selatan oleh *Handelstraat* (Jalan Kembang Jepun), *Roodebrug*

(Jembatan Merah), dan *Heerenstraat* (Jalan Rajawali). Kawasan timur Pecinan, Melayu (pribumi) dan Arab; kawasan barat untuk golongan Eropa (*Europeesche kamp*) (p.1866).

Masjid Ampel, Raden Rahmat bergelar Sunan Ampel dimakamkan di Masjid Ampel. Keberadaan Kerajaan Surabaya yang dirintis oleh Arya Lembu Sura pada akhir abad ke-14 dan dilanjutkan oleh cucu menantunya, Sunan Ampel, pada pertengahan abad ke-15 dan dilanjutkan oleh keturunan Sunan Ampel hingga abad ke-17, terbukti meninggalkan jejak-jejak kebesaran di masa silam (Sunnyoto, 2004:133; Arifin, 1995: 293; 333. Sejarah Regent Surabaya).

Botoputih/Mbah Brondong. Makam Joko Brondong atau Ki Ageng Lanang Dhangiran yang menurunkan para bupati/regent Surabaya (Kasepuhan dan Kanoman) sesudah masa penguasa Mataram atau *Umbul Sawelas* dari Surakarta (Arifin, 1995:293-299). Di Botoputih juga terdapat makam dua bupati Surabaya: Tjokronegoro IV (1863-1901) dan Tjokronegoro V (1901-1912).

Pasar Pabean: dekat bandar Kalimas Timur di kawasan *Maleische kamp* (p.1866).

Kalimas (lama, p.1866): bandar sungai letaknya tidak jauh dari bea cukai (*grote boom*) dan kantor pelabuhan (*havenkantoer*), di kawasan Jembatan Merah. Kini bernama Kampung Baru, tidak jauh dari Pasar Pabean (Purwono 2006:28;185).

Pasar Kecil: di bandar Kalimas Timur di Kampung Baru, *Arab Kamp* (p.1866).

Pekapuran: sebelah utara Petukangan (p.1825).

Kedung Banger: antara Kampung Baru dan Kampung Baruwelas, dekat *Officiers-Kampement* (asrama perwira, p.1866). *Banger* = (J) bau busuk, seperti peceren, got, dan lain sebagainya.

Sukodono: sebelah utara Baruwelas, tampaknya memiliki hubungan historis yang panjang dengan masa kebesaran Kerajaan Surabaya, abad ke-14 dan 15 (Sunnyoto, 2004:132).

*Citadel Prins Hendrik* (Benteng Prins Hendrik): letaknya di sisi utara “Kota Bawah”, benteng ini dibangun tahun 1837 dan terhitung yang paling besar dibandingkan benteng-benteng yang pernah ada sebelumnya, benteng Kalimas (*Fort Kalimas*), benteng Belvedere (*Fort Belvedere*) atau benteng Providentie (*Fort Providentie*) dan benteng Lodewijk (*Fort Ledewijk*) di pulau Menari, lepas pantai Gresik. Benteng Prins Hendrik dirobohkan pada 1930 (Purwono, 2006:163). Kini jadi Kampung/Jalan Benteng.

*Ophaalbrug* (Jembatan Jangkit) atau “Trek Petekan”: dibuat oleh NV Braat & Co. pada 1900, didesain dapat dinaikkan dan diturunkan karena saat itu Kalimas menjadi alur transportasi perahu tradisional yang membawa barang ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun dan Jembatan Merah (*Kompas*, 18 September 2006, halaman A, kolom 6-7). Kini tersisa hanya kerangka besi tua di atas Kalimas, dekat “pasar kaget” sebelah utaranya.

Bandaran (p.1866). Menurut catatan resmi sejarah kota Surabaya bahwa pada tahun 1864 terdapat 288 perempuan yang punya profesi pelacur di bawah pengawasan 18 pemilik rumah bordil. Angka ini meragukan karena dianggap terlalu kecil, dan mungkin hanya menunjukkan banyaknya pekerja seks yang terdaftar secara resmi. Antara lain, para pelacur di sekitar pelabuhan. (Hull, dkk., 1997:7-8). Kampung Bandaran adalah komplek pelacuran resmi pertama di Surabaya. Barangkali di sini munculnya *parikan*: *Tanjung Perak kapale kobong, monggo pinarak kamare kosong* (...silakan mampir kamarnya kosong).

Ujung (lama) di tepian timur Kalimas (p.1900): halte terakhir terujung, dari jalur trem uap Wonokromo Kota-Ujung yang dikelola oleh OJS (*Oost Java Stoomtram Maatschappij*). Dan bisa menyeberang dengan feri *Madoeratram* ke Kamal untuk melanjutkan dengan trem ke jurusan utara (Bangkalan) dan jurusan timur (Kalianget) yang dikelola oleh *Madoera Stoomtram Maatschappij*.

*Fort Kalimas* (Benteng Kalimas) di ujung utara, seakan “pulau kecil” lepas pantai (p.1825).

### 3. Tepian Kiri Sungai

Tetapi diawali dari kawasan kanan sungai karena berangkat dari setasiun Krian dengan trem OJS ke Wonokromo Kota melewati: Pasar Krian-Kemraan-Kemasan-Bendo Munggal-Boharan-Sidorogo-Trosobo-Kemendung-Bringin Wetan – Kletek – Taman – *Pandhuis* - Ngelom-(menyeberangi Kali Surabaya)-Sepanjang/Karangpilang-Mlaten-Kedurus-Gunungsari-Tangsi. Kantor pusat *Oost Java Stoomtram Maatschappij* (kini Jalan Joyoboyo), kira-kira 200 meter dari setasiun Wonokromo Kota.

Wonokromo Kota-Ujung (lama) melewati: Darmo Boulevard (Raya Darmo)-Reinierz Boulevard (Raya Diponegoro)-Pasar Kembang-Ardjoeno Boulevard – Tembok – Pasarturi – Kebonrojo – (menyeberangi Kalimas) – Bibis – Sambongan – Kampung Dukuh – Gili – Sasak – Kampemen (Mas Mansyur) – Bandaran.

Kamal = (Jawa Kawi) pohon asam. *Madoera Stoomtram Maatschappij* mengelola feri Ujung-Kamal dan trem rute Kamal-Bangkalan, pp.; dan Kamal-Kalianget melewati rute: Tebul-Kuanyar Barat – Kuanyar – Karangraba – Batah – Modung – Langkap – Petengteng Ketapang – Kadundung – Bundek – Paeng – Balega – Lumaer – Irengk – Torjun – Sampang – Banyubanger – Camplong – Tanjung – Branta – Pamekasan – Alun – alun – Asemmanis – Larangan - Pasar Kapoh – Candi – Talang – Pakamban – Prenduan – Aengpanas – Kapedi - Kandangan Barat – Aengdakee – Langsar – Saronggi – Nembakor – Sumenep – Panglipur – Pabean – Hotel Sumenep – Marengan - Kalianget (*Jadwal Kereta Jawa & Madura, 1 November 1929-30 April 1930*—Purwono: 2006:157).

*Stoomtram* (trem uap) bisa dilihat di monumen tunggal depan stasiun Pasarturi: Lok B 1239 buatan Inggris tahun 1898.

Canggu atau Cangki, Mojokerto (*Ferry Charter, Majapahit, 1358 M*). Kerajaan Majapahit menyerahkan tugas menjalankan layanan public dalam jasa penyeberangan sungai bersama sekitar 40 desa lainnya yang berada di tepi Sungai Brantas dan Bengawan Solo.

Kini Desa Canggü masuk dalam Kecamatan Jetis, dan di Desa Canggü terdapat dua dusun bernama Pelabuhan dan Tanjung.

Klagen, Tropodo, Krian (prasasti Klagen, 1037), menyebut Ujung Galuh terletak di muara kali sebelah utara Klagen.

Kebraon di Karangpilang: diperkirakan Ujung Galuh di sini, 15 kilometer dari Klagen, dan kurang lebih 40 kilometer dari Canggü/Cangki. Pada abad ke-14 mengalami pergeseran kemudian posisinya menjorok ke laut. Ujung Galuh berada di Kampung Galuhan, Bubutan, Surabaya (1293). Di abad ke-9, Pacekan, Wonokromo, Galuhan, Bukul/Bungkul, Warungturi/Pasarturi, Surabayan, Tunjungan dan Petukangan masih merupakan laut bebas atau rawa pantai; baru di abad ke-13/14 menjadi hunian (prasasti Gunung Butak, 1294) (Kasdi, makalah, 2004). Kebraon dari *ke-prau-an*.

Gunungsari (peta 1879) = gunung indah, asri.

Sawah Maduran (p.1900) = sawah kelompok Madura.

Pikulan (p.1900) = sawah yang dikerjakan/dimiliki satu desa bersama.

Ngasem (p.1900) = *masem*: masih agak mentah; sudah agak usang tapi masih bagus; sawah belum selesai digarap untuk ditanami.

Pasuruhan (p.1900) (1) dari *suruh*, sirih untuk kinang (*Piper betle*): kawasan bekas atau dengan banyak tanaman sirih; (2) Pasuruan, dari *suru*, tetumbuhan sejenis lidah buaya berduri tajam, biasanya untuk pagar. Kawasan bekas/dengan pagar *suru*.

Tegalsari (p.1900) = tegalan indah, asri.

Panjunan (p.1900) = *panjonan*, *palonthen*, *palanyahan*. Tempat pelacuran.

Sepanjang tepian kiri/utara (juga Pulowonokromo Gang Pasir, di tepian selatan) menjadi bandar-bandar untuk perahu khusus pengangkut pasir dari Jombang, Mojokerto, dan Krian. Perahu pasir

bahkan menghilir sampai Kali Pegirikan (Purwono 2006). Perahu pasir menghilang pada 1980-an, digantikan truk, dan penambangan pasir dilarang pada 2000-an.

Halte Wonokromo untuk trem listrik SS (*Staatspoor en Tramwegen*) LYN 1: Wonokromo-Darmo Boulevard – Keputran – Palmenlaan – Simpang – Kaliasin – Tunjungan – Gemblongan – Alun-alun Contong – Pasarbesar – Kebonrojo – Roomschekerkstraat – Willemsplien – Krembangan – westerkade – Bataviaweg – Westerbuitenweg – Tanjung Perak. Balik ke selatan: Tanjung Perak sampai dengan Jembatan Merah-Societetstraat-Pasar Besar-Kramat Gantung-Tunjungan-sampai dengan Wonokromo. LYN 2: Sawahan – Tembok – Prinsesselaan – Embong Malang – Tunjungan – Simpang – Gubeng – Javastraat – Bagong. (Jadwal Kereta Jawa & Madura, 1 November 1929-30 April 1930 – Purwono, 2006: 156; Boedhimoerdono, 2003: 23-24).

Dermorejo (p.1879)

Dermo Lor (p.1900)

Dermo/Darmo mungkin ada hubungannya dengan Ki Dermoyudo, wedana mantri Surabaya (Arifin, 1995:297; 333), kira-kira abad ke-17/18. Jadi bukan nama lurah pertama di kawasan Darmo sebagaimana tutur tradisi lisan lokal.

Banda udara Darmo: tahun 1929 dikembangkan menjadi bandara penerbangan sipil dari rancangan tahun 1922 sebagai bandara militer pertama di Surabaya, dioperasikan secara resmi oleh KNILM (*Koninklijk Nederland Indische Luchtvaart Maatschappij*). Kini menjadi kawasan militer Kodam V Brawijaya (Purwono 2006:174).

Bukul/Bungkul: bandar dalam Ferry Charter 1358. Sunan Bungkul adalah Ki Ageng Bungkul, atau Arya Lembusora, atau tokoh pejabat lain kerajaan Majapahit di Surabaya yang telah beragama Islam yang menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, bertempat tinggal di Ngampeldenta bernama Pangeran Katib dengan gelar Sunan Ngampeldenta dan sebagai Wali yang pertama, kira-kira

tahun 1451 (Syamsudduha, 2004:70;83). Dari sumber lain, Ki Ageng atau Sunan Bungkul aslinya Syeh Mahmudin, namun ada yang mengatakan ia Ki Ageng Supa, pembuat keris untuk raja dan masih keturunan bangsawan Majapahit (Raja Kertawijaya), dan hidup sejaman dengan Sunan Ampel, sekitar abad ke-15 (Indarini, dkk., 2002:20). *Bungkul* (J) = (1) pentol pada teklek/gampar kuno, tongkat, tangkai payung, dan lain sebagainya.; (2) butiran bawang atau kapas.

Dinaya; *naya* = pamong praja, panguasa, gubernemen; kawasan yang dikuasai praja/gubernemen. Sebutan resmi: Dinaya Gubernemen (p.1900).

Magersari, Banjaran, dan Pasar (p.1900) terletak antara Dinoyo Lor dan Keputran. *Magersari* = kawasan penduduk yang minta bertempat tinggal di tanah para bangsawan; Darmo Magersari kini jadi BCA-Darmo. Banjaran = tanaman atau kebun. Pasar: kini Keputran Pasar Selatan.

Kayun (p.1900) = keinginan, niat, karsa; apa saja yang diinginkan; *kayon* = gunung dalam wayang. Kini pasar bunga.

Frase, “Putar Kayun,” dulu, bagi orang Surabaya utara maksudnya pergi ke selatan dan berbalik pulang setelah memutari Kayun, dan yang dari selatan berbalik pulang setelah memutari Kayun. Kayun sebagai *landmark* pertengahan kota, barangkali, kini dilambangkan oleh Tugu Bambu Runcing (ada yang menyebut: “bonjor tuak”) di Taman Ade Irma Suryani Nasution, nama lama “Mendungan” atau “Medongan” (= tempat istirahat; p.1866). “Putar-kayun” kini berarti putar-putar keliling kota. Merujuk tradisi lisan “Budaya Arek” terpilah jadi dua kawasan: “Arek Lor-loran” dan “Arek Kidulan”; yang utara berpusat di Ampel, kawasan santri; yang selatan di Wonokromo, yang biasa disebut “arek blateran”. Bisa diterjemahkan: bebas, gampang beragul dengan siapa saja, mungkin juga “abangan” yang suka *tayuban/tandhakan*, termasuk *ngombe sak tambule* (minum arak dan *snack* khas Suroboyo yaitu rujak cingur dan ayam goreng). Kedua prototipe ini sekarang sudah lebur, tidak sehitam-putih seperti dulu.

Bibis (selatan, p.1990): antara Kayun dan Simpang Kidul. Lihat Bibis (utara), halaman 3.

*Simpang Hospitaal* (p.1825), *Militair Hospitaal* (p.1866) = rumah sakit umum/militer Simpang. Kini Surabaya Plaza.

*Tuin* = Kebun Bunga (p.1866) = sebelah barat RS Simpang.

Rumah dinas residen Surabaya (p.1866). Dulu asalnya rumah tinggal penguasa Jawa bagian timur, Dirk van Hogendorp (1794-1798), dan pada masa pemerintahan Daendels (1808-1811) gedung tersebut mengalami perubahan. Kini Gedung Grahadi, rumah dinas Gubernur Jawa Timur.

Genteng Bandar: bandar.

Genteng Prahu: bandar.

Kabupaten Surabaya, dulunya “Kraton Kanoman Surabaya” bagi Adipati Kanoman, kini Taman Budaya Jawa Timur. Bupati-bupati Kanoman dari Ki Tumenggung Jangrana III (1709-1719/20) sampai R.T.Kramajayadirana (1859-1863). (Arifin 1995: 333; Purwono 2206: 192).

Gemblongan, dari *gemblong* = makanan jadah atau getuk; atau dari *gembong* = tempat penuh air, untuk bandar.

Kantor ANIEM (*Algemene Nederland Indische Electriciteit Maatschappij*) didirikan pada 1909, pengelolanya Handelsvennootschap v/h Maintz & Co. di Amsterdam. Kantor pusat untuk Hindia Belanda di Surabaya, Jalan Gemblongan, dan pegawainya pada 1929: Eropa 290 orang, Cina 110, pribumi 1950, dan ribuan kuli (Vries 1929:241).

Kraton, Kepatihan, dan Carikan (p.1825): situs kerajaan Surabaya yang didirikan kira-kira 1546, dan 1624 dikalahkan oleh Mataram.

Kramat Gantung: makam orang suci/wali (?)

Butulan (p.1925): terusan/kanal sempit ke Kalimas.

Ilat-ilat (p.1825) = titian dari bambu; terletak antara Sulung dan Kabupatian.

Kabupatian (p.1825): masa “Kadipaten Surabaya” (?)

Kromojayan (selatan) dekat Kabupatian, dan Kromojayan (utara) antara Kramat Kambang dan Petambaan (p.1825): mungkin ada hubungannya dengan penguasa kawasan, Ki Ngabehi Kramawijaya, Patih Kanoman, anak Ki Dermoyudo, wedana mantri Surabaya (Arifin 1995:333).

*Regentstraat* = Jalan Bupati (p.1866): Rumah Bupati Kasepuhan, kini Kantor Pos Besar, Jalan Kebonrojo (Purwono 2006:73). Lihat: LAMPIRAN “Mbah Kyai Sedo Masjid.”

Surabaya—*Europeesch kamp* (p. 1866), terletak di barat Kalimas, utara dan selatan dibelah *Heerenstraat* (Jalan Rajawali), bagian dari “kota bawah” (*benedenstad*).

(Pe) Dapu(k)an (p.1866) = *papanthan*, *tumpukan* (misalnya, padi).

Kramat Kambang (p.1825): antara Pedapuan dan Kramajayan (utara); makam orang suci/wali di tengah kolam/tambak sehingga tampak mengambang (?) Sebelah barat Kramat Kambang: Bendungan.

Kromojayan (utara, p.1825): lihat atas.

Petambaan (p.1825): di utara Kromojayan.

Halte Kalimas (p.1900). Kereta SS yang menghubungkan stasiun barang Sidotopo, lewat viaduk Jalan Alun-alun (Pahlawan), bercabang ke Pasarturi dan terus ke Tanjung Perak, berhenti di Halte Kalimas, kini diteruskan ke tambatan Nilam dan Berlian (p.2000).

Kalimas (baru): bandar tambatan kapal-kapal kecil antarpulau.

Ujung (baru): bandar penyeberangan feri ke Kamal.

Tanjung Perak: pembangunan bandar dimulai pada 1910 dan selesai 1916, tahap berikutnya 1919-1925 (Purwono 2006:166).

**Toponim-toponim** lebih banyak berkaitan dengan perairan, tetapi juga berkaitan dengan lain-lainnya atau merujuk prihal tertentu: fauna, flora, kerajaan atau kadipaten, makam, pasar, pelacuran, pekerjaan/kerajinan:

Fauna: Bibis, Jagir (Jawa): anakan atau *gudel* jenis jantan dari kerbau atau kuda, Peneleh (J): penjual/tempat penjualan *telih*, hewan ternak), Sulung (J): laron kecil; di sini asal-muasal “soto sulung”, soto daging ala Surabaya, bukan soto laron.

Flora: Banjaran (J): tanaman; kebun, Bukul/Bungkul (J): butiran bawang, atau kapas, Karang Puh (Kepuh), Kayun (kekayuan), Kebonrojo (*Stadtuin* = taman kota), Ketabang/Ketapang, Kwijilan (J): dari *wiji* = biji, Pasuru(h)an, Pulosari (J): *pulo* = bunga aren/enau, Taroan (J): pepohonan, Tuin (Belanda): taman, Wonocolo, Wonokromo, Wonokusumo.

Kerajaan/kadipaten: Carikan (J): *carik* = jurutulis kraton, Demangan, Dermolor, Dermorejo, Dinoyo, Kabupatihan, Kebonrojo, Kepanjen, Kepatihan, Keputran, Keradenan, Kramat Gantung, Kraton, Kromojayan, Lawang Seketeng (Gapura), Magersari, *Regenstraat*, Titisan.

Makam: Botoputih = Batuputih, dari nama I Bata Pthak, cucu Ki Brondong/Ki Lanang Dhangiran/Mbah Botoputih (Arifin 1995:331), di Jalan Danakarya. Mbah Bungkul di hulu Kalimas, Jalan Raya Darmo. Makam Peneleh (*Europeesch Kerkhof*) di Peneleh. Mbah Kyai Sedo Masjid, di Jalan Tembakan, seberang selatan dari Tugu Pahlawan, Pesarean Keluarga Besar Kesambongan di Jalan Arjuna, Sunan Ampel di hilir Kalimas, di Masjid Ampel.

Pasar: Genteng, Keputran, Pasar Besar, Pasar Bong, Pasar Kecil, Pasar Pabean, Wonokromo.

Pelacuran: Bandaran (kini kawasan Angkatan Laut RI), Kembang Jepun (Melayu): *Jepun* = Jepang; terjemahan dari bahasa Jepang: *Nippon no Hanna* (Boedhimoerdono 2003:45), Panjunan (dekat Kali Wonokromo, mungkin Terminal Joyoboyo sekarang).

Perairan: Bagong Sabrangan, Bandar, Bandaran, Bendungan, Bibis, Butulan, Gemblongan, Gembong, Genteng Bandar, Genteng Prau, Ilat-ilat, Jambangan, Jembatan Merah, Kalianyar, Kalimas (Bandar), Kalimas (Fort = benteng), Kalimir (*meer* = danau, atau *mier* = semut, kecil), Kalisari. Kebon Urang, Kebraon, Kedung Banger, Kramat Kambang, Ngasem (sawah), Pabean, Pengampon (dari *ampo?*), Pengopohan, Petambaan, Pikulan (sawah), Pulotegalsari, Pulowonokromo, Sawah Maduran, Simut (perahu barang, kini Semut), Tambak Bayan, Tanjung Perak, Tretak Petekan (jembatan jangkrit=*ophaalbrug*, disebut dengan *Verwerdabrug*-Boedhimoerdono 2003:9), Ujung (baru), Ujung (lama), Ujung Galuh.

Pekerjaan/kerajinan/layanan: Dadungan (pembuatan tali/dadung), Bagong (ringgit emas sebagai aksesoris gelang, jam, dan lain sebagainya), Jambangan, Gomoin/Gomohen/Ondomohen (*gemoh* = tempat pekerja kerajinan tangan), Gubeng (*gubeng* = *udheng* = ikat kepala; *gobang* = dua setengah sen = 1 benggol = upah memasukkan gabah ke pabrik beras), Kenayang (*ayang*, *ayang-ayangan* = wayangan, layangan, penggambaran), Mranggen (tempat tukang/pembuat rangka/sarung keris, belati, dan lain-lain), Ngagel (*agel* = serat pelepah gebang untuk tali), Pabean, Pandean, Pejagalan, Pegirikan, Pekapuran, Pekulen, Peneleh (*penelih* = penjual hewan ternak), Petambakan, Petukangan, Plampitan (*lampit* = tikar dari rotan).

Lain-lain: Cunggu/Cangki (Kawi): *syangku* = panah, tombak, bokor, Dapuan dari Pedapukan (J)= tumpukan, misalnya, padi), Gubeng Pojok (kini jalan aspal dari Ketabang Kali naik ke Jembatan Kayun/Pemuda, dekat Monumen Kapal Selam), Ngemplak (dari *emplak-emplak* = kawasan gersang tanpa lindungan), Klagen (K): *kalagiyan* = pertandingan, Klimbangan (J): *Palimbangan* = *lelimbungan*

= *tempuk perang* = perang tanding, Pacementan (J) = sejenis tombak kecil; *pacek* = patokan, sumbat besar.; Pegirikan (*girik* = surat pas untuk masuk bandar sebagai kuli, berkaitan dengan Pekulen = tempat kuli), Pecindilan dari Pacendolan; (J): *cendholo* = nista, kelakuan buruk, mungkin Kampung “Preman”, Sukodono (pendanaan, pemberian), Undaan (undhak-undhakan = tanggul pinggir jalan atau sungai), Wonocolo (*wono* = hutan, *colo*, *cecolo* = pesuruh yang menyiarkan kabar tentang perkawinan, dlsb.), Wonokromo (*kromo* = kawin).

### **Toponim pada halte-halte trem uap OJS (*Oost Java Stoomtram Maatschappij*) dan trem listrik SS (*Staatspoor en Tramwegen*):**

Alun-alun Contong, alun-alun berbentuk segitiga. *Conthong* (J) = bungkus dari kertas atau daun pisang berbentuk terompet atau segitiga. *Ardjoeno Boulevard* (Jalan Raya Arjuno), Arjuno nama gunung, di kawasan nama-nama jalannya kelompok gunung.

Bagong (lihat hal.2), Bandaran (bandar), Bataviaweg (Jalan Jakarta). Bendo Mungal: *bendho* = sejenis *kluwih* (*Artocarpus communis*); *mungal* (J) = menonjol, menyala, berbunyi, bersuara; pohon bendo menonjol. Bibis, *Dendrocygna javanica* (lihat hal.4). Boharan (K): *buwara* = mengembara, menggembala sampai jauh; Boharan = tempat gembala yang jauh sekali. Bringin Wetan: pohon bringin (*Fices benyamina*); Wetan (J) = timur.

*Darmo Boulevard* = Jalan Raya Darmo.

Embong Malang: *embong* (J. Dialek) = jalan; *malang* = (J) lawan dari mujur; melintang; pundak bidang; lebih; sebutan pejabat desa/polisi desa, mirip *glondhong* atau pejabat di atas luruh desa; mencari *walang*, atau seperti *walang* (belalang); (K) = nanggung; *malangbong* = nama jenis perahu; *malangen* = asri.

*Javastraat* (Jalan Jawa) di kawasan nama-nama jalannya kelompok pulau.

Gemblongan (lihat hal. 8). Gili (J) = bukit; pulau karang yang membukit di laut; tanggul kali; jalan. Gubeng (lihat hal. 3). Gunungsari (lihat hal. 6).

Kaliasin (sungai asin; Jalan Basuki Rahmat); *Kampemen* (B) = asrama; Kampung Dukuh (J) *dukuh* = kawasan bawahan desa; Karang Pilang: (J) *karang* = pekarangan, kebun, perumahan; *pilang* = nama pohon; Kebonrojo, dulu *Stadtuin* = Taman Kota; Kedurus: (J) *kedurusan* = terwujud apa yang diinginkan, (K) *kadurus* = terlanjur; Kemasin = pedagang mas-intan; perajin perhiasan mas-intan; Kemendung = terkena mendung; Kemraan: (J) *mra* = *wrata*, *sumrambah* = merata, pemerataan; *mrak* = *merak* = burung berbulu indah sekali, *Pavo muticus*; *mrak ati* = menyenangkan; *merak* = mendekati, mendatangi; *merak* = membuat *werak/cuka*, *merakan* = nama rumput suku *Poaceae*; Kemraan: berkaitan dengan pemerataan, burung merak, kesenangan, kedatangan, pembuatan cuka, rerumputan; Keputran (lihat hal. 2, Keradenan); Kletek: (J) *klethek* = suara kerikil, dan lain-lain, yang menimpa benda-benda keras; kereta dorong di rumah sakit; bakiak, theklek; *nglethek* = menguliti; *klethekan* = kulit dan lain sebagainya. yang sudah kering, atau persawahan untuk tanam benih; Kramat Gantung (lihat hal. 9); Krembangan *westerkade* = Krembangan Barat; Krian: (J) asal kata *keri*, *kari*, *ri*, *ari* (*adhi*); *keri*, *keren* = gampang merasa kerii/geli; *ari* = berhenti, mandek, tertinggal; *arian* = harian; *ri* = matahari; *ri*, *eri* = duri, *erian* = penuh duri; Krian: berkaitan dengan kerii/geli, duri, harian, matahari, perhentian, ketinggalan.

Mlaten: (J) *mlathi-an*; *mlathi* = melati: nama pohon dan bunganya warna putih, suku *Rubiaceae*.

Ngelom (J) *lom* = pucat, lapar.

Palmenlaan (B) = Jalan Palem (Jalan Panglima Sudirman); Pandhuis (B): pegadaian; Pasar Besar, pasargede, dulu di sebelah timur Jalan Alun-alun (kini Jalan Pahlawan), kini kantor Dinas Pencatatan Sipil; Pasar Kembang = pasar bunga, di pojok pertigaan Jalan Banyu Urip, di seberang Kanal Banyu Urip, terletak rumah

tinggi menjulang, khalayak ramai menyebutnya “rumah hantu”; sejak masa Hindia-Belanda rumah itu terkenal dalam *urban legend* (dongeng kota): “*Spookhuis van Pasarkembang*” (Rumah Hantu Pasarkembang). Pasar Turi: (J) *turi* = nama pohon, daunnya untuk pakan hewan, bunganya untuk sayuran, sebagai tanaman lindung, *Sesbania grandiflora*; nama lama Warung Turi. *Prinsesselaan* (B) = Jalan Putri Mahkota (Jalan Tidar).

*Reinierz Boulevard* (Jalan Raya Diponegoro); *Roomschekerkstraat* (B) = Jalan Gereja Katolik Roma (Jalan Kepanjen).

Sambongan = san-bong-an, kawasan tiga marga Bong; Sasak (J): jembatan; dinding anyaman bamboo dipakai untuk penutup dasar perahu, kamar, lumbung, dan sebagainya; Sawahan = persawahan; Sepanjang (J) = sap-panjang; *sap* = lapisan, susunan, rangkaian, urutan; ambal, undak-undakan; panjang = panjang; Sidorogo (J) = *sidotresno* = jadi sayang/cinta; *Sedorogo* = mati raga/badan; Simpang (J): simpangan, pertigaan atau perempatan, Jalan Simpang kini Jalan Gubernur Suryo/Pemuda; *Societetstraat* (B) = Jalan Gedung Perkumpulan (Jalan Niaga).

Taman = kebun bunga; Tangsi = asrama tentara; Tanjung Perak = pelabuhan; Tembok (J) = pagar bata; bendungan; babakan; Trosobo (K) = *tras* = bablas; *saba, sesaba* = pergi ke mana-mana; mencari pakan hewan; sering mendatangi; *saba* = perjamuan, paseban, pelataran, alun-alun; Tunjungan (J): *tunjung* = bunga teratai; kuningan, dan sebagainya, sebagai ujung tombak yang runcing; perwujudan dari besi.

*Westerbuitenweg* (B) = Jalan Bagian Barat (Jalan Perak Barat); *Willemsplein* (B) = Taman Willem (Taman Jayengrono di Jembatan Merah Plaza); Wonokromo: halte trem listrik SS (Terminal Joyoboyo); Wonokromo Kota: setasiun trem uap OJS (sebelah utara Terminal Joyoboyo).

## RUJUKAN:

- Arifin, Winarsih Partaningrat, *Babad Blambangan*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.
- Boedhimoerdono, *Jalan Panjang Menuju Kota Pahlawan*, Surabaya: Pusura, 2003.
- Brata, Suparto, “Proses Terjadinya hari Jadi Kota Suirabaya”, *Kompas*, Jakarta, 31 Mei 2006.
- Hull, Terence H., dkk., *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Sinar Harapan & Ford Foundation, 1997.
- Indarini, Sri, dkk., eds, *Bunga Rampai Surabaya dari Masa ke Masa*, Surabaya: Dinas P & K Jatim, 2002.
- Kasdi, Aminuddin, makalah 2004.
- Kompas*, Jakarta, Senin, 18 September 2006, halaman A, kolom6-7; halaman D, kolom 1-3.
- Pigeaud, Theodore G.H., *Java in the 14<sup>th</sup> Century*, The Hague: Martine Nijhoff, 1960.
- Purnomo, Tjahjo dan Ashadi Siregar, *Dolly*, Jakarta: Grafitipers, 1984
- Purwono, Nanang, *Mana Soerabaia Koe*, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.
- Rahajoekoesoemah, Datje, *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sjamsudduha, *Sejarah Sunan Ampel*, Surabaya: Jawa Pos Press, 2004.
- Sunyoto, Agus, *Sunan Ampel Raja Surabaya*, Surabaya: Diantama & LPBA-MASA, 2004
- Vries, H.M.de, ed., *The Importance of Java, Seen from the Air*, Batavia: H.M. de Vries, 1929

Wely, F. Prick van, ed. *Van Goor's Engels Zakwoordenboek*, s Gravenhage-Djakarta: GB van Goor Zonen's Uitgeversmij, 1955

Widada, dkk., eds., *Kamus Basa Jawa (Bausastra Jawa)*, Yogyakarta: Kanisius, 2005

Winter Sr., C.F. dan R.Ng.Ranggawarsita, *Kamus Kawi-Jawa*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003

Wojowasito, S., *Kamus Kawi (Jawa Kuno)-Indonesia*, Malang: CV Pengarang, 1977

Esai:

## **Mbah Kyai Sedo Masjid & Tugu Pahlawan**

Oleh: Akhudiat

Pada peta Surabaya 1825, 1866, dan 1879 (Purwono, *Mana Soerabaia Koe*, 2006), kota Surabaya berpusat di “kota bawah” (*benedenstad*), sekitar Jalan Rajawali, Jembatan Merah, dan Kembang Jepun, di dalam “tembok kota”. Di sisi utara terletak *Citadel Prins Hendrik* (Benteng Prins Hendrik) yang dibangun pada 1837 dan dirobuhkan pada 1930 (Purwono 2006:163), kini jadi Kampung/Jalan Benteng.

Dekat tembok selatan terdapat *Regentstraat* (Jalan Bupati) karena ada rumah Bupati Kasepuhan (kini Kantor Pos Besar, Jalan Kebonrojo), dan di sebelah barat ada Jalan Kapanjen dari selatan ke utara. Kapanjen dari *panji* = bangsawan, setarap wedana, bawahan bupati. Dari Kapanjen ke selatan = Jalan Bubutan (dari *Butotan* = pintu gerbang). Dari perempatan Bubutan/Tembakan ke timur sampai Kalimas: Jalan Tembakan & Jalan Pasar Besar. Dari

perempatan Tembakan/Pasar Besar/Kramat Gantung ke utara: Jalan Alun-alun (Pahlawan).

Di seberang rumah Bupati: *stadtuin* (taman kota) = Kebon Rojo, dari *Regentstraat* di utara sampai Jalan Tembakan di selatan, yang merupakan alun-alun. Di sudut barat-daya alun-alun terdapat situs/makam “Mbah Kyai Sedo Masjid” (Kyai yang wafat dimakamkan di kawasan masjid), di Kampung Kawatan. Kawatan dari *lawatan* atau *layatan*: tempat lawat/layat, atau makam orang terhormat. Dikenal pula sebagai makam Pangeran Pekik alias Mbah Badrun atau Pangeran Sedomasjid (Boedhimoerdono 2003:69).

Dalam konsep mandala Mataram, alun-alun adalah *pancer*, pusat kota, utara: Kraton/Kabupaten, timur: Pasar Besar, selatan: kawasan bisnis, dan lain-lain, barat: Masjid Agung. Dan makam di kiri-kanan serta belakang masjid. Jadi yang tersisa hanya situs/makam “Mbah Kyai Sedo Masjid”, masjidnya sendiri sudah sirna.

Atau dipindah ke utara menjadi Masjid Jamik Kemayoran yang dibangun pada 1884-1888 oleh arsitek Belanda, Wardenaar, dengan gaya arsitektur Jawa kuno, atapnya bersusun tiga serta memiliki dua menara di kiri dan kanan, salah satu telah runtuh disambar petir. Di atas reruntuhan masjid kuno tersebut telah dibangun kembali masjid Kemayoran yang sekarang (Indarini, dkk. 2002:21).

Di lahan alun-alun pada 1891 didirikan gedung pengadilan (*Raad van Justitie*) dengan gaya arsitektur neoklasik. Selama pendudukan Jepang, dipakai untuk Kantor Polisi Militer (*Kempeitai*), bulan Nopember 1945 gedung hancur akibat pertempuran antara arek-arek Surabaya dengan pasukan Inggris.

Tugu Pahlawan didirikan pada 1951 di atas lahan bekas gedung *Raad van Justitie/Ken Pei Tai*, dengan arsiteknya Presiden RI pertama, Ir. Sukarno.

“Mbah Kyai Sedo Masjid” di sisi kiri “masjid yang sudah hilang”, barangkali, meratapi masjid kebanggaannya dalam kubur, selama 61 tahun sejak 1884, karena pada 1945 gedung penjajah dan penjarah alun-alun Kadipaten Kasepuhan Surabaya itu runtuh dihancurkan oleh cucu-cucunya yang bernama arek-arek Surabaya. Seorang cucu lainnya yang Presiden Pertama Republik Indonesia mendirikan Tugu Pahlawan dengan arsitektur sederhana dan terbuka, sebagai *landmark/tetenger* kota, yang kalau kita menamakannya tugu atau monumen, *obelisk* atau *lingga*, tetapi, barangkali, Mbah Kyai memandangnya sebagai “alif”. Sebagaimana kiasan dalam bahasa Jawa, “*ilang-ilangan endok siji*” (biarlah yang hilang memang sudah takdirnya hilang): Simbah kehilangan Masjid Asli, tempatnya bekerja-beribadah-berbakti, penjajah/penjarah kehilangan Gedung Neoklasik, tapi Mbah Kyai Sedo Masjid mendapat ganti “alif” setinggi 45 yard = 41,1 meter, untuk menunjuk, merujuk dan berdoa ke Sang Pencipta langit yang abadi.

Surabaya, 10 Nopember 2006

# **SUNGAI BRANTAS DALAM KONTEKS TRANSPORTASI ANTARA DAS BRANTAS DAN PELABUHAN SURABAYA DALAM KAJIAN HISTORIS**

Oleh: Indriyanto\*\*

## **Pendahuluan**

**S**alah satu ciri dari lokasi pelabuhan di Asia adalah terletak di muara sebuah sungai. Sungai tersebut menjadi penting karena menjadi sarana penghubung dan lalulintas antara daerah hinterland dengan pelabuhan.<sup>1</sup> Demikian halnya dengan pelabuhan Surabaya, yang terletak di muara sungai Kalimas, anak cabang sungai Brantas.

Jaringan hubungan antara pelabuhan dan pedalaman dengan sarana transportasi baik transportasi sungai maupun transportasi darat telah memberi corak dan dinamika tersendiri bagi kelangsungan aktivitas pelabuhan Surabaya pada masa dahulu dan masa-masa berikutnya. Jaringan ini kemudian menjadi sebuah sistem yang saling terkait dan mendukung dalam perkembangan ekonomi regional di wilayah Jawa Timur pada umumnya dan di Surabaya pada khususnya. Sementara itu, keberadaan Surabaya semakin lama menjadi semakin penting dalam jalinan perdagangan baik di tingkat daerah, tingkat nusantara, maupun tingkat internasional.

---

\*\*Drs. Indriyanto, S.H., M.Hum., Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNDIP Semarang.

<sup>1</sup>Pelabuhan modern Singapura, misalnya, terletak di muara sungai Singapura. Sungai ini berkembang sebagai pusat niaga penting dengan daerah perdagangan pelengkap bagi perahu kecil di muara sungai Rochore dan Kallang. Baca: Eric R. Alfred, *Singapore Port History 1819-1963* (Singapore: Port of Singapore Authority, 1987).

Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, menjadi salah satu wilayah hinterland utama bagi aktivitas pelabuhan Surabaya. Daerah ini sangat subur dan memberi banyak produk khususnya gula yang menjadi andalan perdagangan laut dari wilayah Jawa Timur melalui pelabuhan Surabaya. Sungai Brantas sendiri merupakan sungai terbesar di Jawa Timur setelah Bengawan Solo yang bisa dilayari oleh perahu-perahu dagang dari wilayah pedalaman hingga pelabuhan Surabaya. Namun demikian, pada masa setelah jalan raya dan jalan telah menyurutkan salah satu peran dari Sungai Brantas dalam transportasi sungai antara daerah hinterland dengan pelabuhan Surabaya.

Surabaya menjadi pusat yang menghubungkan daerah antara Tuban dan Pasuruan. Secara geografis Surabaya mempunyai keuntungan alami, karena terletak di muara Sungai Brantas dan berada tidak jauh dari muara sungai Bengawan Solo, yang dapat dilayari menuju ke laut dan juga menghubungkan antara daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>2</sup> Kedua sungai ini merupakan jalan masuk ke daerah pedalaman yang subur dan padat penduduk. Sungai Brantas mempunyai sebuah delta luas dan subur yang membentang di antara kedua cabang muaranya, Kalimas dan Kali Porong, yang menjadi batas sebelah selatan Sidoarjo dengan Mojokerto dan Bangil di wilayah Kabupaten Pasuruan. Delta ini adalah yang terbesar dan paling terkenal di Jawa dengan lebar mencapai 24 paal (1 paal = 1,506 meter) dari utara ke selatan dan panjang 29 paal dari timur ke barat. Beberapa abad lalu delta ini merupakan teluk luas yang terletak di dekat ibukota Majapahit dan berjarak sekitar 26 paal dari laut. Seperti delta besar lainnya, pada mulanya delta Brantas merupakan

---

<sup>2</sup>*Tijdschrift voor Nederlansch Indie II*, 1859, hlm. 261. Ada hubungan erat antara Surabaya dengan Madura, karena pelabuhan Madura Barat di Kamal menghadap Surabaya di seberang selat itu. Sementara ikatan etnis dan budaya muncul antara daratan dan pulau Madura dan ikatan keluarga menghubungkan priyayinya, Jayengrana dari Surabaya, sebagai menantu Panembahan Madura. Sutherland, "Notes on Java's Regen", dalam *Indonesia*, Oktober 1973, hlm. 113-147.

kolam pasir dan lumpur yang menjulang di atas air Sungai Kediri yang mengalir hingga ke Surabaya dan Porong. Delta Brantas dipotong oleh berbagai sungai kecil yang airnya sebagian besar berasal dari cabang sungai utama dan sebagian dari sawah. Itulah sebabnya delta ini menjadi subur dan sekarang mencakup distrik Surabaya yang paling kaya.<sup>3</sup> Sebagian besar hasil produksi dari daerah pedalaman, khususnya gula, telah menjadi komoditas penting dalam perdagangan lokal dan internasional.<sup>4</sup>

Paper ini akan mengulas secara singkat bagaimana sungai Brantas dengan DAS atau Wilayah Sungainya berkaitan dengan pelabuhan Surabaya dalam konteks transportasi. Sudah tentu, pembahasan juga akan menyinggung peran pelabuhan Surabaya sebagai pintu utama bagi keluar masuknya barang perdagangan di wilayah ini.

## Setting Historis

Keberadaan Surabaya sebagai sebuah daerah dengan segala aktivitas sosial-ekonominya diperkirakan sudah berlangsung sejak tahun 800.<sup>5</sup> Nama Surabaya mulai disebut sejak abad XIV di dalam

---

<sup>3</sup>Baca: “De Staad der Soerabajasche Havenwerken”, dalam *Indisch Bouwkundige Tijdschrift*, VI, 1913, hlm. 876.

<sup>4</sup>Setelah pertengahan abad V Surabaya memiliki nilai tinggi yang dikejar oleh para pencari kekayaan, termasuk raja-raja Madura dan orang-orang Belanda setelah pertengahan tahun 1600-an. Baca: William H. Frederick, *Hidden Change in Late Colonial Urban Society in Indonesia* (tanpa kota, penerbit dan tahun terbit), hlm. 356.

<sup>5</sup>Setelah tahun 860 M di Jawa Timur terbentuk jaringan dagang dan pelabuhan-pelabuhan laut akibat adanya perpindahan pusat kekuasaan Syailendra dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad VIII. Setyawati Suleiman, “Maritime Routes in the Classical Period”, dalam R.P. Soejono, “Remarks on Maritime Shipping in Prehistoric Times in Indonesia”, *Supplementary Report for SPFA Consultative Workshop on Research on Maritime Shipping and Trade Networks in Southeast Asia (I-W7)*, Cisarua West Java, Indonesia, 20-17 November, 1984.

kitab *Negarakerlagama*.<sup>6</sup> Di dalam dokumen dari masa Majapahit ini dikatakan bahwa Surabaya terletak di sebelah utara Glagah Arum dengan batas di sebelah barat adalah Kalimas dan batas di sebelah timur adalah Kali Pegirian.<sup>7</sup> Kitab itu juga sering menyebut pelabuhan Surabaya, tetapi tidak demikian halnya dengan pelabuhan di sekitarnya seperti Tuban dan Gresik. De Graaf dan Pigeaud berpendapat bahwa hal itu mencerminkan ketidaksenangan pihak istana terhadap sikap penguasa kedua pelabuhan itu yang tidak loyal terhadap pemerintah pusat dan bahkan ada kecenderungan untuk berdiri sendiri.<sup>8</sup> Namun demikian, nama Tuban dan Gresik ternyata cukup banyak disinggung dalam sumber lain seperti laporan Ma Huan

---

<sup>6</sup>H.J. de Graaf, *Surabaya dalam Abad XVII* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, 1981-1982), hlm. 169; Slamet Mulyana, *Negarakerlagama dan Tafsir Sejarahnya* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979). Sementara itu von Faber berpendapat bahwa Surabaya didirikan pada 1275 oleh raja Kertanegara sebagai tempat pemukiman baru bagi para prajurit Singhasari yang berhasil menumpas pemberontakan Kenuruhan pada 1270. Pemberontakan ini dilakukan oleh saudara tiri Kertanegara yang lahir dari selir yang diangkat menjadi Kanuruhan (Kepala Daerah) di Glagah Arum. Pasukan pemberontak membuat pertahanan di sekitar kampung Surabayan. Soeparto Brata, "Terjadinya Kota Surabaya", dalam anonim, *Buku Ulang Tahun Kotamadya Surabaya ke-64* (Surabaya: Seksi Penerangan & Sekretariat Panitia HUT Hasta Windu, 1970), hlm. 2.

<sup>7</sup>Soeparto Brata, "Terjadinya Kota...", hlm. 2; Sri Mintosih, *et al.*, *Pengetahuan, Sikap, Kepercayaan dan Perilaku Budaya Tradisional pada Generasi Muda di Kota Surabaya* (Jakarta: Depdikbud, 1977), hlm. 21-22; Anonim, *Sekilas Sejarah Surabaya* (Surabaya: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya). Pemerintah Daerah menetapkan tanggal lahir Surabaya pada 31 Mei 1293 yang didasarkan pada peristiwa keberhasilan pasukan Jawa di bawah Raden Wijaya atas pasukan Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan. Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Petra Surabaya & Penerbit Andi, 1996), hlm. 6.

<sup>8</sup>H.J. de Graaf dan Th. Pigeaud, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1974), hlm. 195-205.

dan kitab *Pararaton* serta *Babad Ronggolawe*. Di dalam laporan Ma Huan dinyatakan bahwa pada abad XV di pantai utara Jawa Timur terdapat tiga pelabuhan yang dikenal dengan baik oleh para pedagang asing, yaitu Surabaya (*Su-erh-pa-ya*), Tuban (*Tu-pan*), dan Gresik (*Ko-erh Hia*). Perdagangan ekspor dan impor antara Majapahit dan negara-negara lain dilakukan melalui ketiga pelabuhan itu. Komoditas ekspor terpenting dari Majapahit adalah beras, kayu, sagu, pala, dan lada.<sup>9</sup>

Prasasti Trowulan I menyebut Surabaya sebagai tempat terakhir di sepanjang Sungai Brantas menuju ke laut yang di dalamnya terdapat aktivitas pengaturan tempat-tempat penambangan kapal. Pada tahun 1365 Surabaya merupakan tempat terpenting di Jenggala, sebuah kawasan strategis di perairan Brantas yang sejak tahun 929 M telah berkembang sebagai pusat kekuasaan, yang patut ditempati Raja Hayam Wuruk saat ia berada di Jenggala. Pada saat itu Surabaya merupakan pusat perdagangan dan angkatan laut setelah Ujung Galuh.<sup>10</sup>

Pada awal abad XIII kekuasaan Majapahit yang berpusat di hulu Brantas meluas pengaruhnya ke seluruh Kepulauan Nusantara dan hal itu mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perdagangan

---

<sup>9</sup>Tim Penulis Puspindo, *Sejarah Pelayaran Niaga di Indonesia I* (Pra-sejarah hingga 17 Agustus 1945 (Jakarta: Yayasan Pusat Studi Pelayaran Niaga di Indonesia (Puspindo), 1990), hlm. 30. Lihat juga: J.V.C. Mills (ed.), *Ma Huan: Ying Yai Sheng Lan, The Overall Survey of the Ocean's Shore 1433* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970).

<sup>10</sup>Di Surabaya terdapat tempat yang bernama Tegalsari dan Pulosari, yang masing-masing berada di sebelah barat dan utara Kalimas, berhadapan dengan Pacekan. Di Pulosari terdapat kampung perkemahan barisan kuda dan infanteri Mongol yang dipimpin Kubilai Khan untuk melindungi sebagian armadanya yang berpangkalan di Pacekan. Tegalsari sampai sekarang tetap bernama Tegalsari dan terletak di sebelah selatan kampung Surabayan. Sari berarti makam, dan Tegalsari pada umumnya berarti padang pertempuran, karena di daerah itu banyak prajurit Jawa pimpinan Raden Wijaya yang gugur ketika melawan pasukan Mongol.

melalui Selat Malaka, Gresik, dan Surabaya. Pada abad berikutnya untuk pertama kali pada tahun 1365 Surabaya disebutkan telah tampil sebagai *entrepot* internasional. Salah satu faktor yang menentukan perkembangan ini adalah andil Surabaya dalam perdagangan rempah di Kepulauan Nusantara sebelum kedatangan bangsa Eropa, khususnya dengan Maluku.<sup>11</sup> Ketika kekuasaan Majapahit menurun sejak akhir abad XV Surabaya dan kota-kota pelabuhan lain seperti Gresik, Cirebon, dan Banten muncul sebagai kekuatan-kekuatan baru di bawah pengaruh Demak. Kota-kota itu berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan yang semakin penting. Para pedagang berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara dan Cina. Para pendatang ini memberi corak kosmopolitan terhadap bandar-bandar yang berkembang di daerah pesisir.<sup>12</sup>

## DAS Brantas dan Hinterland Utama Pelabuhan Surabaya

Hubungan Surabaya dengan daerah sekitarnya sangat erat terutama yang berkaitan dengan produk dari daerah *hinterland*. Pada abad XIX, produksi daerah *hinterland* yang utama adalah padi, kopi, gula, nila, tembakau, dan sedikit kelapa dan bambu. Gula menjadi

---

<sup>11</sup>B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies I* (The Hague, Bandung: van Hoove, 1995), hlm. 20-29. Bandingkan dengan P.D. Curtin, *Cross-cultural Trade in World History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), hlm. 124-5. Lihat juga: Tome Pires, *The Summa Oriental and the Book of Fransisco Rodrigues*; by Armmando Cortesao (London: Hakluyt Society, 1994), hlm. 210 – 215. Kenneth R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985), hlm. 230-231.

<sup>12</sup>Tim Penulis Puspindo, “*Sejarah Pelayaran ...*”, hlm. 32 & 43. Dari tahun 1483-1542 Surabaya merupakan bagian dari Demak, setelah itu lebih dari 30 tahun berada di bawah supremasi Madura dan antara 1570-1587 Surabaya berada di bawah Kerajaan Pajang. Setelah tahun 1625 Surabaya jatuh ke tangan Kerajaan Mataram sampai tahun 1743, saat ditandatangani perjanjian aneksasi pantai utara Jawa oleh VOC.

produk utama untuk kepentingan ekspor yang dikapalkan melalui pelabuhan Surabaya.<sup>13</sup>

Sementara itu di Rembang, meskipun merupakan daerah tandus, dijumpai hutan jati yang luas, dan sebagian tanahnya menghasilkan beras dan minyak kelapa. Hutan jati di karesidenan ini pada akhir abad XIX adalah seluas 2845 km<sup>2</sup> dan mencakup empat wilayah kabupaten, yaitu Rembang, Tuban, Bojonegoro dan Blora.<sup>14</sup> Hasil hutan jati dari karesidenan ini sebagian besar digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial, termasuk untuk membangun sarana militer di pelabuhan Surabaya. Produk tanaman ekspor dari daerah Rembang, khususnya kopi, sebagian besar juga diekspor melalui pelabuhan Surabaya.<sup>15</sup>

Di daerah Malang terdapat perkebunan kopi bebas yang dikelola oleh penduduk, selain terdapat pula perkebunan tebu dan kina. Demikian juga dengan Lumajang yang merupakan daerah subur penghasil tebu, kopi, dan kina. Sementara daerah Besuki, Situbondo, Banyuwangi, dan Jember, selain menjadi daerah penghasil tebu dan kopi juga penghasil tembakau. Di Kediri banyak dijumpai industri pribumi seperti kerajinan emas dan perak, penyamakan kulit, dan pembuatan pot. Selanjutnya Tulungagung dan Blitar merupakan daerah perkebunan kopi yang sangat subur. Demikian halnya dengan daerah Madiun dan Pacitan banyak menghasilkan komoditas ekspor, terutama beras.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>G.H. von Faber, “*Oude Soerabaja*” (Soerabaia: H. Van Ingen, Bussum: NV Boekhandel en Drukkerij, 1931), hlm. 177.

<sup>14</sup>Arsip Perkebunan No. 1103. Koleksi ANRI Jakarta.

<sup>15</sup>Indriyanto, *Pelabuhan Rembang 1820 – 1900; Profil Pelabuhan Kecil dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ekonomi Wilayah Rembang*. Tesis S2 pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1995.

<sup>16</sup>H. Blink, *Nederlandsch Oost en West Indie, Geographisch, Etnographisch en Economisch Bescheven II* (Leiden: E. J. Brill, 1907), hlm. 167-169.

*Hinterland* yang berdekatan dengan Surabaya adalah Karesidenan Surabaya. Karesidenan ini di sebelah utara dan barat Selat Madura berbatasan dengan Karesidenan Pasuruan; di sebelah selatan berbatasan dengan Karesidenan Kediri; dan di sebelah barat berbatasan dengan Karesidenan Rembang. Kabupaten yang tercakup ke dalam Karesidenan Surabaya adalah Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Sedayu, dan Lamongan. Karesidenan ini dilewati oleh Sungai Bengawan Solo dan Brantas, memiliki tanah yang subur dan penduduk yang padat, sehingga menjadi wilayah paling penting di Jawa.

Hubungan antara *hinterland* dengan pelabuhan yang banyak dimobilisasi produk gula ini menyebabkan industri gula di wilayah Surabaya berkembang semakin pesat sejak awal abad XIX. Di sekitar Surabaya didirikan banyak pabrik gula seperti di Buduran, Waru, Karangbong, Tanggulangin, Ketegan, dan Ketabang pada 1835; Candi pada 1837; Watutulis, Balong Bendo, Gedek, dan Seraten pada tahun 1838; Singkalang, Krian, Bulang, Kenongo, dan Keboan pada 1839; dan Sruni pada 1840. Banyak dari pabrik gula tersebut yang masih terus memproduksi meskipun berulang kali berganti pemiliknya, sementara lainnya, misalnya pabrik gula Ketabang yang terletak di pinggir kota, dihapus sama sekali.<sup>17</sup> Pabrik gula Ketabang, Jagir, Kara, dan Darmo pada 1859 menjadi milik orang Cina, sedangkan pabrik di Gubeng, Balong, Dadongan, dan Patemon berada di tangan orang Jawa. Semua pabrik gula tersebut dibangun di tanah milik swasta. Produksi gula pada 1856 mencapai 17.290 pikul dan pada 1857 menjadi 18 ribu pikul, kemudian pada 1858 naik lagi menjadi 23 ribu pikul. Pada 1860-an produk industri gula Karesidenan Surabaya yang dikelola oleh swasta mencapai 15 ribu pikul/tahun dari 822 bau tanah. Jadi, rata-rata produksi  $\pm$  18,25 pikul/tahun/bau. Munculnya banyak industri gula ini membuka peluang bagi penduduk

---

<sup>17</sup>Bawean termasuk dalam Karesidenan Surabaya sebagai Kabupaten sendiri. Madura, sebelum tahun 1857, juga termasuk dalam Karesidenan Surabaya.

untuk menjadi tenaga kerja di sektor ini. Pada 1859 tidak kurang dari 1000 orang bekerja dalam industri ini.<sup>18</sup>

Pemerintah Kolonial menyikapi perkembangan industri gula dengan melakukan kontrak penanaman tebu dengan para pengusaha swasta. Di distrik Delta, dari 19 perkebunan tebu yang membuat kontrak dengan pemerintah pada 1879, 11 perusahaan di antaranya terletak di delta, yakni Waru, Seruni, Buduran, Candi, Balong, Bendo, Krian, Ketegan, Tanggulangin, Porong, Krembong, dan Watutulis. Sementara 8 perusahaan yang lain berada di Mojokerto. Untuk 11 pabrik ini tersedia lahan 4819 *bau* (1 *bau* sekitar 7096,5 m<sup>2</sup>) untuk dibudidayakan melalui perantara pemerintah dan 480 *bau* tanah secara sukarela ditanami tebu yang disewa dari penduduk. Keberadaan jalur kereta api Surabaya-Mojokerto dan Surabaya-Malang-Pasuruan bagi pabrik-pabrik sangat menguntungkan untuk pengangkutan gula.<sup>19</sup> Pentingnya hasil utama gula dapat dibuktikan dengan pengangkutan barang dari pedalaman menuju ke Surabaya. Pada 1883, misalnya, barang yang diangkut dengan kereta api di jalur bagian timur berjumlah 170.323 ton, dan 40.959 ton di antaranya adalah gula.<sup>20</sup> Pada 1885 pengangkutan gula mengalami peningkatan tajam hingga mencapai 195.000 ton dan pada 1902 meningkat hingga 251.000 ton.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Di Afdeling Gresik, misalnya pembuatan garam dan pembakaran kapur sangat penting untuk memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor. Perikanan, pelayaran pantai dan pembuatan kapal tradisional menjadi mata pencaharian orang banyak.

<sup>19</sup>Letak Delta Surabaya yang menguntungkan sehubungan dengan sarana pengangkutan yang lancar dengan Surabaya sebagai titik akhir di Muara Kalimas atau Sungai Surabaya, merupakan salah satu sebab ramainya lalu lintas perdagangan. *Nota Over de Stoomtramwegnet in de Surabaya-Delta* (Utrecht: J. van Boekhandel, 1885), hlm. 4-5.

<sup>20</sup>“*Nota Over ...*”, hlm. 28.

<sup>21</sup>H. van Kol, *Reisverlag betreffende de Solo-Werken en de Haven van Soerabaia* (tanpa kota terbit, tanpa penerbit, dan tahun terbit, Koleksi KITLV Leiden No. M. 193), hlm. 18.

Pada 1870 industri gula mengalami masa sulit. Hasil gula tidak begitu menguntungkan dan harga di pasar juga rendah, sementara biaya pengolahan dan penanaman tinggi. Kesulitan ini dapat dipecahkan melalui penerapan sistem kerja bebas pada 1887. Meskipun demikian, kondisi yang ditakutkan terjadi juga, ketika pada akhir 1880-an krisis gula diikuti dengan harga yang merosot tajam di pasar. Kondisi ini diperburuk oleh munculnya wabah penyakit ‘*sereh*’ pada tanaman tebu, sehingga banyak perusahaan gula yang mengalami kerugian.<sup>22</sup>

### **Jaringan Transportasi antara Hinterland dengan Pelabuhan Surabaya**

Pada abad X-XII raja-raja Jawa memberikan hak kepada penguasa lokal untuk mendirikan perkampungan pantai dan mengelola pelabuhan di daerah delta Brantas yang kemudian dikenal sebagai Surabaya. Daerah delta Brantas, yang dikenal pula sebagai Changgu, merupakan salah satu pusat aktivitas sosial-ekonomi di Jawa Timur. Di daerah ini terdapat perkampungan dan pasar-pasar di pinggir sungai. Beberapa produk seperti logam dan kain celup sampai ke pasar lokal lewat jaringan pertukaran pribumi. Barang impor ini disalurkan melalui pelabuhan di Jawa Timur oleh pedagang Jawa yang lalu membawanya ke pedalaman untuk ditukar dengan beras. Aktivitas ekspor beras mendorong jaringan terus berkembang dan menyatukan pasar pedalaman dengan kota pantai Jawa.

Produk lokal Majapahit bergerak melalui pasar-pasar pedalaman ke pantai utara sepanjang jalan darat yang berfungsi sebagai pelengkap horisontal bagi pola vertikal sistem sungai Jawa. Namun kesulitan pengangkutan sepanjang jalan yang sempit dan terjal menyebabkan sebagian besar beras Jawa diangkut melalui sungai dari pedalaman ke pantai dan kembali dengan membawa barang impor. Surabaya yang terletak di muara sungai merupakan

---

<sup>22</sup>Kol, “*Reisverslag ...*”, hlm. 180 – 182.

pintu utama atau ‘gerbang’<sup>23</sup> perdagangan laut menuju ke pusat perdagangan Changgu di daerah delta Brantas. Makna Changgu dalam perdagangan Majapahit ditunjukkan dalam laporan Ma Huan tentang ekspedisi laut Cheng Ho pada abad XV. Ma Huan mengatakan bahwa orang bisa mencapai pasar Changgu dengan berlayar sejauh 70-80 li (=25 mil) dari Surabaya melalui Sungai Brantas. Dari Changgu perjalanan dapat diteruskan ke ibukota Majapahit dengan berjalan kaki selama setengah hari. *Pararaton*, yang dibuat pada akhir abad XV atau awal abad XVI, memperkuat laporan Ma Huan dengan melukiskan Changgu sebagai pusat pengumpulan barang-barang yang lewat antara pantai dan ibukota.<sup>24</sup>

Perdagangan di kawasan timur mulai terancam sejak Portugis pada 1511 menduduki Malaka. Portugis berusaha mendobrak perdagangan besar ini pada 1512 dengan berusaha menutup Maluku bagi semua orang selain Jawa. Dalam setengah tahun, untuk kali pertama mereka mencapai Banda, Ambon, dan Ternate. Bangsa lain mulai mengikuti jejak mereka, termasuk orang Cina. Pada 1521 Maluku untuk kali pertama dicapai dari Amerika. Pelayaran ke utara menuju Cina lewat Filipina juga mulai berkembang. Bangsa lain yang lebih kuat dari Jawa kini mulai bersaing.<sup>25</sup>

Perkembangan yang semakin memburuk terjadi ketika Mataram muncul pada abad XVI dengan basis agraris dan berusaha menegakkan kontrol pedalaman atas perdagangan di pantai utara Jawa. Kekacauan politik internal Mataram mengakibatkan penguasa

---

<sup>23</sup>Gerbang atau pintu merupakan sebuah konsep untuk menunjukkan titik penghubung antara dua lokasi dalam jaringan transportasi, ekonomi, dan politik antara daerah pedalaman dan daerah depan/luar. Secara geografis gerbang terletak di muara sebuah sungai. Indu Banga, *Ports and Their Hinterlands in India 1700-1950* (Manohar, India, 1992), hlm. 29.

<sup>24</sup>Kenneth R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985), hlm. 234.

<sup>25</sup>C. Th. Van Deventer, *Overzicht van den Economischen toestand der Inlandsche Bevolking van Java en Madoera* (‘s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904), hlm. 97.

kerajaan itu membiarkan VOC memegang kontrol atas pelabuhan dan perdagangan laut pada awal abad XVII, sementara Mataram hanya puas dengan menguasai wilayah pedalaman. Sejak itu kontrol perdagangan laut Jawa dan perdagangan internasional dipegang oleh bangsa lain.<sup>26</sup> Aktivitas ekonomi Belanda menjamin supremasi kota-kota pantai, sehingga Batavia, Semarang, dan Surabaya menjadi tempat-tempat yang dominan di Jawa.<sup>27</sup> Surabaya yang secara tradisional mempunyai hubungan dengan daerah pedalaman dan strategis baik dari segi ekonomis maupun geografis dimanfaatkan oleh VOC, dan kemudian Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda untuk secara intensif menjadikan Surabaya dan pelabuhannya sebagai salah satu pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi kolonial di bagian timur Jawa.

Hubungan Surabaya dengan daerah pedalamannya bisa dilihat dari aktivitas darat dan sungai. Pangeran Mangkunegara dalam 10-12 hari melayari sungai menuju ke Gresik untuk memuat garam, tembikar, dan ikan yang diperoleh melalui pertukaran dengan kopi atau gula yang mereka bawa. Pengangkutan melalui sungai dapat dilakukan lewat jalur yang tak terputus ke Solo, atau dengan pengangkutan sekoci ke Megeri di dekat Ngawi. Di Ngawi terdapat Sungai Madiun atau Semangka yang bisa dilayari dan bertemu dengan Sungai Solo, sehingga ia sangat berarti bagi pelayaran pedalaman. Pelayaran dari Ngawi ke Solo memakan waktu 5 hari; pelayaran sampai Ngawi minimal menghabiskan 25 hari.<sup>28</sup>

Pelayaran dari Tulungagung dan daerah lain di delta Brantas yang membentang dari Mojokerto-Surabaya-Bangil hanya dapat dilakukan melalui Sungai Brantas. Daerah-daerah tersebut merupakan lahan yang padat dan subur dan dipenuhi oleh pabrik gula. Setelah pembukaan jalan kereta api Kediri-Blitar pada tahun 1883, pelayaran

---

<sup>26</sup>Hall, "Maritime Trade ...", hlm. 225.

<sup>27</sup>James L. Cobban, *The City of Java; An Essay in Historical Geography* (Berkeley: University of California, 1970), hlm. 2-3.

<sup>28</sup>Deventer, "Overzicht ...", hlm. 107.

perahu harus bersaing dengan pengangkutan jalan kereta api. Meskipun demikian, pelayaran perahu masih tetap bertahan. Kenyataan menarik ini dikenang oleh Residen Kediri pada tahun 1891 dalam “Tinjauan Tentang Kondisi Ekonomi”, yang menyatakan bahwa pelayaran perahu di Sungai Brantas terutama berlangsung antara Tulungagung dan Kediri sampai ke Surabaya bolak-balik. Setelah jalan kereta api dikelola oleh negara, pelayaran perahu ini merosot tajam. Namun secara perlahan-lahan kembali meningkat dan kini bahkan menjadi pesaing utama pengangkutan dengan menggunakan kereta api. Pengangkutan di sepanjang jalan air ini berlangsung jauh lebih lambat, namun pada sisi lain juga jauh lebih murah, dibandingkan dengan kereta api. Oleh karena itu, orang lebih banyak menggunakan pengangkutan perahu. Setiap bulan rata-rata terdapat 20-30 buah perahu berangkat ke Surabaya. Perahu sungai yang digunakan di sini adalah jenis *compreg* yang dibuat dari bahan kayu jati dari Surabaya dan berdaya muat 10 *koyang* atau 4 *last*.<sup>29</sup>

Dinamika ekonomi wilayah pedalaman Jawa Timur ini salah satunya didukung oleh sarana transportasi kereta api. Perkembangan sistem transportasi di Jawa Timur berlangsung menurut topografinya. Wilayah Jawa Timur terdiri dari daerah vulkanik yang menyebar sesuai dengan alur lembah sungai-sungai yang secara alamiah menjadi daerah pemukiman penduduk. Sebelum sistem transportasi kereta api dan kendaraan bermotor berlangsung, sistem transportasi sungai menjadi sangat penting di wilayah pedalaman, karena sarana ini sangat murah. Sampai pada perempat akhir abad XIX, sebelum konstruksi jalan kereta api dibangun, Sungai Bengawan Solo dan Brantas berperan penting dalam transportasi di Jawa Timur. Pembangunan jalan kereta api dan jalan raya dilakukan dengan mengikuti arah jalur kedua sungai besar itu, yang juga berpusat ke kota Surabaya. Empat jaringan utama jalan raya dan jalan kereta api telah membentuk jaringan koridor yang menghubungkan Surabaya dengan daerah-daerah di sekitarnya. *Pertama*, adalah jalur Surabaya-

---

<sup>29</sup> Deventer, “*Overzicht ...*”, hlm. 107-108.

Malang melalui Gempol yang mempunyai cabang jalan utama menuju Pasuruan dan Probolinggo. *Kedua*, koridor jaringan jalan Surabaya menuju ke daerah pusat perkebunan, yaitu Lumajang, Jember, dan Banyuwangi sampai ke tempat penyeberangan feri ke Bali. *Ketiga*, jaringan koridor bagian tenggara dan selatan menuju kota-kota yang dilalui Sungai Brantas seperti Mojokerto, Kediri, Tulungagung, dan Blitar yang juga berhubungan dengan Madiun dan Solo. *Keempat*, adalah koridor jaringan jalan dari Gresik menuju ke Lamongan dan Bojonegoro serta ke Kudus dan Semarang.<sup>30</sup>

Dengan semakin meningkatnya ekspor produk *hinterland* di Jawa Timur, pembangunan jalan kereta api terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta. Jalan kereta api yang sudah dibangun sejak akhir abad XIX antara lain jalur Surabaya-Pasuruan, memotong jalur Sidoarjo-Bangil<sup>31</sup> dan Kertasana-Malang, semakin memperlancar transportasi dari daerah pedalaman ke pelabuhan Surabaya. Jalur Surabaya-Pasuruan itu juga menghubungkan Sidoarjo-Mojokerto. Dari Kertasana ada jalur ke Wilangan dan jalur Wilangan-Madiun.<sup>32</sup> Setiap hari ada tiga sampai empat kereta penumpang melewati jalur Waru-Krian-Mojosari, Krian-Kupang, dan Krian-Jarebeng. Sementara jalur Krian-Sidoarjo dan Prambon-Porong dilewati oleh dua sampai

---

<sup>30</sup> Dick, "The Economic Role of Surabaya", dalam Howard Dick, James J. Fox, Jamie Mackie (ed). *Balanced Development East Java in The New Order*. Singapore: Oxford University Press, 1993

<sup>31</sup> Dengan adanya pekerjaan jaringan transportasi ini menyebabkan permintaan akan tenaga kerja semakin meningkat sejak tahun 1870. Para pekerja tertarik dengan pekerjaan di pabrik-pabrik gula sepanjang jalur transportasi yang ada. Mereka menjadi tenaga kerja kasar dengan gaji sebesar 60 sen sehari. Baca: R.E. Elson, *Peasant and The Colonial Sugar Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940* (Singapore: Oxford University Press, 1984), hlm. 135.

<sup>32</sup> Rangkaian kereta api terdiri dari lokomotif, gerbong barang dan tiga gerbong penumpang, secara teratur melewati jalur-jalur ini. Veth, "*Java ...*", hlm. 852 - 853.

tiga kereta setiap hari.<sup>33</sup> Sampai dengan 1925, hampir semua ibukota kabupaten telah dilalui oleh jalur kereta api.<sup>34</sup>

## **Pelabuhan Surabaya Sebagai Pintu Utama Perdagangan Hinterland-Foreland**

Lokasi pelabuhan Surabaya terletak di muara Sungai Kalimas hingga ke Jembatan Merah. Kapal-kapal memasuki sungai itu untuk melakukan aktivitasnya. Di aliran sebelah kanan Kalimas, di atas tanggul yang berjarak sekitar 500 meter dari muara sungai itu, terdapat kantor bea cukai (*douane*). Di sini dijumpai dermaga kecil (*kleine boom*) sebagai tempat berlabuh bagi kapal-kapal yang mengangkut barang untuk diperiksa dan diberi cap, baik ketika kapal-kapal itu akan memasuki dermaga besar (*grootte boom*) yang terletak di dekat Jembatan Merah maupun ketika mereka akan keluar dari pelabuhan Surabaya.<sup>35</sup>

*Grootte boom* merupakan pelabuhan utama di Kalimas yang memiliki lahan sepanjang 420 meter dan luas sekitar tiga hektar.<sup>36</sup> Di pelabuhan ini ratusan perahu hilir-mudik di sepanjang jalur Kalimas. Perahu-perahu tersebut sebagian berangkat membawa barang-barang dagangan ke berbagai daerah tujuan dan sebagian yang lain sibuk melayani kegiatan bongkar-muat. Di sepanjang sisi kanan dan kiri Kalimas terlihat deretan gudang-gudang hingga ke Jembatan Merah. Di depan gudang-gudang ini tampak puluhan kuli dengan keringat bercucuran sedang mengangkat barang-barang dalam karung maupun

---

<sup>33</sup>“Nota Over ...”, hlm. 9

<sup>34</sup>*Boekoe Peringatan dari Staatsspoor-en Tramwegwn di Hindia Belanda 1875 – 1925* (Weltevreden: Topografische Inrichting, 1925).

<sup>35</sup>Di depan kantor *douane* ini senantiasa ramai, karena orang hiruk-pikuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bongkar-muat barang perdagangan. Sering pula dijumpai seseorang sedang digeledah oleh petugas, karena dicurigai membawa candu, atau pembongkaran kopor serta barang bawaan dari para awak kapal. *Jawa Pos*, 17 November 1982, hlm. III.

<sup>36</sup>J. Kraus en G. J. de Jongh, *Verslag Over de Verbetering van Haventoestanden van Soerabaia* (Batavia: Landsdrukkerij, 1910), hlm. 3.

peti dari kapal menuju ke gudang. Di kompleks pelabuhan ini juga terdapat bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh orang-orang pribumi dan Timur Asing yang sebagian besar bekerja di lingkungan pelabuhan. Orang-orang Eropa hanya menempati sepertiga dari bangunan rumah tinggal. Kompleks rumah tinggal ini mempunyai jaringan jalan dengan total panjang mencapai sekitar 28 km.<sup>37</sup>

Pelabuhan Surabaya mulai menghadapi persoalan ketika perkembangan pelayaran dan perdagangan mengalami peningkatan sementara kondisi fisik pelabuhan dan Kalimas semakin buruk. Perkembangan aktivitas di pelabuhan Surabaya semakin terlihat ketika Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda mengambil kebijakan untuk menjadikan pelabuhan ini sebagai titik pusat pelabuhan ekspor untuk wilayah Hindia Timur demi kepentingan tanaman produk pemerintah, terutama gula dan kopi, yang akan diekspor ke pasar Eropa. Ketimpangan antara peningkatan aktivitas pelayaran dan perdagangan dan kondisi fisik pelabuhan yang kurang mendukung aktivitas tersebut membutuhkan perhatian yang serius dari pihak-pihak terkait untuk lebih memperhatikan kondisi pelabuhan Surabaya.<sup>38</sup>

Sejak perempat akhir abad XIX mulai muncul pemikiran untuk membahas usaha pengembangan pelabuhan. Surabaya meskipun merupakan pelabuhan niaga penting di Hindia-Belanda, infrastruktur pelabuhan ini masih ketinggalan. Setelah jalan masuk ke kanal barat difungsikan kapal-kapal bisa berlabuh di tempat yang teduh di Pulau Madura dan berkumpul di tepi muara Kalimas. Jalan masuk ke pelabuhan ini berkembang sangat pesat hingga mencapai sekitar 3,5 kilometer dari kota sejak pembangunan benteng Prins Hendrik di muara Kalimas dimulai pada tahun 1837. Kapal-kapal

---

<sup>37</sup>D.G. Stibbe & F.J.W.H. Sandbergen, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie VIII* (s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1939), hlm.1463.

<sup>38</sup>Hal ini juga terungkap dalam surat W.G. Quellhorst, Ketua Perusahaan Dagang di Surabaya, kepada Majelis Rendah Parlemen Belanda tanggal 14 Juni 1902. Lihat: *De Indische Gids I*, 1902, hlm.873-874.

membongkar muatan di *grote boom* di seberang Jembatan Merah. Perahu-perahu tongkang atau sekoci membawa barang-barang impor ini untuk diperiksa dan dipungut cukainya sebelum dibawa pergi ke gudang penimbunan. Muatan ekspor utama berupa gula yang dibawa dari pedalaman dengan perahu sungai atau kereta api dan dialihkan ke gudang-gudang besar di sepanjang Kalimas juga diangkut dengan menggunakan perahu tongkang ke kapal-kapal yang akan membawanya ke berbagai negara tujuan.<sup>39</sup>

Namun pada pergantian abad, seiring dengan penerapan teknologi baru kapal uap dan pertumbuhan aktivitas pelayaran dan perdagangan, metode penanganan muatan secara tradisional dianggap sudah kurang memadai. Kebutuhan penimbunan barang sebelum dikapalkan di lahan gudang di sepanjang Kalimas telah meningkat semakin pesat. Pada pertengahan tahun 1900-an jarak yang harus ditempuh untuk mengangkut barang dengan perahu tongkang dari gudang ke kapal hanya sejauh 5 mil. Pembongkaran barang dari gerbong kereta menuju ke kapal ini melibatkan penanganan ganda yang tidak efisien. Untuk mencapai efisiensi diperlukan gudang yang memungkinkan kapal laut bisa memuat langsung barang dari gerbong kereta. Muatan impor menghadapi masalah yang sama. Pertumbuhan volume perdagangan dan ukuran kapal menunjukkan bahwa pembongkaran semua muatan impor di depan *grote boom* menjadi alasan kemacetan yang diperparah oleh kenyataan bahwa ujung sungai di muara Kalimas hanya bisa dilewati oleh perahu bermuatan pada saat gelombang tinggi. Dengan memperhatikan keadaan

---

<sup>39</sup>Proyek besar pertama adalah pembangunan pelabuhan Tanjung Priok yang terletak beberapa kilometer di sebelah timur pusat kota lama Batavia. Proyek ini dimulai pada tahun 1877 dan berakhir pada tahun 1886. H.W. Dick, *Surabaya City of Work, A Socio-Economic History, 1900 – 2000* (Ohio: Centre for International Studies, Southeast Asia Series, 2002), hlm. 46-47. Tentang kondisi pelabuhan-pelabuhan di Jawa pada tahun 1850-an yang buruk, sehingga membutuhkan perhatian pemerintah untuk segera mengambil langkah perbaikan, lihat: “Kondisi dan Masa Depan Pelabuhan-pelabuhan di Jawa setelah Janji Menteri”, dalam *TNI* 1, 1858.

semacam itu banyak pihak setuju bahwa sesuatu harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi pelabuhan Surabaya.<sup>40</sup> Perlunya perbaikan dan pembangunan pelabuhan Surabaya kemudian menjadi perdebatan hangat yang terus berlanjut di kalangan pengambil keputusan.

Sebagai pelabuhan yang tenang dan menguntungkan dari segi geografis, Surabaya menjadi pelabuhan terpenting di Jawa Timur bukan saja bagi kepentingan ekonomi melainkan juga untuk kepentingan pertahanan. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda untuk mengembangkan Surabaya sebagai pelabuhan niaga dan pelabuhan militer. Kedua kompleks pelabuhan itu terletak saling berdekatan. Kompleks pelabuhan niaga yang sering disebut sebagai Pelabuhan Tanjung Perak terletak di jalan masuk muara Kalimas yang dekat dengan Jembatan Merah. Pelabuhan inilah yang sejak zaman dahulu sebelum orang Barat datang ke Hindia telah berfungsi sebagai tempat perdagangan antarpulau dan internasional. Sementara kompleks pelabuhan militer yang dikenal pula sebagai Pangkalan Angkatan Laut terletak di sebelah timur muara Kalimas. Kompleks ini mulai digunakan sebagai pusat armada dan pertahanan sekaligus sebagai pelabuhan perang sejak tahun 1837. Masing-masing kompleks pelabuhan mempunyai aktivitas yang berbeda. Pelabuhan niaga berfungsi sebagai pelabuhan komersial yang menekankan pada kegiatan ekonomi, sedangkan pelabuhan militer berfungsi sebagai pelabuhan perang dengan menekankan pada kegiatan pertahanan dan perbaikan kapal perang serta pembuatan kapal. Kedua kompleks pelabuhan ini sama-sama penting bagi Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.

Peranan kawasan laut, khususnya Kawasan Laut Jawa, juga sangat penting dalam lalu-lintas perdagangan antarpulau di kepulauan Nusantara ini. Laut Jawa merupakan laut inti dari kepulauan ini selain Laut Banda dan Laut Flores. Kawasan Laut Jawa merupakan sebuah

---

<sup>40</sup> Dick, “*Surabaya City...*”, hlm. 48

zona yang dikelilingi oleh pelabuhan-pelabuhan yang terletak di pantai utara Jawa, di sekitar tenggara Sumatera, di wilayah selatan dan barat Kalimantan, dan pulau-pulau di bagian timur Nusantara.<sup>41</sup>

Eksistensi pelabuhan Surabaya sangat terkait dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan di wilayah Hindia bagian timur pada umumnya dan di wilayah Surabaya khususnya yang menunjukkan peranan pentingnya bagi VOC dan pemerintah kolonial sejak abad XVI hingga abad XX. Menjelang awal abad XVII perkapalan di Laut Jawa sangat ramai. Beberapa tempat seperti Banten dan Gresik masih merupakan pelabuhan dagang peringkat pertama di Hindia, yang kemudian digantikan oleh Batavia dan Surabaya untuk Jawa. Ketika pelayaran di Asia sudah dimasuki oleh kapal-kapal Eropa dengan ukuran yang relatif lebih besar, maka kapal-kapal Asia terlihat kecil. Dalam perdagangan dan pelayaran dengan kapal-kapal tersebut, pelabuhan Surabaya menjadi salah satu pelabuhan penting di Laut Jawa yang menghubungkan jalur perdagangan di Asia. Sebuah *jung* pada awal abad XVI mempunyai berat sekitar 400-500 ton. Kapal ini sebenarnya merupakan kapal paling besar pada periode tersebut apabila dibandingkan dengan bobot kapal pada akhir abad XVI yang hanya kurang dari separonya. *Jung* Jawa yang terbesar berbobot lebih dari 200 ton yang digunakan untuk mengangkut beras dari Jawa ke kota-kota di Sumatera dan Semenanjung Malaya. Sampai dengan tahun 1620 Raja Mataram masih memiliki sebuah *jung* pengangkut beras dengan bobot 400 ton. Kapal-kapal Asia yang berbobot antara 20-200 ton ini terlihat di pelabuhan Surabaya dengan jumlah “1000 atau lebih”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Jeroen Touwen, *Shipping and Trade in the Java Sea Region 1870-1900 A Collection of Statistics on the Major Java Sea Port* (Leiden: KITLV Press, 2001), hlm. 1.

<sup>42</sup>Jumlah “1000 atau lebih” menunjukkan pada betapa ramainya kapal-kapal dalam pelayaran Asia itu yang berlabuh di Pelabuhan Surabaya. Anthony Reid, *Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1860 Jilid II* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm.53.

Setelah akhir abad XVII terjadi kemunduran pelayaran pribumi. Aktivitas pelayaran akhirnya dikuasai oleh orang Eropa, khususnya VOC yang mendominasi 50% dari perkapalan dan setidaknya 40% dari perdagangan, meskipun sektor pelayaran dan perdagangan pribumi tidak sepenuhnya lenyap. Perubahan-perubahan di bidang pelayaran dan perdagangan laut ini juga ditentukan oleh hancurnya kota-kota pelabuhan pada masa Mataram, tindakan VOC atas perdagangan laut, dan tumbuhnya kekuasaan kolonial Belanda.<sup>43</sup>

Meskipun pelayaran pribumi mengalami kemunduran, namun bagi Surabaya dan *hinterland*-nya, pelayaran pedalaman masih berlangsung melalui Sungai Brantas. Memang hanya sungai ini yang bisa dilayari dari Tulungagung dan Mojokerto-Surabaya-Bangil yang dipenuhi oleh pabrik gula. Jalur pelayaran perahu ini tetap bertahan meskipun harus bersaing dengan jalur pengangkutan darat melalui jalan kereta api Kediri-Blitar yang dibangun pada tahun 1883. Akan tetapi segera setelah jalan kereta api dikelola oleh negara pada akhir abad XIX, pelayaran perahu ini merosot tajam meskipun tetap dianggap sebagai pesaing utama kereta api. Pengangkutan di sepanjang jalan air ini memang berlangsung jauh lebih lambat, namun pada sisi lain juga jauh lebih murah daripada kereta api, sehingga pengangkutan perahu menjadi pilihan utama. Setiap bulan rata-rata 20-30 perahu berangkat ke Surabaya. Perahu sungai yang digunakan di sini adalah jenis *compreng* yang dibuat dari kayu jati dari Surabaya dan mempunyai daya muat 10 *koyang* atau 4 *last*.<sup>44</sup>

Pada akhir abad XVIII, kebanyakan pelabuhan di Jawa terletak di daerah yang dikuasai oleh VOC di pantai utara Jawa. Wilayah ini terdiri atas bagian utara Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Pulau Madura. Pelabuhan-pelabuhan yang terletak di kawasan ini adalah Banyuwangi, Bangkalan, Rembang, Semarang,

---

<sup>43</sup>Gerrit Knaap, "Shipping and Trade in Java, c.1775; A Quantitative Analysis", *Modern Asia Studies* Vol 33, 1999 No.2, hlm. 405-420.

<sup>44</sup>Knaap, "*Shipping and ...*", hlm. 107.

Pasuruan, Surabaya, Juana, Pekalongan, Sumenep, Gresik, Jepara, dan Tegal. Sementara dua pelabuhan kecil lainnya di Jawa Barat yang juga dikuasai oleh VOC adalah pelabuhan Cirebon dan Banten. Rata-rata volume tahunan pelayaran kapal-kapal yang datang dan pergi yang diukur dalam ton di pelabuhan-pelabuhan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel**  
**Rata-rata Volume Kapal yang Berlabuh di Pelabuhan-pelabuhan di Jawa pada Tahun 1775-an**

Pelabuhan	Volume (ton)
Batavia	254.800
Semarang	108.800
Rembang	38.800
Surabaya	35.800
Gresik	35.800
Juana	30.400
Cirebon	20.800
Banten	19.400
Pekalongan	19.200
Jepara	19.000
Tegal	14.400
Sumenep	13.600
Bangkalan	7.200
Pasuruan	2.400
Banyuwangi	2.200

Sumber: Gerrit Knaap, "Shipping and Trade in Java, c. 1775: A Quantitative Analysis", dalam *Modern Asia Studies* Vol. 33, 1999 No. 2.

Volume tahunan dari semua pelabuhan tersebut sedikit di atas 622.600 ton. Batavia merupakan pelabuhan terbesar dengan sekitar 40% jumlah tonase, diikuti agak jauh oleh Semarang. Rembang sebagai pelabuhan pengekspor kayu menduduki posisi ketiga. Hal ini bisa dimengerti, karena komoditas yang diangkut dari Rembang didominasi oleh kayu jati. Sementara Surabaya menduduki posisi

keempat bersama dengan Gresik. Andil VOC dalam volume pelayaran dari semua pelabuhan adalah 321.200 ton, atau hampir 52%. Namun andil VOC mempunyai fluktuasi antara 25-60% di beberapa pelabuhan.<sup>45</sup> Dengan demikian jelas bahwa pelabuhan Surabaya lebih banyak menampung kapal-kapal berukuran relatif kecil, tetapi dalam jumlah yang relatif banyak. Hal ini terbukti bahwa sampai dengan akhir abad XVIII volume tahunan perkapalan di pelabuhan Surabaya lebih kecil jika dibandingkan dengan Batavia dan Semarang. Pada abad itu Batavia memang menjadi pelabuhan paling penting di Jawa dibandingkan dengan pelabuhan lainnya.<sup>46</sup>

Sesuai dengan laporan ekspor-impor yang ada, jenis barang-barang perdagangan juga mengalami perkembangan. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa pada abad XVII komoditas utama dalam perdagangan adalah beras dan rempah-rempah. Selanjutnya pada abad XVIII, selain beras dan rempah-rempah, kain dan candu serta porselin juga menjadi komoditas perdagangan yang penting. Pada abad XIX hingga abad XX, produk utama dalam perdagangan adalah gula. Dalam hal ini Surabaya menjadi pelabuhan ekspor gula terbesar pada saat itu. Sebagian besar karet juga diekspor dari Jawa melalui pelabuhan Surabaya.<sup>47</sup> Komoditas perdagangan yang lain pada abad XIX adalah akar wangi (sejenis bahan pembasmi serangga), arak, coklat, *cassia fistula*, minyak kopra, akar jarak, bunga pala (*fuli*), getah damar, getah perca, kulit, nila, kayu manis, kapuk, minyak kacang, katun mentah, kulit kina, biji kopi, kopi jadi, cengkih, lada putih, akar-akaran, tembakau, teh, panili, kulit samakan, dan serabut.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Perkecualian bagi aturan ini adalah dua pelabuhan di Madura, yakni Sumenep dan Bangkalan yang mengabaikan peran VOC. Alasan untuk itu adalah para penguasa lokal di Madura wajib menggunakan kapal mereka untuk mengirim upeti. Sementara Batavia, markas besar VOC di Asia, adalah yang paling menonjol. Knaap, "*Shipping and ...*".

<sup>46</sup>Gerrit Knaap, *Shallow Waters, Rising Tide Shipping and Trade in Java Around 1775* (Leiden: KITLV Press, 1996), hlm. 19-24.

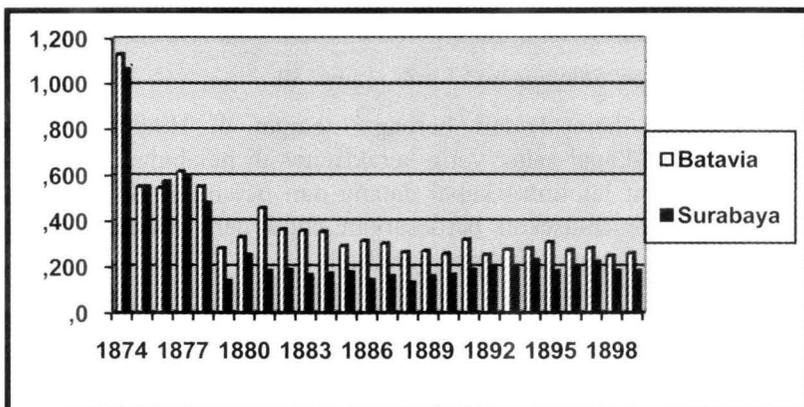
<sup>47</sup>Touwen, "*Shipping and Trade...*", hlm. 10.

<sup>48</sup>Blink, "*Nederlands Oost-en ...*", hlm. 163.

Sementara barang-barang yang sering menjadi komoditas impor adalah keramik, mentega, kain katun, anggur, kertas, minyak, nikel, porselin, rokok, soda, whisky, barang-barang dari besi, susu, roti, manufaktur, dan batubara. Impor terbesar yang dilakukan melalui pelabuhan Surabaya adalah tekstil, beras, dan mesin.

Untuk pelayaran internasional, sampai dengan akhir abad XIX posisi pelabuhan Surabaya masih berada di bawah pelabuhan Batavia. Hal ini dapat dilihat dalam grafik 1 di bawah ini.

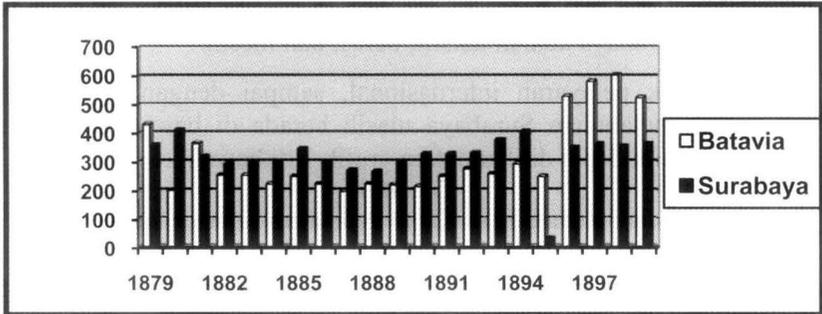
**Grafik 1**  
**Jumlah Kedatangan Kapal Pelayaran Internasional**  
**di Pelabuhan Batavia dan Surabaya Tahun 1874-1899**



Sumber : Touwen, *Shipping and Trade...*, hlm. 26.

Akan tetapi, dalam pelayaran interregional posisi pelabuhan Surabaya berada di atas pelabuhan Tanjung Priok. Grafik 2 berikut ini menunjukkan perbandingan jumlah kedatangan kapal dalam pelayaran interregional antara pelabuhan Surabaya dan Batavia. Dari grafik tersebut akan dapat dilihat bahwa dalam pelayaran interregional pelabuhan Surabaya berhasil mengungguli pelabuhan Batavia, sekurang-kurangnya antara tahun 1879-1893. Namun sejak tahun 1895-1899 pelabuhan Batavia berhasil menempati posisi yang dominan dalam pelayaran interregional.

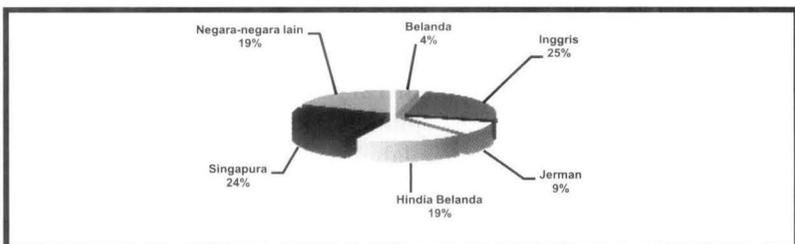
Grafik 2  
 Jumlah Kedatangan Kapal dalam Pelayaran Interregional  
 di Pelabuhan Batavia dan Surabaya Tahun 1879-1899



Sumber : Touwen, *Shipping and Trade...*, hlm. 30.

Selain berasal dari berbagai tempat di Hindia Belanda, terdapat kapal-kapal asing yang beraktivitas di pelabuhan Surabaya. Apabila tingkat lalulintas kapal datang dan berangkat di Pelabuhan Surabaya diprosentasekan berdasarkan andil dari berbagai negara, maka hasilnya dapat dilihat pada grafik 3.

Grafik 3  
 Prosentase Andil Kapal Berdasarkan Kebangsaan dalam Pelayaran  
 Internasional di Pelabuhan Surabaya  
 Tahun 1879- 1899



Sumber: Departement van Financien, *Statistiek van den Handel, de Scheepvaart en de in-en uitvoerregten in Nederlandsch Indie*, dalam berbagai tahun (Batavia: Landsdrukkerij).

Dari grafik 3 dapat diketahui bahwa dalam pelayaran internasional yang berlangsung di pelabuhan Surabaya, peranan kapal-kapal dari dan ke Belanda relatif kecil apabila dibandingkan dengan Inggris. Bahkan, meskipun kapal-kapal Belanda digabungkan dengan kapal-kapal Hindia Belanda, ternyata masih kalah dari andil kapal-kapal Inggris. Grafik tersebut sekaligus juga menunjukkan tentang jalur terpadat atau jalur “gemuk” dari pelayaran internasional yang dilayani oleh Pelabuhan Surabaya, yaitu jalur Surabaya-Inggris, Surabaya-Singapura, Surabaya-wilayah Hindia-Belanda, Surabaya-negara asing lainnya, dan Surabaya-Jerman serta Surabaya-Belanda. Dari fakta ini terbukti bahwa peranan Singapura dalam pelayaran internasional di pelabuhan Surabaya memang besar.

Sementara itu, untuk melihat indikasi tentang aktivitas ekspor dan impor dapat dilihat dari bermuatan atau tidaknya kapal-kapal yang datang ke dan pergi dari pelabuhan Surabaya. Khusus untuk periode tahun 1879-1899, aktivitas ekspor-import dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel**  
**Aktivitas Ekspor dan Impor dalam Pelayaran Internasional di Pelabuhan Surabaya Tahun 1879-1899 (dalam m<sup>3</sup>)**

Tahun	Kapal Datang (Impor)				Kapal Berangkat (Ekspor)			
	Bermuatan		Kosong		Bermuatan		Kosong	
	Jml	Kapasitas	Jml	Kapasitas	Jml	Kapasitas	Jml	Kapasitas
1879	137	92.876	3	2.211	154	94.467	13	3.325
1881	180	117.736	6	5.593	167	108.458	20	16.173
1883	161	292.031	16	51.880	140	260.475	29	7.010
1885	172	320.291	30	802	184	295.323	17	44.190
1887	156	310.825	18	1.840	172	276.342	16	43.766
1889	154	280.862	31	111.758	192	287.965	22	65.228
1891	186	401.402	31	132.233	186	485.218	10	36.155
1893	198	464.888	24	107.242	131	271.616	37	14.279
1895	181	393.458	42	230.057	184	416.802	4	11.914
1897	220	540.108	23	136.846	155	354.666	14	52.578
1899	180	506.539	62	411.133	117	288.309	9	44.784
<b>Total</b>	<b>1.925</b>	<b>3.721.016</b>	<b>286</b>	<b>1.191.595</b>	<b>1.782</b>	<b>2.863.327</b>	<b>191</b>	<b>339.403</b>

Sumber: Departement van Financien, *Statistiek van den Handel de scheepvaart en in-en Iutvoerregten in Nederlandsch Indie*, dalam berbagai tahun (Batavia: Landsdrukkerij).

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa volume kapal-kapal datang yang bermuatan (impor) menunjukkan peningkatan dan mencapai rata-rata 87,77% dibandingkan dengan kapal-kapal datang yang tidak bermuatan. Di sisi lain, volume kapal-kapal berangkat yang bermuatan (ekspor) menunjukkan adanya fluktuasi dan mencapai rata-rata 90,30% apabila dibandingkan dengan kapal-kapal berangkat yang tidak bermuatan. Dengan demikian, perbandingan volume ekspor dan impor menunjukkan adanya perimbangan, dan hal itu sekaligus juga menunjukkan ramainya aktivitas ekspor dan impor di pelabuhan Surabaya.

## Kesimpulan

Sejak zaman Majapahit, peranan sungai Brantas sebagai sarana transportasi telah memberikan andil yang besar dalam perkembangan ekonomi wilayah Jawa Timur terutama semakin berfungsinya Surabaya baik sebagai daerah, kota, dan pelabuhan yang diperhitungkan dunia. Itulah sebabnya sejak abad XIV Surabaya telah menjadi salah satu simpul jaringan perdagangan laut di Asia Tenggara. Peranan Surabaya dalam perdagangan dunia mengalami pasang dan surut seiring dengan persaingan politik dan ekonomi antara bangsa-bangsa asing di nusantara dan antara mereka dengan kerajaan pribumi yang menguasai Surabaya. Di bawah dominasi Belanda, Surabaya berkembang sebagai pelabuhan tersibuk dan kota terbesar kedua di Hindia-Belanda setelah Batavia.

Peningkatan aktivitas di pelabuhan Surabaya di dukung oleh aliran produk-produk dari daerah *hinterland* terutama di DAS atau Wilayah Sungai Brantas. Interaksi antara pelabuhan dan daerah *hinterland* terjalin melalui pelayaran sungai dan menjadi lebih intensif setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun jalan raya dan jalur-jalur kereta api. Jalur darat ini digunakan untuk mendukung eksploitasi kolonial terhadap daerah pedalaman yang subur dan padat penduduk melalui pengembangan berbagai industri, terutama gula. Industrialisasi pada masa kolonial mendorong terjadinya perluasan wilayah kota Surabaya dan munculnya kota-kota

di daerah pedalaman. Hubungan perdagangan dengan daerah lain di nusantara juga telah memantapkan Surabaya sebagai tempat utama dalam perdagangan laut nusantara, terutama di wilayah timur Indonesia.

Perubahan fungsi Sungai Brantas sebagai sarana transportasi sejak jalan raya dan jalan kereta api dibangun, telah menyurutkan bahkan mematikan secara perlahan-lahan pelayaran sungai dari daerah hinterland ke pelabuhan Surabaya. Hendaknya, perlu dipikirkan kembali fungsionalisasi sungai Brantas sebagai sarana transportasi, mengingat jalur darat semakin padat dengan berbagai permasalahannya. Untuk itu, diperlukan pengembangan konsep transportasi sungai yang lebih efektif, misalnya dibuat pelabuhan kecil atau dermaga bongkar muat di kota-kota yang dilalui sungai Brantas.

## Kepustakaan

Alfred, Eric R., *Singapore Port History 1819-1963* (Singapore: Port of Singapore Authority, 1987).

Anonim, *Boekoe Peringatan dari Staatspoor-en Tramwegen di Hindia Belanda 1875-1925* (Wetevreden: Topografische Inrichting, 1925).

Anonim, *Buku Ulang Tahun Kotamadya Surabaya ke-64* (Surabaya: Seksi Penerangan & Sekretariat Panitia HUT Hasta Windu, 1970).

Anonim, *Nota Over de Stoomtramwegnet in de Surabaya-Delta* (Utrecht: J. van Boekhandel, 1885).

Anonim, *Sekilas Sejarah Surabaya* (Surabaya: Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya).

Arsip Perkebunan No. 1103. Koleksi ANRI Jakarta.

- Blink, H., *Nederlandsch Oost en West Indie, Geographisch, Etnographisch en Ekonomisch Besrcheven II* (Leiden: E. J. Brill, 1907).
- Broeze, F.J.A., "The Merchan Fleet of Java 1820-1850 A Preliminary Survy" dalam *Archipel* No. 18 tahun 1979 (Paris: Association Archipel).
- Cobban, James L., *The City of Java; An Essay in Historical Geography* (Barkeley: University of California, 1970).
- Curtin, P.D., *Cross-cultural Trade in World History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).
- Campo, A., "Perahu Shipping in Indonesia 1870-1914, dalam *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* Volume 27; 1993 (Sydney: The University of Sydney, 1993).
- , The Accomodation of Dutch, British and German Maritime Interest in Indonesia, 1890-1910, dalam *International Journal og Maritime History* IV, No. I (June 1992).
- Deventer, C. Th. Van, *Overzicht van den Economischen toestand der Inlandsche Bevolking van Java en Madoera* ('s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904).
- D.G. Stibbe & F.J.W.H. Sandbergen, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie VIII* (s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1939).
- De Indische Gids I, 1902.
- Dick, H.W., *Surabaya City of Work, A Socio-economic History, 1900 – 2000* (Ohio: Centre for International Studies, Southeast Asia Series, 2002).
- Elson, R.E., *Peasant and The Colonial Sugar Impact and Change in an East Java Residency, 1830 – 1940* (Singapore: Oxford University Press, 1984).

- Faber, G.H. von, *Oude Soerabaja* (Soerabaia: H. Van Ingen, Bussum: NV Boekhandel en Drukkerij, 1931).
- Frederick, William H., *Hidden Change in Late Colonial Urban Society in Indonesia* (tanpa kota, penerbit dan tahun terbit).
- Graaf, H.J. de, *Surabaya dalam Abad XVII* (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, 1981-1982).
- Graaf, H.J. de dan Th. Pigeaud, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1974), hlm. 195-205.
- Hall, Kenneth R., *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985).
- Handinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Petra Surabaya & Penerbit Andi, 1996).
- Indriyanto, *Pelabuhan Rembang 1820 – 1900; Profil Pelabuhan Kecil dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Ekonomi Wilayah Rembang*. Tesis S2 pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1995.
- J. Kraus en G. J. de Jongh, *Verslag Over de Verbetering van Haventoestanden van Soerabaia* (Batavia: Landsdrukkerij, 1910).
- Knaap, Gerrit, "Shipping and Trade in Java, c.1775; A Quantitative Analysis", *Modern Asia Studies* Vol 33, 1999 No. 2.
- , *Shallow Waters, Rising Tide Shipping and Trade in Java Around 1775* (Leiden: KITLV Press, 1996).
- Kol, H. Van, *Reisverlag betreffende de Solo-Werken en de Haven van Soerabaia* (tanpa kota terbit, tanpa penerbit, dan tahun terbit, Koleksi KITLV Leiden No. M. 193).
- Mulyana, Slamet, *Negarakertagama dan Tafsir Sejarahnya* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1979).

- Mintosih, Sri, et al., *Pengetahuan, Sikap, Kepercayaan dan Perilaku Budaya Tradisional pada Generasi Muda di Kota Surabaya* (Jakarta: Depdikbud, 1977).
- Mills, J.V.C. (ed.), *Ma Huan: Ying Yai Sheng Lan, The Overall Survey of the Ocean's Shore 1433* (Cambridge: Cambridge University Press, 1970).
- PY Manguin, "Dunia yang Ramai: Laut Cina dengan Jaringan-jaringnya", dalam *Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan).
- Reid, Anthony, *Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1860 Jilid II* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).
- Soejono, R.P., "Remarks on Maritime Shipping in Prehistoric Times in Indonesia", *Supplementary Report for SPFA Consultative Workshop on Research on Maritime Shipping and Trade Networks in Southeast Asia (I-W7)*, Cisarua West Java, Indonesia, 20-17 November, 1984.
- Sutherland, Heather, "Notes on Java's Regen", dalam *Indonesia*, Oktober 1973.
- "De Staat der Soerabajasche Havenwerken", dalam *Indisch Bouwkundige Tijdschrift*, VI, 1913.
- Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies I* (The Hague, Bandung: van Hoove, 1995).
- Tim Penulis Puspindo, *Sejarah Pelayaran Niaga di Indonesia I (Pra-sejarah hingga 17 Agustus 1945)* (Jakarta: Yayasan Pusat Studi Pelayaran Niaga di Indonesia (Puspindo), 1990).
- Tijdschrift voor Nederlansch Indie II, 1859.
- Tome Pires, *The Summa Oriental and the Book of Francisco Rodrigues*; by Arnmando Cortesao (London: Hakluyt Society, 1994).

Touwen, Jeroen, *Shipping and Trade in the Java Sea Region 1870-1900 A Collection of Statistics on the Major Java Sea Port* (Leiden: KITLV Press, 2001).

“Invoer op Java Gedurende 1819”, dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, 1840, II.

“Staat van den Scheepvaart op Java en Madoera Gedurende het Jaar 1830”, arsip *Marine* Nomor 262, Koleksi ANRI Jakarta.

# PROSPEK PENGEMBANGAN DAS BRANTAS DALAM BIDANG SOSIAL EKONOMI

Oleh: Djoko Pitono<sup>1</sup>

## 1. MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL (Tujuan Pembangunan Abad Milenium)<sup>2</sup>

Untuk mengatasi masalah dasar yang mendera umat manusia, terutama di negara berkembang dan negara miskin, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mencanangkan “Tujuan Pembangunan Abad Milenium (*Millennium Development Goals /MGDs*) yang harus dicapai oleh 191 negara anggotanya pada tahun 2015. Adapun ke 8 (delapan) sasaran yang harus dicapai, adalah:

- (1) Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrem:
  - Mengurangi hingga ½ (setengah) jumlah orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari US\$ 1 (satu dolar Amerika) per hari;
  - Mengurangi hingga ½ (setengah) proporsi penduduk dunia yang menderita kelaparan.
- (2) Mencapai pendidikan dasar secara universal:
  - Memastikan bahwa semua anak lelaki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasar.
- (3) Meningkatkan kesetaraan jender dan memberdayakan wanita:
  - Menghilangkan kesenjangan jender di tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, kalau bisa pada 2005, dan paling lambat pada 2015.

---

<sup>1</sup>Djoko Pitono, Ahli Peneliti Utama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dipresentasikan pada “Seminar Perubahan DAS Brantas Dalam Perspektif Sejarah”, Surabaya Agustus, 2007

<sup>2</sup>Tujuan Pembangunan Abad Milenium/*Millennium Development Goals (MGDs)*, Kompas 4-8-05, hal 10

- (4) Mengurangi tingkat kematian anak:
  - Mengurangi hingga  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) tingkat kematian bagi anak-anak di bawah usia lima tahun (balita).
- (5) Memperbaiki kesehatan ibu:
  - Mengurangi hingga  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) tingkat kematian ibu.
- (6) Mengurangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya:
  - Menghentikan dan mulai mencegah penyebaran HIV/AIDS;
  - Menghentikan dan mulai mencegah wabah malaria dan penyakit utama lainnya.
- (7) Menjamin kelestarian lingkungan hidup:
  - Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkesinambungan lewat kebijakan-kebijakan dan penyusunan program-program, mencegah kerusakan sumber daya alam;
  - Mengurangi hingga setengah proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih untuk diminum;
  - Mencapai secara signifikan perbaikan hidup dari setidaknya 100 juta penduduk dunia yang hidup di daerah-daerah kumuh pada 2020.
- (8) Membentuk sebuah kerja sama global untuk pembangunan:
  - Menciptakan lebih jauh sistem perdagangan dan keuangan lewat sebuah peraturan internasional, menciptakan peraturan yang tidak diskriminatif dan bisa diterapkan di semua negara. Di dalam hal ini, termasuk adanya komitmen untuk menciptakan pemeritahan yang baik, program pembangunan dan program pengurangan kemiskinan (di tingkat nasional maupun tingkat internasional);
  - Menyusun daftar-daftar kebutuhan khusus yang paling diperlukan oleh negara-negara terbelakang. Di dalam konteks ini, di antaranya termasuk pembebasan tarif atau kuota atas ekspor negara terbelakang; meningkatkan porsi hutang yang dihapuskan, penghapusan hutang pemerintah secara bilateral; dan memberikan bantuan pemerintahan yang sifatnya lebih

berupa kemurahan hati pada negara terbelakang dalam rangka pengurangan kemiskinan;

- Menyusun daftar kebutuhan bagi daerah terpencil dan negara-negara berkembang yang sangat kecil ukurannya dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah;
- Mengupayakan secara komprehensif hutang tidak lagi menjadi beban; hutang negara berkembang lewat perangkat nasional dan internasional agar hutang tidak menjadi beban.
- Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan farmasi agar tersedia akses bagi negara termiskin di negara berkembang untuk mendapatkan obat-obatan;
- Kerja sama dengan sektor swasta dalam rangka penyebaran teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi, bagi semua negara yang paling membutuhkan.

Sesungguhnya umat manusia telah mulai mengupayakan perbaikan nasib warganya yang miskin, dan memperbaiki kerusakan lingkungan hidup dengan program pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, secara lebih bijak, sesuai dengan kesepakatan: *“World Summit for Sustainable Development”* di *Rio de Janeiro, Brazil 1992*. Kesepakatan Rio de Janeiro masih merupakan kesepakatan awal yang kemudian oleh para negara anggotanya dikembangkan menjadi program **“Agenda 21”**. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup meresmikannya menjadi **“Agenda Indonesia 21”**<sup>3</sup> yang berisi Kesepakatan Rio de Janeiro 1992 tersebut untuk Indonesia, yaitu:

*Bagian pertama: Pelayanan Masyarakat*

- (1) Pengentasan kemiskinan
- (2) Perubahan pola konsumsi
- (3) Dinamika kependudukan
- (4) Pengelolaan dan peningkatan kesehatan
- (5) Pengembangan perumahan dan pemukiman

---

<sup>3</sup> *Agenda Indonesia 21, Kemeterian Lingkungan Hidup, 1995*

- (6) Sistem perdagangan global, instrumen ekonomi serta neraca ekonomi & lingkungan terpadu

*Bagian kedua: Pengelolaan Limbah*

- (1) Perlindungan atmosfer
- (2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun
- (3) Pengelolaan limbah radioaktif
- (4) Pengelolaan limbah padat dan cair

*Bagian ketiga: Pengelolaan Sumberdaya Tanah*

- (1) Perencanaan sumberdaya tanah
- (2) Pengelolaan hutan
- (3) Pengembangan pertanian dan pedesaan
- (4) Pengelolaan sumberdaya air

*Bagian keempat: Pengelolaan Sumberdaya Alam*

- (1) Konservasi keanekaragaman hayati
- (2) Pengembangan bioteknologi
- (3) Pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan

Kesepakatan Rio de Janeiro 1992 dilanjutkan lagi lima tahun kemudian di Kyoto, Jepang tahun 1997. Kesepakatan Kyoto disamping lebih merinci “*World Summit for Sustainable Development*”, menetapkan juga Pemanasan Global Efek Rumah Kaca sebagai salah satu topik unggulan.

Lima tahun kemudian pertemuan dilanjutkan di Afrika Selatan yang menghasilkan **Kesepakatan Johannesburg 2002**. Apabila pertemuan lima tahunan di Brazilia dan di Jepang, lebih membahas “**Apa masalahnya?**” maka pada pertemuan di Afrika Selatan lebih maju lagi, yakni membahas “**Bagaimana menyelesaikan masalahnya dan kapan?**”. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pengentasan kemiskinan: “*Bahwa* pada tahun 2015 jumlah orang miskin dengan pendapatan per hari US\$ 1,- atau kurang, yang kelaparan dan yang tidak mendapat akses terhadap air minum yang aman (bersih), harus direduksi setengahnya”.

Belum lima tahun berselang, pada tahun 2005 PBB telah mengambil inisiatif untuk mempercepat dan mempertegas penyelesaian masalah utama kemanusiaan dan lingkungan hidup dalam dokumen “*Millennium Development Goal*”, seperti tertera di atas.

Pemerintah Indonesia meratifikasi semua program pengentasan kemiskinan tersebut. Masalahnya adalah, sudah sejauh mana pelaksanaan kebijakan pemerintah telah dilaksanakan di lapangan. Tahun 2015 tinggal 8 tahun lagi.

“Prospek Pengembangan DAS Brantas dalam Bidang Sosial Ekonomi” yang menjadi topik bahasan kali ini bertujuan untuk, melihat dan meletakkan proporsi prospek pengembangan DAS Brantas dalam kerangka kesepakatan “*Millenium Development Goal*” yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia. Sebagai contoh tindakan nyata yang harus kita lakukan dalam pengelolaan DAS Brantas antara lain, “dapatkah kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan butir-butir “*Millennium Development Goal*” sebagai berikut:

- Dapatkah DAS Brantas membantu “Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim?”. Atau lebih rinci lagi “Dapatkan DAS Brantas membantu mengentaskan kemiskinan dan kelaparan penduduk miskin yang tinggal di sepanjang DAS Brantas pada tahun 2015, menjadi separuhnya?”
- Dapatkah kita “*mengupayakan pendidikan dasar secara universal*” atau lebih spesifik: “Memastikan bahwa semua anak lelaki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasar” di sepanjang DAS Brantas?.
- Dapatkah kita “*Meningkatkan kesetaraan jender dan memberdayakan wanita*” atau “Menghilangkan kesenjangan jender di tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, kalau bisa pada 2005, dan paling lambat pada 2015 ?”.
- Dapatkah kita “*Mengurangi tingkat kematian anak*” atau “Mengurangi hingga 2/3 (dua per tiga) tingkat kematian bagi anak-anak di bawah usia lima tahun (balita)”.

- Dapatkah kita “*Memperbaiki kesehatan ibu*” atau “Mengurangi hingga  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) tingkat kematian ibu”.
- Dapatkah kita “*Menjamin kelestarian lingkungan hidup*” atau *lebih spesifik*: (a) Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkesinambunataugan lewat kebijakan-kebijakan dan penyusunan program-program, mencegah kerusakan sumber daya alam; (b) Mengurangi hingga setengah proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih untuk diminum; (c) Mencapai secara signifikan perbaikan hidup dari setidaknya 100 juta penduduk dunia yang hidup di daerah-daerah kumuh pada 2020.

Apabila pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kepedulian dasar “*Millennium Development Goal*” dapat dijawab dan dilaksanakan di lapangan, maka DAS Brantas dapat menjadi contoh pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Diharapkan pengalaman DAS Brantas bisa menjadi inspirasi bagi 89 DAS besar lainnya di Indonesia.

## 2. LATAR BELAKANG DAS BRANTAS

Secara garis besar, pengelolaan DAS Sungai Brantas dapat dilihat dari gambar-gambar di bawah ini. Konsep dasar pengelolaan dan pengembangan sebuah daerah aliran sungai adalah pengembangan bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir. Agar keterpaduan pembangunan ketiga bagian tersebut dianut prinsip pengelolaan “**Satu Sungai, Satu Rencana dan Satu Manajemen Terpadu**”

## Gambar-1, Konsep Dasar Pengembangan

### Pengelolaan SDA di Wilayah Sungai Kali Brantas Konsep Dasar Pengembangan



- Di bagian hulu : dibangun waduk untuk mengendalikan banjir dan menyimpan air dimusim hujan serta pembangkitan tenaga listrik
- Di bagian tengah : dibangun bendung untuk meninggikan muka air guna penyaluran air bagi berbagai keperluan (air minum, air industri, pertanian, perkebunan dlab.)
- Di bagian hilir : dibangun bendung untuk mencegah intrusi air laut

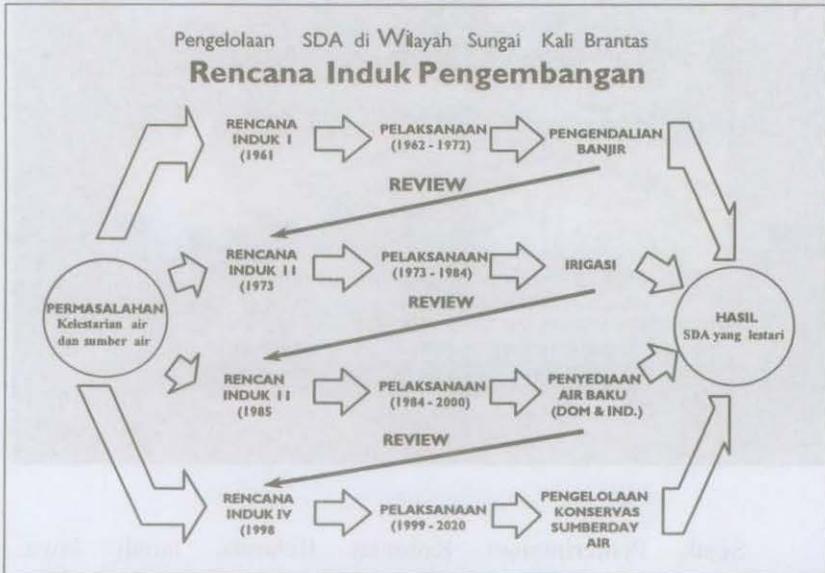
**satu sungai, satu rencana, satu manajemen terpadu**  
**one river, one plan, one integrated management**

Sejak Pemerintahan Kolonial Belanda, tanah Jawa, khususnya Jawa Timur, seperti halnya pulau-pulau lain, dikembangkan menjadi basis pertanian dan perkebunan karet, teh, kopi, kakao, tebu, lada dan lain-lain. Di dataran rendah yang datar dikembangkan perkebunan tebu untuk gula. Oleh karena itu sejak zaman kolonial tersebut, sistem pengairan telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.

Pada jaman pemerintahan RI, Rencana Induk DAS Brantas mulai dilaksanakan sejak tahun 1961, utamanya untuk menanggulangi banjir, kemudian di sempurnakan pada tahun 1973 untuk kepentingan irigasi, mengingat peningkatan penduduk menuntut tersedianya pangan yang memadai. Rencana Induk ketiga dilaksanakan pada

tahun 1985 untuk mengatasi kebutuhan air baku rumah tangga dan industri yang makin meningkat akibat pesatnya pertumbuhan industri pada era Orde Baru. Dan yang terakhir tahun 1998 untuk pengelolaan dan konservasi air, terutama dalam rangka mengatasi limbah.

**Gambar-2. Rencana Induk Pengembangan**



Hasil dan manfaat pengembangan DAS Brantas dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Total investasi yang sudah ditanam sebesar Rp.7,3 triliun (tahun 2001). Manfaatnya berupa pengendalian banjir 50-tahunan, irigasi, perikanan, listrik, suplai air baku untuk rumah tangga dan industri. Pada tahun 1999-2004 telah diselesaikan “*Brantas River Water Quality and Management Project*” untuk memonitor kualitas air di DAS Brantas.<sup>4</sup> Kerjasama antara Pemerintah Austria dan

<sup>4</sup>*Implementations of “The Brantas River Water Quality and Management Project”, Djoko Pitono, 2004*

Indonesia, yang dilaksanakan oleh *Verbundplan* dari pihak Austria dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk di kelola oleh Perum Jasa Tirta I.

**Gambar-3. Hasil dan Manfaat Pengembangan**

*Pengelolaan SDA di Wilayah Sungai Kali Brantas*  
**Hasil & Manfaat Pengembangan**

- **Prasarana pengairan (1961 – 2001):**
  - 5 bendungan (waduk tahunan )
  - 3 bendungan (waduk harian )
  - 6 bendung (3 bendung karet )
  - Tanggul pintu pintu air dsb .
- **Total investasi :**
  - Rp . 7.3 triliun (tahun 2001)
- **Manfaat:**
  - Pengendalian banjir : 5 tahun periode ulang
  - Irigasi : 304.000 ha (83.000 ha langsung dari K. Brantas :  
+ 2, milyar m<sup>2</sup>/th)
  - Perikanan : 15,000 ha
  - Listrik : 1 milyar kWh / tahun
  - Suplai air baku : Domestik : 22 juta m<sup>3</sup> / tahun  
Industri : 14 juta m<sup>3</sup> / tahun

Sejarah pembentukan Perum Jasa Tirta 1, secara singkat dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. Para pengembang dan pengelola DAS Brantas merasa bahwa hanya dengan motto “**Satu Sungai, Satu Rencana dan Satu Manajemen Terpadu**” kesinambungan dan keberadaan DAS Brantas dapat dipertahankan. Mengingat dana

## Gambar-4. Pembentukan dan Tugas Pokok

*Perum Jasa Tirta I*  
**Pembentukan & Tugas Pokok**

- **Didirikan berdasarkan :**  
PP No. 51/1990 tentang Perusahaan Umum Jas Tirta dan diperbaharui dengan PP No. 93/1999 tentang Perusahaan Umum Jas Tirta I.
- **Misi perusahaan:**
  - Memberikan pelayanan bagi kemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air serta sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
- **Tugas pokok perusahaan:**
  - Operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan
  - Pengusahaan air dan sumber-sumber air.
  - Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), antara lain perlindungan, pengembangan dan penggunaan air serta sumber-sumber air (melalui rekomendasi penyuluhan dan bimbingan)
  - Rehabilitasi prasarana pengairan

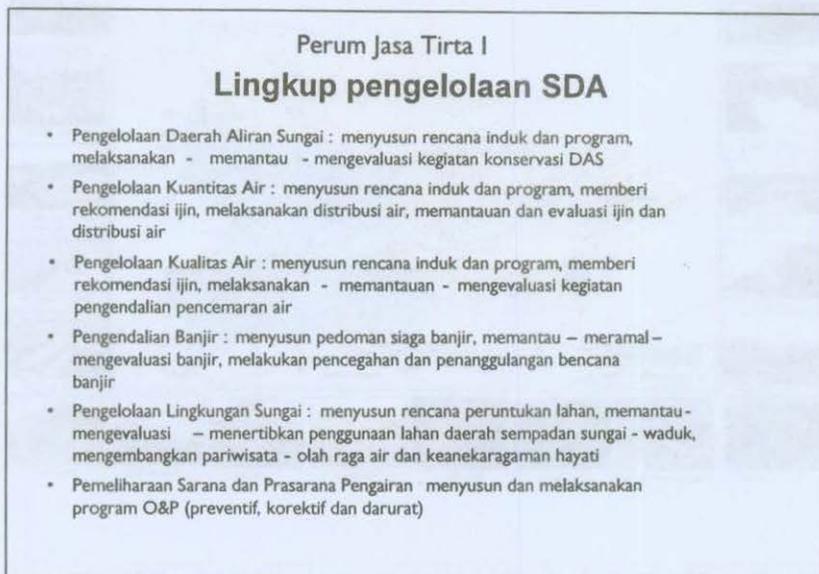
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Perusahaan menyelenggarakan usaha-usaha antara lain sebagai berikut :

- Usaha Pokok penyediaan air baku untuk berbagai keperluan
- Usaha Penunjang Pariwisata, Jasa Konsultasi, Jasa Konstruksi dan Jasa lain (sewa lahan, dsb)

pemerintah semakin terbatas untuk mengelola DAS Brantas khususnya dan semua DAS pada umumnya, maka diusulkan untuk membentuk badan pengelola berupa "Perusahaan Umum Jasa Tirta", sehingga dapat dikelola secara mandiri. Pemasukan didapat dari jasa pengadaan air baku utamanya untuk PDAM, PLN, dan Industri. Aset DAS Brantas tetap dimiliki Pemerintah, Perum Jasa Tirta hanya mengelola aset. Keberhasilan ini kemudian ditiru dengan adanya Perum Jasa Tirta lainnya. DAS Brantas menjadi Perum Jasa Tirta I, sedangkan Jatiluhur menjadi Perum Jasa Tirta II. Dipastikan akan dibentuk Perum Jasa Tirta lainnya. Sukses ini juga menjawab banyak kritik yang mengatakan: "*Indonesia pandai membangun tetapi kurang pandai memelihara*". Adapun lingkup pengelolaan SDA

dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Secara lebih rinci dapat dilihat dari Makalah yang dibacakan dalam "Seminar Indikator Pembangunan Berkelanjutan DAS Brantas" 30 Januari 2003.<sup>5</sup>

**Gambar-5. Lingkup Pengelolaan Sumber Daya Alam**

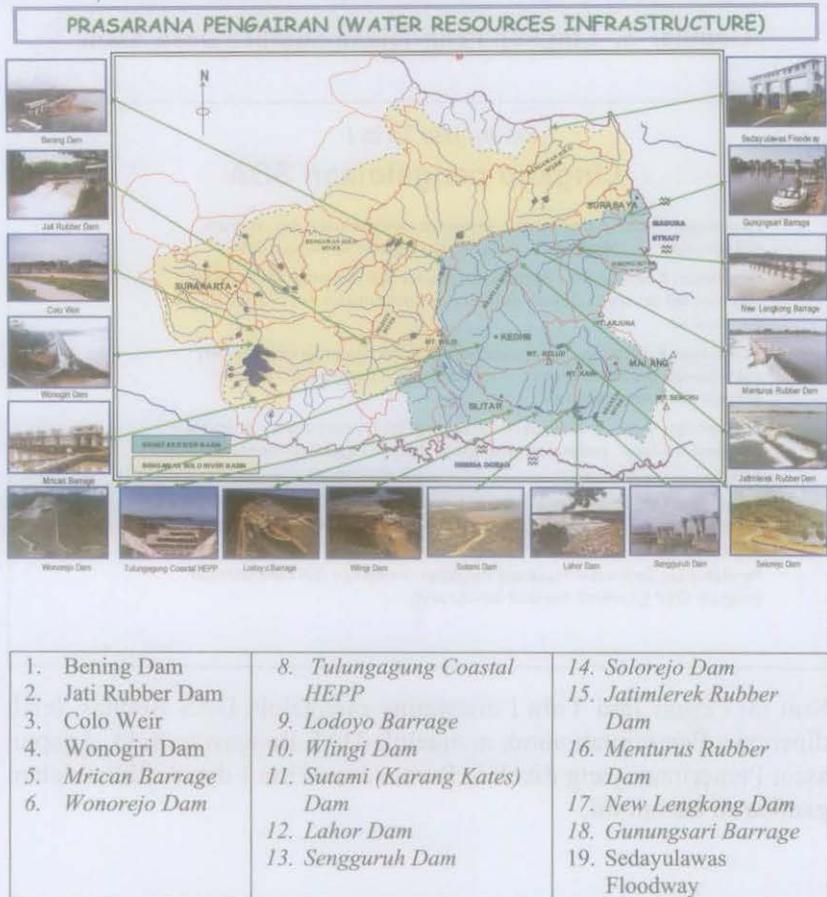


Saat ini Perum Jasa Tirta I disamping mengelola DAS Brantas, telah dipercaya Pemerintah untuk mengelola DAS Bengawan Solo. Adapun asset Pemerintah yang dikelola Perum Jasa Tirta I dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

---

<sup>5</sup>“Pengelolaan DAS Brantas” oleh Ir. Widyo Parmanto ME, Perum Jasa Tirta I. “Seminar Indikator Pembangunan Berkelanjutan DPS Brantas”. 30 Januari 2003, Kampus III Universitas Muhammadiyah, Malang.

**Gambar-6. Prasarana Pengairan DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo**



Aset DAS Brantas yang begitu besar merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Apalagi ditambah dengan asset DAS Bengawan Solo yang juga menjadi kebanggaan dan sekaligus tanggung jawab masyarakat JawaTengah dan Jawa Timur, merupakan

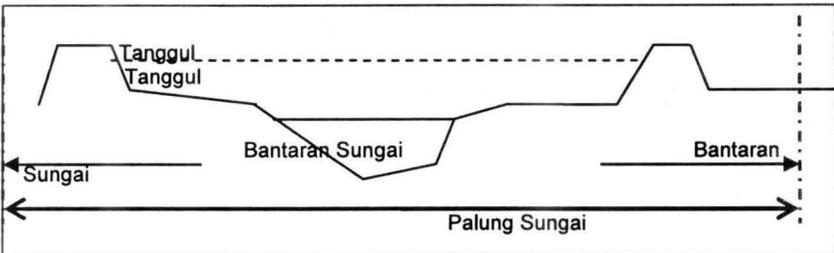
tantangan agar aset tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur.

### 3. TANTANGAN SEJARAH MASA DEPAN

#### 3.1 Pengertian Sungai<sup>6</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1991, sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Sedangkan garis sempadan sungai diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63 tahun 1993, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Daerah sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

**Gambar 7. Sempadan Sungai menurut Permen PU No.63/1993**



Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan sungai. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai, dihitung dari tepi sampai kaki tanggul sebelah dalam. Daerah Pengaliran Sungai (DPS) adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang

---

<sup>6</sup>Isnugroho, *Strategi Pengelolaan Sungai untuk Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan*, Balai Sungai Surakarta, Departemen Kimpraswil, 2002, *Peluang & Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia*.

terbentuk secara alamiah tempat meresap dan / atau mengalirnya air hujan yang jatuh di daerah tersebut melalui sungai dan anak-anak sungai di daerah itu.

### 3.2 Satuan Wilayah Sungai<sup>7</sup>

Mengingat area Indonesia sangat luas, maka pengelolaan sungai sebagai sumberdaya air yang penting dan strategis dilakukan melalui pendekatan Pengembangan Wilayah Sungai (PWS), suatu pendekatan menyeluruh (*integrated approach*) terhadap suatu wilayah sungai sebagai satu kesatuan wilayah pengembangan.

Daerah Pengaliran Sungai (DPS) dikelompokkan dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS). Seluruh Wilayah Indonesia telah dibagi menjadi **90 SWS**. Pembagian wilayah sungai menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39 tahun 1989 secara ringkas dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

**Tabel-1. Pembagian Wilayah Sungai menurut Peraturan Men. P.U No. 39/1989**

No.	Pulau	Jumlah SWS	Kode Wilayah Sungai
1	Sumatera	30	01.01 s/d 01.30
2	Jawa	15	02.01 s/d 02.15
3	Nusa Tenggara	7	03.01 s/d 03.07
4	Kalimantan	14	04.01 s/d 04.14
5	Sulawesi	17	05.01 s/d 05.17
6	Maluku	3	06.01 s/d 06.03
7	Papua	4	07.01 s/d 07.04

---

<sup>7</sup>Isnugroho, *Strategi Pengelolaan Sungai untuk Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan*, Balai Sungai Surakarta, Departemen Kimpraswil, 2002, *Peluang & Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia*, Hal 212

### 3.3 Potensi dan Ketersediaan Air di Indonesia<sup>8</sup>

Potensi sumberdaya air di Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 15.000 meter kubik per kapita per tahun. Jauh lebih tinggi dari potensi rata-rata pasokan dunia yang hanya 8.000 meter kubik per kapita per tahun. Sebagaimana yang dialami berbagai wilayah di dunia, di Indonesia pun terjadi ketimpangan distribusi curah hujan seperti yang dikehendaki oleh Allah Yang Maha Kuasa. Di seluruh pulau di Indonesia (17.508 pulau) terdapat perbedaan curah hujan dan ketersediaan yang amat bervariasi, seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel-9. Rata-Rata Aliran Tahunan & Ketersediaan Air di Pulau-pulau Besar di Indonesia**

Pulau	Rata-2 Aliran Tahunan m <sup>3</sup> /detik	Ketersediaan air per kapita per tahun (m <sup>3</sup> /kapita/tahun)						
		1930	1961	1971	1980	1990	1995	2000
Jawa	6.189	4.678	3.096	2.565	2.138	1.815	1.701	
Sumatera	24.041	91.844	48.171	36.428	27.062	20.788	18.569	
Kalimantan	32.719	475.711	251.601	200.275	153.476	113.436	98.542	
Papua	28.453		1.838.723	972.153	764.959	550.589	461.810	
Indonesia	104.862	54.456	34.715	27.741	22.421	18.346	16.980	15.975

### Defisit Air di Indonesia<sup>9</sup>

Pulau Jawa pada tahun 1930 masih mampu memasok 4.700 m<sup>3</sup>/kapita/tahun. Saat ini total potensinya sudah tinggal sepertiganya (1.500 m<sup>3</sup>/kapita/tahun). Nanti pada tahun 2020 total potensinya tinggal 1.200 m<sup>3</sup>/kapita/tahun. Dari potensi alami ini, hanya 35% yang layak secara ekonomis untuk dikelola. Maka potensi nyatanya

---

<sup>8</sup>Suparmono, *Kebijakan Pasokan Air 2020, Masyarakat Peduli Air, 2002, Peluang & Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia, Hal 73.*

<sup>9</sup>Suparmono, *Kebijakan Pasokan Air 2020, Masyarakat Peduli Air, 2002, Peluang & Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia, Hal 73.*

tinggal 400 m<sup>3</sup>/kapita/tahun, jauh di bawah angka minimum PBB, yaitu sebesar 1000 m<sup>3</sup>/kapita/tahun. Padahal dari jumlah 35% tersebut, sebesar 6% diperlukan untuk penyelamatan saluran dan sungai-sungai, sebagai *maintenance flow*. Oleh karena itu peta wilayah krisis air di bumi tahun 2025, terbitan *International Water Management Institute*, menyebutkan bahwa Jawa dan beberapa pulau lainnya sudah termasuk dalam wilayah krisis, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel-3. Neraca Air Tahun 1990 di Indonesia**

Daerah	Permintaan Jumlah (juta m <sup>3</sup> )	Potensi Ketersediaan (juta m <sup>3</sup> )	Surplus/Minus (juta m <sup>3</sup> )
1. Jawa	66.336	43.952	(- 22.384)
2. Sumatera	37.202	174.050	+ 136.848
3. Kalimantan	25.169	214.435	+ 189.266
4. Sulawesi	14.720	53.927	+ 39.207
5. Maluku	407	5.830	+ 5.423
6. Nusa Tenggara	141	21.793	+ 21.652
7. Papua	112	188.837	+ 188.126
Jumlah (Indonesia)	144.117	702.804	+ 552.126

Tahun 1990, Pulau Jawa sudah defisit air, dari permintaan 66.336 juta m<sup>3</sup>/tahun, hanya dapat disediakan pasokan 43.952 juta m<sup>3</sup>/tahun (*Water Resources Development 1990*).

Kajian lain yang dilakukan pada musim kemarau tahun 1993, mencatat bahwa 75% Pulau Jawa mengalami kekeringan akibat defisit air. Apabila dinyatakan dalam bobot, bahwa besarnya defisit air pada tahun 1993 sudah mencapai 40%, maka defisit air tahun 2000 meningkat menjadi 56%. Suatu angka yang mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai secermat mungkin.

Untuk melengkapi neraca kebutuhan dan ketersediaan air di Indonesia, ditampilkan data pendukung tambahan lainnya dari Kantor

Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 1997 dalam tabel di bawah ini.<sup>10</sup>

**Tabel-4. Neraca Air Tahun 1995 s/d 2015 di Indonesia**

No	Pulau	Ketersediaan Air (juta m <sup>3</sup> /th)	Kebutuhan Air (juta m <sup>3</sup> /thn)			Surplus/Deficit Air (juta m <sup>3</sup> /th)		
			1995	2000	2015	1995	2000	2015
1	Sumatera	111.008	19.165	25.296	49.583	91.913	85.780	61.495
2	Jawa	30.569	62.927	83.378	164.672	-32.358	-52.809	-134.103
3	Kalimantan	140.006	5.111	8.204	23.093	134.894	131.802	116.912
4	Sulawesi	34.787	15.257	25.556	77.305	19.531	9.232	-42.518
5	Bali	1.067	2.574	8.599	28.719	-1.507	-7.531	-27.652
6	N TB	3.509	1.629	1.832	2.519	1.880	1.676	989
7	NTT	4.251	1.736	2.908	8.797	2.515	1.343	-4.546
8	Maluku	15.458	236	305	575	15.222	15.153	14.882
9	Papua	350.590	128	283	1.311	350.461	350.306	349.278
Jumlah (Indonesia)		691.315	108.763	156.362	356.575	582.551	534.952	334.739

Demikianlah kilas sejarah masalah air di Indonesia yang terekam sejak tahun 1930 dan prakiraan hingga tahun 2025 ke depan.

### **3.5 Ancaman dan Tantangan DAS Brantas**

Pada umumnya masalah utama ketersediaan dan kebutuhan air di wilayah Indonesia adalah serupa. Pertumbuhan penduduk yang pesat diiringi oleh kebutuhan ekonomi yang makin meningkat, apalagi tanpa dibarengi dengan rencana pembangunan yang baik, selalu menimbulkan masalah banjir, limbah rumah tangga, limbah industri, kekurangan air, sehingga mengakibatkan kesenjangan kaya-miskin, apalagi dengan diumumkannya bahwa Indonesia menjadi negara pembabat hutan nomor satu dunia<sup>11</sup>. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 memperparah kondisi kehidupan bangsa.

<sup>10</sup>Sutopo Purwo Nugroho, *Pengelolaan DAS dan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan, 2002, Peluang & Tantangan Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia*, Hal 165..

<sup>11</sup>Indonesia Masuk "Rekor Dunia", "Tercatat sebagai Penghancur Hutan Tercepat di Dunia", *Kompas* 4 Mei 2007.

Sayangnya reformasi yang sudah berjalan selama sembilan tahun juga belum kunjung dapat memperbaiki kesejahteraan bangsa.<sup>12</sup>

Adapun ancaman dan tantangan yang dihadapi Perum Jasa Tirta I dalam mengelola DAS Brantas pada khususnya dan DAS Bengawan Solo pada umumnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

### **Gambar-8. Ancaman dan Tantangan**

*Perum Jasa Tirta I*

**Ancaman dan Tantangan yang Dihadapi**

- Sedimentasi waduk akibat degradasi fungsi daerah tangkapan hujan
- Kebutuhan air yang terus meningkat dengan ketersediaan yang sangat terbatas mengakibatkan timbulnya potensi konflik antar pemanfaat
- Beban pencemaran yang masuk sungai melampaui daya dukung sungai akibat dari pengendalian pencemaran yang belum efektif pelaksanaannya
- Kerusakan sarana dan prasarana akibat penggalian pasir yang tidak terkendali yang dapat menimbulkan bencana banjir
- Penggunaan tanah di daerah sempadan sungai yang tidak sesuai peruntukan mengakibatkan sulitnya pelaksanaan pemeliharaan sungai
- Keterbatasan kontribusi pemanfaat (dalam bentuk iuran) mengakibatkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan dengan semestinya yang menimbulkan penurunan fungsi – umur sarana dan prasarana serta peningkatan kebutuhan dan untuk rehabilitasinya .

Sesuai disain sebuah waduk atau bendungan, biasanya umur waduk berkisar antara 25 hingga 75 tahun. Namun apabila investasi berskala raksasa tersebut tidak dipelihara, misalnya karena pembabatan hutan, maka umur waduk atau bendungan tersebut akan lebih singkat. Pengerukan bendungan merupakan kegiatan tambahan akibat proses sedimentasi yang berlebihan dan sebetulnya dapat

---

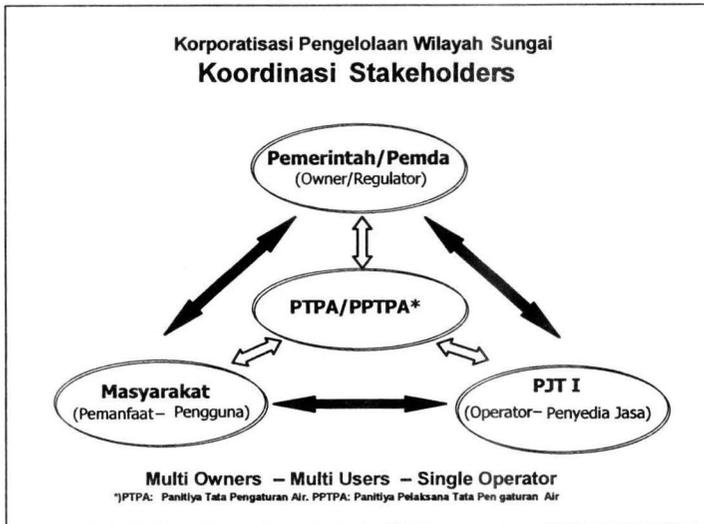
<sup>12</sup> “Reformasi Baru Sebatas Ornamen Demokrasi”. Suwardiman, Kompas, 28 Mei 2007.

dihindarkan apabila pengelolaan hutan di hulu DAS dilaksanakan dengan benar.

Untuk menghindari konflik antara pengguna DAS, telah dikeluarkan peraturan dan pengaturan bersama antara: (1) Pemerintah Daerah, (2) Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA) dan Panitia Pelaksana Tata Pengatur Air (PPTPA), (3) Masyarakat Pengguna (PDAM, PLN, Industri, Irigasi, Masyarakat Umum) dan (4) Perum Jasa Tirta I (operator/ penyedia jasa). Diharapkan kerjasama antar instansi, pengelola, pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat umum tersebut, dapat mengatasi kemungkinan konflik kepentingan yang tidak diharapkan. Secara singkat dapat digambarkan dalam skema di bawah ini.

Secara lebih rinci mekanisme pelaporan dan tindak turutan terjadinya pencemaran air digambarkan dalam skema selanjutnya.

**Gambar-9. Koordinasi Stakeholder**





**Tabel-5. Indeks Kemiskinan**

HUMAN POVERTY INDEX (INDEKS KEMISKINAN) INDONESIA 2003							
Provinsi	% Kematian <40 th	% Buta Huruf	% Tanpa Fasilitas Air Bersih	% Tanpa Fasilitas Kesehatan	% Balita Kurang Gizi	Human Poverty Index	HPI Ranking
Aceh	12,6	4,2	48,5	38,0	35,2	28,4	23
SumUtara	13,3	3,9	41,8	30,4	33,0	24,8	15
SumBarat	15,2	4,9	42,4	27,6	28,0	23,4	12
Riau	12,0	3,5	58,9	29,7	18,4	25,1	16
Jambi	13,9	5,3	47,4	23,1	25	22,7	9
SumSelatan	16,0	5,9	52,7	36,0	28,2	27,7	21
Bengkulu	16,3	7,0	45,0	22,0	26,4	22,7	8
Lampung	15,2	7,0	45,9	29,8	24,2	23,9	13
BangkaBel	16,0	8,3	48,9	35,3	21,1	25,2	18
DKIJakarta	6,7	1,8	30,3	2,9	23,2	13,2	1
Jawa Barat	18,0	6,9	53,0	19,0	21,5	23,0	11
Jawa Tengah	10,9	14,3	39,8	20,9	25,0	21,0	6
DI Yogya	6,7	14,1	38,9	7,7	16,9	16,1	2
Jawa Timur	15,3	16,8	36,7	22,2	25,5	21,7	7
Banten	21,7	6,2	55,8	23,5	20,5	25,1	17
Bali	9,5	13,5	39,3	19,8	18,7	17,3	3
NTBarat	27,3	22,2	52,3	21,6	37,8	30,2	26
NTTimur	19,2	15,9	46,8	32,8	38,8	28,9	24
KalBarat	18,1	13,1	78,5	50,1	33,2	38,0	30
KalTengah	10,2	3,6	66,7	33,6	31,9	30,7	27
KalSelatan	23,9	6,7	41,5	27,3	30,2	25,5	19
KalTimur	10,2	4,8	37,3	22,2	21,5	19,1	5
SulUtara	8,4	1,2	35,7	18,4	21,9	17,8	4
SulTengah	20,1	6,7	53,8	36,8	29,6	28,9	25
SulSelatan	11,3	16,5	45,1	27,3	29,1	24,6	14
SulTenggara	16,8	11,8	41,3	37,4	28,3	25,8	20
Gorontalo	18,5	4,8	62,4	32,7	42,0	32,4	29
Maluku	16,2	3,7	43,9	26,1	25,2	22,9	10
MalukuUtara	20,7	4,2	43,2	42,2	29,6	27,9	22
Papua	16,8	25,6	61,6	36,1	24,3	30,9	28

Variasi indikator kesejahteraan rakyat amat banyak, Indikator Kemiskinan merupakan salah satu yang amat penting, dan sekedar untuk menjembatani kondisi kesejahteraan rakyat Jawa Timur, dengan Program *Millenium Development Goal*, ada baiknya

ditampilkan data tentang “Rumah Berlantai Tanah” di Kabupaten dan Kota Jawa Timur”, khususnya di sepanjang DAS Brantas dan Bengawan Solo.

**Tabel-6. Kondisi Rumah Berlantai Tanah**

PROVINSI JAWA TIMUR				
NO.	KABUPATEN	% RUMAH LANTAI TANAH	KABUPATEN	% RUMAH LANTAI TANAH
1	Pacitan	38,92	Magetan	16,44
2	Ponorogo	34,98	Ngawi	62,12
3	Trenggalek	28,35	Bojonegoro	76,60
4	Tulung Agung	18,61	Tuban	55,04
5	Blitar	22,06	Lamongan	49,94
6	Kediri	15,65	Gresik	19,21
7	Malang	17,46	Bangkalan	27,05
8	Lumajang	11,79	Sampang	62,36
9	Jember	20,26	Pamekasan	42,77
10	Banyuwangi	19,02	Sumenep	9,61
11	Bondowoso	39,08	Kediri-Kota	3,60
12	Situbondo	39,91	Blitar-Kota	3,60
13	Probolinggo	33,80	Malang-Kota	4,62
14	Pasuruan	17,18	Probolinggo Kota	4,92
15	Sidoarjo	4,27	Pasuruan Kota	1,01
16	Mojokerto	18,72	Mojokerto -- Kota	5,63
17	Jombang	22,21	Madiun-Kota	2,81
18	Nganjuk	36,56	Surabaya-Kota	2,77
19	Madiun	36,56		

Diluar dugaan ternyata masih terdapat 13 Kabupaten yang rumah penduduknya berlantai tanah di atas 30%. Yang tertinggi Bojonegoro 76,60%. Selanjutnya bisa dilihat kondisi serupa untuk Kota dan Kabupaten Jawa Timur yang berada di sepanjang DAS Brantas dan Bengawan Solo.

#### 4.1. Kemiskinan Desa<sup>13</sup>

Desa hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan. Pada tahun 1998 dari **49,5 juta jiwa penduduk miskin** di Indonesia sekitar **60%-nya** (29,7 juta jiwa) tinggal di daerah pedesaan. Pada tahun 1999, prosentase angka kemiskinan mengalami penurunan dari 49,5 juta jiwa menjadi 37,5 juta jiwa. Prosentase kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan, tetapi prosentase kemiskinan di daerah pedesaan justru mengalami peningkatan dari 60% tahun 1998 menjadi 67% tahun 1999 sebesar 25,1 juta jiwa, sementara di daerah perkotaan hanya mencapai 12,4 juta jiwa (Data BAPPENAS, 2004). Data tersebut diperkuat laporan Kompas tahun 2004 yang menyajikan bahwa lebih dari 60% penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian, desa hingga sekarang tetap menjadi kantong terbesar dari pusat kemiskinan. Tabel berikut menggambarkan prosentase perubahan dan jumlah penduduk miskin antara kota dengan desa dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1999. Kemiskinan terendah dicapai pada tahun 1996. Mampukah kita mengembalikan ke posisi tahun 1996? Harus berjuang.

---

<sup>13</sup>*Menanggulangi Kemiskinan Desa, Gregorius Sahdan, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta, Direktur Kajian Politik dan Pembangunan Kawasan, Center for Humanity and Civilization Studies (CHOICES), Asisten Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta.*

**Tabel-7. Persentasi & Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin 1976-1999**

Tahun	Desa		Kota	
	Penduduk miskin (juta jiwa)	(%)	Penduduk miskin (juta jiwa)	(%)
1976	44,2	40,4	10,0	38,8
1978	38,9	33,4	8,3	30,8
1980	32,8	28,4	9,5	29,0
1981	31,3	26,5	9,3	28,1
1984	25,7	21,2	9,3	23,1
1987	20,3	16,4	9,7	20,1
1990	17,8	14,3	9,4	16,8
1993	17,2	13,8	8,7	13,4
1996	15,3	12,3	7,2	9,7
1998	31,9	25,7	17,6	21,9
1999	25,1	20,2	12,4	15,1

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonomi 1996-1999.*

Sejarah masa depan dapat kita siapkan dengan baik apabila kesadaran akan pengalaman pahit masa lalu kita jadikan cermin pelajaran berharga, sedangkan kondisi nyata yang kita hadapi sekarang harus kita atasi sekuat tenaga, serta menyiapkan perbaikan untuk menyusun masa depan. Kita teladani sikap juang para pendiri bangsa kita Bung Karno, Bung Hatta dan kawan-kawan. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang berdasarkan hasil mimpi, perencanaan dan perjuangan yang gigih tanpa mempedulikan derita yang dialami. Pengadilan, penjara, pengucilan, pembuangan dan penyiksaan batin tidak mengecilkan keinginan untuk memerdekakan Bangsa Indonesia dari penjajah Belanda.

Apabila data hasil perhitungan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 dijadikan patokan, maka jumlah penduduk miskin yang harus dientaskan separuhnya pada tahun 2015 cukup besar yaitu 30 juta orang, seperti dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel-8. Keluarga Miskin sesuai BPS 2005 untuk Bantuan Langsung Tunai<sup>14</sup>**

No	Provinsi	Keluarga Miskin	No	Provinsi	Keluarga Miskin
1	N. Aceh D.	Belum didata	18	Nusa Tenggara Barat	485.086
2	Sumatra Utara	641.938	19	Nusa Tenggara Timur	554.045
3	Sumatra Barat	233.695	20	Kalimantan Barat	284.866
4	Riau	274.576	21	Kalimantan Tengah	130.267
	Jambi	172.310	22	Kalimantan Selatan	199.424
6	Sumatra Selatan	502.200	23	Kalimantan Timur	168.571
7	Bengkulu	118.505	24	Sulawesi Utara	98.906
8	Lampung	655.905	25	Sulawesi Tengah	175.076
9	Bangka Belitung	27.285	26	Sulawesi Selatan	472.008
10	Kepulauan Riau	54.192	27	Sulawesi Tenggara	182.583
11	DKI Jakarta	101.219	28	Gorontalo	73.250
12	Jawa Barat	2.573.522	29	Sulawesi Barat	77.557
13	Jawa Tengah	2.708.598	30	Maluku	125.309
14	DI Yogya	233.956	31	Maluku Utara	54.077
15	Jawa Timur	2.728.629	32	Irian Jaya Barat	96.619
16	Banten	435.090	33	Papua	150.725
17	Bali	118.447	Total Keluarga Miskin		14.898.436
			Total Penduduk Miskin*		59.593.744

*\*) Catatan: Satu keluarga rata-rata empat jiwa*

Jawa Timur ternyata mempunyai beban penduduk miskin terbesar diantara 33 provinsi, yaitu 2.728.629 keluarga atau 10.914.516 orang. Tentu saja penduduk miskin di sepanjang DAS Brantas dapat dihitung kemudian.

<sup>14</sup> *Bantuan Langsung Tunai, Kompas 20 Oktober 2005.*

Belum selesai dengan masalah pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Jawa Timur, khususnya di sepanjang DAS Brantas, Indonesia kembali dilanda musibah gempa besar, yang salah satunya menyebabkan terjadinya LUMPUR PANAS Sidoarjo pada tanggal 29 Mei 2006, setelah diguncang oleh Tsunami di Aceh 26 Desember 2004.

Masih lekat dalam ingatan, dengan suara keras, bergetar, Yohanes Imam Suwadi (72)<sup>15</sup> menyatakan ketidakpercayaannya kepada pemerintah. "Kami korban luberan lumpur PT Lapindo Brantas merasa diabaikan, ditinggalkan," tutur Yohanes dan diamini oleh warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perumtas) 1 yang kala itu ikut serta.

Mengapa? Padahal, jika diperhatikan, sejak lumpur meluber, pemerintah telah membentuk tim independen untuk menginvestigasi penyebab terjadinya luapan lumpur di Porong, Sidoarjo, pada 14 Juni 2006. Berbagai upaya dilakukan, seperti membuat tanggul, menyediakan pompa pengendali, memberi bantuan dana dan ganti rugi, hingga pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 pada 8 April 2007. Kembali jika dicermati, apa yang sebenarnya belum dilakukan?

Namun di sisi lain, dapat ditanyakan penderitaan seperti apa yang belum dialami warga? Mulai dari kehilangan tempat tinggal, lahan persawahan, pekerjaan, keluarga, masa depan, hingga ingatan.

---

<sup>15</sup>*Persoalan Masyarakat, Jangan Lupakan Korban Lapindo*  
*.B.J.S.Hardianto & M.Z.Wahyudi, Kompas, 30 Mei 2007*

**Gambar 11. Keganasan Lumpur Panas Sidoarjo**



Niat untuk bertemu sempat ditolak Presiden sebelum akhirnya diluluskan. Bahkan, sebelumnya mereka diterima juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjanjikan dana ganti rugi sebesar 20 persen segera dikucurkan langsung. Harapan kembali pulih dan mereka kembali ke Sidoarjo. Namun, satu tahun sudah bencana itu menggerus harapan mereka. Selama itu juga mereka terus menuai janji.

Yohanes mengungkapkan, sulit berharap kepada pemerintah karena pemerintah dinilainya lebih peduli kepada kondisi PT Lapindo Brantas daripada kepada warga korban. Padahal, dari data yang dihimpun *Kompas*, sebanyak 29.484 warga Porong, 34.946 warga Tanggulangin, dan 21.884 warga Jabon turut serta mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla ke tampuk tertinggi kepemimpinan Indonesia.

Kilas balik sejarah penanggulangan kemiskinan tingkat nasional akan di bahas pada bab 4.2 di bawah ini. Upaya yang telah dilaksanakan mengalami pasang surut. Bahwa upaya tersebut selalu dilaksanakan oleh pemerintah, merupakan hal yang terpuji, namun kegagalan yang terjadi seyogyanya menjadi cermin untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kegagalan yang terjadi diulas

dalam bab selanjutnya, demikian pula usulan perbaikan kebijakan juga dikemukakan sebagai masukan untuk kita semua dalam merencanakan sejarah yang lebih baik.

“Dapatkah kita menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan butir-butir *“Millennium Development Goal”* sebagai berikut:

**Tabel-9. Target Millennium Development Goal**

<b>Target Millennium Development Goal</b>	<b>Alternatif Solusi</b>
Dapatkah DAS Brantas membantu “Meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim?”. Atau lebih rinci lagi “Dapatkan DAS Brantas membantu mengentaskan kemiskinan dan kelaparan penduduk miskin yang tinggal di sepanjang DAS Brantas pada tahun 2015, menjadi separuhnya?”	Data Bantuan Langsung Tunai/ BLT, dapat dijadikan data dasar Rencana Pengentasan Kemiskinan DAS Brantas.
Dapatkah kita “ <i>mengupayakan pendidikan dasar secara universal</i> ” atau lebih spesifik: “Memastikan bahwa semua anak lelaki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasar” di sepanjang DAS Brantas?.	Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Daerah bertanggung jawab penuh.
Dapatkah kita “ <i>Meningkatkan kesetaraan jender dan memberdayakan wanita</i> ” atau “Menghilangkan kesenjangan jender di tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, kalau bisa pada 2005, dan paling lambat pada 2015 ?”.	Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Daerah bertanggung jawab penuh.
Dapatkah kita “ <i>Mengurangi tingkat kematian anak</i> ” atau “Mengurangi hingga 2/3 (dua per tiga) tingkat kematian bagi anak-anak di bawah usia lima tahun (balita)”.	Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan bertanggung jawab penuh.
Dapatkah kita “ <i>Memperbaiki kesehatan ibu’</i> atau “Mengurangi hingga ¾ (tiga per empat) tingkat kematian ibu”.	Pemerintah Daerah/Dinas Kesehatan bertanggung jawab penuh.
Dapatkah kita “ <i>Menjamin kelestarian lingkungan hidup</i> ” atau lebih spesifik	Pemerintah Daerah/Dinas LH bertanggung Jawab penuh.

(a) Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkesinambungan lewat kebijakan-kebijakan dan penyusunan program-program, mencegah kerusakan sumber daya alam;	Pemerintah Daerah/Dinas LH Bertanggung Jawab penuh.
(b) Mengurangi hingga setengah proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih untuk diminum;	PDAM dapat mengambil prakarsa penuh
(c) Mencapai secara signifikan perbaikan hidup dari setidaknya 100 juta penduduk dunia yang hidup di daerah-daerah kumuh pada 2020.	Pemerintah Daerah bertanggung Jawab penuh.

Alternatif solusi yang tercantum dalam tabel di atas hanya menyebutkan kebutuhan data dasar yang lebih akurat, dimana data Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), telah mengalami uji lapangan hingga tingkat RT dan RW bersama dengan petugas BPS. Diharapkan data tersebut dapat menunjukkan sasaran keluarga miskin yang lebih tepat.

Untuk memenuhi target “*Millennium Development Goals*” lainnya, hanya disebutkan instansi paling berwenang yang bertanggung jawab. Maksudnya di bawah bimbingan instansi tersebut diharapkan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dapat disosialisasikan, sehingga masyarakat umum secara terorganisir dan sinergis dapat menjalankan dengan lebih teratur dan memenuhi sasaran yang direncanakan Pemerintah.

#### 4.2. Review Kebijakan dan Program<sup>16</sup>

Selama ini, kebijakan penanggulangan kemiskinan, didesain secara sentralistik oleh pemerintah pusat yang diwakili oleh BAPPENAS. BAPPENAS merancang program penanggulangan kemiskinan dengan dukungan alokasi dan distribusi anggaran dari

---

<sup>16</sup>*Menanggulangi Kemiskinan Desa, Gregorius Sahdan, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta, Direktur Kajian Politik dan Pembangunan Kawasan, Center for Humanity and Civilization Studies (CHOICES), Asisten Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.*

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan hutang kepada Bank Dunia serta lembaga keuangan multinasional lainnya. Berkat alokasi anggaran yang memadai, pemerintah pusat menjalankan kebijakan sentralistik dengan program-program yang bersifat karitatif. Sejak tahun 1970-an di bawah kebijakan *economic growth* sampai dengan sekarang, pemerintah pusat menjadikan desa sebagai obyek dari seluruh proyek yang dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menjalankan program-programnya dalam bentuk: (1) Menurunkan jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan melalui bantuan kredit, jaminan usaha dan pengadaan sarana dan prasarana di desa seperti PUSKESMAS, INPRES, KUD, dan sebagainya; (2) Mengusahakan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui distribusi sembako yang dibagikan secara gratis kepada penduduk miskin; (3) Mengusahakan pelayanan kesehatan yang memadai dengan menyebarkan tenaga-tenaga kesehatan ke desa dan pengadaan obat-obatan melalui PUSKESMAS; (4) Mengusahakan penyediaan fasilitas pendidikan dasar dengan memperbanyak pendirian sekolah-sekolah INPRES; (5) Menyediakan kesempatan bekerja dan berusaha melalui proyek-proyek perbaikan sarana dan prasarana milik pemerintah, penyediaan kredit dan modal usaha yang diberikan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat miskin; (6) Memenuhi kebutuhan perumahan dan sanitasi dengan memperbanyak penyediaan rumah-rumah sederhana untuk orang miskin; (7) Mengusahakan pemenuhan air bersih dengan pengadaan PAM; (8) Menyediakan sarana listrik masuk desa, sarana telekomunikasi dan sejenisnya; dan sebagainya.

Berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah tersebut, lebih banyak menuai kegagalan dibandingkan dengan keberhasilannya. Program Kredit Usaha Tani (KUT) misalnya, merupakan salah satu di antara serangkaian program pemerintah yang terbaru, yang menuai kegagalan. Program ini menempatkan Bank, Koprasi, LSM dan kelompok tani hanya sebagai mesin penyalur

kredit, sedangkan tanggung jawab kredit terletak di tangan Departemen Koperasi. Pada tahun 1998, plafon KUT mencapai 8,4 triliun rupiah naik 13 kali lipat dari sebelumnya. Para petani menyebut program ini sebagai "kesalahan bertingkat enam" karena; (1) Pelaksanaan KUT tidak benar-benar memberdayakan petani; (2) Mesin penyalur KUT (LSM, Bank, Koprasi), ditunjuk tidak diseleksi secara ketat; (3) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dibuat secara serampangan, banyak fiktifnya; (4) Kredit diberikan kepada siapa saja termasuk nonpetani, sehingga kurang tepat sasaran; (5) Tidak ada pengawasan dalam penyaluran, penerimaan dan penggunaan kredit; (6) Dana penyaluran banyak bocornya, mulai dari Departemen Koprasi, hingga ke KUD. Akibatnya per September 2000, tunggakan KUT mencapai 6,169 triliun rupiah atau 73,69% dari realisasi kredit (bandingkan dengan tingkat pengembalian kredit Grameen Bank yang mencapai 97%)

Sejak tahun 2000, program **KUT** yang dianggap gagal total diganti pemerintah dengan program baru yakni Program Kredit Ketahanan Pangan (**KKP**) yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada bank, pemerintah hanya bertindak sebagai pemberi subsidi pada tahap awal. Berdasarkan target pemerintah, program ini menuai sukses tahun 2004, tetapi lagi-lagi mengalami kegagalan karena kesulitan bank menyalurkan kredit kepada petani dan kesulitan petani membayar bunga kredit. Dari plafon sebesar 2,3 triliun rupiah, sampai Maret 2001 baru terrealisasi 3,85 miliar rupiah atau 1,57%. Akibatnya, terjadi kelangkaan kredit usaha tani di desa. Di samping program KUT dan KKP juga ada Program Pengembangan Kecamatan (**PPK**). Program ini bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat pedesaan, sekaligus memperbaiki kinerja pemerintah daerah dengan cara memberi bantuan modal dan pengadaan infrastruktur. Inti dari program ini adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat, laki-laki dan perempuan, termasuk masyarakat miskin. Program ini dirancang melalui mekanisme musyawarah mulai dari tingkat dusun hingga ke tingkat kecamatan. Pelaksanaan program didampingi oleh seorang fasilitator kecamatan,

dua orang fasilitator desa, satu laki-laki, satu perempuan di tiap desa, juga dibantu lembaga pengelola yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK) di kecamatan yang melibatkan LMD. Program ini di beberapa daerah mengalami kegagalan, karena tidak adanya perencanaan yang matang dan juga kurangnya transparansi penggunaan dan alokasi anggaran kepada masyarakat desa.

Kisah kegagalan program yang dirancang dan didanai oleh pemerintah dan Bank Dunia, juga terjadi dalam Program Padat Karya Desa-Pengembangan Wilayah Terpadu (**PKD-PWT**) di NTT, Sulawesi Selatan, NTB dan Sulawesi Utara serta program PDMDEK di Jawa Barat. Program PKD-PWT membagikan uang bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada setiap desa dan langsung disalurkan ke rekening Tim Pelaksana Desa (**TPD**). Jumlah desa yang dibantu dengan program ini mencapai 1.957 desa. Program ini mengalami kegagalan, karena proses perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran bantuan kepada desa, sangat tergantung kepada TPD. Sementara PDMDEK di Jawa Barat, mengalami kegagalan karena dana bergulir yang diberikan kepada masing-masing desa sebanyak 14 juta rupiah per desa, digunakan masyarakat untuk tujuan konsumtif.

### **4.3. Strategi dan Kebijakan Alternatif**

Dilihat dari kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini, strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak kepada rakyat miskin, *option for the poor* menjadi kebutuhan mutlak menanggulangi kemiskinan. Untuk membuat sebuah strategi dan kebijakan alternatif, diperlukan pengetahuan yang memadai tentang penyebab utama kemiskinan masyarakat desa. Dari serangkaian penyebab kemiskinan masyarakat desa yang telah disebutkan di depan, maka strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan desa dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai, secara gratis dan cuma-cuma. Pemerintah perlu mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi keberpihakan kepada

orang miskin (pendidikan untuk orang miskin). Pendidikan yang ditawarkan di Indonesia saat ini sangat mahal dan biayanya sulit dijangkau oleh orang-orang miskin. Karenanya, mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anak mereka, sebab beban biaya pendidikan yang ada, tidak sebanding dengan kemampuan keuangan mereka. Masyarakat desa selalu mengatakan bahwa “janganakan untuk menyekolahkan anak-anak, untuk makan sehari-hari saja, susahnya minta ampun”;

- (2) Redistribusi lahan dan modal pertanian yang seimbang. Ketimpangan kepemilikan lahan pertanian, memperlebar jurang kemiskinan antara masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sebagian besar tanah-tanah pertanian yang subur dimiliki oleh tengkulak lokal dan tuan tanah. Akibatnya, tanah-tanah pertanian yang ada, tidak memberikan penghasilan yang cukup bagi orang-orang desa yang memiliki tanah dan modal pertanian yang terbatas. Sebagian besar tenaga dan fisik mereka dipergunakan untuk menjadi buruh di tanah-tanah pertanian milik tuan tanah dan tengkulak lokal;
- (3) Mendorong perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerah pedesaan. Pembukaan investasi pertanian dan pertambangan dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa. Dengan begitu, pendapatan mereka akan meningkat dan berpengaruh pada perubahan kesejahteraan hidup;
- (4) Membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk memperoleh kredit usaha yang mudah. Sistem kredit yang ada saat ini, belum memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa dan sering salah sasaran. Karena itu, diperlukan kebijakan baru yang memberikan jaminan kredit usaha yang memadai bagi masyarakat desa;
- (5) Memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat desa. Kebutuhan sandang, papan dan pangan perlu dilakukan melalui sebuah mekanisme lumbung desa yang memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat desa, memperoleh sumber-sumber kebutuhan yang disediakan secara terorganisir;

- (6) Memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang memadai. Teknologi pertanian diperbanyak dan diberikan secara cuma-cuma kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup mereka;
- (7) Memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem layanan kesehatan gratis, memperbanyak PUSKESMAS dan unit-unit layanan kesehatan kepada masyarakat desa yang miskin dan terbelakang;
- (8) Memberikan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. Jaminan asuransi dan jaminan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan semangat hidup yang lebih berarti. Sistem asuransi dan jaminan sosial yang ada saat ini, diberlakukan secara diskriminatif, hanya terbatas kepada mereka yang memiliki uang saja. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan asuransi yang memadai kepada masyarakat miskin;
- (9) Memperkuat komitmen eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tatanan pemerintahan. Tatanan pemerintahan yang ada saat ini, memberikan keleluasaan bagi terjadinya praktik korupsi dalam seluruh level pemerintahan. Perbaikan tatanan pemerintahan, menjadi kata kunci untuk membuat program penanggulangan kemiskinan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat miskin;
- (10) Mendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas yang utama, mendorong tekad semua pihak untuk mengakui kegagalan penanggulangan kemiskinan selama ini, membangkitkan kesadaran kolektif agar memahami kemiskinan sebagai musuh bersama, dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam memberantas kemiskinan.

Untuk menunjang keberhasilan strategi tersebut, diperlukan unsur-unsur berikut:

- (a) Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua;
- (b) Memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut. Biarkan orang miskin merasakan bagaimana proses mereka bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan;
- (c) Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin;
- (d) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait, serta membangkitkan gairah mereka yang terlibat untuk mengambil peran yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program;
- (e) Menyediakan ruang gerak yang seluas-luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator, selanjutnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut, sehingga akhirnya, kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan disepakati bersama;
- (f) Pemerintah dan pihak lainnya (ORNOP, Perguruan Tinggi, pengusaha, masyarakat madani, partai politik dan lembaga sosial keagamaan) dapat bergabung menjadi kekuatan yang saling mendukung;
- (g) Mereka yang bertanggungjawab dalam menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan ini sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap instansi. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi gerakan dari, oleh dan untuk rakyat.

Secara umum, program strategis yang dapat dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan di desa adalah:

- (1) membuka peluang dan kesempatan berusaha bagi orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan iklim agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh penduduk miskin. Karena itu, kebijakan dan program yang memihak orang miskin perlu difokuskan kepada sektor ekonomi riil (misalnya: pertanian, perikanan, manufaktur, usaha kecil menengah), terutama di sektor informal yang menjadi tulang punggung orang miskin. Agar pertumbuhan ekonomi ini berjalan dan berkelanjutan, maka di tingkat nasional diperlukan syarat:
- (a) Stabilitas makro ekonomi, khususnya laju inflasi yang rendah dan iklim sosial politik dan ekonomi yang mendukung investasi dan inovasi para pelaku ekonomi. Secara garis besar hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah pusat;
  - (b) Diperlukan kebijakan yang berlandaskan paradigma keberpihakan kepada orang miskin agar mereka dapat sepenuhnya memanfaatkan kesempatan yang terbuka dalam proses pembangunan ekonomi;
  - (c) Memberikan prioritas tinggi pada kebijakan dan pembangunan sarana sosial dan sarana fisik yang penting bagi masyarakat miskin, seperti jalan desa, irigasi, sekolah, air minum, air bersih, sanitasi, pemukiman, rumah sakit, dan poliklinik di tingkat nasional maupun daerah. Beberapa program yang bisa dijalankan dengan menggunakan kebijakan ini adalah:
    - program penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat miskin (PUSKESMAS, POSYANDU), dan sebagainya;
    - program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penyediaan pendidikan gratis bagi orang miskin;
    - program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan informal dan keterampilan bagi masyarakat miskin, melalui inisiatif dari pemerintah daerah, juga melalui kerjasama dengan badan pendidikan, perguruan tinggi atau dengan LSM lokal;

- program pembentukan modal usaha melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lembaga-lembaga keuangan agar mereka ikut serta dalam program kredit dan tabungan;
  - program sertifikasi tanah dan tempat usaha bagi orang miskin untuk menjaga asetnya dengan baik;
  - program pengembangan pusat pasar pertanian dan pusat informasi perdagangan.
- (2) Kebijakan dan program untuk memberdayakan kelompok miskin. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Kebijakan dalam memberdayakan kelompok miskin harus diarahkan untuk memberikan kelompok miskin akses terhadap lembaga-lembaga sosial, politik dan hukum yang menentukan kehidupan mereka. Untuk memperluas akses penduduk miskin diperlukan:
- (a) Tata pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama birokrasi pemerintahan, lembaga hukum, dan pelayanan umum lainnya;
  - (b) Dalam tata pemerintahan diperlukan keterbukaan, pertanggungjawaban publik, dan penegakan hukum, serta partisipasi yang luas masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa program yang bisa dilaksanakan adalah:
    - Program penguatan organisasi sosial, kelompok ekonomi, dan organisasi swamasyarakat lainnya seperti kelompok arisan, kelompok petani pangan, pedagang kecil, simpan-pinjam dan sebagainya;
    - Program keterlibatan kelompok miskin dalam proses pendidikan demokrasi, misalnya dalam pengambilan keputusan melalui *public hearing*, penggunaan hak tanya dan sebagainya;

- Program keterlibatan kelompok miskin dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- (3) Kebijakan dan Program yang Melindungi Kelompok Miskin. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap guncangan internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena (PHK) maupun guncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi guncangan-guncangan tersebut. Kebijakan dan program yang diperlukan mencakup upaya untuk:
- (a) Mengurangi sumber-sumber resiko guncangan;
  - (b) Meningkatkan kemampuan kelompok miskin untuk mengatasi guncangan dan;
  - (c) Menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif. Beberapa program yang bisa dilaksanakan untuk kategori ini adalah:
    - Program lumbung desa yang sudah dikenal sejak lama. Program ini dapat disempurnakan dengan memasukkan metode yang lebih baik;
    - Program kredit mikro atau koperasi simpan pinjam untuk kelompok miskin yang mudah diakses, dengan persyaratan atau agunan yang mudah dan syarat pengembalian yang fleksibel;
    - Program pengembangan modal usaha dan kewiraswastaan untuk mendorong kelompok miskin meningkatkan kemampuan pemupukan modal usahanya secara mandiri dan berkelanjutan;
    - Program pembentukan lembaga khusus penanggulangan bencana alam dan sosial yang terpadu, efektif dan responsif di daerah.
- (4) Kebijakan dan Program untuk memutus pewarisan kemiskinan antar generasi; hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus.

Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan. Beberapa program yang dapat dikembangkan dalam kategori ini adalah:

- Program pemberian bantuan sarana dan beasiswa untuk masyarakat miskin;
- Program pemberian makanan tambahan bagi anak-anak miskin di sekolah;
- Program magang atau menyerap lulusan sekolah kejuruan atau diploma;
- Program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan produktif;
- Program penyuluhan bagi para ibu, bapak dan remaja, tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam berumah tangga.

(5) Kebijakan dan program penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat desa dapat menanggulangi sendiri kemiskinannya. Kadang-kadang pemerintah menganggap bahwa yang dibutuhkan masyarakat miskin adalah sumber-sumber material bagi kelangsungan hidup penduduk miskin. Anggapan tersebut, tidak selamanya benar, karena toh dalam kondisi tertentu, masyarakat desa yang miskin dapat keluar dari persoalan kemiskinan tanpa bantuan material pemerintah. Inisiatif dan kreativitas mereka dapat menjadi modal yang berharga untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Otonomi desa merupakan ruang yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk mengelola inisiatif dan kreativitas mereka dengan baik, menjadi sumber daya yang melimpah untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Kebijakan dan program yang bisa dilakukan untuk penguatan otonomi desa adalah:

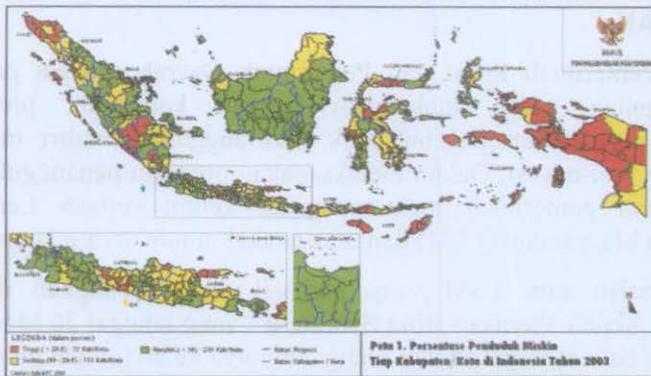
- Meningkatkan mutu sumber daya manusia desa melalui pendidikan formal & nonformal;
- Meningkatkan ketersediaan sumber-sumber biaya pembangunan desa dengan alokasi anggaran yang jelas dari pusat, provinsi dan kabupaten;

- Menata lembaga pemerintahan desa yang lebih efektif dan demokratis;
- Membangun sistem regulasi (perdes) yang jelas dan tegas;
- Mewujudkan otonomi desa untuk memberikan ruang partisipasi dan kreativitas masyarakat;
- Mengurangi praktek korupsi di birokrasi pemerintah desa melalui penerapan tatanan pemerintahan yang baik;
- Menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan publik;
- Memberikan ruang yang cukup luas bagi keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

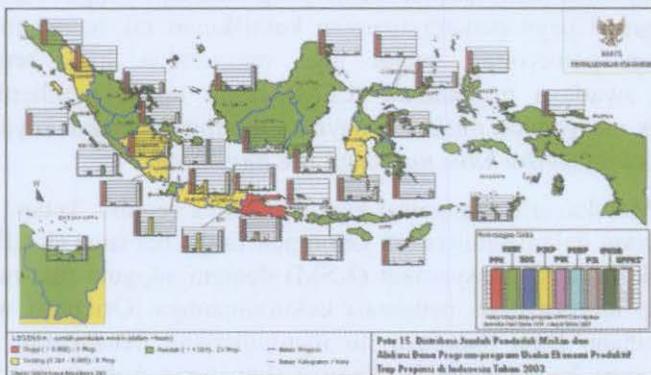
Berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut, membutuhkan usaha yang serius untuk melaksanakannya. Disamping itu diperlukan komitmen pemerintah dan semua pihak untuk melihat kemiskinan sebagai masalah fundamental yang harus ditangani dengan baik, berkelanjutan dan dengan dukungan anggaran yang jelas.

Untuk mengingatkan betapa luasnya peta kemiskinan di Indonesia, di berikan gambar Peta Kemiskinan seperti terlihat di bawah ini beserta beberapa usaha penanggulangannya. Program yang sudah dikembangkan oleh pemerintah seyogyanya dilaksanakan lebih efisien dan efektif lagi agar segera dapat mencapai tujuan mulia dan dirasakan rakyat.

Gambar-12. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia<sup>17</sup>



Gambar-13. Peta Alokasi Program Usaha Ekonomi Produktif



- PPK- Program Pengembangan Kecamatan
- KUBE- Kelompok Usaha Bersama
- BDS-? P2KP- Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
- P4K- Proyek Peningkatan Pendapatan Petani/Nelayan Kecil
- PEMP-?
- P3L-?
- IPKDB-?
- UPPKS-?

<sup>17</sup>Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, <<http://www.tkpkri.org/id>>

## 5. PERAN MASYARAKAT MENYIAPKAN SEJARAH MASA DEPAN

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pelopor pembangunan sudah melakukan banyak kebijakan, program, membiayai kegiatan tersebut baik dari anggaran sendiri maupun pinjaman luar negeri. Dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan pemerintah juga mengajak keikutsertaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat umum secara langsung.

Salah satu LSM yang berhasil menyumbangkan darma-baktinya adalah **Yayasan Bina Swadaya**<sup>18</sup> yang tanggal 26 Mei 2007 yang lalu baru merayakan hari ulang tahunnya ke 40 (empat puluh).

Menurut Bambang Ismawan (pendiri Yayasan Bina Swadaya), salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan tak hanya menjadi kepedulian pemerintah, tetapi juga masyarakat luas, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) lewat upaya pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Upaya itu ditempuh dengan keyakinan, mereka bukanlah *the have not* tetapi *the have little*.

Mereka sulit mengatasi kemiskinannya sendiri. Tetapi, lewat kebersamaan dalam satu wadah kelompok usaha bersama (KUB) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) dengan anggota rata-rata 20-30 orang, mereka bisa mengatasi kekurangannya. Orientasi wadah-wadah binaan Bina Swadaya itu meningkatkan pendapatan rakyat miskin lewat kegiatan *micro finance* (keuangan mikro) dan *micro enterprise* (usaha mikro), mengutamakan pendidikan anggota, memupuk kemampuan diri dan sosial.

"Saya ingin Bina Swadaya menjadi panggung bagi individu dan kelompok yang berjuang di atas kaki sendiri agar bisa diteladani. Bina Swadaya memacu semangat masyarakat lemah, miskin, dan terpinggirkan agar mampu secara sosial dan mandiri. Saya ingin kisah

---

<sup>18</sup>"*BAMBANG ISMAWAN MENGINSPIRASI INDONESIA*", Haryo Damardono, Kompas, 7 Juni 2007, "Sosok".

mereka ditulis agar masyarakat sadar punya potensi besar," ujar penggemar senam San Khung dan setia jogging pagi itu.

Perjuangan keswadayaan dimulai Bambang sejak tahun 1967, saat mendirikan Yayasan Sosial Tani Membangun, cikal bakal Bina Swadaya yang lahir 24 Mei 1967.

"Saya memberdayakan masyarakat lemah diawali dengan rasa malu. Mengapa? Tahun 1960-an itu saya bertemu John Dijkstra SJ (almarhum), pastor Belanda yang masuk-keluar Gunung Kidul menolong warga dari paceklik dengan mengajak menanam lahan telantar dan bantuan keuangan. Mengapa dia, orang asing, yang membantu rakyatku, bukan saya?"

Kala itu Bambang sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia bimbang. Walau kuliah di Fakultas Ekonomi, dia tak ingin berbisnis. Namun, apa yang dilakukan Pater Dijkstra menggugah keinginannya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Ia juga disemangati oleh Sylvia Ismawan, sarjana Fisipol UGM yang lalu jadi istrinya.

Kisah perjuangan 40 tahun Bina Swadaya penuh jatuh bangun, di tengah menjamur dan menyurutnya kegiatan LSM lain. Namun, Bina Swadaya yang berkantor pusat di Jakarta bisa eksis. "Awalnya perjuangan Bina Swadaya terseok-seok. Contoh konkret, saat Bina Swadaya menerbitkan majalah Trubus tahun 1969. Ini negara agraris, kenapa tak ada majalah pertanian? Bagaimana petani yang sebagian besar golongan lemah itu mendapat informasi cara menanam atau tentang varietas tanaman tertentu?"

Selama 15 tahun pertama Trubus rugi, tak ada pembeli dan pengiklan. Namun, Bambang bertahan walau harus berutang. Usahanya tak sia-sia, tirus Trubus kini sekitar 70.000 eksemplar per bulan dan menjadi inspirasi bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca krisis moneter untuk usaha agribisnis, sumber referensi berbagai persoalan pertanian dan ikutannya, termasuk mendongkrak nama dan gengsi tanaman-tanaman hias.

Dari pengalamannya selama 40 tahun di bidang pemberdayaan masyarakat miskin, Bambang mengemukakan, kalau diberi kredit mikro, mereka tak butuh bunga murah, karena berkat keuletannya kegiatan ekonomi bisa menguntungkan.

Bambang mengutip disertasi Mat Syukur yang membuktikan bahwa keuntungan usaha mikro umumnya mencapai 15 hingga 214 persen per bulan dari modal awal. Sedangkan pengembalian kreditnya, berdasarkan pengalaman Bina Swadaya, yang kini punya empat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan 14 cabang Pelayanan Keuangan Mikro, lebih dari 90 persen.

Mitra kerja pemerintah. Salah satu kunci meluasnya pola pemberdayaan Bina Swadaya terhadap masyarakat Indonesia selama puluhan tahun adalah menjadikan pemerintah sebagai mitra kerja.

Bambang, penerima Satyalencana Pembangunan tahun 1995, mengusulkan agar istilah organisasi nonpemerintah (NGO) diganti LSM. Ini agar tak terkesan sebagai oposan terhadap pemerintah. Alasannya, ketika ide pemberdayaan meluas, justru dibutuhkan campur tangan pemerintah yang memiliki jaringan hingga pelosok desa.

Terbentuknya kerja sama Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) dengan Bank Rakyat Indonesia, Program Perhutanan Sosial dengan Perum Perhutani dan The Ford Foundation, Program Irigasi Terpadu dengan Pekerjaan Umum pun, tak lepas dari "formula" Bina Swadaya yang diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Kerja sama juga dibina dengan perusahaan swasta seperti Coca-Cola dan Carrefour.

Bina Swadaya memiliki 17 perusahaan yang mengembangkan lima bidang kegiatan, yakni keuangan mikro, agribisnis, komunikasi pembangunan, wisata alternatif, dan pemberdayaan masyarakat warga. Pusat pelatihan didirikan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan bidang agribisnis untuk

memberdayakan masyarakat sipil. Sampai tahun 2007 ini dihasilkan lebih dari 10.000 alumni.

Ribuan contoh sukses seperti yang telah dilakukan oleh tokoh Bambang Ismawan, Pendiri dan Ketua Yayasan Bina Swadaya dapat di kemukakan disini. Yang terpenting adalah: “Rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Yang Maha Esa, niat, semangat, perbuatan nyata, dedikasi, ketulusan, kerja keras, keinginan untuk berdikari”, yang telah dibuktikan, seyogyanya di jadikan contoh dan sari tauladan untuk kita semua dalam mengisi kesepakatan “*Millennium Development Goals*”, khususnya di DAS Brantas .

## 6. PENUTUP

Bangsa Indonesia telah banyak membuat sejarah besar yang perlu disyukuri dan dijadikan sari tauladan, mulai dari sejarah kerajaan Sriwijaya, Mojopahit, Candi Borobudur yang menjadi salah satu dari delapan keajaiban dunia.

Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dari penjajahan Kolonial Belanda selama 350 tahun, dan mengenyahkan pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945, merupakan karya bangsa yang tak ternilai harganya. Kemudian disambung dengan Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, yang menghasilkan Deklarasi Bandung, Penyelenggaraan Asian Games di Jakarta tahun 1962, dan pembebasan Irian Jaya tahun 1963, merupakan hasil perjuangan keras yang patut disyukuri.

Swasembada beras tahun 1984, keberhasilan Program Keluarga Berencana, beserta perangkat kesehatan “Puskesmas, Posyandu”, pertumbuhan ekonomi lebih dari 6% per tahun selama 25 tahun, Pengorbitan Satelit Telekomunikasi Pertama didunia yang dimiliki Negara Berkembang Indonesia, penerbangan perdana pesawat terbang produksi IPTN “N-250 Tetuko” di pameran dirgantara Paris (satu-atunya wakil negara Asia pada waktu itu),

merupakan sumbangan karya Anak Bangsa Indonesia yang patut diteladani.

Walaupun pelaksanaan pemilihan umum langsung Presiden RI tahun 2004 menjadi awal keberhasilan praktek demokrasi di Indonesia, tetapi kita rasakan bahwa masalah kesejahteraan rakyat masih jauh dari yang kita inginkan bersama.

Butir-butir "*Millennium Development Goals*" sudah dijabarkan dan diratifikasi oleh Pemerintah RI. Pola pikir dan pola tindak telah pula dijabarkan, terutama oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Keberhasilan dan hambatan serta kegagalan upaya penanggulangan kemiskinan telah di bahas di bab 4, namun tantangan masih tetap besar. Kalau data penduduk miskin hasil perhitungan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dijadikan patokan, maka pada tahun 2015, kita harus mengentaskan penduduk miskin menjadi separuhnya, berarti kita harus menyediakan kesejahteraan bagi 30 juta penduduk miskin. Suatu pekerjaan raksasa yang menunggu kita semua.

Banyak upaya pemerintah dan masyarakat sudah ditempuh, tetapi masih sulit menurunkan jumlah penduduk miskin. Mungkin keberhasilan **Prof. Mohhammad Yunus**<sup>19</sup>. Pemenang Hadiah Nobel tahun 2006 dari Bangladesh, untuk penanggulangan kemiskinan dunia, perlu dipraktekkan lebih cermat lagi di Indonesia. Walaupun program serupa bernama "Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K)" sudah dijalankan oleh Departemen Pertanian bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia 15 tahun yang lalu, namun belum cukup bermakna untuk pengentaskan 30 juta penduduk miskin.

Almarhum Prof. Mubyarto yang amat pro penduduk miskin, telah mengembangkan Program "Inpres Desa Tertinggal (IDT)", yang

---

<sup>19</sup>M. Yunus Terima Nobel Perdamaian. *Penciptaan Perdamaian Dimulai dari Akarnya*. Kompas 14 Oktober 2006. (Reuter/AP/AFP/MON/BSW).

sering diplesetkan menjadi "IKI DUITTE TEKNO", ternyata belum berhasil menjadi gerakan nasional seperti Prof. M Junus di Bangladesh.

Apabila masalah kemiskinan disederhanakan menjadi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu "sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hak berusaha, dan keadilan hukum", mungkin nasehat bijaksana dari Ustad kondang "Aa Gym" bagi kaum papa adalah "**Mempraktekkan 3M Aa Gym**" yaitu "Mulai dari diri sendiri, Mulai dari yang kecil, dan Mulai sekarang juga".

Untuk mengatasi pangan, bagi yang mempunyai lahan pertanian sendiri: "Upayakan Pertanian Organik, dengan membuat kompos sendiri agar tidak tergantung dari pupuk kimia/*unorganik* yang mahal dan sering dipalsukan. Tanami dengan Padi SRI (*System Rice of Intencification*, teknologi Srilanka) yang tidak membutuhkan air sebanyak padi biasa dan hasilnya bisa mencapai 8 ton per hektar. Hal ini sudah diprektekkan dengan sukses di Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat tahun mulai tahun 2006".

Untuk mengatasi papan/rumah, bisa digunakan teknologi Brazilia, yaitu membuat "Bata Sahara"<sup>20</sup>, tanpa dibakar (karenanya disebut bata ekologis), dari campuran tanah dan sedikit semen, kemudian di press/tekan, seperti membuat bataco. Apabila fondasi, sudah disiapkan, dan "Bata Sahara" tersedia, begitu pula pintu, jendela, atap sudah ada, maka rumah tipe 36 bisa dibangun dalam waktu satu minggu.

---

<sup>20</sup><http://www.sahara.com>, SAHARA TECNOLOGIA, MÁQS. E EQUIPTOS. LTDA. Rua Miguel Rachid, 456 / 468 - Ermelino Matarazzo, CEP 03808-130 - São Paulo - SP, PABX: (011) 6943-695.

**Gambar – 14. Spesifikasi Teknis Bata Sahara**

	<b>SOIL</b>	+	<b>WATER</b>	=	
					
			<b>5%</b>		
					
	<b>(Sandy Soil)</b>		<b>CEMENT</b>		

Secara tidak langsung, sarana prasarana **pendidikan** dan **kesehatan** dapat diupayakan menggunakan teknologi "Bata Sahara". Dengan kata lain, di samping rumah pribadi, bangunan kantor **pendidikan** (taman kanak-kanak, sekolah, kantor dinas pendidikan), kantor **kesehatan** (pos desa siaga, posyandu, puskesmas, klinik, rumah sakit), **rumah ibadah** (mushola, mesjid, gereja, vihara), dan perkantoran pada umumnya dapat dibangun secara mandiri dan gotong royong menggunakan teknologi "Bata Sahara".

Di sinilah peran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas lainnya, untuk memprakarsai pengentasan masalah kemiskinan dan masalah lainnya secara sinergis di tingkat desa.

**Gambar-15. Tipe Modul Pasangan Bata**

<p><b>SaharaStraight wall</b> (tembok lurus)</p> 	<p><b>Corners (sudut)</b></p> 	<p><b>Solid Column</b> (kolom penuh)</p> 
<p><b>Hollow Column =&gt;</b> (kolom berongga)</p>		
<p><b>Modular: 10x20x5</b></p>  <p><i>100 units/m<sup>2</sup></i></p>	<p><b>Modular: 12,5x25x6,25</b></p>  <p><i>64 units/m<sup>2</sup></i></p>	<p><b>Modular: 15x30x7,5</b></p>  <p><i>45 units/m<sup>2</sup></i></p>
<p><b>This brick is used for straight walls, corners and columns</b></p>		

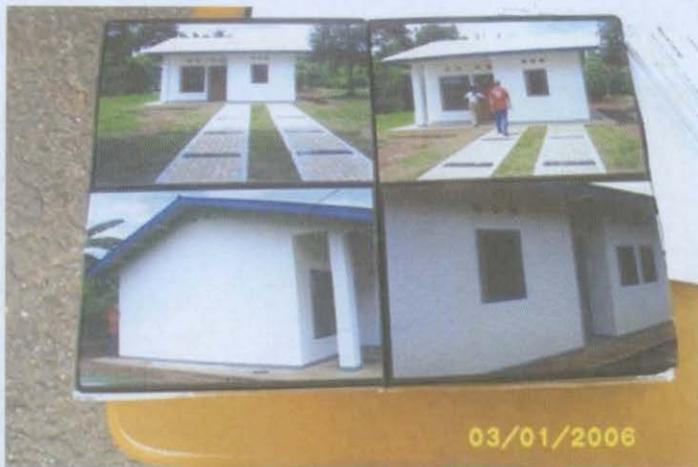
Gambar-16. Susunan Bata Sahara



Gambar-17. Beberapa Contoh Rumah Bata Sahara



**Gambar-18. Contoh Rumah Bata Sahara di Halim Perdana Kusumah TNI AU, Jakarta**

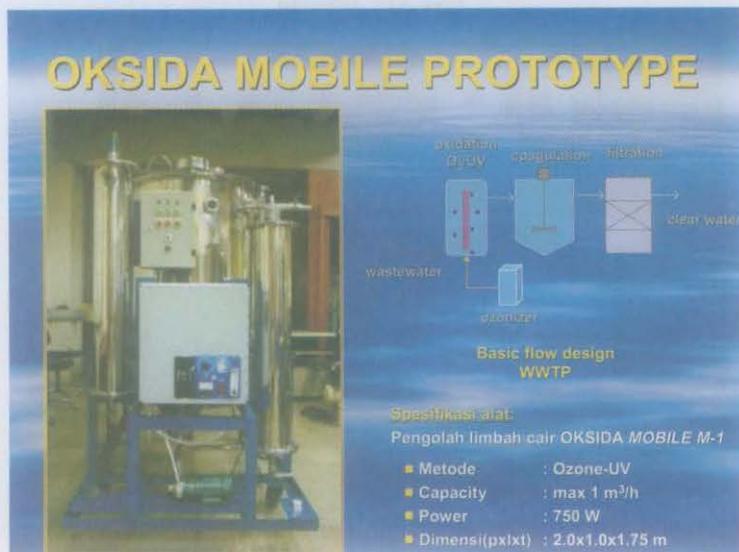


Untuk memberikan akses air bersih kepada masyarakat umum, peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak usah diragukan lagi, namun demikian "Teknologi Ozon (O<sub>3</sub>)"<sup>21</sup> yang ditemukan 50 tahun yang lalu, kini telah berkembang dengan aplikasi yang lebih merakyat. Teknologi ozon dapat dipergunakan untuk mengolah limbah cair bersekala besar besar dan kecil, misalnya untuk industri kimia, daur ulang air di hotel, pengolahan limbah rumah sakit dan lain-lain. Sedangkan untuk sekala kecil, bisa dibangun untuk mengolah limbah Puskesmas, pabrik kecil dan penjernihan air bersih.

---

<sup>21</sup> "Waste Water Treatment Design Based on Ozone Technology", Anto Tri Sugiarto Ph.D, P2KIM-LIPI, Seminar Nasional "IPAL Berbasis OZON" Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 20 Desember 2004.

Gambar-19. Instalasi Pengolah Limbah Metode "OZON"



Air adalah kebutuhan dasar kesehatan. Diharapkan teknologi "Ozon" dapat membantu pengadaan air bersih secara swadaya.

Di bidang kesehatan Pemerintah telah menyiapkan perangkat "Desa Siaga" yaitu: "Wilayah yang penduduknya memiliki kesiapan, kemampuan, serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah gawat darurat kesehatan secara mandiri. Desa siaga juga diharapkan dapat memberi gambaran tentang suatu wilayah agar masyarakatnya sadar, mau, dan mampu mencegah serta mengatasi berbagai ancaman kesehatan masyarakat." Misalnya, kurang gizi, penyakit menular, dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki wilayah itu secara gotong royong, mereka minimal dapat mengatasi warganya secara dini. Dengan demikian, mereka bisa melakukan tindakan preventif. Bila terjadi kejadian kesehatan luar biasa dan bencana di desa, masyarakat pun akan cepat tanggap. "Apalagi sekarang banyak penyakit berbahaya, seperti flu burung".

Departemen Kesehatan (Depkes) menargetkan sudah terdapat 70 ribu “Desa Siaga”<sup>22</sup> di seluruh Indonesia pada 2009. Sementara itu, pada 2007, ditargetkan ada 30 ribu desa lagi.

Selain itu, Depkes sejak 2006 sudah melatih 34.890 bidan yang akan menjadi ujung tombak program tersebut. “Para bidan itu kita latih bukan saja tentang pelayanan kesehatan, melainkan juga untuk memotivasi warga untuk bisa mandiri menjaga kesehatan dan tanggap terhadap bencana,”

Agar kesadaran masyarakat tentang kesehatan dirinya meningkat, Prof. Dr. Hendrawan Nedasul<sup>23</sup>, dalam bukunya yang terbit pertama kali tahun 2006, dan sekarang adalah terbitan keempat, berjudul “SEHAT ITU MURAH”, memberikan nasehat, bahwa mencegah datangnya penyakit jauh lebih baik dan murah dari pada mengobati penyakit. Hal ini penting diketahui masyarakat umum, terutama tingkat menengah kebawah, mengingat pengobatan penyakit semakin mahal.

Di awal buku ada kutipan kecil yang mengusik benak kita yang kebanyakan buruk otobiografi kesehatannya. Petikan kecil itu berbunyi begini, Di setengah kehidupan kita mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan uang. Di setengah lainnya kita mengorbankan uang kita untuk mendapatkan kembali kesehatan kita (FM Voltaire). Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amien.

Beralih ke masalah lingkungan. Akibat ulah manusia sendiri Taman Sumber Brantas yang telah dibangun dengan cantik oleh Perum Jasa Tirta I di atas tanah 11 hektar, hancur dilanda banjir, karena penggundulan hutan di atasnya.

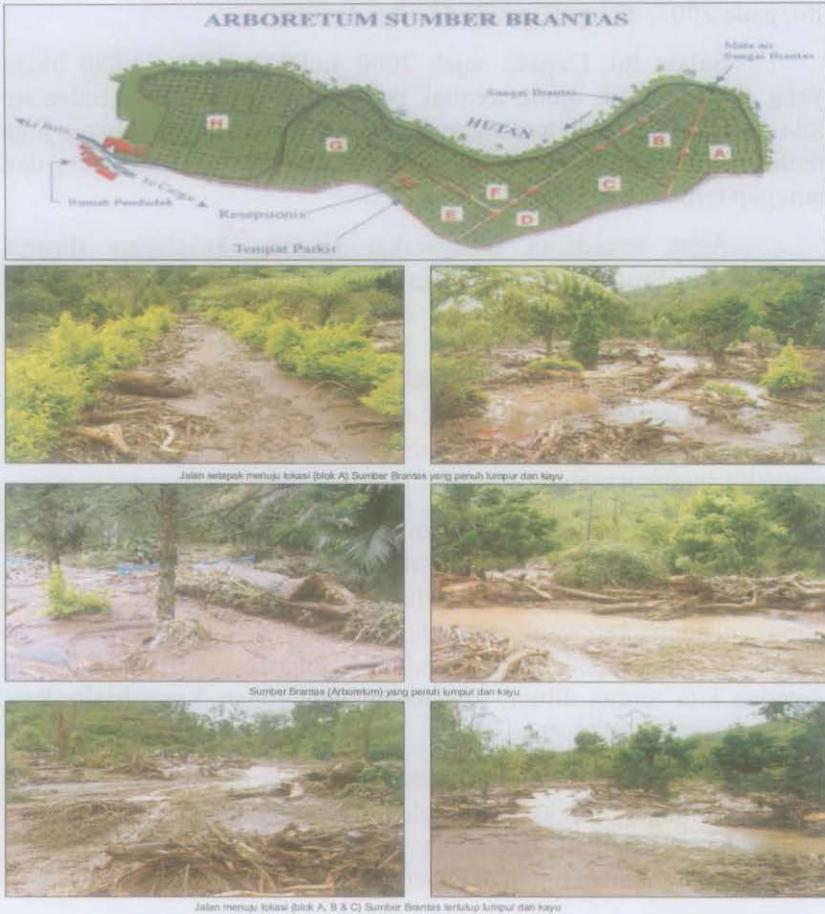
---

<sup>22</sup>Departemen Kesehatan *Siapkan 70 Ribu Desa Siaga pada 20. Kompas, 15 Januari 2007*

<sup>23</sup>“Sehat itu Murah” Prof. Dr. DR. Hendrawan Nedasul, Penerbit: PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.

## Gambar-20. Arboritum Sumber Brantas

KONDISI BANJIR di SUMBER BRANTAS TANGGAL 03 FEBRUARI 2004



Gambar pertama di atas ini merupakan penataan Arboritum (Kebun Raya Kecil) Sumber Brantas sebelum banjir. Gambar sesudahnya memperlihatkan kondisi sesudah banjir. Rehabilitasi suatu kawasan semacam arboretum membutuhkan biaya yang amat mahal.

Rencana perbaikan sudah disiapkan, bahkan direncanakan sebelum banjir. Hal ini dilaksanakan atas perhatian Presiden Megawati Sukarnoputri, yang amat memperhatikan lingkungan hidup, terutama sungai. Perum Jasa Tirta I bekerjasama dengan Kebun Raya Purwodadi LIPI, mendisain ulang Arboretum Sumber Brantas disesuaikan dengan kebutuhan masa depan.

**Gambar-21.**  
**Rencana Penataan Ulang Arboretum (Kebun Rraya Kecil)**  
**di Sumber Brantas, Batu, Malang, Untuk Wisata/Rekreasi, Pendidikan**  
**dan Penelitian, Sebagai Bagian Program Konservasi**  
**Daerah Aliran Sungai Brantas**



Khusus untuk kasus Brantas, seyogyanya sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo, mulai dari bendungan, waduk, yang dibangun dengan biaya sendiri, peralatan pengendalian banjir dan pemantau limbah yang diperoleh dari bantuan Jepang dan pinjaman lunak Austria, dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tersebut di atas.

Untuk mengakhiri dan menyemangati penyusunan sejarah DAS Brantas di masa depan, saya kutipkan seloroh almarhum Prof. Samaun Samadikun, mantan Ketua LIPI, salah satu putra bangsa yang menonjol di bidang elektronika, dan putra Almarhum Mantan Gubernur Jawa Timur "Bapak Samadikun", sebagai berikut:

***"Kalau kita secara genetik adalah keturunan yang unggul, maka sesulit apapun masalah yang kita hadapi, insyaallah pasti bisa kita selesaikan, kecuali sebaliknya".***

Serpong, 16 Juni 2007.

# KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

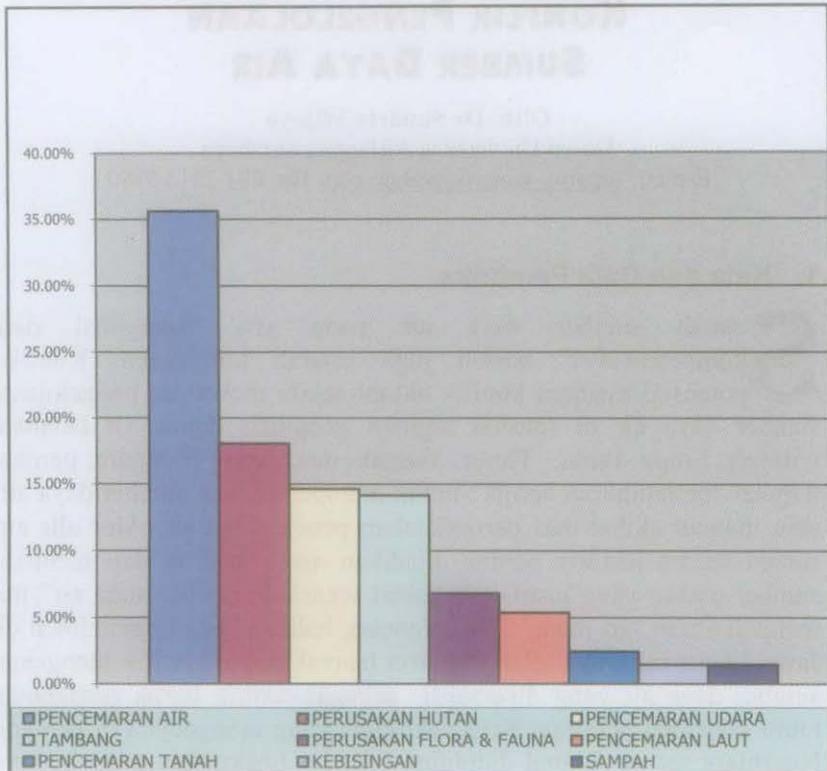
Oleh: **Dr Suparto Wijoyo**

Dosen Universitas Airlangga Surabaya

E-mail: [suparto\\_wijoyo@yahoo.com](mailto:suparto_wijoyo@yahoo.com) Hp. 081 2313 9897

## 1. Kata dan Data Pembuka

Sejarah sumber daya air pada sisi “kompetisi dan kompetensinya” adalah juga sejarah konfliknya. Konflik potensial maupun konflik aktual selalu mewarnai pengelolaan sumber daya air di seluruh segmen geografis dunia. Di belahan wilayah Eropa Barat, Timur Tengah dan Asia Tenggara pernah terhelat “pertempuran heroik” untuk memperebutkan sumber daya air atau muncul akibat dari permasalahan pencemaran air. Alur air sungai secara historis pernah dijadikan ajang konflik dan menjadi sumber petaka yang justru mengubah secara dramatik “mata air” itu menjadi aliran “air mata”. Di Indonesia, bahkan pada tingkat lokal di Jawa Timur misalnya telah terpotret banyak kasus konflik mengenai sumber daya air yang dipersepsi sebagai cermin buruk rendahnya mutu majemen perairan. Krisis ekologis yang menggejala di bentara Nusantara secara faktual didominasi media lingkungan yang berupa pencemaran air. Tabel berikut ini menginformasikan dengan terangnya:



Sehubungan dengan hal tersebut saya teringat konstruksi *simbolik-metaforik* dari **R. Latter** atas kondisi lingkungan dewasa ini. Diungkapkan bahwa orang Perancis menggunakan teka-teki untuk mengajarkan kepada anak-anak sekolah tentang sifat pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebuah kolam teratai, begitu teka-teki itu, berisi selembur daun. Tiap hari daun itu berlipat dua. Dua lembar daun pada hari kedua, empat pada hari ketiga, dan delapan pada hari keempat, demikian seterusnya. Kalau kolam itu penuh pada hari ketiga puluh, kapankah kolam itu berisi separohnya? Begitu ditanyakan. Jawabnya, “pada hari kedua puluh sembilan”. *Cangkringan* ini dirujuk oleh **L.R. Brown** dalam *The Twenty Ninth Day: Accomoditing Human Need*

*and Numbers to the Earth's Resource* dan telah dialihbahasakan *Hari yang Kedua Puluh Sembilan*.

Itulah gambaran realitas telanjang yang menghadang masa depan sumber daya air. Dalam periode tahun lalu tersuguhkan hampir 500 kasus lingkungan di Indonesia yang kenyataannya pencemaran air telah menduduki ranking pertama dari sembilan kasus lingkungan yang menyeruak. Pencemaran air telah melebihi batas-batas toleransi ekologi yang terbentang di delapan penjuru mata angin Ibu Pertiwi. Negeri ini mampu mengukir “*prestasi*” ambisius yang merontokkan pondasi kehidupannya sendiri.

Nasib kolam teratai Republik ini, kini mungkin sudah penuh seluruhnya, sementara waktu penyelamatan tinggal sehari. Semua pihak harus memahami urgensi kebutuhan untuk menghentikan konflik di bidang pengelolaan sumber daya air dan memulihkan kualitas air. Maraknya frekuensi konflik sumber daya air dan tingginya tingkat pencemaran air adalah kebenaran yang tak terelakkan sebagai produk sikap *biarinisme dan kemunafikan hukum*.

## **2. Birokratisasi dan Privatisasi Sumber Daya Air**

Norma hukum itu dibuat untuk memberikan pedoman bagi penataan kehidupan dengan segala aktivitasnya, termasuk dalam melakukan pengelolaan sumber daya air. Kepastian hukum dan keadilan hukum harus dituangkan dalam formulasi peraturan perundang-undangan. Lahirnya *Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air* seyogiannya memberikan basis hukum untuk mereduksi konflik di sektor perairan. Namun sayang, substansi *Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air* justru memberikan “kepastian hukum” yang kering dan mengabaikan rasa keadilan dalam pengelolaan sumber daya air. Sumber daya air “dikavling-kavling” secara teritorial maupun fungsional. Tragis bukan?

Melalui Undang-undang termaksud telah terjadi *birokratisasi* dan *korporatisasi* sumber daya air secara masif. Birokrasi dan

korporasi akan menjadi pelaku utama pengusahaan sumber daya air. Norma hukum yang terkandung dalam *Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air* patut dicurigai sebagai pijakan dasar dan "pintu pandora" babakan baru dalam pengelolaan sumber daya air yang menafikan masyarakat adat. Dalam bahasa yang paling umum adalah bahwa *Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air* telah menggeser (bahkan memindahkan) ranah sumber daya air yang semula berada dalam domain publik masuk ke areal ruang privat. Maka muncullah istilah *privatisasi* sumber daya air yang dilegalisasi oleh negara dengan *Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air*. Otoritas negara melalui *Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air* sebenarnya terlibat dalam proses penciptaan konflik sumber daya air. Inilah "dosa hukum" terbesar bagi negara apabila kelak akan semakin beragamnya konflik sumber daya air di Indonesia.

### 3. Aspek Hukum Pencemaran Air

Bagaimana air tidak tercemar, kalau mayoritas industri dibiarkan membuang limbah (cairnya) tanpa kendali. Instrumen perizinan sebagai sarana pencegahan pencemaran tidak difungsikan. Para pengusaha dengan enakanya membuang limbah tanpa beban. Air telah dijadikan media gratisan para pengusaha nakal (bukan yang masuk kategori *green company*) untuk "*mensemayamkan*" limbanya.

Sejarahnya, sejak 5 Juni 1990 telah diundangkan *Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air* (PP Pengendalian Pencemaran Air). PP ini memformulasikan bahwa pembuangan limbah cair ke dalam air di lakukan dengan izin yang di berikan oleh Gubernur, sedangkan yang ke tanah izinya ke Menteri Negara Lingkungan Hidup (MENLH). PP Pengendalian Pencemaran Air berlaku efektif 5 Juni 1991. Dengan demikian, mulai tanggal 5 Juni 1991 semua industri di Indonesia yang membuang limbah cairnya ke dalam air wajib memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) dari Gubernur (dan yang ke tanah dari MENLH).

Kenyataannya? Sebagian terbesar Gubernur tidak menerbitkan IPLC secara memadai, bahkan ada IPLC manipulatif. Selama kurun waktu berlakunya PP Pengendalian Pencemaran Air tersebut, industri yang memiliki IPC “tidak sampai hitungan jari tangan”. Alhasil, para pengusaha secara riil bebas membuang limbahnya tanpa izin dari Gubernur dan MENLH. Mengapa dalam rentang waktu sepuluh tahun Gubernur dan MENLH tidak menerbitkan secara tepat? Adakah ini suatu kesengajaan ataukah ketidaktahuan? Untuk itulah dalam kasus konflik sumber daya air yang berkaitan dengan pencemaran air berdasarkan PP Pengendalian Pencemaran Air, Gubernur (air permukaan) dan MENLH (air bawah tanah) adalah penegak hukum utama yang harus bertanggung jawab. Mengapa izin pembuangan limbah cair saat itu tidak segera diterbitkan sebagaimana mestinya?

Instrumen IPLC merupakan sarana pencegahan pencemaran air yang paling efektif, sebab suatu izin itu diterbitkan selalu dengan persyaratan. Pelanggaran terhadap persyaratan perizinan dapat dikenai sanksi. Selama izin belum diberikan, selama itu pembuangan limbah (cair) tidak di perkenankan. Membuang limbah (cair) tanpa izin adalah perbuatan pidana. Pidanaan pelaku pencemaran air tentunya didasarkan pada ketentuan pidana yang terdapat dalam *Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)* dan *Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (bukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“Wetboek van Straafrecht”))* yang akrab disapa dengan W.v.S alias KUHP seperti selama ini, bahkan Peraturan Daerah. Untuk perusahaan industri pidanaannya dalam kasus pencemaran air secara spesifik mengacu pula pada *Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (UU Perindustrian)* berikut peraturan pendukungnya. Penerapan UU Perindustrian dalam memproses hukum kasus pencemaran masih jauh dari harapan.

Dari kenyataan bahwa sebagian besar korporasi membuang limbah tanpa izin saat itu (era PP No. 20 Tahun 1990), berarti para pengusaha telah melakukan pelecehan hukum terhadap Gubernur dan

MENLH. Dalam optik demikian, aturan PP Pengendalian Pencemaran Air yang dikeluarkan hanyalah “*non-enforcement policy*”. Dibuat tetapi tidak untuk dilaksanakan, apalagi ditegakkan.

Lebih dari itu, sejak tanggal 12 Desember 2001 telah disahkan *Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air* (PP No. 82 Tahun 2001). Dengan PP No. 82 Tahun 2001 ini, PP No. 20 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP No. 82 Tahun 2001 telah mengintroduksi IBAL (Izin Pembuangan Air Limbah) dan Izin Pemanfaatan Air Limbah (IMAL) yang menjadi wewenang Bupati/Walikota sesuai dengan dinamika otonomi daerah. Intinya, semua industri atau kegiatan usaha lainnya dilarang membuang air limbah sebelum mendapatkan IBAL-IMAL dari Bupati/Wali Kota.

Kini pengendalian konflik yang bertalian dengan pencemaran air ada di genggam tangan Bupati dan Wali Kota. Berlakunya PP No. 82 Tahun 2001 harus dijadikan momentum penyelamatan air. Mempidanakan pencemar Kali Surabaya tentunya didasarkan pada ketentuan pidana yang terdapat dalam *Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UUPH), bukan *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (“*Wetboek van Strafrecht*”) yang akrab disapa dengan W.v.S alias KUHP.

#### **4. Tindak Pidana Sumber Daya Air**

Tindak pidana mencemarkan air bukan delik aduan. Kejahatan di bidang sumber daya air adalah delik biasa. Maka pihak kepolisian seharusnya meninggalkan pemahaman klasik mengenai delik lingkungan. Pada era tahun 1990-2000an sekarang ini, di kalangan penegak hukum masih terdapat persepsi yang keliru bahwa delik lingkungan dianggap delik aduan (“*klachtdelict*”). Bahkan di tahun 2007 ini tetap saja menggejala tentang persepsi “minor” bahwa delik lingkungan adalah delik aduan. *Quo vadis kepolisian?*

Hal ini berarti, polisi akan bertindak apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban pencemaran). Apakah pengaduan

dari warga masyarakat yang menjadi korban pencemaran air merupakan persyaratan bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan kasus pencemaran air? Pertanyaan itu diajukan sebagai pendulum untuk menggugah kreativitas polisi dan sekaligus dimaksudkan untuk mengantisipasi terbangunnya anggapan yang menyesatkan terhadap delik lingkungan. Menyeruaknya pemikiran tentang perlunya “pengaduan warga” dalam proses penyidikan kasus lingkungan, juga terbangun dari kesalahan perumusan hukum UUPH (UU No. 23 Tahun 1997). Dalam perspektif hukum lingkungan kepidanaan (“*strafrechtelijk milieurecht*”), delik lingkungan yang digariskan pada Pasal 41- 48 UUPH bukanlah delik aduan. Dalam konten dan konteks demikianlah kemunculan *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup* menjadi kurang relevan.

Kenyataan historis yang terpaparkan adalah adanya sinyalemen “pemelintiran hukum secara terang-terangan, lugas, dan menyentak”. Sebuah refleksi yang sumbang dan mengaharubirukan hukum lingkungan. Tindak pidana lingkungan benar-benar “dipatulipat”. Terjadi penjungkirbalikkan sikap terhadap tindak pidana sumber daya air. Betapa kelam dan berkeloknya penegakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan sumber daya air, termasuk di Jawa Timur.

Mari membuka lembaran sejarah penegakan hukum lingkungan di Jawa Timur sebagai bahan untuk renungan memejahijaukan pencemar air. Siapa lagi korban pencemaran di Jawa Timur yang mau “bersusah payah” melaporkan terjadinya pencemaran air? Simaklah kisah tragis **Kristiawan Waluyo**, warga Ponorogo dalam “telenovela” pencemaran air yang diduga dilakukan oleh perusahaan X. Nasib sial menyimpannya. Ia justru diadili di Pengadilan Negeri Ponorogo dan dijatuhi hukuman pidana empat bulan. Mendadak sontak sang “bintang” berubah “peran” dari statusnya pelapor menjadi terlapor.

Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Nyatalah bahwa **Kristiawan Waluyo** harus menikmati dan menyikapi keganjilan tuduhan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana diatur Pasal 335 ayat (1) huruf e KUHP. Padahal, surat KPPLH Tingkat I Propinsi Jawa Timur dengan merujuk pada hasil penelitian BPPI-BTKL Surabaya mengungkapkan tentang terdapatnya korelasi pencemaran seperti yang dipaparkan **Kristiawan Waluyo**. Temuan saintifik inilah yang dijadikan acuan pelaporan oleh pejuang lingkungan yang nasibnya sangat “*tragis*” tersebut.

Ingatlah tentang apa yang pernah terjadi dan terpentaskan di Tembok Duku. Suatu hari ada “drama melankolis” di Tembok Dukuh (Surabaya) yang menimpa dua aktivis rakyat yang menjadi korban pencemaran lair sumur yang diduga berasal dari korporasi X, yakni Saudara **Sugito** dan (alm) **Heri**. Keduanya harus menerima “suratan takdir” pemeriksaan dan interogasi oknum keamanan di Surabaya, tapi bukan pihak kepolisian. Lah aneh toh, bukan polisi kok ikut campur? Itulah lakon yang terhelat dalam kasus sumber daya air. Kedua “aktor utama” sambil “dipelonco” di “markas besarnya” bertepatan pada saat gugatan pencemaran air sumur sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Terlalu banyak warga masyarakat mengalami kisah serupa. Mereka dengan senang hati melaporkan terjadinya pencemaran air, tanah, dan udara. Gugatan lingkungan pun diajukan. *Apesnya*, gugatan mereka banyak yang kandas, terpental gelanggang peradilan yang mulia. Korban kalah berkelanjutan. Apa yang mereka lakukan justru dinilai sebagai tindakan pencemaran nama baik pemilik perusahaan. Garis hidup yang dialami petani Tambak Rejoso, Pasuruan, juga terpotret sama. Enam belas warga telah diinapkan oleh “yang berwajib” dengan “selimut” melanggar Pasal 160 jis. Pasal 55, 56, dan 214 KUHP. Dan, terhadap delik lingkungan pencemaran tambak yang diadakan oleh warga justru tidak diadakan penyidikan yang menggembirakan. Kasus pencemaran air tambah warga dianggap selesai di luar pengadilan tanpa proses hukum pidana.

Semua itu seyogianya menyadarkan dan mengetuk “nurani hukum” aparaturnya kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman untuk bekerja sungguh-sungguh menangani kasus konflik pengelolaan sumber daya air. Kisah sedih yang selalu menimpa korban pencemaran mesti diakhiri. Kita terus bertanya-tanya: Bagaimana kelanjutan kisah-kisah sedih penanganan kasus-kasus lingkungan akan terlukiskan?

Banyak kasus lingkungan besar telah menjadi sorotan nasional dan dunia internasional kini tenggelam ditelan zaman yang mendeskripsikan tontonan, betapa kuatnya komitmen bisnis menggusur niatan yuridis. Apa kabar kasus lumpur Lapindo? *Apabila kepolisian dan kejaksaan saling beradu argumentasi “kosong” di luar persidangan, apakah artinya peradilan?* Kalaulah kedua instansi hukum itu tidak mau mengawali penuntasan kasus pencemaran air (termasuk dalam kasus lumpur Lapindo), ini pertanda bahwa masa reformasi hanyalah merupakan momentum reinkarnasi keruntuhan peradaban hukum.

## 5. Akhir Kata

Itulah gambaran sederhana mengenai konflik yang pernah dan akan terjadi di “kosmos” pengelolaan sumber daya air. Kini jangan lagi menunda-nunda pekerjaan. Pencegahan dan penyelesaian yuridis konflik sumber daya air harus dilakukan dengan peran besar semua *stakeholders* secara sinergis. Bukankah waktu penyelamatan “kolam teratai” tinggal sehari? Salam.

# KALI BRANTAS DAN BENCANA ALAM

Oleh: Ir. Widyo Parwanto, M. Tech.  
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Umum

**B**encana Alam merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan : "bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan". Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya gempa bumi di wilayah tak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian istilah "alam" juga ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan manusia. Besarnya potensi kerugian juga tergantung pada bentuk bahayanya sendiri, mulai dari kebakaran, yang mengancam bangunan individual, sampai peristiwa tubrukan meteor besar yang berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia.

### 1.2. Pengertian dan Istilah

- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

- Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- Banjir atau bah atau air bah adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai atau pecahnya bendungan sungai. Ketika hujan turun, yang kadang terjadi adalah banjir secara tiba-tiba yang diakibatkan terisinya saluran air kering dengan air. Banjir semacam ini disebut banjir bandang.

### **1.3. DAS Kali Brantas**

Kali Brantas yang terletak di Provinsi Jawa Timur mempunyai panjang 320 km dan memiliki DAS seluas 12.000 km<sup>2</sup> yang mencakup kurang lebih 25% luas Provinsi Jawa Timur. Curah hujan rerata di DAS Kali Brantas sebesar 2.000 mm/tahun,  $\pm$  80% jatuh pada musim hujan.



melalui Kota Kediri. Di kota Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widias, kemudian ke timur mengalir ke kota Mojokerto. Di kota ini Kali Brantas bercabang dua, ke arah Kota Surabaya dan ke kota Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.

Dengan jumlah penduduk di DAS Brantas yang mencapai 15,6 juta (tahun 2005) atau mencapai 48% jumlah penduduk Jawa Timur dibandingkan dengan luasnya yang hanya 25% maka DAS Brantas merupakan daerah padat penduduk yang ada di Jawa Timur. Padatnya jumlah penduduk tersebut akan memberikan konsekuensi terhadap rentannya timbulnya bencana yang terjadi di DAS Brantas.

Hujan, banjir bandang, tanah longsor, tanah retak, gempa, gunung meletus itulah bencana alam yang mewarnai DAS Brantas di masa lalu sampai sekarang. Telah banyak upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi masalah bencana tersebut namun perlu dipahami bahwa bencana tidak sepenuhnya (mutlak) dapat diatasi, yang mampu dilakukan adalah mengurangi, mengantisipasi dan melakukan upaya penanggulangan bila terjadi bencana.

## **2. Peristiwa Bencana di DAS Kali Brantas**

Dibalik cerita tentang bagaimana Kali Brantas yang banyak memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang tinggal di lembah Kali Brantas karena kesuburan tanahnya, airnya yang melimpah namun juga ada beberapa peristiwa bencana yang terjadi di lembah Brantas yang menyebabkan kerugian besar dan bahkan menghilangkan suatu peradaban.

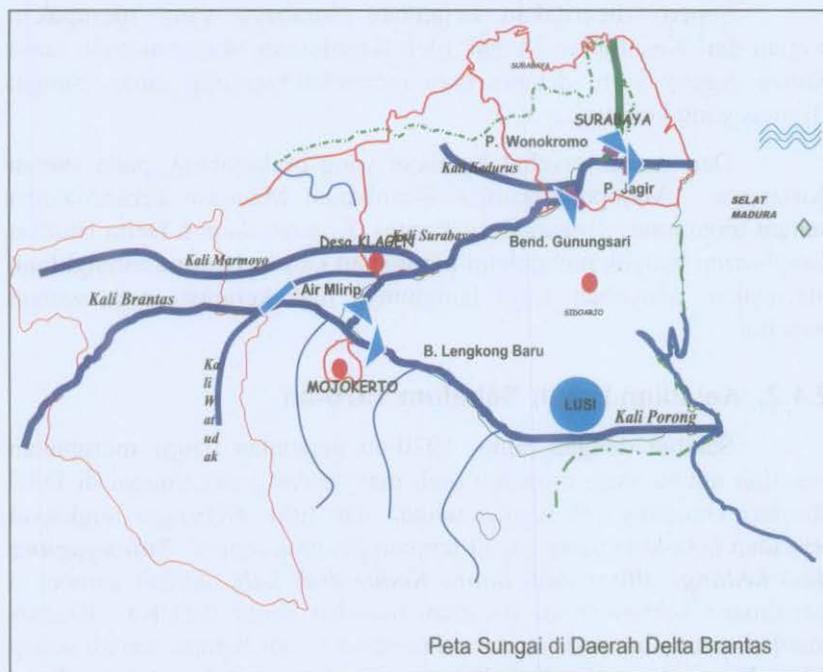
### **2.1 Bencana Banjir**

#### **2.1.1. Banyu Pindah**

Seperti diceritakan dalam Prasasti Kelagyan (1037 m), Kelagyan adalah nama desa Klagen sekarang di utara Kali Porong, bahwa pada suatu hari sungai Bengawan (Brantas) yang semula

mengalir ke utara tiba-tiba mengalir ke timur memutuskan hubungan negeri Jenggala dengan laut, merusak tanaman dan menggenangi rumah2 penduduk. Sebelumnya penduduk mungkin secara swadaya membuat tanggul-tanggul, tetapi kurang kokoh sehingga berkali-kali jebol dan banjir menggenangi daerah hilirnya.

Raja Erlangga yang dipusingkan dengan peristiwa tersebut bertindak dengan membangun bendungan besar di **Waringin Pitu** dan memaksa sungai kembali mengalir ke utara. Mungkin, inilah yang disebut sebagai bencana “**Banyu Pindah**” dalam buku Pararaton.



Sejak zaman Kerajaan Medang abad ke-9 dan 10, Delta Brantas yang dibentuk dua sungai (Kali Mas dan Kali Porong) diolah dengan baik, muara Brantas dijadikan pelabuhan untuk perdagangan (Pelabuhan Hujung Galuh). Ibukota kerajaan didirikan dan

dinamakan Kahuripan yang letaknya di dekat desa Tulangan, utara Kali Porong, di sebelah barat Tanggulangin, di dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo. Setelah kerajaan Erlangga pecah menjadi dua pada abad ke-11, yaitu Panjalu (Kediri) dan Jenggala (Kahuripan), dan Kahuripan mundur lalu dianeksasi Kediri, pelabuhan dari Brantas ditarik ke pedalaman di Cangg, dekat Mojokerto sekarang. Kemudian, Kediri digantikan Singhasari, lalu akhirnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 M, pusat kerajaan kembali mendekati laut di Delta Brantas.

Seperti diceritakan kejatuhan Surabaya yang merupakan bagian dari Kesultanan Demak oleh Kesultanan Mataram pada masa Sultan Agung yaitu dengan cara menyekat/menutup aliran Sungai Brantas yang ke Surabaya.

Dari cerita tersebut kerajaan yang berkembang pada zaman Airlangga – Majapahit sampai Kesultanan Mataram keberadaannya sangat tergantung dengan Kali Brantas. Kondisi daerah Delta Brantas yang sering banyak mengalami perubahan karena banjir kemungkinan merupakan penyebab jatuh banggunya dari kerajaan pada zaman tersebut.

### 2.1.2. Kejadian Banjir Sebelum 1970-an

Sampai dengan tahun 1970-an persoalan banjir merupakan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di DAS Brantas khususnya di bagian tengah dan hilir. Beberapa ungkapan terhadap kota-kota yang ada di lembah Brantas seperti *Tulungagung dadi kedung.. Blitar dadi latur.. Kediri dadi kali.* adalah gambaran bagaimana kekhawatiran ancaman masalah banjir dari Kali Brantas menjadi persoalan pada saat itu. Peristiwa banjir hampir terjadi setiap tahun karena kapasitas Kali Brantas yang menurun karena terjadinya pendangkalan Kali Brantas akibat letusan Gunung Kelud.

Dengan telah selesainya beberapa bendungan yang dibangun di DAS Brantas seperti Bendungan Selorejo(1970) Bendungan Sutami(1972) dan Proyek Perbaikan Sungai Brantas Tengah (1978),

Perbaikan Kali Porong(1976) dan Perbaikan Kali Surabaya (1978) dan Proyek Drainase Tulungagung (1980) sehingga kota Kediri, Tulungagung, dan Blitar tidak lagi dilanda banjir akibat meluapnya aliran sungai Brantas.

### **2.1.3. Kejadian Banjir Setelah tahun 2000-an**

Seiring dengan terjadinya kerusakan lingkungan DAS maka pada beberapa tahun terakhir ini peristiwa banjir sering terjadi yang disebabkan oleh meluapnya anak-anak sungai, peristiwa banjir tersebut antara lain ;

#### **(a) Banjir Sub–DAS Brantas Hulu**

Peristiwa banjir yang terjadi pada tanggal 3- 4 Pebruari 2002 merupakan banjir terbesar yang terjadi selama periode 50 tahun terakhir di Brantas Bagian Hulu (Malang raya) yang menyebabkan kerugian besar di Kota Malang dan Kota Batu karena hancurnya bangunan-bangunan melintang sungai dan hanyutnya rumah yang ada di kiri kanan sungai. Arboretum Sumber Brantas yang selama ini sebagai simbol untuk melestarikan sumber air hampir separuh arealnya tertimbun lumpur. Beberapa jembatan dan bangunan air sepanjang Kali Brantas di Kota Batu dan Malang hanyut. Curah hujan yang tercatat di Stasiun Wonosalam dan Trawas masing-masing 105 mm dan 242 mm

Meskipun peristiwa ini tidak merenggut korban jiwa namun kejadian banjir tersebut telah menjadi peringatan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Kali Brantas khususnya yang ada di Kota Batu dan Malang.

#### **(b) Banjir Sub-DAS Lesti**

Kejadian banjir yang terjadi karena meluapnya Kali Lesti pada tanggal 29 Januari 2002 yang menghanyutkan 7 buah jembatan yang ada di sepanjang Kali Lesti. Catatan curah hujan yang tertinggi

pada saat kejadian di St. Dampit sebesar 244 mm dan St. Sengguh 156 mm.

### **(c) Banjir Sub-DAS Brangkal**

Pada tanggal 11 Desember 2002, di Wana Wisata Padusan, Pacet, Kabupaten Mojokerto telah terjadi banjir bandang selama kurang lebih 15 menit yang menyebabkan pengunjung meninggal dunia sebanyak 26 orang. Kejadian banjir bandang tersebut berasal dari Sungai Dawuhan salah satu anak sungai Brangkal, salah satu Sub - DAS Sungai Brantas. Curah hujan yang terjadi pada saat itu relatif kecil Namur karena adanya pembendungan di anak-anak sungai tersebut yang kemudian cobol maka terjadilah bencana tersebut.

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Jawa Timur, ditemukan bahwa banjir disebabkan oleh kerusakan hutan di wilayah DAS Kromong (*Gunung Welirang*), yang mengalir ke DAS Brantas. Kerusakan hutan di DAS Kromong ini terjadi di areal Tahura R. Soeryo dan areal Perhutani. Di beberapa kawasan tersebut sudah gundul akibat ditebang, baik itu oleh illegal logging maupun legal logging.

### **(d) Banjir Sub Das Bogel - Kalidawir**

Banjir yang terjadi pada tanggal 2-5 Desember 2004 merupakan banjir terbesar pada kurun waktu lima puluh tahun terakhir karena meluapnya Kali Bogel dan Kali Dawir (diceritakan oleh masyarakat banjir seperti pernah terjadi pada tahun 1956).

Kejadian banjir diawali dengan turunya curah hujan mulai tanggal 2 sampai 5 Desember 2007 dengan curah hujan kumulatif yang sangat tinggi: Tunggorono 441 mm, Bhirowo 371 mm, dan Wlingi 366 mm. Ketinggian curah hujan tersebut merupakan kejadian hujan dengan kala ulang 10.000 tahunan. Akibat banjir tersebut ada 40 desa di 13 kecamatan yang ada di Kab. Blitar, Tulungagung dan Blitar yang terkena banjir dan menyebabkan korban jiwa meninggal 12 orang di Kabupaten Blitar.

Debit yang melewati Bendungan Wlingi, Bendung Lodoyo yang berada di Kab. Blitar dan Bendung Mrican di Kediri masing-masing mencapai 1.745 m<sup>3</sup>/dt, 2.047 m<sup>3</sup>/dt dan 1.768 m<sup>3</sup>/dt merupakan debit terbesar yang selama bangunan tersebut mulai beroperasi.

### **(e) Banjir Kali Ngasinan Sub-DAS Ngrowo**

Banjir yang terjadi di Kabupaten Trenggalek pada tanggal 19 – 20 April 2006, akibat meluapnya K. Ngasinan dan K. Tawing, berada di Sub DAS K. Ngrowo yang merupakan salah satu anak sungai Kali Brantas. Banjir tersebut menyebabkan 1.329 rumah tergenang hampir 2 hari dan menyebabkan 23 orang meninggal dunia. Curah hujan rata-rata berkisar 100 mm namun merata di seluruh Sub-Das Ngasinan.

## **2.2. Bencana Letusan Gunung Kelud**

Di wilayah sungai Kali Brantas terdapat 2 gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Semeru dan Gunung Kelud. Namun hanya Gunung Kelud yang letusannya berdampak langsung kepada Kali Brantas.

Berdasarkan data yang ada bahwa Gunung Kelud ini meletus pada periode 15 – 20 tahun. Dari catatan sejak tahun 1000 Gunung Kelud telah meletus 23 kali dan kali terakhir gunung ini meletup pada 10 Februari 1990. Kejadian letusan yang banyak menelan korban yaitu pada tahun 1752 yang menyebabkan korban jiwa sekitar 10.000 jiwa kemudian pada tahun 1919 yang mengakibatkan korban jiwa sekitar 5.110 jiwa.

## **2.3. Kekeringan (Kekurangan) Air**

Kejadian kekurangan air pada saat sudah mulai dirasakan utamanya yang ada di wilayah DAS Brantas bagian hilir khususnya Delta Brantas yaitu terjadi konflik/persaingan antara pemanfaat air irigasi dan pemanfaat air lainnya (PDAM, industri dan tambak),

sehingga telah menimbulkan permasalahan. Kejadian kesulitan air yang pernah terjadi pada tahun 1997 sebagai dampak El Niño.

## 2.4 Pencemaran Air

Peristiwa pencemaran selama ini banyak terjadi di Kali Surabaya karena merupakan akumulasi pembuangan limbah-limbah dari bagian hulu. Beberapa kasus terjadinya pencemaran seperti tumpahnya limbah tetes PG Ngadirejo dan beberapa terjadi ikan mati di Kali Surabaya karena limbah industri. Disamping seringnya kejadian pencemaran di Kali Surabaya sejak tahun 2001 di waduk Sutami yaitu terjadi peristiwa eutrofikasi atau terjadinya peningkatan pertumbuhan algae atau biasanya disebut “**algal bloom**” atau “**algae blooming**” yang menyebabkan berkurangnya *dissolved oxygen* yang berada di dalam air akibat dekomposisi kematian algae. Kejadian ini dapat menyebabkan matinya organisme lain.

Kondisi tersebut disebabkan karena kelebihan Nutrien (khususnya unsur fosfor dan nitrogen) yang masuk ke dalam waduk yang berasal dari limbah domestik (rumah tangga), pertanian dan industri.

Dampak dari kejadian eutrofikasi adalah banyaknya ikan mati yang ada di waduk disertai bau amis yang menyengat dan mengganggu masyarakat yang tinggal disekitar waduk.

Peristiwa eutrofikasi ini hampir terjadi setiap tahun pada umumnya pada awal dan akhir musim kemarau.

## 2.5. Bencana Semburan (Gunung) Lumpur

Terjadinya gunung api lumpur biasanya berasosiasi dengan suatu keadaan geologi yang lapisan sedimennya belum tekompaksikan, mempunyai tekanan tinggi dan mengakibatkan timbulnya diapir dari serpih ataupun penusukan oleh serpih. Gejala tersebut juga sering berasosiasi dengan daerah yang disebut ‘*over pressured area*’, yaitu daerah tekanan tinggi yang tekanan serpihnya

lebih besar daripada tekanan hidrostatik, dengan demikian dapat menimbulkan kesulitan pemboran. Secara geologi, fenomena Mud Volcano atau gunung api lumpur adalah ekstrusi yang dibarengi dengan keluarnya gas dan air (kadang-kadang juga minyak) secara kuat, bahkan dengan suara ledakan. Seringkali gas yang dikeluarkan terbakar sehingga menyerupai gunung api. Sifat gunung api lumpur ini sangat tergantung kepada iklim dan juga jumlah lempung yang dikeluarkan.

### Seperti diceritakan dalam Ki(1) **Pagunung Anyar**

Tab Pararaton yang diterjemahkan Brandes (1896), bahwa pada tahun 1296 Caka atau 1374 Masehi telah terjadi sebuah bencana bernama “**Pagunung Anyar**” yang memundurkan Majapahit, kerajaan Nusantara terbesar. Apakah bencana Pagunung Anyar? Oleh Awang Harun Satyana kejadian tersebut ditafsirkan sebagai erupsi gununglumpur ala semburan LUSI (!)



Lokasi Patahan Watukosek

**Banjir Lumpur Panas Sidoarjo**, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan.

Dari analisa para pakar geologi bahwa kawasan mulai dari Mojokerto sampai lokasi terjadinya semburan lumpur Sidoarjo (Patahan Watukosek) merupakan daerah patahan yang rawan terjadinya semburan seperti yang saat ini terjadi di Porong.

### **3. ANCAMAN BENCANA ALAM**

#### **3.1. Ancaman Banjir**

Dengan memperhatikan peristiwa kejadian banjir bandang yang terjadi di beberapa Sub Das Kali Brantas seperti Sub DAS Brantas Hulu, Sub DAS Lesti, Sub DAS Brangkal, Sub DAS Ngasinan-Ngrowo, Sub DAS Bogel – Kali Dawir ancaman terhadap terjadinya banjir bandang akan meningkat sejalan dengan meningkatnya kerusakan daerah DAS.

Seperi dilaporkan oleh BP DAS Brantas, Dep. Kehutanan luas daerah DAS Kritis di DAS Brantas mencapai 280.258 ha, luas tersebut mencapai 24% luas DAS Brantas.

Berdasarkan hasil kajian perubahan tata guna lahan seperti dilaporkan dalam Penyusunan Pola Pengelolaan Sumbeday Air Sungai Kali Brantas bahwa selama periode 1994 dan 2005 telah terjadi luas kawasan hutan dari 117.600 ha menjadi 109.730 ha atau berkurang 7.870 ha (6.69%). Apabila ditinjau dari masing-masing

Sub DAS Brantas mengalami kondisi perubahan paling besar yaitu sebesar 33% kawasan hutan yang berubah fungsi lahan terbuka, sedangkan Sub DAS yang beralih fungsi sebesar 20%. Disamping itu indikisai terjadi perubahan pola hujan yang terkonsentrasi dalam waktu yang lebih pendek juga terjadi pada dekade terakhir sebagai dampak terjadinya pemanasan global.

Dampak LUSI terhadap keberadaan fungsi Kali Porong sebagai *Flood Way* akan mempunyai potensi menimbulkan banjir mengingat solusi sementara yang diambil pada saat ini adalah membuang lumpur ke Kali Porong. Sampai dengan akhir Oktober 2007 pembuangan lumpur telah menyebabkan kondisi dasar sungai pada lokasi pembuangan lumpur telah mencapai kenaikan 4.50 m dari dasar sungai rencana atau sekitar 7.00 m dari kondisi awal. Keadaan ini telah menyebabkan kapasitas Kali Porong tinggal 450 m<sup>3</sup>/dt (dari kapasitas semula 1.500m<sup>3</sup>/dt).

### **3.2 Ancaman Kekeringan dan Pencemaran**

Bencana kekeringan di DAS umumnya dialami oleh pertanian (khususnya tanaman padi), terjadinya kekeringan akan berdampak meningkatnya kadar pencemaran karena terbatasnya air yang digunakan untuk pengenceran. Untuk Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo yang sebagian besar kebutuhan air minumannya mengandalkan Kali Surabaya akan paling menderita bila terjadi bencana kekeringan dan pencemaran.

Dari hasil evaluasi monitoring kualitas air pada tahun 2006 oleh Perum Jasa Tirta I berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003 tentang Pedoman penentuan Status Mutu Air dengan Metode STORET dan menggunakan 11 parameter menunjukkan bahwa status mutu air di DAS Brantas sebagai Klas I adalah 82% katagori buruk atau status cemar berat untuk Klas I, sedangkan untuk Klas II mencapai 53%.

Bertambahnya penduduk dan pembangunan ekonomi yang semakin pesat, memberi dampak pada penurunan kondisi kualitas air.

Pembuangan air limbah dari aktivitas domestik, industri dan pertanian yang melampaui daya dukung sumber air mengakibatkan pencemaran air sehingga kualitas air tidak memenuhi baku mutu peruntukannya. Penegakan hukum terhadap pencemar masih lemah, karena masih mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, termasuk kesempatan kerja dan lain-lain.

Pengendalian pencemaran air merupakan masalah yang kompleks, memerlukan dana besar dan waktu panjang serta memerlukan komitmen semua pihak yang berkepentingan, baik Pemerintah Pusat/Daerah, pengelola wilayah sungai maupun dari pemanfaat air (industri, domestik, pertanian) serta masyarakat.

### **3.3. Ancaman Letusan Gunung Kelud dan Semburan Lumpur**

Ancaman terhadap kemungkinan terjadinya letusan Gunung Kelud yang berdasarkan data meletus dalam kurun waktu 15–20 tahun akan tetap menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Kelud. Sedangkan untuk ancaman terjadinya semburan lumpur yang saat ini sedang terjadi di Porong barangkali menjadi pengalaman untuk lebih berhati-hati dalam melakukan eksplorasi bahan mineral yang ada di kawasan patahan Watukosek.

### **3.4. Ancaman Kegagalan Bendungan**

Dengan keberadaan beberapa bendungan yang telah dibangun di Kali Brantas secara seri (*cascade*) mulai Bendungan Senguruh, Karangates- Lahor dan Wlingi terjadi kegagalan bendungan bisa saja terjadi akibat terjadinya banjir PMF (*Probable Maximum Flood*).

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Kimpraswil melalui PT Indra karya Mei 2001 dalam kondisi yang paling ekstrim dimana keempat bendungan tersebut runtuh maka dampak/pengaruh yang diakibatkan oleh banjir mencapai 123.60 km ke hilir dengan penduduk yang terkena resiko (PenRes) sebanyak 101,279 KK. Dan apabila jebolnya diawali dari Bendungan

Karangates maka dampak banjir berkurang menjadi 104,15 km ke hilir dan jumlah PerRes sebanyak 59.507 km.

## **4. Upaya Pengendalian Bencana**

### **4.1. Konservasi Daerah Tangkapan Hujan**

Upaya untuk menghindari bencana yang diakibatkan oleh kerusakan hutan di DAS Brantas sudah banyak dilakukan baik oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah. Pemerintah melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dep. Kehutanan melalui BP DAS Brantas antara lain: Program GERHAN, melalui Departemen Pekerjaan Umum GNKPA, sedangkan pemerintah propinsi dengan mengupayakan adanya jeda penebangan.

### **4.2. Prasarana Pengendali Banjir**

Untuk pengendalian banjir di DAS Brantas telah tersedia prasarana pengendali banjir (waduk, pintu-2 air, *Flood Forecasting Warning System*).

Fasilitas untuk prediksi iklim, cuaca dan banjir dengan menggunakan fasilitas telemetri dan bantuan simulasi komputer Sistem Peramalan dan Peringatan Dini Banjir (*Flood Forecasting and Warning System—FFWS*) yang dihubungkan dengan basis data nasional dan internasional.

### **4.3. Prasarana Monitoring Kualitas Air**

Dalam melakukan pemantauan kualitas air, Perum Jasa Tirta I secara periodik melakukan pemantauan secara manual dan secara otomatis/telemetri (baik kualitas air sungai maupun buangan limbah cair dominan), melaksanakan pengujian laboratorium dan evaluasi serta memberi rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Gubernur maupun BAPEDALDA) yang dipergunakan sebagai dasar penegakan aturan dan pembinaan kualitas air sungai. Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan sarana pemantauan kualitas air *real time*

(*Brantas River Water Quality and Pollution Management Project*) yang terdiri dari 23 stasiun pengamatan kualitas air sungai dan 12 pemantauan limbah industri dominan.

#### **4.4. Antisipasi dan Penanggulangan Bencana**

Untuk antisipasi dan penanggulangan bencana telah dibentuk organisasi ini terdiri dari beberapa tingkatan koordinasi sebagai berikut:

- (1) Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan (BAKORNAS PBP). Organisasi ini berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan dampak bencana.
- (2) Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP di Tingkat Propinsi yang bertugas mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk pengarah, pembinaan serta pengendalian upaya kegiatan penanggulangan banjir dan penanganan pengungsi, melakukan koordinasi dan pengendalian teknis dan administrasi, mengkoordinasikan penerimaan dan penyaluran bantuan yang dilaksanakan Bupati/Walikota di Jawa Timur.
- (3) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP). Organisasi ini berfungsi melaksanakan kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana di masing-masing kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Timur.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATGAS PBP) Propinsi Jawa Timur. SATGAS PBP merupakan organisasi yang bertugas untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi.
- (5) Rencana Tindak Darurat Keruntuhan Bendungan

Untuk penanganan bila terjadi keruntuhan bendungan maka telah disusun Buku Panduan Rencana Tindak Darurat yang berguna sebagai panduan untuk menyamakan kesamaan bahasa antara Pengelola Bendungan dan Pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dalam keadaan darurat akibat keruntuhan bendungan, serta menetapkan hazard klasifikasi bendungan.

## **5. Kesimpulan**

- (1) Kejadian bencana di DAS Kali Brantas meliputi berbagai macam antara lain banjir, kekeringan, pencemaran air, letusan Gunung Kelud, dan gunung lumpur.
- (2) Dampak dari kerusakan lingkungan hutan akan mengancam terjadinya bencana banjir bandang di beberapa Sub DAS: Brantas Hulu, Brangkal, Ngasinan, Bogel – Kali Dawir, Konto. Kondisi yang akan datang akan semakin mengerikan apabila mulai sekarang masyarakat dan pemerintah tidak sungguh-sungguh berupaya untuk memperbaiki kondisi lahan-lahan kritis, hutan gundul dan lain-lain.
- (3) Dari kejadian bencana yang terjadi diharapkan semua pihak dapat mengambil pelajaran dari tindakan/kesalahan yang telah dilakukan sehingga kedepan kejadian bencana dapat diminimalkan.
- (4) Semoga kita bisa lebih arif dalam mengelola dan menyikapi lingkungan alam tempat hidup kita.

## **Daftar Pustaka :**

History of Brantas, April 2001, Perum Jasa Tirta I

Perkembangan Pembangunan Pengairan di Indonesia, Ir. Subandi Wirosoemarto, Dep. PU, 1999/2000

Development of the Brantas River Basin, JICA, 1998.

Laporan Pemantauan Kualitas Air di DAS Kali Brantas 2006, Perum  
Jasa Tirta I

Bencana LUSI di Jaman Mojopahit, Awang HS, Maret 2007.

Laporan Akhir Hazard Klasifikasi dan rencana Tindak Darurat  
bendungan Sengguruh, Karangates, lahor dan Wlingi, PT  
Indra karya, Dep. Kimpraswil, mei 2001.

# KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI DAS KALI BRANTAS

Ir. Soekistijono, Dipl. HE<sup>1</sup>  
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I

## 1. Pendahuluan

**S**umber daya alam (hutan, tanah dan air) mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, oleh karena itu keberadaannya perlu dilestarikan agar dapat memberikan manfaat yang optimal. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan kemampuan daya dukungnya serta tidak disertai dengan usaha-usaha konservasi akan menimbulkan kerusakan, misalnya terjadinya erosi tanah yang menjadi penyebab timbulnya lahan kritis, sedimentasi, banjir, kekeringan, pencemaran air, degradasi fungsi waduk dan tidak berfungsinya bangunan pengairan.

Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Tata guna air dan tata guna lahan diselenggarakan secara terpadu untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Di samping itu, perlu diperhatikan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, pemeliharaan wilayah resapan air dan sumber air lainnya.

Peningkatan pertumbuhan penduduk dan kegiatan sektor industri memiliki potensi merusak lingkungannya, antara lain dengan berubahnya tata guna lahan. Oleh karena itu harus selalu dijaga agar kegiatan pembangunan memperhatikan daya dukung sumber daya air dan lingkungannya agar dapat menunjang proses *self purification*. Sebagai contoh, perubahan tata guna lahan dan perambahan hutan

---

<sup>1</sup>Direktur Teknik Perum Jasa Tirta I.

menjadi lahan pertanian, menyebabkan degradasi lingkungan. Perubahan ini menurunkan daya dukung lingkungan yang terutama sekali ditandai oleh rusaknya ekosistem perairan tawar yang pada akhirnya akan mengakibatkan menurunnya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan kesehatan yang memadai (oleh karena banjir dan bencana alam lainnya).

## 2. Pengelolaan Sumber Daya Air di DAS Kali Brantas

Kali Brantas yang terletak di Provinsi Jawa Timur mempunyai panjang 320 km dan memiliki DAS seluas  $\pm 12.000 \text{ km}^2$  yang mencakup kurang lebih 25% luas Provinsi Jawa Timur. Curah hujan rerata di DAS Kali Brantas sebesar 2.000 mm/tahun,  $\pm 80\%$  jatuh pada musim hujan.

Distribusi curah hujan yang tidak seimbang ini menyebabkan perbedaan yang cukup besar terhadap ketersediaan air di DAS Kali Brantas antara musim hujan dan musim kemarau. Air sungai Kali Brantas digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu air baku untuk air minum dan industri, air irigasi, PLTA, penggelontoran, pariwisata dan lain-lain.

DAS Kali Brantas merupakan salah satu wilayah sungai strategis nasional karena pengembangan sumber daya air di DAS Brantas telah memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di regional dan nasional. Pada tahun 2003 tercatat hampir 59% Produk Domestik Regional Bruto (*Gross Regional Domestic Product-GRDP*) Jawa Timur berasal dari DAS Brantas.

Pengembangan SDA di DAS Kali Brantas dilakukan dengan sistem pengelolaan terpadu berlandaskan prinsip “satu sungai, satu rencana terpadu, satu manajemen terkoordinasi”, dilaksanakan berdasar pada suatu Rencana Induk (*Master Plan*) yang ditinjau kembali pada setiap jangka waktu kurang lebih 10 tahun sekali, dimulai dari Rencana Induk I (tahun 1961). Sampai dengan saat ini telah disusun 4 (empat) buah Rencana Induk. Yang terakhir adalah

Rencana Induk IV (tahun 1998) yang dititikberatkan pada manajemen dan konservasi SDA guna meningkatkan kelestarian dan optimalisasi penggunaannya.

Pembangunan dalam pengembangan sumber daya air bukan hanya pada hal penyediaan sumber daya air tetapi juga dalam hal pengendalian sumber daya air. Hasil pembangunan, berupa sejumlah prasarana sumber daya air antara lain: waduk/ bendungan (Sengguruh, Sutami, Lahor, Wlingi, Selorejo, Bening dan Wonorejo), bendung (Lodoyo, Mrican, Lengkong Baru, Gunungsari, Segawe dan Tiudan) dan bendung karet (Gubeng, Menturus dan Jatimlerek), terowong, tanggul, dan lain sebagainya. Prasarana sumber daya air yang telah dibangun di DAS Kali Brantas adalah sebesar total investasi yang tertanam untuk pengembangan wilayah sungai Kali Brantas sejak tahun 1960 – 2000 telah mencapai Rp 7,9 triliun.

Manfaat yang diperoleh antara lain dapat mengendalikan banjir 50 tahunan di sungai utama seluas 60.000 ha, mengairi sawah seluas 121.000 ha yang di jamin dari waduk (dari total sawah seluas 304.000 ha), menghasilkan energi listrik setara 1 miliar kWh/tahun, menyediakan air baku untuk industri 122 juta m<sup>3</sup>/tahun dan PDAM 274 juta m<sup>3</sup>/tahun. Manfaat lain adalah penyediaan sarana pariwisata dan lain sebagainya.

Untuk dapat menjaga fungsi sarana dan prasarana pengairan yang ada di DAS Kali Brantas agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dan mencapai umur ekonomis yang direncanakan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 tahun 1990, Pemerintah mendirikan Perum Jasa Tirta. Berdasarkan PP No. 93 tahun 1999, Perum Jasa Tirta diubah namanya menjadi Perum Jasa Tirta I (PJT I). Wilayah kerja PJT I di DAS Brantas seperti pada **Lampiran – 1**. Saat ini wilayah kerja PJT I telah berkembang dengan penambahan wilayah kerja pada sungai Bengawan Solo berdasar Keputusan Presiden No. 129 tahun 2000 tanggal 14 September 2000.

Tugas pokok PJT I adalah melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, perusahaan air dan sumber-

sumber air, pengelolaan DAS, antara lain perlindungan, pengembangan dan penggunaan air serta sumber-sumber air melalui pemberian rekomendasi, penyuluhan dan bimbingan serta rehabilitasi prasarana pengairan (dalam batas kemampuan keuangan Perusahaan).

### 3. Kondisi DAS Kali Brantas

#### 3.1. Pembagian Sub DAS

DAS Brantas terdiri dari 6 sub DAS dengan luas total sebesar 11.988 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari basin block seperti tercantum pada tabel berikut:

No.	Sub DAS	Basin Block	Luas Catchment Area (km <sup>2</sup> )
1	Brantas Hulu	Upper Brantas	180
		Bango-Sari	235
		Amprong	349
		Manten	176
		Upper Lesti	263
		Genteng	133
		Lower-Lesti Jaruman	239
		Metro	323
		Ampo	183
		Kedungbanteng	64
		Bambang	273
		Lemon-Putung	173
		Lekso	139
		Jari	78
		Putih	62
Abab	554		
Jimbe	336		
		<b>3.760</b>	
2	Brantas Tengah	Ngobo-Serinjing	647
		Badak-Sukorejo	302
		Catut-Kedak	193
		<b>1.142</b>	
3	Ngrowo – Ngasinan	Ngrowo	<b>1.470</b>
4	Konto	Konto	<b>568</b>

5	Widas	Amunger Widas	269
			1.253
			<b>1.522</b>
6	Brantas Hilir	Gunting	723
		Turibaru	109
		Beng	151
		Brangkal	221
		Sadar	358
		Bongkok	164
		Porong	420
		Mas	1.379
		<b>3.525</b>	
<b>Total Luas DAS Kali Brantas</b>			<b>11.988</b>

### 3.2. Kondisi masing-masing Sub DAS

Sub DAS Kali Brantas Hulu terletak di dataran tinggi sepanjang Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Butak dan Gunung Kelud dengan kemiringan lereng  $6^{\circ}$ – $42^{\circ}$ , elevasi antara 500–1000 m. Curah hujan rata-rata tahunan antara 1.500–4.000 mm, nilai tertinggi terjadi di sekitar Gunung Kelud dan Gunung Semeru. Lokasi DAS Kali Brantas hulu dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Sub DAS Kali Brantas Tengah terletak di dataran tinggi sepanjang Gunung Kelud dan Gunung Wilis dengan kemiringan lereng antara  $7^{\circ}$ – $43^{\circ}$ , elevasi antara 50–700 m. Curah hujan rata-rata tahunan antara 1.500–4.000 mm dengan nilai tertinggi terjadi di sekitar Gunung Wilis.

Sub DAS Ngrowo-Ngasinan terletak di dataran tinggi di sepanjang Gunung Wilis dan memiliki kemiringan lereng antara  $7^{\circ}$ – $39^{\circ}$ . Curah hujan rata-rata tahunan antara 1.000–3.000 mm.

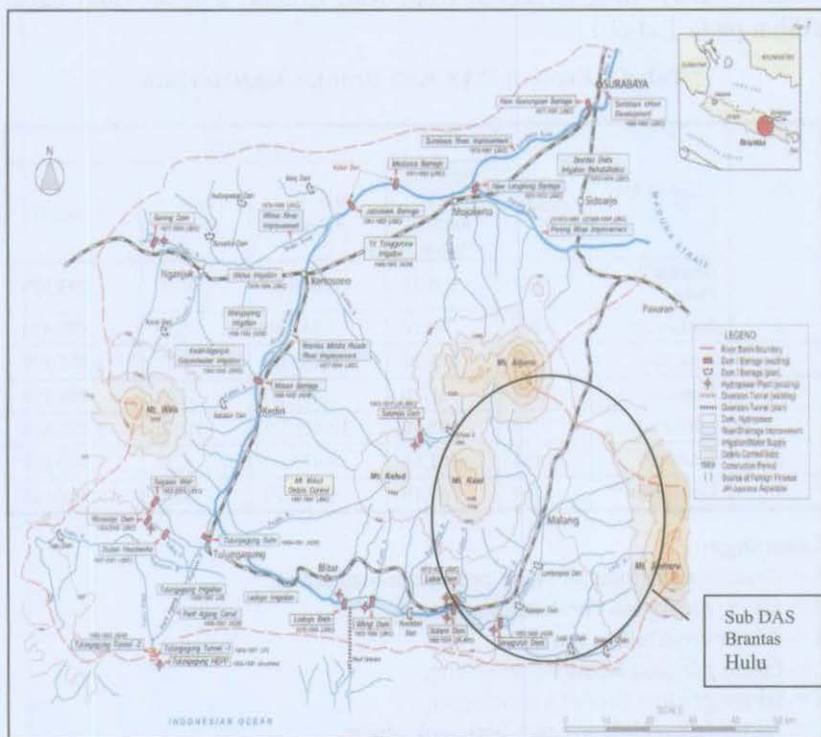
Sub DAS Konto terletak di dataran tinggi sepanjang Gunung Kelud, Gunung Wilis, Gunung Kawi dan Gunung Gentong-Gowok. Daerah ini memiliki kemiringan lereng antara  $8^{\circ}$ – $43^{\circ}$  dengan elevasi

antara 500–1.200 m. Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 1.500–4.000 mm.

Sub DAS Widas terletak di daerah dataran tinggi di sepanjang Gunung Wilis. Daerah ini memiliki kemiringan lereng antara  $8^{\circ}$ - $39^{\circ}$  dengan elevasi antara 40–700 m. Curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 1.500–3.500 mm.

Sub DAS Kali Brantas Hilir terletak di dataran tinggi sepanjang Gunung Argowayang, Gunung Welirang, Gunung Anjasmoro, Gunung Bendo dan dataran rendah di wilayah delta dengan kemiringan lereng antara  $5^{\circ}$ – $42^{\circ}$ , elevasi antara 5–500 m. Curah hujan rata-rata tahunan antara 1.500–3.000 mm.

Sub DAS Kali Brantas Hulu merupakan daerah tangkapan hujan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dalam *Watershed Conservation Master Plan* yang disusun pada Pebruari 2005 sebagai bagian dari *Water Resources Existing Facilities Rehabilitation and Capacity Improvement Project* (JBIC Loan No. IP-510) ada 4 (empat) sub DAS yang menjadi target program konservasi yaitu Kali Brantas hulu, Kali Brangkal, Kali Lekso dan Kali Konto. Keempat sub DAS tersebut merupakan daerah yang mempunyai potensi tinggi terjadinya erosi.



Gambar 1 Lokasi DAS Kali Brantas Hulu

#### 4. Erosi dan Sedimentasi

Berdasarkan studi BRLKT Brantas tahun 2003 diketahui bahwa erosi tertinggi pada sub DAS Amprong, Bango dan Brantas Bagian Hulu sebesar 2.268 ton/ha/tahun terjadi di DAS Amprong. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 1980 an, pada sub DAS Amprong, Bango dan Brantas Bagian Hulu terjadi peningkatan erosi hampir 300%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah mengalami degradasi yang sangat signifikan. Secara lengkap

besarnya erosi yang terjadi di DAS Kali Brantas Bagian Hulu dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1 Erosi di DAS Kali Brantas Bagian Hulu**

No.	Sub DAS	Luas (km <sup>2</sup> )	Laju Erosi			
			A=RKL SCP ton/ha/ tahun	m <sup>3</sup> /km <sup>2</sup> / tahun	mm/ tahun	m <sup>3</sup> / tahun
1	Brantas Hulu	182	108,20	6.009,20	6,00	1.093.679
2	Bango-Sari	262	60,10	3.337,60	3,30	874.454
3	Amprong	348	172,50	9.585,60	9,60	3.335.779
4	Manten	217	61,70	3.430,20	3,40	744.359
5	Lesti Hulu	258	195,80	10.879,20	10,90	2.806.825
6	Genteng	131	152,50	8.472,00	8,50	1.109.827
7	Lesti Hilir	219	69,70	3.874,70	3,90	848.553

Keterangan:

A = besarnya kehilangan tanah persatuan luas lahan,

R = faktor erosivitas curah hujan dan air,

K = faktor erodibilitas tanah,

L = faktor panjang kemiringan lereng,

S = faktor gradien (beda) kemiringan,

C = faktor (pengelolaan) cara bercocok tanam,

P = faktor praktek konservasi tanah (cara mekanik).

Sumber: Water Resources Existing Facilities Rehabilitation & Capacity Improvement Project, Pebruari 2005

Pada DAS Kali Brantas Tengah, terjadi keruntuhan lereng, terutama di daerah dengan kemiringan lereng yang curam yaitu daerah Kali Badak-Sukorejo serta sedimentasi akibat letusan gunung berapi (Gunung Kelud). Berdasarkan hasil perhitungan pada studi WREFR & CIP Pebruari 2005 dengan menggunakan metode USLE diketahui bahwa besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan per tahun sebesar 88,83 ton/ha/tahun atau sekitar 2.099.116 m<sup>3</sup>/tahun.

Di wilayah sungai Kali Brantas terdapat 2 gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Semeru dan Gunung Kelud. Akibat letusan kedua gunung tersebut, dasar sungai Kali Brantas naik. Sebagai gambaran, akibat letusan Gunung Kelud pada tahun 1951 dan 1966 deposit sungai sepanjang 175 km antara Kaulon dan Jabon bertambah sebanyak 33 juta m<sup>3</sup> dalam periode 1951 – 1970. Namun dengan adanya pengambilan pasir di sungai tanpa ijin oleh masyarakat, secara perlahan terjadi degradasi dasar sungai.

Agar letusan Gunung Kelud tersebut tidak berpengaruh terhadap kapasitas aliran sungai, dilakukan pelebaran dasar sungai melalui pengerukan. Letusan Gunung Kelud diperkirakan terjadi dalam kurun waktu berkisar 15 – 20 tahun. Pada tahun 1966 Gunung Kelud mengeluarkan 90 juta m<sup>3</sup> abu vulkanik. Direncanakan *carrying capacity suspended load* dan *bed load* sebesar 1,65 juta m<sup>3</sup>/tahun dan *wash load* sebesar 4,6 juta m<sup>3</sup>/tahun dan kemiringan dasar sungai diperkirakan antara 1/1500–1/2050. Agar terjadi keseimbangan dalam transpor sedimen, maka peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperluas penampang sungai melalui pengerukan sebesar 15,8 juta m<sup>3</sup> yang dilakukan dalam dua tahap.

Pada daerah sub DAS Ngrowo-Ngasinan terdapat banyak keruntuhan lereng, khususnya di daerah pertanian berkembang. Daerah sub DAS Ngrowo-Ngasinan merupakan daerah dengan tingkat erosi permukaan yang relatif tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan pada studi WREFR & CIP Pebruari 2005 dengan menggunakan metode USLE diketahui bahwa besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan per tahun di sub DAS Ngrowo-Ngasinan adalah sebesar 35,50 ton/ha/tahun atau sekitar 2.786.545 m<sup>3</sup>/tahun.

Pada daerah sub DAS Konto terdapat banyak keruntuhan lereng, khususnya di daerah dengan kemiringan lereng yang curam seperti pada lereng Gunung Kelud. Erosi permukaan yang terjadi sebagian besar dalam kategori tinggi dan terjadi sedimen yang tidak stabil pada dasar sungai. Sehingga daerah sub DAS Konto merupakan daerah yang rawan terjadi erosi dan sedimentasi. Berdasarkan hasil

perhitungan pada studi WREFR & CIP Pebruari 2005 dengan menggunakan metode USLE diketahui bahwa besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan per tahun di sub DAS Konto adalah sebesar 56,60 ton/ha/tahun atau sekitar 1.556.812 m<sup>3</sup>/tahun.

Daerah sub DAS Widas, kondisi lereng relatif stabil dengan tingkat bahaya erosi dan sedimentasi yang rendah. Berdasarkan hasil perhitungan pada studi WREFR & CIP Pebruari 2005 dengan menggunakan metode USLE diketahui bahwa besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan per tahun di sub DAS Widas adalah sebesar 39,05 ton/ha/tahun atau sekitar 2.803.602 m<sup>3</sup>/tahun.

Daerah sub DAS Kali Brantas Hilir merupakan daerah yang jarang terjadi kerusakan lereng, kondisi sedimen sebagian besar dalam kondisi stabil dan erosi permukaan yang terjadi dalam kategori rendah. Daerah sub DAS Kali Brantas Hilir tidak termasuk dalam daerah rawan erosi dan sedimentasi. Berdasarkan hasil perhitungan pada studi WREFR & CIP Pebruari 2005 dengan menggunakan metode USLE diketahui bahwa besarnya kehilangan tanah per satuan luas lahan per tahun di sub DAS Kali Brantas Hilir adalah sebesar 50,73 ton/ha/tahun atau sekitar 907.001 m<sup>3</sup>/tahun.

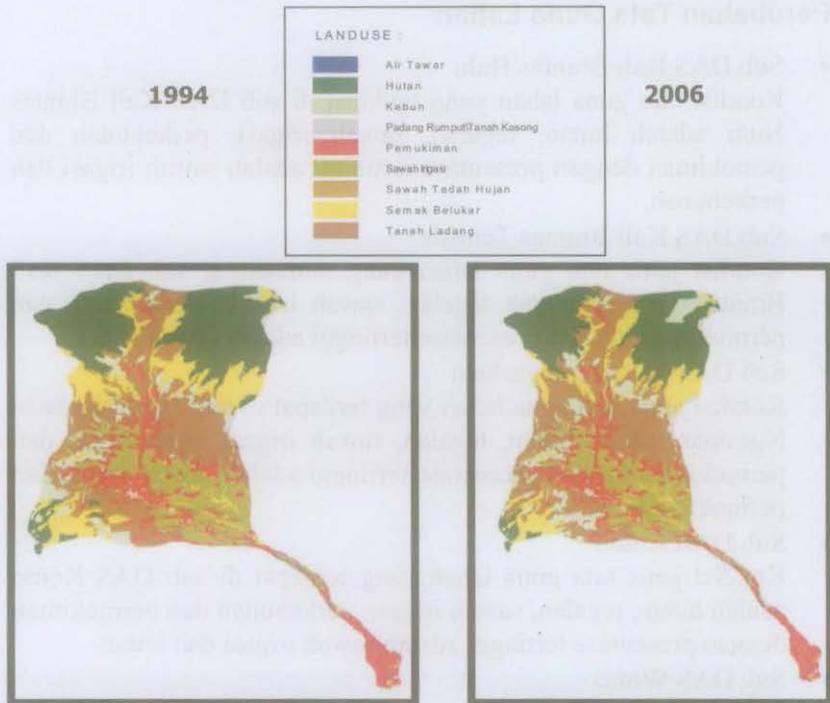
**Tabel 2. Kapasitas Tampungan Waduk-waduk di DAS Kali Brantas**

No.	Waduk	Tampungan Awal			Kapasitas			Laju Sedimen (jt m <sup>3</sup> /th)
		Tahun	Efektif	Total	Tahun	Efektif	Total	
1	Sengguruh	1988	19,0	21,5	2005	0,9	1,5	1,18
2	Sutami	1972	253,0	343,0	2006	146,7	174,7	4,95
3	Lahor	1977	29,4	36,1	2006	25,2	30,6	0,20
4	Wlingi	1977	5,2	24,0	2006	2,1	4,4	0,68
5	Lodoyo	1980	4,2	5,8	2006	2,7	2,7	0,12
6	Selorejo	1970	50,1	62,3	2006	40,8	42,9	0,54
7	Bening	1981	28,4	32,9	2004	26,2	28,7	0,18
8	Wonorejo	2000	99,4	111,0	2005	99,6	110,3	0,14

## Perubahan Tata Guna Lahan

- Sub DAS Kali Brantas Hulu  
Kondisi tata guna lahan yang terdapat di sub DAS Kali Brantas Hulu adalah hutan, tegalan, sawah irigasi, perkebunan dan pemukiman dengan presentase tertinggi adalah sawah irigasi dan perkebunan.
- Sub DAS Kali Brantas Tengah  
Kondisi jenis tata guna lahan yang terdapat di sub DAS Kali Brantas Tengah adalah tegalan, sawah irigasi, perkebunan dan permukiman dengan presentase tertinggi adalah sawah irigasi.
- Sub DAS Ngrowo-Ngasinan  
Kondisi jenis tata guna lahan yang terdapat di sub DAS Ngrowo-Ngasinan adalah hutan, tegalan, sawah irigasi, perkebunan dan permukiman dengan presentase tertinggi adalah sawah irigasi dan permukiman.
- Sub DAS Konto  
Kondisi jenis tata guna lahan yang terdapat di sub DAS Konto adalah hutan, tegalan, sawah irigasi, perkebunan dan permukiman dengan presentase tertinggi adalah sawah irigasi dan hutan.
- Sub DAS Widas  
Kondisi jenis tata guna lahan yang terdapat di sub DAS Widas adalah tegalan, sawah irigasi, perkebunan dan permukiman dengan presentase tertinggi adalah sawah irigasi.
- Sub DAS Kali Brantas Hilir  
Kondisi jenis tata guna lahan yang terdapat di sub DAS Kali Brantas hilir adalah hutan, tegalan, sawah irigasi, perkebunan dan permukiman dengan presentase tertinggi adalah sawah irigasi, permukiman dan perkebunan.

Perubahan kondisi tata guna lahan di DAS Brantas bagian hulu dapat dilihat pada **Gambar 2**.

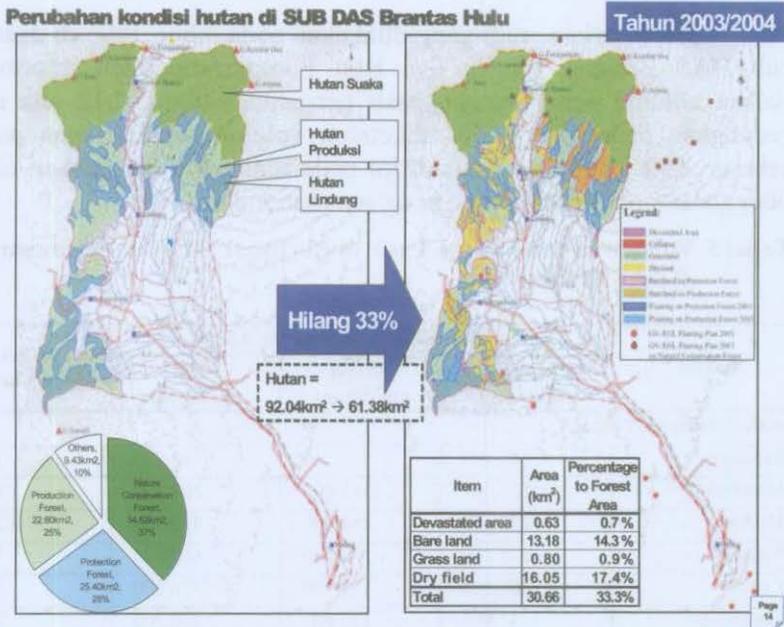


Gambar 2 Kondisi Perubahan Tata Guna Lahan di DAS Brantas Bagian Hulu

Kondisi hutan yang ada di DAS Kali Brantas bagian hulu sudah sangat memprihatinkan karena banyaknya kegiatan *illegal logging* yang dilakukan di wilayah ini. Di sub DAS Brantas hulu, sejak tahun 1980-an, luas area hutan telah berkurang sebesar 33% (semula sebesar 92,04 km<sup>2</sup> menjadi 61,38 km<sup>2</sup>) seperti terlihat pada **Gambar 3**.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan lahan pada sub DAS Kali Brantas Hulu, menyebabkan banyak lahan yang kemampuannya tidak sesuai untuk tujuan pertanian diubah menjadi daerah pertanian tanpa melakukan konservasi tanah dan air dengan

baik. Kondisi ini menambah jumlah lahan kritis yang ada secara signifikan.



Gambar 3 Perubahan Kondisi Hutan di Sub DAS Brantas hulu

## 5. Kerusakan Alur Sungai Degradasi Dasar Sungai

Degradasi dasar sungai di wilayah sungai Kali Brantas khususnya di bagian tengah sampai hilir sungai Kali Brantas termasuk sungai Kali Porong perlu segera diatasi mengingat bahaya yang mengancam keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana SDA telah tampak pada saat ini. Di beberapa lokasi pada ruas sungai yang mengalami degradasi dasar sungai telah terjadi longoran, destabilisasi dan kerusakan bangunan seperti bendung karet, pilar

jembatan, bendung, siphon, intake pengambilan dan lain-lain dimana rehabilitasi kerusakan-kerusakan tersebut akan memerlukan biaya yang sangat besar.

Berdasarkan studi yang dilakukan pada tahun 1996 di daerah sub DAS Brantas Tengah dan Kali Porong, diperoleh informasi bahwa volume penambangan pasir per-tahun sebesar 2,12 juta m<sup>3</sup>, sedangkan pada tahun 2004 diketahui volume penambangan pasir sebesar 2,92 juta m<sup>3</sup>. Kenaikan ini pada umumnya disebabkan oleh penggunaan peralatan pompa yang semakin meluas.

**Tabel 5 Volume Penambangan Pasir di Berbagai Wilayah Administrasi di DAS Brantas**

Lokasi	Volume Penambangan Pasir (m <sup>3</sup> /tahun)			Jumlah Pekerja (orang/hari)
	Manual (m <sup>3</sup> /tahun)	Pompa (m <sup>3</sup> /tahun)	Total (m <sup>3</sup> /tahun)	
<b>Kali Brantas (179 lokasi)</b>				
Sidoarjo	42.500	0	42.500	150
Mojokerto	151.500	111.000	262.500	1.060
Jombang	822.600	168.200	990.800	3.220
Nganjuk	267.100	383.000	650.100	720
Kediri	200.800	135.700	336.500	510
Kota Kediri	47.900	182.800	230.700	220
Tulungagung	0	183.900	188.900	400
<b>Total</b>	<b>1.532.400</b>	<b>1.169.600</b>	<b>2.702.000</b>	<b>6.280</b>
<b>Kali Porong (35 lokasi)</b>				
Sidoarjo	22.200	79.100	101.300	270
Mojokerto	2.100	113.000	115.100	260
Pasuruan	1.200	0	1.200	10
<b>Total</b>	<b>25.500</b>	<b>192.100</b>	<b>217.600</b>	<b>540</b>

## 6. Pencemaran Air dan Degradasi Kualitas Air

Bertambahnya penduduk dan pembangunan ekonomi yang semakin pesat, memberi dampak pada penurunan kondisi kualitas air karena beban pencemar yang masuk ke sungai meningkat tiap tahun.

Permasalahan dalam pengendalian pencemaran air, antara lain:

- a. Secara umum beban pencemar yang masuk ke sungai lebih besar dari daya dukung sungai.

Hal ini disebabkan karena pengendalian limbah domestik belum dilaksanakan secara optimal, terutama pengendalian sumber pencemar limbah rumah tangga. Berdasarkan penelitian, beban pencemaran limbah domestik mencapai 62 % dari total beban yang masuk sungai. Di samping itu, masih banyak industri yang kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)-nya lebih kecil dari limbah yang diproduksi, sehingga buangan limbahnya tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Besarnya beban pencemaran (ton BOD/hari) yang masuk ke sungai Kali Brantas (dari hulu sampai ke hilir), apabila tidak ada usaha-usaha pengendalian pencemaran adalah sebagai berikut:

Komponen <sup>2</sup>	Kondisi Tahun 1997	Prediksi beban pencemaran	
		2010	2020
Beban Domestik (ton BOD/hari)	205	234	257
Beban Industri (ton BOD/hari)	125	208	308

- b. Pengendalian pencemaran air merupakan masalah yang kompleks, memerlukan dana besar, waktu panjang serta komitmen semua pihak yang berkepentingan (Pemerintah Pusat/Daerah, pengelola/PJT I, pemanfaat air dan masyarakat).
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan kontrol sosial yang positif (aktif – konstruktif) antara

---

<sup>2</sup>Pertumbuhan industri rata-rata 4,4 % per tahun dan jumlah penduduk 1,5 % per tahun

lain beban sampah yang berasal dari Kota Malang dan sekitarnya diperkirakan 700 ton/hari.

- d. Pencemaran air di waduk, khususnya peningkatan kadar nitrogen dan fosfat (N & P) menyebabkan eutrofikasi sehingga terjadi *algae blooming*. *Algae blooming* menyebabkan banyak ikan mati, dan algae yang mati akan menimbulkan bau busuk. Hal ini sangat merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar waduk. Peningkatan kadar N & P juga diikuti tumbuhnya enceng gondok yang berlebihan.

## 7. Konservasi Sumber Daya Air

Konservasi Sumber Daya Air di wilayah sungai Kali Brantas ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi SDA di wilayah sungai Kali Brantas.

Konservasi SDA tersebut dilakukan melalui:

- Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air.
- Pengelolaan kualitas air.
- Pengendalian dan pencemaran air yang akan mengacu pada pola pengelolaan SDA yang ditetapkan di WS Kali Brantas.

Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui:

- Pemeliharaan kelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
- Pengendalian pemanfaatan sumber air;
- Pengisian air pada sumber air;
- Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di daerah sekitar sumber air;
- Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- Pengaturan daerah sempadan sumber air;
- Rehabilitasi hutan dan lahan; dan
- Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam.

Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yang dilakukan dengan cara:

- Menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu yang diperlukan;
- Menghemat air dengan cara pemakaian yang efisien dan efektif; dan
- Mengendalikan penggunaan air tanah.

## **8. Kegiatan Konservasi yang Telah Dilakukan**

Kegiatan konservasi yang dilakukan memerlukan kerjasama dari pihak terkait dan masyarakat serta diperlukan pengelolaan/manajemen yang mencakup kegiatan penghijauan, terasering, pengendalian erodi dan sedimentasi serta pengendalian tata guna lahan. Di DAS Kali Brantas, pihak yang terlibat dalam kegiatan konservasi antara lain:

### **1. Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP – DAS)**

Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 665/Kpts-II/2002 tanggal 7 Maret 2002 membentuk BP-DAS yang membawahi berbagai wilayah sungai di Indonesia. BP-DAS Brantas sendiri berasal dari gabungan Badan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BLKT) Surabaya dan BLKT Malang. Badan ini bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di DAS Brantas.

### **2. Perum Perhutani Unit II**

Perhutani Unit II dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15/1972, Peraturan Pemerintah No. 36/1986 dan Peraturan Pemerintah No. 53/1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14/2001, Perhutani sempat berubah menjadi PT. Perhutani (Persero), namun diubah kembali Perum Perhutani Unit II berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/2003 tanggal 17 Pebruari 2003.

Perhutani Unit II mempunyai wilayah kerja sebanyak 25 DAS di Jawa Timur, diantaranya adalah Brantas, Bengawan Solo, Probolinggo dan Madura. Keempat DAS ini merupakan DAS yang memiliki fungsi strategis di Jawa Timur. Berikut ini beberapa fungsi strategis Perum Perhutani II bagi masyarakat Jawa Timur:

- Mendukung peningkatan kualitas lingkungan seperti udara yang bersih, ketersediaan yang cukup akan air tanah dan kelestarian kualitasnya, penanggulangan banjir dan penggundulan hutan serta menjaga tampungan air di danau.
- Memproduksi material kayu untuk bangunan, kayu bakar, obat-obatan alami dan pangan.
- Menjaga kondisi flora dan fauna.
- Mengembangkan pariwisata dan pendidikan mengenai alam.
- Mendukung pengadaan kesempatan kerja.
- Mendukung pengembangan industri berbasis bahan baku kayu.
- Melindungi dan menjaga flora dan fauna yang ada di Jawa Timur seperti bunga, buah, burung-burung langka, kupu-kupu, reptil dan ikan.

### 3. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur

Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 33/2000. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan dinas-dinas kehutanan yang ada di tingkat kabupaten/kota. Fungsi utama dari dinas kehutanan lokal adalah mengatur permasalahan kehutanan di tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan kegiatan ini, dinas menyiapkan anggaran, biaya pemeliharaan dan pelaksanaan sebagai pendukung Dinas Kehutanan tingkat propinsi.. Untuk mengeluarkan surat ijin penebangan hutan diperlukan koordinasi antara dinas kehutanan kabupaten/kota, dinas kehutanan propinsi dan Perhutani.

Fungsi utama dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur antara lain:

- Mengeluarkan peraturan dalam perencanaan kehutanan.
- Mengeluarkan peraturan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengaturan wilayah hutan.
- Mengatur panduan dalam peningkatan hasil hutan dan mengatur rehabilitasi hutan.
- Mengeluarkan ijin pemanfaatan kayu hutan di Kabupaten/Kota.
- Menjaga keamanan dan mengontrol keadaan hutan dlsb.

#### 4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Dalam kegiatan konservasi terdapat LSM yang peduli dan mengkhususkan dalam kegiatan penghijauan. Namun kendala bagi LSM tersebut adalah dana dan kebanyakan menggantungkan dana bantuan dari organisasi internasional.

Kabupaten/Kota	Nama LSM	Aktivitas Utama
1. Kabupaten Mojokerto	LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)/Muda Mandiri	Kehutanan
2. Kabupaten Jombang	LSM Mandiri LSM Elji Mas	Kehutanan Kehutanan
3. Kabupaten Blitar	Wahana Karya Pemuda LSM Wonotani	Kehutanan Kehutanan
4. Kota Batu	Wahana Kalpika	Kehutanan
5. Kabupaten Malang	Lembaga Paramita LPPT Bina Bangun Yayasan Bumi Mastra LPM Universitas Brawijaya	Kehutanan Kehutanan Kehutanan Kehutanan

#### 5. Perum Jasa Tirta I

Upaya yang telah dilakukan oleh PJT I untuk mengatasi permasalahan konservasi lingkungan DAS, antara lain:

### (1) Penghijauan

- a. Kegiatan penghijauan secara rutin telah dilaksanakan intern PJT I, berdasarkan program setiap tahun. Tahun 2004, 2005 dan 2006 seluas 50 – 180 ha.
- b. Kegiatan penghijauan bekerjasama dengan dinas terkait yang berada di wilayah kerja PJT I antara lain:
  - Dinas Kehutanan Kabupaten Malang,
  - Dinas Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang,
  - Dinas Kehutanan Kota Batu,
  - Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu,
  - Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk,
  - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik,
  - Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mojokerto,
  - Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung, dsb.
- c. Kegiatan penghijauan dengan melibatkan masyarakat untuk menanam dan memelihara pohon, sedangkan penyediaan bibit dan pembinaan dilakukan melalui kerjasama antara PJT I dengan Lembaga Swadaya Masyarakat antara lain:
  - Tahun 2004-2006, penghijauan di Desa Tlekung dan Bendosari, Kec. Junrejo, Kota Batu, bekerjasama dengan Yayasan Pengembangan Pedesaan (YPP) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
  - Tahun 2005-2006, penghijauan di Kota Malang, PJT I bekerjasama dengan Tunas Hijau Club.

### (2) Pembuatan Dam Penahan

Untuk memelihara dan melestarikan lingkungan sungai dan waduk, dibangun dam penahan sedimen sederhana di bagian hulu, berfungsi untuk menahan laju erosi lahan dan laju sedimen yang masuk ke waduk. Dengan adanya dam penahan tersebut, dapat

mengurangi potensi terjadinya erosi atau longsoran pada lahan milik masyarakat.

- a. Pada tahun 2005, telah dibangun 29 unit dam penahan dan 3 unit *gully plug*. Pembangunan dam penahan dan *gully plug* bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kota Batu, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mojokerto, Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung.
- b. Pada tahun 2006, telah dibangun 27 unit dam penahan dan 15 unit *gully plug*. Pembangunan dam penahan dan *gully plug* bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kota Batu, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mojokerto, Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tulungagung.

### (3) Sosialisasi/Penyuluhan

Dilakukan secara rutin baik kepada masyarakat di daerah bantaran sungai, sekitar waduk maupun masyarakat umum. Sosialisasi/penyuluhan biasanya dilakukan PJT 1 bekerjasama dengan LSM, dinas-dinas terkait maupun akademisi, mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dengan:

- a. Tidak menebang pohon di hutan lindung di daerah hulu sungai yang dapat mempercepat laju erosi dan sedimentasi di bagian hilir,
- b. Melakukan penghijauan di lingkungan sekitar,
- c. Mengelola lahan sesuai kaidah konservasi,
- d. Tidak melakukan pengambilan pasir di sungai tanpa ijin,
- e. Tidak membuang sampah ke sungai dan lain sebagainya

### (4) Berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL).

GN-RHL sebagai gerakan nasional yang terencana dan terpadu, dilaksanakan berdasar Keputusan Bersama Menko Bidang Kesra Nomor: 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2003, Menko Bidang

Perkonomian Nomor: KEP.16/M.EKONOMI/03/2003 dan Menko Bidang Polkam Nomor: KEP.08/MENKO/POLKAM/III/2003 tanggal 31 Maret 2003 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional. Gerakan ini didasari pada kondisi kerusakan hutan dan lahan di Indonesia yang saat ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak, baik secara nasional maupun internasional. Data terakhir mengindikasikan bahwa kawasan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan lebih dari 43 juta ha dengan laju deforestasi sebesar 1,6 juta ha sampai 2 juta ha/tahun. Hal ini memacu pemerintah, swasta maupun masyarakat melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

## 9. Kendala yang Dihadapi

Walaupun telah banyak upaya yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*, namun masih ada kendala dalam pelaksanaan konservasi dan pelestarian sumberdaya alam yang melibatkan masyarakat. Kendala tersebut antara lain adalah:

- (1) Pola pikir yang dulunya sektoral, belum sama sekali hilang, sehingga perlu persamaan persepsi dalam menangani suatu masalah. Masih ada gejala penanganan pengelolaan yang terfragmentasi berdasarkan batas wilayah administratif kabupaten / kota.
- (2) Karena kondisi ekonomi, masyarakat belum mampu ikut berkontribusi dalam pengelolaan DAS, khususnya konservasi lingkungan, antara lain:
  - Membuang sampah/limbah ke dalam sungai
  - Pengambilan pasir tanpa ijin di sepanjang Kali Brantas
- (3) Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya perambahan dan penggundulan hutan serta alih tata guna lahan yang kurang tepat, khususnya di daerah hulu DAS sehingga dalam jangka panjang akan menyebabkan degradasi lingkungan yang lebih parah.

- (4) Masyarakat kurang menyadari, bahwa berbagai penyebab terjadinya bencana adalah masyarakat sendiri (penebangan hutan, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan pola/tata guna lahan, dan lain sebagainya).

Dari kendala-kendala tersebut di atas, perlu diusulkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pengendalian sedimen yang seimbang

Sedimen yang sebagian besar masuk ke waduk berasal dari bagian hulu sungai karena lahan-lahan kritis yang gundul, sehingga di bagian hulu waduk diperlukan bangunan yang berfungsi sebagai penahan sedimen agar tidak langsung masuk ke waduk. Tetapi di lain pihak perlu suplai sedimen ke bagian hilir agar morfologi sungai tidak terganggu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah penggelontoran waduk terutama waduk harian.

- (2) Penghijauan

Sebagai kawasan lindung, hutan yang berfungsi sebagai penyimpanan air harus dijaga kelestariannya agar ketersediaan air dalam tanah tidak terganggu dan menahan terjadinya longsoran pada daerah yang curam.

- (3) Pengendalian pencemaran

Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah domestik, pertanian, peternakan maupun industri. Untuk ini perlu dilakukan tindakan pencegahan dengan membuat suatu sistem pengelolaan limbah agar dapat mengurangi tingkat pencemaran yang terjadi.

## **10. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

- (1) Pengelolaan tata guna air dan tata guna lahan perlu diselenggarakan secara terpadu untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Oleh karena itu, harus diperhatikan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan kritis, pemeliharaan wilayah resapan air dan sumber air lainnya.

- (2) Kondisi DAS Kali Brantas khususnya di bagian hulu cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan lahan pada sub DAS Kali Brantas Hulu, menyebabkan banyak hutan yang dialihkankansfungsi menjadi daerah pertanian tanpa perlakuan konservasi tanah dan air yang baik dan benar.
- (3) Permasalahan utama di dalam konservasi lingkungan di DAS Kali Brantas adalah erosi dan sedimentasi. Karena kerusakan hutan yang terjadi di daerah hulu menyebabkan erosi lahan, maka sedimen yang terbawa aliran sungai masuk dan mengendap di waduk sehingga terjadi peningkatan sedimen di waduk.
- (4) Upaya yang telah dilakukan oleh PJT I untuk mengatasi permasalahan konservasi lingkungan DAS, antara lain penghijauan, pembuatan dam penahan, sosialisasi/penyuluhan dan berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL).
- (5) Kendala yang dihadapi dalam kegiatan konservasi lingkungan di DAS Kali Brantas, antara lain pola pikir yang masih sektoral, kurangnya kontribusi masyarakat dalam kegiatan konservasi, serta pengalihan tata guna lahan yang kurang tepat.
- (6) Hal-hal yang dapat diusulkan dalam kegiatan konservasi antara lain pengendalian sedimen yang seimbang, penghijauan dan pengendalian pencemaran.

### C. Saran

- (1) Untuk menghadapi permasalahan DAS Brantas saat ini serta mengantisipasi permasalahan yang akan datang, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap *Watershed Master Plan* yang mencakup pengelolaan DAS Kali Brantas secara keseluruhan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian pengelolaan DAS dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

- (2) Perlunya perhitungan *sediment balance* yang terjadi di waduk dan sungai-sungai sehingga dapat diantisipasi dampak yang akan timbul akibat ketidakseimbangan sedimen.
- (3) Penanggulangan masalah erosi dan sedimentasi untuk jangka pendek antara lain pengerukan dan penggelontoran di waduk serta pembuatan dam penahan sedimen di hulu waduk. Penanganan jangka panjang adalah melakukan konservasi hutan dan sosialisasi pengelolaan lahan pertanian yang benar secara berkelanjutan.
- (4) Penanganan non struktural yang dapat dilakukan antara lain sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan dan perlunya menanamkan kesadaran masyarakat bahwa lingkungan adalah milik bersama. Selain itu perlu tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku penebangan hutan maupun pembuangan limbah



ISBN : 978-979-18033-0-4